'A9AMA' SAYA ADALAH JURNALISME

"This book can help journalists and citizens alike understand the importance of independent journalism to democracy."

Bill Kovach
Committee of Concerned Journalists, Washington D.C.

ANDREAS HARSONO

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

‘A9AMA’ SAYA ADALAH JURNALISME

ANDREAS HARSONO

http://pustaka-indo.blogspot.com

PENERBIT PT KANISIUS

AGAMA SAYA ADALAH JURNALISME

Oleh: Andreas Harsono

1016004223

©2010 Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS
Anggota SEKSAMA (Sekretariat Bersama) Penerbit Katolik Indonesia
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA
Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349
E-mail: office@kanisiusmedia.com
Website: www.kanisiusmedia.com

Editor: Fahri Salam, A. Ranggabumi N.
Desain sampul dan tata letak: Vera Rosana

Edisi elektronik diproduksi oleh Divisi Digital Kanisius tahun 2016.

ISBN 978-979-21-3196-3 (pdf)

ISBN 978-979-21-2699-0 (cetak)

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Daftar Isi

7 **PENGANTAR**

LAKU WARTAWAN

15 Sembilan Elemen Jurnalisme
32 Pendidikan Jurnalisme di Pulau Jawa
37 Model Pelatihan Wartawan Mahasiswa
41 Byline dan Tagline
45 Pagar Api Desain Suratkabar
49 Quo Vadis Jurnalisme Islami?
53 Jurnalisme Warga (Gereja)
63 Pers, Sejarah dan Rasialisme
67 Beasiswa untuk Wartawan

PENULISAN

79 Menulis Perlu Tahu dan Berani
82 Belajar Menulis Bahasa Inggris
87 Bagaimana Mempersiapkan Suatu Naskah?
93 Bagaimana Cara Rekrut Wartawan?
97 Apakah Wartawan Perlu Dipidanakan?
103 Referensi Kedua

DINAMIKA RUANG REDAKSI

113 Kecepatan, Ketepatan, Perdebatan
143 Di Balik Ketegangan Indonesia-Singapura
161 Tempo Versus Tomy Winata
169 Wartawan atau Politikus?
173 Kupas Tuntas Media Palmerah
177 "Asing" di Tanah Acheh
181 Jungkir Balik di El Tari
187 Sengkarut Harian Equator

http://pustaka-indo.blogspot.com

193 Lampung, Lampung, Lampung
197 Surat untuk Gatra

PELIPUTAN

204 Independensi Bill Kovach
210 Pakar, Pengamat, Pemerhati
216 Jurnalisme dan Nasionalisme
219 Wawancara, Wartawan dan Ratu Kecantikan
226 Seksisme, Rasialisme dan Sektarianisme
230 Apa Itu Investigative Reporting?
250 Kapan Wartawan Mencuri?
253 Bagaimana Meliput Pontianak?
257 Sebuah Renungan Merauke

263 *Sumber Naskah*
265 *Ucapan Terimakasih*

http://pustaka-indo.blogspot.com

Andreas Harsono pernah bekerja sebagai wartawan *The Jakarta Post*, *The Nation* (Bangkok), *The Star* (Kuala Lumpur) dan *Pantau* (Jakarta). Dia menerima Nieman Fellowship on Journalism dari Universitas Harvard. Dia menyunting buku *Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat* serta buku terjemahan *Sembilan Elemen Jurnalisme* karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel.

http://pustaka-indo.blogspot.com

PENGANTAR

BEBERAPA TAHUN LALU, Hamid Basyaib, mantan redaktur harian *Republika*, minta saya bikin antologi jurnalisme. Perkaranya, sejak pulang dari Universitas Harvard, saya sering menjawab email dari wartawan atau mahasiswa. Mereka tanya macam-macam. Dari soal "amplop"—suap untuk wartawan—hingga liputan. Saya menembuskan jawaban-jawaban ini kepada *mailing list* majalah Pantau. Basyaib sering membaca. Dia usul saya mengumpulkan tanya-jawab ini.

Saya ragu. Saya kira paling ideal bikin buku utuh. Bukan apa yang disebut Ulil Abshar-Abdalla dari Jaringan Islam Liberal: membuat *non-book book* atawa buku-bukuan.

Suatu hari, istri saya, Sapariah, mengajak saya ke toko buku dan memperlihatkan berbagai buku-bukuan. Sapariah juga wartawan. Dia berpendapat kumpulan naskah punya keunikan. Tanya-jawab itu mencerminkan masalah-masalah yang muncul dari kalangan wartawan di dalam negara Indonesia. Ia adalah persoalan-persoalan yang hidup di masyarakat media kita. Bikin buku (*beneran*) memerlukan waktu dan biaya besar. Kami tak punya biaya.

Saya masih ragu. Di Indonesia, tak terhitung banyak orang bikin buku-bukuan. Maria Hartiningsih, kenalan saya dari harian

http://pustaka-indo.blogspot.com

Kompas, mengatakan mayoritas buku terbitan Jakarta, termasuk dari perusahaannya sendiri, ya … buku-bukuan. Saya pikir mengapa saya tak bikin buku utuh? Apalagi semua naskah ini juga ada dalam blog *http://andreasharsono.blogspot.com*.

Jalan keluarnya? Khas seorang blogger, saya lempar saja ke internet. Saya minta pendapat orang. Ada lebih dari selusin blogger kirim komentar. Tak ada seorang pun menganggapnya salah.

Keraguan akhirnya leleh. Saya pikir toh di dunia ini banyak sekali orang bikin kumpulan karangan. Saya juga berjanji akan tetap menulis buku utuh. Antologi ini saya kumpulkan sembari menyelesaikan buku *A Nation in Name: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism.* Sudah tujuh tahun saya pakai untuk melakukan riset dan menulis buku tersebut. Tiga tahun saya pakai buat melakukan perjalanan dari Sabang di Pulau Weh ke Merauke di Papua—di antara mereka, saya mengunjungi lebih dari 90 kota, desa, pulau kecil dan pantai.

Contoh lain adalah Noam Chomsky, seorang guru, munsyi dan aktivis dari Massachusetts Institute of Technology di Cambridge. Chomsky bikin antologi maupun buku *(beneran)*. Menurut *Arts and Humanities Citation Index*, Chomsky adalah penulis yang paling sering dikutip di seluruh dunia akademik untuk periode 1980–1992.

Masalah selanjutnya adalah memilih. Saya coba kumpulkan naskah-naskah saya. Ada lusinan makalah seminar. Ada esai majalah. Ada juga naskah-naskah dalam bahasa Inggris, yang sayangnya, jarang dibaca khalayak bahasa Melayu. Ada surat yang pakai kata "saya" tapi juga "aku" atau "gua" atau "kitorang." Lumayan bingung. Ada yang hanya email sepanjang 500 kata. Tapi ada juga yang panjang lebih dari 7.000 kata.

Tingkat popularitas masing-masing naskah berbeda. Menurut Google Analytics, ada dua naskah saya yang paling sering dibaca dan dikutip orang: "Sembilan Elemen Jurnalisme" dan "Bagaimana Menulis Bahasa Inggris?"

Ada satu esai yang ditulis dengan rekan saya Esti Wahyuni dari Yayasan Pantau. Ada satu analisis, "Kecepatan, Ketepatan,

http://pustaka-indo.blogspot.com

Perdebatan," yang saya tulis berdasarkan liputan beberapa wartawan majalah bulanan *Pantau*.

Dateline naskah-naskah itu dibuat di tempat berbeda. Kebanyakan saya tulis di Jakarta. Namun ada juga yang muncul dari Banda Aceh, Cambridge, Ende, Jogjakarta, London, Merauke, Pontianak, Semarang, Singapura dan sebagainya. Saya juga seenaknya pakai kata campur-campur. Ada banyak kalimat dan kata-kata dari bahasa Inggris. Juga ada kata-kata Hokkian, Jawa, Jerman, Khmer, Madura, Manado dan sebagainya. Ejaan pun ada yang pakai gaya Van Ophuysen. *Menurut owe, Bahasa Melayu versi Indonesia sak idoepnja memang campoer-campoer.* Pengarang Remy Sylado kasih ingat saya bahwa sembilan dari 10 kata-kata dalam bahasa Melayu versi Indonesia adalah *asing*. Saya mengumpulkan lebih dari 200 naskah.

Hitung kiri dan kanan, saya putuskan naskah bahasa Inggris tak perlu dibukukan. Khalayak naskah-naskah itu beda dengan khalayak bahasa Melayu. Pengulangan juga harus dihindari. Saya membatasi jumlah halaman agar buku ini, sesuai anjuran beberapa blogger, harganya tidak mahal.

Saya usahakan semua naskah tampil dengan format orisinal. Ada berupa surat. Ada berupa esai. Ada pula *feature*. Saya juga menulis naskah baru buat mengisi beberapa lubang dalam kumpulan karangan ini. Saya susun dalam empat tema: (1) laku wartawan (*code of conduct*); (2) penulisan (*writing*); (3) dinamika ruang redaksi (*newsroom diversity*) serta (4) liputan (*reporting*). Pembagian ini lazim dalam pendidikan jurnalisme.

Tentu saja, Anda bisa membaca naskah ini secara bebas. Bisa seenaknya sendiri. Bisa tiduran, bisa dalam bus kota, bisa pula di perpustakaan.

JUDUL BUKU-BUKUAN INI, *Agama Saya Adalah Jurnalisme*, sesungguhnya pemberian Novriantoni Kahar dari Komunitas Islam Utan Kayu. Ceritanya, suatu sore Novri mengundang saya tampil untuk selama

http://pustaka-indo.blogspot.com

satu jam di radio Utan Kayu, Jakarta. Dia tanya misalnya, "Apakah agama adalah faktor yang mempersatukan Indonesia?"

Saya cerita soal perang Acheh di mana sesama Muslim, bangsa Acheh dan bangsa Jawa, berperang lebih dari 600 tahun. Bagaimana menerangkan orang-orang Madura, yang dibunuh dan diusir orang Melayu di Sambas? Kesultanan Ternate dan Tidore juga sama-sama Islam. Tapi mereka bersaing dan berperang selama 800 tahun, melibatkan Portugis dan Spanyol. Pada 1999–2000, ketika terjadi sengketa sektarian, Islam versus Kristen, di Ternate, Tidore dan Halmahera, juga punya *background* dendam Ternate-Tidore. Saya kira kesamaan tak identik dengan kesatuan.

Novri mengembangkan *interview* soal pandangan saya pribadi. Saya menjawab, "Kalau masih ditanya juga soal apa agama saya, saya akan jawab: *agama saya adalah jurnalisme*. Saya percaya bahwa jurnalisme sangat berguna untuk kebaikan masyarakat."

Ucapan itu sebenarnya datang dari Bill Kovach. Dia guru saya ketika belajar di Harvard. Kovach seorang guru wartawan beretnik Albania. Nama marganya "Kovachi." Bapaknya Muslim, ibunya Kristen Ortodoks. Dia lahir di Amerika Serikat dan menikah dengan seorang Kristen. Kovach berpendapat, "Makin bermutu jurnalisme di dalam masyarakat, maka makin bermutu pula informasi yang didapat masyarakat bersangkutan. Terusannya, makin bermutu pula keputusan yang akan dibuat."

Saya percaya, apabila jurnalisme di suatu masyarakat bermutu, maka kehidupan masyarakat itu juga akan makin bermutu. Kovach sendiri dipengaruhi Walter Lippmann, seorang pemikir jurnalisme yang menulis buku *Public Opinion* pada 1922.

Beberapa hari kemudian, wawancara saya diketik dan diterbitkan jaringan suratkabar Kelompok Jawa Pos. Novriantoni Kahar memberi judul, "Agama Saya Adalah Jurnalisme." Judulnya menyengat.

Dari Jember, Papa saya menelepon dan bilang ada teman lamanya, Cek Pen, menelepon pagi-pagi dan bilang, "Kiong Hie ya." Ini bahasa Hokkian, artinya, "Selamat." Cek Pen dari Surabaya ikut

http://pustaka-indo.blogspot.com

senang anak temannya *mlebu koran*. Papa terdengar bangga sekali anaknya masuk koran.

Buat seorang wartawan, tak ada yang istimewa masuk koran, masuk radio atau masuk televisi. Namanya juga wartawan. Kami biasa saja muncul di media. Tapi saya merasakan kesenangan mereka. Saya bukan anak yang mampu memberi uang atau hadiah kepada orangtua atau adik-adik saya. Menjadi wartawan tak akan membuat orang jadi kaya. Namun kesenangan kecil macam begini, tentu juga, menyenangkan. Ia tak bisa diukur dengan uang.

Saya berterima kasih kepada para guru saya –orang-orang yang memberi perhatian lebih dari sekadar tanggungjawab pekerjaan mereka untuk membimbing saya belajar berpikir, menulis dan bersikap. Saya berutang budi selamanya kepada mereka: Arief Budiman, ART Kemasang, Bill Kovach, George Junus Aditjondro, Goenawan Mohamad, Liem Soei Liong, Rahman Tolleng dan lainnya.

Kini saya ingin membagi kesenangan kecil ini kepada Anda. Buku-bukuan ini mungkin berguna untuk banyak orang, tak hanya wartawan, yang ingin tahu apa makna jurnalisme untuk masyarakat. Selamat membaca!

Andreas Harsono

http://pustaka-indo.blogspot.com

http://pustaka-indo.blogspot.com

LAKU WARTAWAN

http://pustaka-indo.blogspot.com

http://pustaka-indo.blogspot.com

Sembilan Elemen Jurnalisme

HATI NURANI JURNALISME Amerika ada pada Bill Kovach. Ini ungkapan yang sering dipakai orang bila bicara soal Kovach. Thomas E. Patterson dari Universitas Harvard mengatakan, Kovach punya "karier panjang dan terhormat" sebagai wartawan. Goenawan Mohamad, redaktur pendiri majalah *Tempo*, merasa "sulit mencari kesalahan" Kovach.

Wartawan yang nyaris tanpa cacat itulah yang menulis buku *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect* (April 2001) bersama rekannya Tom Rosenstiel. Kovach memulai karier sebagai wartawan pada 1959 di sebuah suratkabar kecil sebelum bergabung dengan *The New York Times*, salah satu suratkabar terbaik di Amerika Serikat, dan membangun karier selama 18 tahun di sana.

Kovach mundur ketika ditawari jadi pemimpin redaksi harian *Atlanta Journal-Constitution*. Di bawah kepemimpinannya, harian ini berubah jadi suratkabar bermutu. Hanya dalam dua tahun, Kovach membuat harian ini mendapatkan dua Pulitzer Prize, penghargaan nomor satu dalam jurnalisme Amerika. Total dalam kariernya, Kovach menugaskan dan menyunting lima laporan yang mendapatkan Pulitzer Prize. Pada 1989-2000 Kovach jadi kurator

http://pustaka-indo.blogspot.com

Nieman Foundation for Journalism di Universitas Harvard yang tujuannya meningkatkan mutu jurnalisme.

Sedangkan Tom Rosentiel adalah mantan wartawan harian *The Los Angeles Times* spesialis media dan jurnalisme. Kini sehari-harinya Rosenstiel menjalankan Committee of Concerned Journalists—sebuah organisasi di Washington D.C. yang melakukan riset dan diskusi tentang media.

Dalam buku ini Bill Kovach dan Tom Rosenstiel merumuskan sembilan elemen jurnalisme. Kesimpulan ini didapat setelah Committee of Concerned Journalists mengadakan banyak diskusi dan wawancara yang melibatkan 1.200 wartawan dalam periode tiga tahun. Sembilan elemen ini sama kedudukannya. Tapi Kovach dan Rosenstiel menempatkan elemen jurnalisme yang pertama adalah kebenaran, yang ironisnya, paling membingungkan.

Kebenaran yang mana? Bukankah kebenaran bisa dipandang dari kacamata berbeda-beda? Tiap-tiap agama, ideologi atau filsafat punya dasar pemikiran tentang kebenaran yang belum tentu persis sama satu dengan yang lain. Sejarah pun sering direvisi. Kebenaran menurut siapa?

Bagaimana dengan bias seorang wartawan? Tidakkah bias pandangan seorang wartawan, karena latar-belakang sosial, pendidikan, kewarganegaraan, kelompok etnik, atau agama, bisa membuat si wartawan menghasilkan penafsiran akan kebenaran yang berbeda-beda?

Kovach dan Rosenstiel menerangkan bahwa masyarakat butuh prosedur dan proses guna mendapatkan apa yang disebut kebenaran fungsional. Polisi melacak dan menangkap tersangka berdasarkan kebenaran fungsional. Hakim menjalankan peradilan juga berdasarkan kebenaran fungsional. Pabrik-pabrik diatur, pajak dikumpulkan, dan hukum dibuat. Guru-guru mengajarkan sejarah, fisika, atau biologi, pada anak-anak sekolah. Semua ini adalah kebenaran fungsional.

Namun apa yang dianggap kebenaran ini senantiasa bisa direvisi. Seorang terdakwa bisa dibebaskan karena tak terbukti

http://pustaka-indo.blogspot.com

salah. Hakim bisa keliru. Pelajaran sejarah, fisika, biologi, bisa salah. Bahkan hukum-hukum ilmu alam pun bisa direvisi.

Hal ini pula yang dilakukan jurnalisme. Bukan kebenaran dalam tataran filosofis. Tapi kebenaran dalam tataran fungsional. Orang butuh informasi lalu-lintas agar bisa mengambil rute yang lancar. Orang butuh informasi harga, kurs mata uang, ramalan cuaca, hasil pertandingan bola dan sebagainya.

Selain itu kebenaran yang diberitakan media dibentuk lapisan demi lapisan. Kovach dan Rosenstiel mengambil contoh tabrakan lalu-lintas. Hari pertama seorang wartawan memberitakan kecelakaan itu. Di mana, jam berapa, jenis kendaraan apa, nomor polisi berapa, korban bagaimana. Hari kedua berita itu mungkin ditanggapi oleh pihak lain. Mungkin polisi, mungkin keluarga korban. Mungkin ada koreksi. Maka pada hari ketiga, koreksi itulah yang diberitakan. Ini juga bertambah ketika ada pembaca mengirim surat pembaca, atau ada tanggapan lewat kolom opini. Demikian seterusnya.

Jadi kebenaran dibentuk hari demi hari, lapisan demi lapisan. Ibaratnya stalagmit, tetes demi tetes kebenaran itu membentuk stalagmit yang besar. Makan waktu, prosesnya lama. Tapi dari kebenaran sehari-hari ini pula terbentuk bangunan kebenaran yang lebih lengkap.

Saya pribadi beruntung mengenal Kovach ketika saya mendapat kesempatan ikut program Nieman Fellowship pada 1999-2000 di mana Kovach jadi kurator. Di sana Kovach melatih wartawan-wartawan dari berbagai belahan dunia untuk lebih memahami pilihan-pilihan mereka dalam jurnalisme. Tekanannya jelas: memilih kebenaran!

Tapi mengetahui mana yang benar dan mana yang salah saja tak cukup. Kovach dan Rosenstiel menerangkan elemen kedua dengan bertanya, "Kepada siapa wartawan harus menempatkan loyalitasnya? Pada perusahaannya? Pada pembacanya? Atau pada masyarakat?"

Pertanyaan itu penting karena sejak 1980-an banyak wartawan Amerika yang berubah jadi orang bisnis. Sebuah survei menemukan

http://pustaka-indo.blogspot.com

separuh wartawan Amerika menghabiskan setidaknya sepertiga waktu mereka buat urusan manajemen ketimbang jurnalisme.

Ini memprihatinkan karena wartawan punya tanggungjawab sosial yang tak jarang bisa melangkahi kepentingan perusahaan di mana mereka bekerja. Walaupun demikian, dan di sini uniknya, tanggungjawab itu sekaligus adalah sumber dari keberhasilan perusahaan mereka. Perusahaan media yang mendahulukan kepentingan masyarakat justru lebih menguntungkan ketimbang yang hanya mementingkan bisnisnya sendiri.

Mari melihat dua contoh. Pada 1893 Adolph Ochs membeli harian *The New York Times*. Ochs percaya bahwa penduduk New York capek dan tak puas dengan suratkabar-suratkabar kuning yang kebanyakan sensasional. Ochs hendak menyajikan suratkabar yang serius, mengutamakan kepentingan publik dan menulis, *"… to give the news impartiality, without fear or favor, regardless of party, sect or interests involved."*

Pada 1933 Eugene Meyer membeli harian *The Washington Post* dan menyatakan di halaman suratkabar itu, "Dalam rangka menyajikan kebenaran, suratkabar ini kalau perlu akan mengorbankan keuntungan materialnya, jika tindakan itu diperlukan demi kepentingan masyarakat."

Prinsip Ochs dan Meyer terbukti benar. Dua harian itu menjadi institusi publik yang prestisius sekaligus bisnis yang menguntungkan.

Kovach dan Rosenstiel khawatir banyaknya wartawan yang mengurusi bisnis bisa mengaburkan misi media dalam melayani kepentingan masyarakat. Bisnis media beda dengan bisnis kebanyakan. Dalam bisnis media ada sebuah segitiga. Sisi pertama adalah pembaca, pemirsa, atau pendengar. Sisi kedua adalah pemasang iklan. Sisi ketiga adalah warga (*citizens*).

Berbeda dengan kebanyakan bisnis, dalam bisnis media, pemirsa, pendengar, atau pembaca bukanlah pelanggan (*customer*). Kebanyakan media, termasuk televisi, radio, maupun dotcom, memberikan berita secara gratis. Orang tak membayar untuk menonton televisi, membaca internet, atau mendengarkan radio. Bahkan dalam

http://pustaka-indo.blogspot.com

bisnis suratkabar pun, kebanyakan pembaca hanya membayar sebagian kecil dari ongkos produksi. Ada subsidi buat pembaca.

Adanya kepercayaan publik inilah yang kemudian "dipinjamkan" perusahaan media kepada para pemasang iklan. Dalam hal ini pemasang iklan memang pelanggan. Tapi hubungan ini seyogyanya tak merusak hubungan yang unik antara media dengan pembaca, pemirsa, dan pendengarnya.

Kovach dan Rosenstiel prihatin karena banyak media Amerika mengkaitkan besarnya bonus atau pendapatan redaktur mereka dengan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan bersangkutan. Sebuah survei menemukan, 71 persen redaktur Amerika menerapkan sebuah gaya manajemen yang biasa disebut *management by objections*.

Model ini ditemukan oleh guru manajemen Peter F. Drucker. Idenya sederhana. Para manajer diminta menentukan target sekaligus imbalan bila mereka berhasil mencapainya.

Manajemen model ini, menurut Kovach dan Rosenstiel, bisa mengaburkan tanggungjawab sosial para redaktur. Mengaitkan pendapatan seorang redaktur dengan penjualan iklan atau keuntungan perusahaan sangat mungkin mengingkari prinsip loyalitas si redaktur terhadap masyarakat. Loyalitas mereka bisa bergeser pada peningkatan keuntungan perusahaan karena dari sana pula mereka mendapatkan bonus.

BANYAK WARTAWAN MENGATAKAN *The Elements of Journalism* perlu dipelajari orang media. Suthichai Yoon, redaktur pendiri harian *The Nation* di Bangkok, menulis bahwa renungan dua wartawan "yang sudah mengalami pencerahan" ini perlu dibaca wartawan Thai.

I Made Suarjana dari tim pendidikan majalah *Gatra* mengatakan pada saya bahwa *Gatra* sedang menerjemahkan buku ini buat keperluan internal mereka. "Buku ini kita pandang mengembalikan pada *basic* jurnalisme," kata Suarjana.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Salah satu bagian penting buku ini adalah penjelasan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel tentang elemen ketiga. Mereka mengatakan esensi dari jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi.

Disiplin mampu membuat wartawan menyaring desas-desus, gosip, ingatan yang keliru, manipulasi, guna mendapatkan informasi yang akurat. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dengan hiburan, propaganda, fiksi atau seni.

Mereka berpendapat, "saudara-sepupu" hiburan yang disebut *infotainment* (dari kata *information* dan *entertainment*) harus dimengerti wartawan agar tahu mana batas-batasnya. *Infotainment* hanya terfokus pada apa-apa yang menarik perhatian pemirsa dan pendengar. Jurnalisme meliput kepentingan masyarakat yang bisa menghibur tapi juga bisa tidak.

Batas antara fiksi dan jurnalisme memang harus jelas. Jurnalisme tak bisa dicampuri dengan fiksi setitik pun. Kovach dan Rosenstiel mengambil contoh pengalaman Mike Wallace dari *CBS* yang difilmkan dalam *The Insider*. Film ini bercerita tentang keengganan jaringan televisi *CBS* menayangkan sebuah laporan tentang bagaimana industri rokok Amerika memakai zat kimia tertentu buat meningkatkan kecanduan perokok.

Kejadian itu sebuah fakta. Namun Wallace keberatan karena ada kata-kata yang diciptakan dan seolah-olah diucapkan Wallace. Sutradara Michael Mann mengatakan film itu "pada dasarnya akurat" karena Wallace memang takluk pada tekanan pabrik rokok. Jika kata-kata diciptakan atau motivasi Wallace berbeda antara keadaan nyata dan dalam film, Mann berpendapat itu bisa diterima.

Kovach dan Rosenstiel mengatakan dalam kasus itu keterpaduan (*utility*) jadi nilai tertinggi ketimbang kebenaran harafiah. Fakta disubordinasikan kepada kepentingan fiksi. Mann membuat film itu dengan tambahan drama agar menarik perhatian penonton.

Lantas bagaimana dengan beragamnya standar jurnalisme? Tidakkah disiplin tiap wartawan dalam melakukan verifikasi bersifat personal? Kovach dan Rosenstiel menerangkan memang tak setiap

http://pustaka-indo.blogspot.com

wartawan punya pemahaman yang sama. Tidak setiap wartawan tahu standar minimal verifikasi. Susahnya, karena tak dikomunikasikan dengan baik, hal ini sering menimbulkan ketidaktahuan pada banyak orang karena disiplin dalam jurnalisme ini sering terkait dengan apa yang biasa disebut sebagai objektifitas.

Orang sering bertanya apa objektifitas dalam jurnalisme itu? Apakah wartawan bisa objektif? Bagaimana dengan wartawan yang punya latar-belakang pendidikan, sosial, ekonomi, kewarganegaraan, etnik, agama dan pengalaman pribadi yang nilai-nilainya berbeda dengan nilai dari peristiwa yang diliputnya?

Kovach dan Rosenstiel menjelaskan, pada abad 19 tak mengenal konsep objektifitas itu. Wartawan zaman itu lebih sering memakai apa yang disebut sebagai realisme. Mereka percaya bila seorang reporter menggali fakta-fakta dan menyajikannya begitu saja maka kebenaran bakal muncul dengan sendirinya.

Ide tentang realisme ini muncul bersamaan dengan terciptanya struktur karangan yang disebut piramida terbalik di mana fakta yang paling penting diletakkan pada awal laporan, demikian seterusnya, hingga yang paling kurang penting. Mereka berpendapat struktur itu membuat pembaca memahami berita secara alamiah.

Namun pada awal abad 20 beberapa wartawan khawatir dengan naifnya realisme ini. Pada 1919 Walter Lippmann dan Charles Merz, dua wartawan terkemuka New York, menulis sebuah analisis tentang bagaimana latar-belakang kultural *The New York Times* menimbulkan distorsi pada liputannya tentang revolusi Rusia. *The New York Times* lebih melaporkan tentang apa yang diharapkan pembaca ketimbang melaporkan apa yang terjadi.

Lippmann menekankan, jurnalisme tak cukup hanya dilaporkan oleh "saksi mata yang tak terlatih." Niat baik atau usaha yang jujur juga tak cukup. Lippmann mengatakan inovasi baru pada zaman itu, misalnya *byline* atau kolumnis, juga tidak cukup.

Byline diciptakan agar nama setiap reporter diketahui publik yang bakal mendorong si reporter bekerja lebih baik karena namanya

http://pustaka-indo.blogspot.com

terpampang jelas. Kolumnis adalah wartawan atau penulis senior yang tugasnya menerangkan suatu peristiwa dengan konteks yang lebih luas yang mungkin tak bisa dilaporkan reporter yang sibuk bekerja di lapangan.

Solusinya, menurut Lippmann, wartawan harus menguasai semangat ilmu pengetahuan, *"There is but one kind of unity possible in a world as diverse as ours. It is unity of method, rather than aim; the unity of disciplined experiment* (Ada satu hal yang bisa disatukan dalam kehidupan yang berbeda-beda ini. Hal itu adalah keseragaman dalam mengembangkan metode, ketimbang sebagai tujuan; seragamnya metode yang ditarik dari pengalaman di lapangan)."

Baginya, metode jurnalisme bisa objektif. Tapi objektifitas ini bukanlah tujuan. Objektifitas adalah disiplin dalam melakukan verifikasi.

Sayang, dengan berjalannya waktu, pemahaman orisinal terhadap objektifitas ini diartikan keliru. Banyak penulis seperti Leo Rosten, yang mengarang sebuah buku sosiologi tentang wartawan, memakai istilah objektifitas buat merujuk pada pemahaman bahwa wartawan itu seyogyanya objektif.

Saya kira di Indonesia juga banyak dosen komunikasi yang berpikir ala Rosten. Ini membingungkan. Para wartawan pun, pada gilirannya, ikut meragukan pengertian objektif dan menganggapnya sebagai ilusi.

Bagaimana metode yang objektif itu bisa dilakukan? Kovach dan Rosenstiel menerangkan betapa kebanyakan wartawan hanya mendefinisikan dengan liputan berimbang (*balance*), tidak berat sebelah (*fairness*) serta akurat.

Tapi berimbang maupun *fairness* adalah metode. Bukan tujuan. Keseimbangan bisa menimbulkan distorsi bila dianggap sebagai tujuan. Kebenaran bisa kabur di tengah liputan yang berimbang. *Fairness* juga bisa disalahmengerti bila dianggap sebagai tujuan. *Fair* terhadap sumber atau *fair* terhadap pembaca?

Kovach dan Rosenstiel menawarkan lima konsep dalam verifikasi:

- Jangan menambah atau mengarang apa pun;

http://pustaka-indo.blogspot.com

- Jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar;
- Bersikaplah setransparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi Anda dalam melakukan reportase;
- Bersandarlah terutama pada reportase Anda sendiri;
- Bersikaplah rendah hati.

Kovach dan Rosenstiel tak berhenti hanya pada tataran konsep. Mereka juga menawarkan metode yang konkrit dalam melakukan verifikasi itu. *Pertama*, penyuntingan secara skeptis. Penyuntingan harus dilakukan baris demi baris, kalimat demi kalimat, dengan sikap skeptis. Banyak pertanyaan, banyak gugatan.

Kedua, memeriksa akurasi. David Yarnold dari *San Jose Mercury News* mengembangkan satu daftar pertanyaan yang disebutnya *"accuracy checklist."*

- Apakah *lead* berita sudah didukung dengan data-data penunjang yang cukup?
- Apakah sudah ada orang lain yang diminta mengecek ulang, menghubungi atau menelepon semua nomor telepon, semua alamat, atau situs web yang ada dalam laporan tersebut? Bagaimana dengan penulisan nama dan jabatan?
- Apakah materi *background* guna memahami laporan ini sudah lengkap?
- Apakah semua pihak yang ada dalam laporan sudah diungkapkan dan apakah semua pihak sudah diberi hak untuk bicara?
- Apakah laporan itu berpihak atau membuat penghakiman yang mungkin halus terhadap salah satu pihak? Siapa orang yang kira-kira tak suka dengan laporan ini lebih dari batas yang wajar?
- Apa ada yang kurang?
- Apakah semua kutipan akurat dan diberi keterangan dari sumber yang memang mengatakannya? Apakah kutipan-kutipan itu mencerminkan pendapat dari yang bersangkutan?

Ketiga, jangan berasumsi. Jangan percaya pada sumber-sumber resmi begitu saja. Wartawan harus mendekat pada sumber-sumber

http://pustaka-indo.blogspot.com

primer sedekat mungkin. David Protess dari Northwestern University memiliki satu metode. Dia memakai tiga lingkaran yang konsentris. Lingkaran paling luar berisi data-data sekunder terutama kliping media lain. Lingkaran yang lebih kecil adalah dokumen-dokumen misalnya laporan pengadilan, laporan polisi, laporan keuangan dan sebagainya. Lingkaran terdalam adalah saksi mata.

Metode *keempat*, pengecekan fakta ala Tom French yang disebut *Tom French's Colored Pencil*. Metode ini sederhana. French, seorang spesialis narasi panjang nonfiksi dari suratkabar *St. Petersburg Times*, Florida, memakai pensil berwarna untuk mengecek fakta-fakta dalam karangannya, baris per baris, kalimat per kalimat.

MUSIM DINGIN TAHUN lalu ketika salju membasahi Cambridge, saya sempat berbincang-bincang dengan Bill Kovach tentang hubungan wartawan dan sumbernya. Saya katakan, pernah ketika mengerjakan suatu liputan, secara tak sengaja, keluarga saya berhubungan cukup dekat dengan keluarga orang yang diwawancarai.

Kami diskusikan masalah itu. Singkat kata, Kovach mengatakan, bahwa seorang wartawan "tidak mencari teman, tidak mencari musuh." Terkadang memang sulit menerima tawaran jasa baik, misalnya diantar pulang ketika kesulitan cari taksi, tapi juga tak perlu datang ke acara-acara sosial di mana independensi wartawan bisa salah dimengerti orang karena ada saja pertemanan yang terbentuk lewat acara-acara itu.

"Seorang wartawan adalah mahluk asosial. *Don't get me wrong,*" kata Kovach. Asosial bukan antisosial.

Ini sedikit menjelaskan elemen keempat: independensi. Kovach dan Rosenstiel berpendapat, wartawan boleh mengemukakan pendapatnya dalam kolom opini (tidak dalam berita). Mereka tetap dibilang wartawan walau menunjukkan sikapnya dengan jelas. Kalau begitu wartawan boleh tak netral?

http://pustaka-indo.blogspot.com

Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Imparsialitas juga bukan yang dimaksud dengan objektifitas. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput.

Jadi, semangat dan pikiran untuk bersikap independen ini lebih penting ketimbang netralitas. Namun wartawan yang beropini juga tetap harus menjaga akurasi dari data-datanya. Mereka harus tetap melakukan verifikasi, mengabdi pada kepentingan masyarakat, dan memenuhi berbagai ketentuan lain yang harus ditaati seorang wartawan.

"Wartawan yang menulis kolom memang punya sudut pandangnya sendiri …. Tapi mereka tetap harus menghargai fakta di atas segalanya," kata Anthony Lewis, kolumnis *The New York Times*.

Menulis kolom ibaratnya, menurut Maggie Galagher dari *Universal Press Syndicate*, "bicara dengan seseorang yang tak setuju dengan saya."

Tapi wartawan yang menulis opini tetap tak diharapkan menulis tentang sesuatu dan ikut jadi pemain. Ini membuat si wartawan lebih sulit untuk melihat dengan perspektif berbeda. Lebih sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. Lebih sulit lagi menyakinkan masyarakat bahwa si wartawan meletakkan kepentingan mereka lebih dulu ketimbang kepentingan kelompok di mana si wartawan ikut bermain.

Kesetiaan pada kebenaran inilah yang membedakan wartawan dengan juru penerangan atau propaganda. Kebebasan berpendapat ada pada setiap orang. Tiap orang boleh bicara apa saja walau isinya propaganda atau menyebarkan kebencian. Tapi jurnalisme dan komunikasi bukan hal yang sama.

Independensi ini juga yang harus dijunjung tinggi di atas identitas lain seorang wartawan. Ada wartawan yang beragama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, berkulit putih, keturunan Asia, keturunan Afrika, Hispanik, cacat, laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Mereka, bukan pertama-tama, orang Kristen dan kedua baru wartawan.

Latar-belakang etnik, agama, ideologi, atau kelas, ini seyogyanya dijadikan bahan informasi buat liputan mereka. Tapi bukan dijadikan

http://pustaka-indo.blogspot.com

alasan untuk mendikte si wartawan. Kovach dan Rosenstiel juga percaya, ruang redaksi yang multikultural bakal menciptakan lingkungan yang lebih bermutu secara intelektual ketimbang yang seragam.

Bersama-sama wartawan dari berbagai latar ini menciptakan liputan yang lebih kaya. Tapi sebaliknya, keberagaman ini tak bisa diperlakukan sebagai tujuan. Dia adalah metode buat menghasilkan liputan yang baik.

ELEMEN JURNALISME yang kelima adalah memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Memantau kekuasaan bukan berarti melukai mereka yang hidupnya nyaman. Mungkin kalau dipakai istilah Indonesia. "Jangan cari gara-gara juga." Memantau kekuasaan dilakukan dalam kerangka ikut menegakkan demokrasi.

Salah satu cara pemantauan ini adalah melakukan *investigative reporting*—sebuah jenis reportase di mana si wartawan berhasil menunjukkan siapa yang salah, siapa yang melakukan pelanggaran hukum, yang seharusnya jadi terdakwa, dalam suatu kejahatan publik yang sebelumnya dirahasiakan.

Sayangnya di Amerika Serikat, saya kira juga di Indonesia, label investigasi sering dijadikan barang dagangan. Kovach dan Rosenstiel menceritakan bagaimana radio-radio di sana menyiarkan rumor dan dengan seenaknya mengatakan mereka melakukan investigasi. Susahnya, para pendengar, pemirsa, dan pembaca juga tak tahu apa investigasi itu.

Salah satu konsekuensi dari investigasi adalah kecenderungan media bersangkutan mengambil sikap terhadap isu di mana mereka melakukan investigasi. Ada yang memakai istilah *advocacy reporting* buat mengganti istilah *investigative reporting* karena adanya kecenderungan ini. Padahal hasil investigasi bisa salah. Dan dampak yang timbul besar sekali. Bukan saja orang-orang yang didakwa dibuat menderita tapi juga reputasi media bersangkutan bisa tercemar serius. Mungkin karena risiko ini, banyak media besar serba tanggung

http://pustaka-indo.blogspot.com

dalam melakukan investigasi. Mereka lebih suka memperdagangkan labelnya saja tapi tak benar-benar masuk ke dalam investigasi.

Bob Woodward dari *The Washington Post*, salah satu wartawan yang investigasinya ikut mendorong mundurnya Presiden Richard Nixon karena skandal Watergate pada 1970-an, mengatakan salah satu syarat investigasi adalah "pikiran yang terbuka."

Elemen keenam adalah jurnalisme sebagai forum publik. Kovach dan Rosenstiel menerangkan zaman dahulu banyak suratkabar yang menjadikan ruang tamu mereka sebagai forum publik di mana orang-orang bisa datang, menyampaikan pendapat, kritik, dan sebagainya. Di sana juga disediakan cerutu serta minuman.

Logikanya, manusia itu punya rasa ingin tahu yang alamiah. Bila media melaporkan, katakanlah dari jadwal-jadwal acara hingga kejahatan publik hingga timbulnya suatu tren sosial, jurnalisme ini menggelitik rasa ingin tahu orang banyak. Ketika mereka bereaksi terhadap laporan-laporan itu maka masyarakat pun dipenuhi dengan komentar—mungkin lewat program telepon di radio, lewat *talkshow* televisi, opini pribadi, surat pembaca, ruang tamu suratkabar dan sebagainya. Pada gilirannya, komentar-komentar ini didengar oleh para politisi dan birokrat yang menjalankan roda pemerintahan. Memang tugas merekalah untuk menangkap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, fungsi jurnalisme sebagai forum publik sangatlah penting karena, seperti pada zaman Yunani kuno, lewat forum inilah demokrasi ditegakkan.

Sekarang teknologi modern membuat forum ini lebih bertenaga. Sekarang ada siaran langsung televisi maupun *chatroom* di internet. Tapi kecepatan yang menyertai teknologi baru ini juga meningkatkan kemampuan terjadinya distorsi maupun informasi menyesatkan yang potensial merusak reputasi jurnalisme.

Kovach dan Rosenstiel berpendapat jurnalisme yang mengakomodasi debat publik harus dibedakan dengan "jurnalisme semu," yang mengadakan debat secara artifisial dengan tujuan menghibur atau melakukan provokasi.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Munculnya jurnalisme semu itu terjadi karena debatnya tak dibuat berdasarkan fakta-fakta secara memadai. *"Talk is cheap,"* kata Kovach dan Rosenstiel. Biaya produksi sebuah *talkshow* kecil sekali dibandingkan biaya untuk membangun infrastruktur reportase. Sebuah media yang hendak membangun infrastruktur reportase bukan saja harus menggaji puluhan, bahkan ratusan wartawan, tapi juga membiayai operasi mereka. Belum lagi bila media bersangkutan hendak membuka biro-biro baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ngomong itu murah. Mendapatkan komentar-komentar lewat telepon dan disiarkan secara langsung sangat jauh lebih murah ketimbang melakukan reportase.

Jurnalisme semu juga muncul karena gaya lebih dipentingkan ketimbang esensi. Jurnalisme semu pada gilirannya membahayakan demokrasi karena ia bukannya memperlebar nuansa suatu perdebatan tapi lebih memfokuskan dirinya pada isu-isu yang sempit, yang terpolarisasi. Buntutnya, upaya mencari kompromi, sesuatu yang esensial dalam demokrasi, juga tak terbantu oleh jurnalisme macam ini. Jurnalisme semu tak memberikan pencerahan tapi malah mengajak orang berkelahi lebih sengit.

SELAMA DUA SEMESTER mengikuti program Nieman Fellowship, Bill Kovach mengusulkan agar kami ikut suatu kelas tentang penulisan narasi (nonfiksi). Dia menekankan perlunya wartawan belajar menulis narasi karena kekuatan jurnalisme cetak sangat ditentukan oleh kemampuan ini. Saya mengikuti nasihat Kovach dan belajar tentang suatu genre yang disebut *narrative report* atau jurnalisme kesastraan.

Anjuran itu sesuai dengan elemen ketujuh bahwa jurnalisme harus memikat sekaligus relevan. Mungkin meminjam motto majalah *Tempo* jurnalisme itu harus "enak dibaca dan perlu." Selama mengikuti kelas narasi itu, saya belajar banyak tentang komposisi, tentang etika, tentang naik-turunnya emosi pembaca dan sebagainya.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Memikat sekaligus relevan. Ironisnya, dua faktor ini justru sering dianggap dua hal yang bertolak-belakang. Laporan yang memikat dianggap laporan yang lucu, sensasional, menghibur, dan penuh tokoh selebritas. Tapi laporan yang relevan dianggap kering, angka-angka, dan membosankan.

Padahal bukti-bukti cukup banyak, bahwa masyarakat mau keduanya. Orang membaca berita olahraga tapi juga berita ekonomi. Orang baca resensi buku tapi juga mengisi teka-teki silang. Majalah *The New Yorker* terkenal bukan saja karena kartun-kartunnya yang lucu, tapi juga laporan-laporannya yang panjang dan serius.

Kovach dan Rosenstiel mengatakan wartawan macam itu pada dasarnya malas, bodoh, bias, dan tak tahu bagaimana harus menyajikan jurnalisme yang bermutu.

Menulis narasi yang dalam, sekaligus memikat, butuh waktu lama. Banyak contoh bagaimana laporan panjang dikerjakan selama berbulan-bulan terkadang malah bertahun-tahun. Padahal waktu adalah sebuah kemewahan dalam bisnis media.

Di sisi lain, daya tarik hiburan memang luar biasa. Pada 1977 kulit muka majalah *Newsweek* dan *Time* 31 persen diisi gambar tokoh politik atau pemimpin internasional serta 15 persen diilustrasikan oleh bintang hiburan. Pada 1997, kulit muka kedua majalah internasional ini mengalami penurunan 60 persen dalam hal tokoh politik. Sedangkan 40 persen diisi oleh bintang hiburan.

Duet Kovach-Rosenstiel sebelumnya menerbitkan buku *Warp Speed: American in the Age of Mixed Media* (1999) di mana mereka melakukan analisis yang tajam terhadap liputan media Amerika atas skandal Presiden Bill Clinton dan Monica Lewinsky. Kebanyakan media suka menekankan pada sisi sensasi dari skandal itu ketimbang isu yang lebih relevan.

Elemen kedelapan adalah kewajiban wartawan menjadikan beritanya proporsional dan komprehensif. Kovach dan Rosenstiel mengatakan banyak suratkabar menyajikan berita yang tak proporsional. Judul-judulnya sensional. Penekanannya pada aspek

http://pustaka-indo.blogspot.com

yang emosional. Mungkin kalau di Jakarta contoh terbaik adalah harian *Rakyat Merdeka*. Suratkabar macam ini seringkali tidak proporsional dalam pemberitaannya.

Kovach dan Rosenstiel mengambil contoh menarik. Suratkabar sensasional diibaratkan seseorang yang ingin menarik perhatian pembaca dengan pergi ke tempat umum lalu melepas pakaian, telanjang. Orang pasti suka dan melihatnya. Pertanyaannya, bagaimana orang telanjang itu menjaga kesetiaan pemirsa?

Ini berbeda dengan pemain gitar. Dia datang ke tempat umum, memainkan gitar, dan ada sedikit orang yang memerhatikan. Tapi seiring dengan kualitas permainan gitarnya, makin hari makin banyak orang yang datang untuk mendengarkan. Pemain gitar ini adalah contoh suratkabar yang proporsional.

Proporsional serta komprehensif dalam jurnalisme memang tak seilmiah pembuatan peta. Berita mana yang diangkat, mana yang penting, mana yang dijadikan berita utama, penilaiannya bisa berbeda antara si wartawan dan si pembaca. Pemilihan berita juga sangat subjektif. Kovach dan Rosenstiel bilang justru karena subjektif inilah wartawan harus senantiasa ingat agar proporsional dalam menyajikan berita.

Warga bisa tahu kalau si wartawan mencoba proporsional atau tidak. Sebaliknya warga juga tahu kalau si wartawan cuma mau bertelanjang bulat.

SETIAP WARTAWAN HARUS mendengarkan hati nuraninya sendiri. Dari ruang redaksi hingga ruang direksi, semua wartawan seyogyanya punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggungjawab sosial. Ini elemen yang kesembilan.

"Setiap individu reporter harus menetapkan kode etiknya sendiri, standarnya sendiri dan berdasarkan model itulah dia membangun kariernya," kata wartawan televisi Bill Kurtis dari *A&E Network*.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Menjalankan prinsip itu tak mudah karena diperlukan suasana kerja yang nyaman, yang bebas, di mana setiap orang dirangsang untuk bersuara. "Bos, saya kira keputusan Anda keliru!" atau "Pak, ini kok kesannya rasialis" adalah dua contoh kalimat yang seyogyanya bisa muncul di ruang redaksi.

Menciptakan suasana ini tak mudah karena berdasarkan kebutuhan, ruang redaksi bukanlah tempat di mana demokrasi dijalankan. Ruang redaksi bahkan punya kecenderungan menciptakan kediktatoran. Seseorang di puncak organisasi media memang harus bisa mengambil keputusan—menerbitkan atau tidak menerbitkan sebuah laporan, membiarkan atau mencabut sebuah kutipan yang panas—agar media bersangkutan bisa menepati *deadline*.

Membolehkan tiap individu wartawan menyuarakan hati nurani pada dasarnya membuat urusan manajemen jadi lebih kompleks. Tapi tugas setiap redaktur memahami persoalan ini. Mereka memang mengambil keputusan final tapi mereka harus senantiasa membuka diri agar tiap orang yang hendak memberi kritik atau komentar bisa datang langsung pada mereka.

Bob Woodward dari *The Washington Post* mengatakan, "Jurnalisme yang paling baik seringkali muncul ketika ia menentang manajemennya."

Pada hari pertama Nieman Fellowship, Bill Kovach mengatakan pada 24 peserta program itu bahwa pintunya selalu terbuka. Terkadang dia sering harus mengejar *deadline* dan mengetik, "Raut wajah saya bisa galak sekali bila seseorang muncul di pintu saya. Tapi jangan digubris. Masuk dan bicaralah."

Jakarta, 2001

http://pustaka-indo.blogspot.com

Pendidikan Jurnalisme di Pulau Jawa

Handono yang baik,

Masalah yang Anda bahas adalah mutu pendidikan jurnalisme di Indonesia. Anda bertanya, "Bagaimana standar kurikulum yang seharusnya diterapkan di lembaga pendidikan junalisme? Apakah sekolah-sekolah jurnalisme di Indonesia sekarang ini sudah sesuai dengan kebutuhan media kita? Kalau sesuai, kenapa banyak media massa sepertinya menomorduakan lulusan-lulusan program studi jurnalisme?"

Saya membongkar perpustakaan saya untuk mencari hasil studi Thomas Hanitzsch, seorang kandidat Ph.D. dari Universitas Ilmenau, Jerman, yang pernah kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, serta meneliti pendidikan jurnalisme Indonesia. Saya baca riset awalnya, "Rethinking Journalism Education in Indonesia: Nine Theses," yang diterbitkan jurnal *Mediator* terbitan Universitas Islam Bandung (vol. 2 no. 1 thn. 2001).

Hanitzsch menulis bahwa mendefinisikan mutu dalam jurnalisme, dengan mengutip ilmuwan kelahiran Jerman, Stefan Russ-Mohl, "Ibaratnya memaku puding ke tembok." Ia sesuatu yang sia-sia. Anda bayangkan deh bagaimana memaku puding?

http://pustaka-indo.blogspot.com

Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, dari Joseph Pulitzer (New York) hingga Max Weber (Munich), sudah membicarakan apa ukuran jurnalisme bermutu? Diskusinya sulit sekali, kalau tak bisa dibilang bikin pusing.

Ada kubu yang berpendapat wartawan perlu sekolah jurnalisme, antara lain Joseph Pulitzer, yang memberikan uang untuk mendirikan Columbia Graduate School of Journalism pada 1902. Ada pula kubu yang berpendapat wartawan tak perlu belajar sekolah secara khusus. Jurnalisme adalah keahlian pertukangan. Wartawan sebaiknya belajar dari berbagai disiplin ilmu. Soal keahlian jurnalisme itu sendiri diajarkan melalui magang. Kubu ini termasuk dosen-dosen Universitas Harvard, yang mendirikan Nieman Foundation on Journalism, pada 1939. Di Amerika ada puluhan program serupa Nieman Fellowship di mana wartawan diberi kesempatan mencicipi berbagai ilmu, mulai dari politik hingga pengobatan, dari musik hingga arsitektur, namun mereka tak menerima gelar.

Namun di Amerika juga banyak sekolah wartawan bermutu di mana wartawan diajari berbagai macam keterampilan dalam jurnalisme sekaligus belajar ilmu sosial atau ilmu lain yang menarik minat mereka.

Ilmuwan Jerman, Siegfried Weishenberg, pada 1990, mencoba maju lebih konkrit dengan memperkenalkan empat macam kompetensi yang diperlukan seorang wartawan agar bisa melakukan pekerjaannya dengan baik: (1) Kompetensi profesional, misalnya, melakukan *editing*, seleksi informasi, memahami komunikasi dasar dan sebagainya; (2) Kompetensi transfer, misalnya, penguasaan bahasa, presentasi informasi, berbagai genre dalam jurnalisme dan sebagainya; (3) Kompetensi teknis, misalnya, komputer, internet, desain grafis dan sebagainya; (4) Kompetensi tingkat lanjut, misalnya, pengetahuan terhadap isu liputan tertentu, ilmu-ilmu sosial, bahasa asing dan sebagainya.

Dalam makalah itu, Hanitzsch menjelaskan keempat kompetensi itu dalam sebuah tabel. Berdasarkan tabel itu dia

http://pustaka-indo.blogspot.com

membandingkannya dengan kurikulum, kualifikasi tenaga pengajar, rasio jumlah mahasiswa dan dosen, serta faktor-faktor lain pada lima sekolah jurnalisme yang memiliki program studi komunikasi: (1) Universitas Gadjah Mada (UGM); (2) Lembaga Pers Dokter Soetomo (LPDS); (3) Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP); (4) Multi Media Training Center (MMTC); (5) Universitas Indonesia (UI).

Ada beberapa kesimpulan yang didapat Hanitzsch. *Pertama*, pendidikan jurnalisme kita masih dihambat oleh apa yang disebut sebagai "kurikulum nasional." *Kedua*, tak ada interaksi antara pendidikan jurnalisme dan industri media. Sekolah jurnalisme punya dunianya sendiri, sedangkan industri media berada pada dunia yang lain. LPDS dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta punya pendekatan berbeda namun juga tak memadai karena mereka tak dilengkapi dengan sekolah di bidang penyiaran—sesuatu yang berkembang pesat di Indonesia.

Ketiga, semua sekolah ini tak dilengkapi dengan teknologi yang memadai. Banyak yang tak punya fasilitas internet maupun desain grafis. Kebanyakan dosen mengajarkan pengetahuan komunikasi plus matakuliah macam Pancasila, Pendidikan Moral Pancasila, dan sebagainya.

Keempat, di Indonesia, ada 69 sekolah jurnalisme (dari D-1 hingga S-3) tapi 80 persen ada di Pulau Jawa dan Medan. Daerah timur, dari Makassar hingga Jayapura, dari Maluku hingga Kupang, adalah daerah-daerah yang tak punya sekolah jurnalisme. Hanitzsch melihat ada ketimpangan besar antara jurnalisme di Jawa dan Medan serta di kota-kota timur.

Dia memberikan data lengkap pada kelima sekolah itu. Sekolah wartawan pertama di Jakarta adalah "Akademi Wartawan" yang didirikan pada 1950 dan jadi cikal bakal IISIP. UGM mendirikan jurusan "*publicitit*" pada 1953. UI mendirikannya pada 1959.

Namun semua sekolah yang diteliti Hanitzsch punya kelemahan di bidang tenaga pengajar. UGM misalnya, dari 16 dosen tetap, semua punya gelar di bidang komunikasi namun hanya tiga orang

http://pustaka-indo.blogspot.com

yang punya pengalaman di bidang jurnalisme. IISIP punya 10 dosen tetap, tanpa jurusan penyiaran, dan hanya enam dosen yang punya pengalaman di bidang jurnalisme. MMTC didirikan Departemen Penerangan pada 1985 untuk mendidik karyawan *TVRI* dan *RRI*. Namun sejak jatuhnya Presiden Soeharto, ia kesulitan dana dan kini masih belum punya kejelasan akan masa depannya.

Kebanyakan sekolah ini menekankan kurikulum mereka pada pengetahuan tentang komunikasi namun kemampuan praktis di bidang jurnalisme, misalnya menulis, sedikit diajarkan. Bahkan di UGM, teknik investigasi dan format berita dijadikan satu matakuliah, diajarkan satu semester saja. Semua sekolah ini juga tak memberikan kesempatan mahasiswa untuk merasakan ruang redaksi—sesuatu yang normal dilakukan sekolah macam Columbia Graduate School of Journalism.

Saya tidak kaget membaca penemuan Thomas Hanitzsch. Saya kira isu ini juga sering dibicarakan di kalangan wartawan kita. Selama lebih dari 15 tahun jadi wartawan, saya sering mendengar keluhan para redaktur yang kesulitan mencari tenaga wartawan. Saya, misalnya, menerima keluhan dari Wina Armada Sukardi, mantan pemilik harian *Merdeka* yang kini anggota Dewan Pers, serta Iwan Qodar Himawan, mantan pemimpin redaksi majalah *Gatra*.

Keduanya merasa sulit mencari orang yang bisa dididik jadi wartawan. Padahal sekolah jurnalisme banyak sekali. Hanisztch menulis 69 sekolah itu punya 19 ribu mahasiswa. Ia seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan media di Indonesia.

Menurut Atmakusumah Astraatmadja dari Lembaga Pers Dr. Soetomo, dalam sebuah email suatu *mailing list* pada awal 2000, jumlah wartawan di Indonesia pada masa Presiden Soeharto hanya sekira 7.000. Mereka mengasuh hampir 300 media cetak. Ada hampir 700 stasiun radio (walaupun sangat sedikit yang memiliki kegiatan jurnalistik) dan enam stasiun televisi.

Sekarang, ketika media cetak jadi sekira 600-700, stasiun radio lebih dari 1.000, dan televisi menjadi lebih dari sepuluh di Jakarta

http://pustaka-indo.blogspot.com

(total 31 di seluruh Indonesia), paling-paling wartawan bertambah 8.000-10.000. Padahal kebutuhannya banyak sekali. Kita bakal melihat ledakan stasiun-stasiun televisi di luar Jakarta—mungkin lebih dari 10 kota besar Indonesia. Siapa yang bakal mengisi kekurangan tenaga-tenaga di sana?

Saya tak tahu jawabannya. Tapi saat ini, setidaknya saya ingin sekali bisa membaca disertasi Thomas Hanitzsch bila sudah selesai.[1] Saya kira sudah saatnya kita membicarakan pendidikan jurnalisme Indonesia secara serius. Tanpa upaya perbaikan sekolah jurnalisme, saya khawatir, masa depan media kita juga suram, dan pada gilirannya ia juga akan memengaruhi mutu demokrasi Indonesia.

Jakarta, 2004

http://pustaka-indo.blogspot.com

1 Disertasi Hanitzsch di Universitas Ilmenau, Jerman, *Journalism in Indonesia: journalistic actors, structures, and orientations in a democratizing media system*, (2004). Dia meraih gelar diploma dari Universitas Leipzig, Jerman, dengan tesis *Journalism education in Indonesia: context, objectives, structures, and contents*, (1999). Hanitzsch pendiri International Communication Association dan juga co-editor *Journal of Global Mass Communication*.

Model Pelatihan Mahasiswa

BAGAIMANA BIKIN PELATIHAN untuk wartawan mahasiswa atau pemula? Ini pertanyaan yang sering saya dapatkan dari mahasiswa. Mereka suka tanya, siapa yang cocok jadi pembicara? Berapa panjang satu sesi? Siapa yang bisa mengajarkan menulis? Berita? *Feature*? Opini? Bagaimana bedanya dengan media elektronik?

Yayasan Pantau biasa membagi materi dalam empat kategori: (1) reportase; (2) penulisan; (3) laku wartawan; (4) dinamika ruang redaksi (*newsroom)*. Ini pembagian yang juga biasa dilakukan di berbagai sekolah jurnalisme di Boston, New York dan kota Amerika lain. Reportase termasuk teknik wawancara, riset buku, internet, *database* dan pengamatan di lapangan. Penulisan termasuk latihan membuat deskripsi, menggunakan dialog, diskusi soal bagaimana membuat struktur cerita dan sebagainya. Kami biasa bikin dua struktur untuk pemula: piramida terbalik dan *feature*.

Laku wartawan ya soal etika. Ia berhubungan dengan sumber, bagaimana memandang informasi, siapa yang layak dijadikan sumber dan sebagainya.

Dinamika *newsroom* berkenaan dengan keragaman. Misalnya, Anda hendak meliput soal apa yang disebut sebagai "terorisme"—kalangan lain menyebutnya "perang" atau "jihad"—maka sangatlah

http://pustaka-indo.blogspot.com

perlu untuk mengajak rekan Anda yang mengerti Islam dan debat soal "jihad" untuk terlibat. Latar belakang ini bisa memperkaya liputan. Mau meliput soal pelecehan terhadap "agama Hindu" perlu mengajak rekan yang mengerti soal Hindu dalam liputan atau diskusi. Mau bicara soal "Kristenisasi" atau "Islamisasi" ya perlu melibatkan mereka yang berasal dari agama yang dipersoalkan itu.

Empat kategori ini belakangan dikembangkan oleh Committe of Concerned Journalists di Washington D.C. Saya juga banyak mengambil ilmu dari International Center for Journalists. Saya kebetulan pernah berhubungan dengan mereka. Saya pernah jadi konsultan ICFJ di Banda Aceh dan Timor Leste sehingga mengerti cara mereka membangun silabus.

Soal pembicara sangat penting. Ia tergantung pada banyak hal, antara lain waktu mereka, dana untuk mendatangkan mereka dan sebagainya. Kami di Yayasan Pantau lebih suka menggunakan sedikit instruktur daripada setiap sesi ganti instruktur (ini sering jadi kebiasaan pers mahasiswa).

Metode *Pantau* ini menghemat waktu instruktur untuk mengenal audiens (*ice breaking* cukup dilakukan sekali) serta mencegah pengulangan. Ia juga lebih menjamin terciptanya peluang para peserta untuk memahami apa yang dilatihkan. Makin dalam pemahaman mereka makin baik bukan? Saya sangat tidak menganjurkan sebuah program pelatihan yang menggunakan instruktur gonti-ganti untuk setiap sesi. Ini membuang-buang tenaga dan waktu.

Kalau Anda setuju dengan pendekatan kami, maka Anda harus mencari instruktur yang bisa tinggal di tempat pelatihan selama acara berlangsung. Ia mengajar dari sesi ke sesi. Setiap sesi acuannya 90 menit. Kalau terlalu panjang, lebih dari 90 menit, peserta merasa lelah dan konsentrasi menurun. Sehari penuh, maksimal tiga sesi.

Dalam "kursus jurnalisme sastrawi" misalnya, yang rutin diadakan *Pantau* tiap semester, selama dua minggu, hanya ada dua instruktur: Janet Steele dan saya. Steele seorang dosen dari George

http://pustaka-indo.blogspot.com

Washington University. Namun kami sering mengundang pembicara ketiga untuk *sharing* dan variasi. Pada kelas yang waktunya lama, katakanlah seminggu sekali pertemuan, kami juga pakai satu atau dua instruktur.

Faktor lain adalah latihan menulis atau praktik. Pers mahasiswa cenderung mengabaikan latihan. Lebih banyak diskusi. Dulu zaman saya pertama kali ikut pelatihan pers mahasiswa dengan tabloid *Gita Kampus* di Salatiga pada 1985, pembicaranya mungkin ada 15 orang, dari pagi sampai malam. Dan tidak ada praktik sama sekali. Dari peserta sekitar 40 orang itu hanya tiga yang akhirnya bisa menulis. Anda hendak membuat "pendidikan dan latihan" namun sering lupa unsur latihan. Latihan menulis lebih menjamin peserta bisa menulis.

Ini berarti Anda juga perlu instruktur yang bisa memberikan tugas dengan sangat fokus serta bersedia mengoreksi dan membahas pekerjaan rumah. "Fokus" artinya pekerjaan rumah itu cukup pendek tapi bisa membuat instruktur melihat seberapa jauh si peserta mengerti apa yang sudah diajarkan. Janet Steele sangat pandai membuat tugas pekerjaan rumah. Saya belajar dari Steele tentang bagaimana mendesain pekerjaan rumah.

Last but not the least, wartawan yang baik belum tentu bisa jadi pengajar yang baik. Anda harus mencari wartawan yang mengerti perjalanan sejarah 300 tahun jurnalisme. Dia juga mengerti dasar-dasar jurnalisme lewat berbagai konvensi yang dikembangkan di berbagai belahan dunia (terutama England dan New England di mana jurnalisme berkembang paling awal). Dia juga sekaligus tahu cara mengajar, cara mendorong peserta untuk suka berdiskusi dan memotivasi mereka membaca bahan-bahan bacaan.

Tidaklah mudah mencari orang begini karena mereka rata-rata sibuk. Namun kalau Anda gigih melakukan pendekatan, saya kira Anda bisa mendapatkan wartawan-*cum*-instruktur macam ini. Cari wartawan yang *track record*-nya bagus—tidak pernah campur dengan politik atau *public relations.* Di Jakarta, kami biasa minta Agus Sopian,

http://pustaka-indo.blogspot.com

Amarzan Loebis, Alfian Hamzah, Bre Redana, Budi Setiyono, Harry Surjadi dan sebagainya.

Bagaimana soal seleksi peserta? Cara terbaik adalah minta calon peserta mengirim dua naskah yang mereka anggap terbaik. Kita bisa menilai cara seseorang berpikir lewat tulisannya. Kita bisa mencari peserta yang standarnya sama.

Ini akan memudahkan proses belajar mengajar. Kalau peserta tak sama standarnya, instruktur lebih repot. Jam terbang bersama lembaga media mahasiswa juga menentukan. Ini bisa diminta lewat surat pengantar yang sekaligus cerita tentang riwayat bekerjanya dalam lembaga media.

Mungkin ini sekilas saja cara mendesain program pelatihan wartawan mahasiswa.

Jakarta, 2006

http://pustaka-indo.blogspot.com

Byline dan Tagline

SAYA PUNYA SATU isu yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Ceritanya, 15 Desember 2003, Bill Kovach, salah satu penulis buku *Sembilan Elemen Jurnalisme*, datang ke kantor harian *Kompas*. Kovach menemui Jakob Oetama dan Suryopratomo, masing-masing pemimpin umum dan pemimpin redaksi *Kompas*. Mereka bertemu di ruang kerja Oetama untuk diskusi selama satu jam. Lantas Kovach menemui sekelompok wartawan *Kompas* untuk berdiskusi di sebuah ruang rapat. Ada sekitar 15 wartawan *Kompas* ikut di sana.

Kovach sempat bertanya kepada para wartawan *Kompas*, "Mengapa suratkabar Anda tak memakai *byline*? Mengapa di halaman satu tak terlihat *byline*?"

Kalau ingatan saya tidak keliru, Bambang Wisudo, salah satu wartawan yang hadir, mengatakan kalau *Kompas* menggunakan *byline* bakal kelihatan kalau tulisan wartawan-wartawannya masih belum bagus menulis. Tak semua wartawan bisa mendapatkan *byline*. Malu kalau pakai *byline*.

Kovach balik mengatakan bukankah itu esensi *byline*? Artinya, biarkan pembaca tahu mana wartawan yang bisa menulis dengan baik dan mana yang tidak baik. Bukankah itu bagian dari *accountability Kompas*?

http://pustaka-indo.blogspot.com

Jadi kalau *Kompas* memakai *byline*, orang bakal tahu siapa orang yang menulis laporan yang baik atau yang buruk. Bukan sebaliknya, menaruh semua tanggungjawab kepenulisan itu kepada institusi *Kompas*.

Wisudo bilang ini sudah tradisi *Kompas*. Dia mengatakan tak tahu jawaban pastinya. Wisudo mengatakan seharusnya Kovach tanya kepada "Pak Jakob," sembari tangannya mengacung ke atas.

Kovach mengangguk-angguk. Sayang, janji bertemu kedua kalinya dengan Oetama, karena kesibukan masing-masing, tak terlaksana. Oetama menelepon saya dan mengundang Kovach sarapan bersama. Pendek kata, pertanyaan itu pun tak bisa dilanjutkan Kovach kepada Oetama. Kovach kembali ke Washington.

Namun Kovach sempat melontarkan isu ini sekali lagi keesokan harinya, ketika muncul dalam acara *Metro TV* bersama Jason Tedjasukmana. Kovach mengatakan suratkabar di Indonesia, yang dilihatnya di Medan, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan Jakarta, kebanyakan tak memakai *byline*. Menurutnya, ini sebuah kekurangan.

Dalam bahasa Inggris, *byline* berasal dari kata "by" (oleh) dan "line" (baris) yang merujuk kepada sebuah baris dekat judul cerita di mana terdapat nama orang yang menulis cerita itu. Menurut kamus *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary*, kata ini masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Inggris, artinya terekam pertama kali dalam perbendaharaan bahasa Inggris, pada 1938.

Kovach mengatakan pada sebuah diskusi lain bahwa *byline* dipakai pertama kali pada 1850-an oleh Charles S. Taylor, seorang jenderal yang lantas jadi *publisher* harian *The Boston Globe*, sesudah perang saudara Amerika. Taylor sering jengkel karena selama perang ada saja wartawan yang menulis dengan judul, "Berita Penting Jika Terbukti Benar." Dia memutuskan menaruh nama para wartawannya pada berita-berita yang diterbitkan *The Boston Globe*.

Pemakaian *byline* ternyata membuat wartawan-wartawan *The Boston Globe* lebih berhati-hati dengan laporan-laporan mereka. Ketika itu, sama dengan suratkabar-suratkabar Indonesia hari ini, media Amerika tak memakai *byline*. Mereka hanya menaruh inisial si

http://pustaka-indo.blogspot.com

wartawan di ekor laporan. Namun inovasi Taylor ini perlahan-lahan ditiru oleh suratkabar lain di Amerika Serikat.

Prosesnya tidak cepat. Butuh waktu lama untuk menyakinkan pada redaktur bahwa *byline* adalah masalah *accountability*. Harian *The New York Times* baru mulai menerapkan *byline*, sebagai isu *accountability*, pada 1960-an.

Banyak redaktur hanya memberikan *byline* bila sebuah laporan dianggap punya kualitas bagus. Kalau biasa-biasa saja, tak diberi *byline*, cukup inisial di ekor karangan—yang sebenarnya menurut sejarah, lebih untuk fungsi administrasi internal.

Byline dianggap sebagai *reward* (hadiah) bukan *accountability* (akuntabilitas). Namun pemakaian *byline* untuk kolom opini lebih cepat diterima karena si suratkabar berpendapat isi opini tak harus mencerminkan opini institusi suratkabar.

Tapi hari ini, kalau Anda membaca *The New York Times*, *The Washington Post*, *Wall Street Journal*, atau suratkabar apapun di Amerika Serikat, *byline* sudah jadi praktik biasa. Semua laporan berita diberi nama wartawannya.

Saya kebetulan pernah bekerja untuk harian *The West Australian* (Perth), *The Nation* (Bangkok) dan *The Star* (Kuala Lumpur). Semua berita, kecuali berita dua kolom yang relatif pendek, diberi *byline*.

Di Indonesia, kebanyakan suratkabar tak memakai *byline*. Di Indonesia, *accountability* wartawan disembunyikan di balik tanggungjawab institusi. Padahal dua hal ini bisa dibedakan. Kalau seorang wartawan diberi *byline*, maka dia akan lebih bertanggungjawab terhadap isi laporannya karena publik akan tahu siapa wartawan yang bekerja relatif konsisten menghasilkan berita-berita yang bermutu. Juga sebaliknya, publik akan tahu wartawan mana yang pernah bikin salah.

Harian *The Jakarta Post* mungkin termasuk suratkabar pertama di Indonesia yang memakai *byline*. Menurut Endy Bayuni, kini pemimpin redaksi *The Jakarta Post*, kebijakan tersebut dipakai sejak 1 Oktober 2001 ketika desain harian ini diubah—antara lain memakai warna merah pada logo mereka.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Bayuni mengatakan pada saya, hasilnya memang wartawan *The Jakarta Post* dipaksa menulis lebih baik karena kalau ada kesalahan atau ada yang melenceng, nama mereka bisa segera diketahui publik. Namun, hasilnya positif karena wartawan juga bisa membangun reputasi mereka.

Praktik *byline* juga dipakai majalah. Cuma di majalah, atau juga suratkabar kalau sebuah laporan dikerjakan ramai-ramai, harus dibedakan antara *byline* dan *tagline*.

Tagline adalah baris di mana nama para kontributor sebuah laporan diletakkan. *Byline* untuk penulis laporan. Sedang wartawan-wartawan lain yang memberikan bahan atau kontribusi untuk laporan itu dimasukkan dalam *tagline*. Ini penting dibedakan karena si penulis sering hanya memakai satu alinea saja dari si kontributor. Dan seringkali si kontributor yang jadi sasaran kekesalan orang kalau laporan mereka dianggap tak memuaskan. Padahal kontributor cuma setor laporan. Kebanyakan majalah Indonesia, menggunakan *tagline* tapi tanpa *byline*.

Sekarang mari kita perhatikan. Suratkabar dan majalah apa saja di Indonesia ini yang belum membawa prinsip *accountability* ke ruang redaksi mereka? Kalau Anda bekerja di media, tidakkah Anda tertarik untuk membawa isu ini ke rapat redaksi? Atau kalau Anda seorang pembaca, tidakkah Anda tertarik untuk bertanya kepada redaktur Anda, "Eh, kenapa ya kita tak memakai *byline*?"

Jakarta, 2004

http://pustaka-indo.blogspot.com

Pagar Api
Desain Suratkabar

DESAIN SURATKABAR SELALU ada filsafatnya. Suratkabar misalnya, tak dianjurkan melulu berhalaman yang berisikan huruf. Ini membuat pembaca cepat bosan dan mata lelah. Desain suratkabar juga membutuhkan garis tipis untuk memisahkan iklan dan berita. Garis ini adalah lambang pagar api atau *firewall* yang mencerminkan prinsip antara berita dengan iklan harus tegas dipisahkan. Iklan adalah iklan. Berita adalah berita.

Perhatikan, misalnya, harian *Financial Times, International Herald Tribune, The New York Times*, atau *Wall Street Journal*. Mereka selalu menorehkan garis tipis dengan rapih untuk memisahkan iklan dengan berita. Di Asia, tengok saja harian *The Bangkok Post, Asahi Shimbun* (Tokyo), atau *South China Morning Post* (Hong Kong). Mereka dengan rajin setiap hari membubuhkan garis tipis. Majalah macam *Far Eastern Economic Review* maupun *Asiaweek* juga menghormati garis sakral ini.

Bandingkan dengan *Kompas*, *Tempo*, *Media Indonesia*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, *The Jakarta Post*, atau harian daerah macam *Suara Merdeka* (Semarang), *Jawa Pos* (Surabaya), dan *Singgalang* (Padang). Ternyata rombongan suratkabar ini tak memiliki garis lambang pagar api.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Bill Kovach, wartawan veteran harian *The New York Times* dan kurator The Nieman Foundation for Journalism di Universitas Harvard, Amerika Serikat, mengatakan pagar api hukumnya wajib bagi setiap media massa. Setiap suratkabar seyogyanya mencetak garis tipis tersebut. "Tak perlu dipertanyakan lagi," kata Kovach.

Harold Ross, redaktur majalah *The New Yorker*, menganggap sedemikian sakralnya pagar api itu sampai-sampai ruang redaksi dan pemasarannya pun dipisahkan. Ruang redaksi di lantai yang berbeda dengan ruang iklan dan distribusi. Ross bahkan tak menganjurkan para wartawannya banyak bicara dengan orang pemasaran. Dia khawatir obrolan itu akan memengaruhi cara pandang si wartawan.

Tak jelas mengapa suratkabar Indonesia tak biasa mencantumkan garis tipis itu. Mungkin ada redaktur yang berpendapat toh hanya lambang. Tidakkah lebih penting substansinya? Yang lain berpendapat hanya menambah pekerjaan, ongkos produksi, dan makan waktu. Mungkin juga alasan sejarah. Suratkabar Indonesia lebih merupakan alat perjuangan melawan kekuasaan ketimbang medium berita yang dikelola dengan profesional.

Kini zaman berubah. Wartawan sekarang bisa bekerja lebih bebas, tanpa takut sensor atau bredel. Keleluasaan itu seyogyanya ditanggapi pula dengan cara kerja yang lebih baik, lebih etis, dan lebih disiplin dalam memisahkan berita dan iklan. Apalagi tekanan pasar makin meningkat. Kompetisi berebut kue iklan juga makin ketat. Persaingan ini seringkali membuat para redaktur lupa bahwa berita mereka bukan "berita pesanan" terutama karena dana atau kompensasi apapun dari pemesan.

Suratkabar Indonesia makin hari makin memperlihatkan campurnya berita dan iklan. Ada harian terkemuka Jakarta yang menciptakan rubrik foto upacara, kegiatan hotel, kegiatan sosial, pameran, peresmian ini dan itu, setiap Rabu dan Minggu dengan penampilan berita. Padahal rubrik ini sepenuhnya iklan. Ada juga mingguan terkemuka yang beberapa minggu lalu menurunkan berita perjalanan dengan kapal mewah, saat si

http://pustaka-indo.blogspot.com

wartawan sepenuhnya disponsori si empunya bisnis pariwisata, dan laporannya muncul sebagai berita. Lengkap dengan foto-foto yang disediakan pihak sponsor.

Untuk majalah perempuan jangan ditanya, dari iklan minyak wangi hingga mode pakaian, banyak yang dibiayai industri kecantikan. Kini *advertorial* tidak pernah dipermasalahkan lagi. Makin banyak suratkabar Indonesia yang membuat *advertorial* dengan wajah sama dengan berita. *Advertorial*, sekadar mengingatkan, adalah gabungan dua kata: *advertisement* dan *editorial*.

Pagar api mengingatkan bahwa orang *advertisement* tak boleh ikut campur urusan *editorial*. Sebaliknya redaktur dan wartawan juga tak usah ikut campur urusan iklan. Pagar ini sebenarnya memudahkan kerja jurnalisme. Bagian iklan tak direpoti kerewelan wartawan. Sementara para wartawan juga tahu bahwa dia benar-benar menulis berita.

Apa risiko pelanggaran pagar api? Jawabnya bisa bermacam-macam, dari yang sederhana hingga yang serius. Yang jelas kepercayaan pembaca terhadap suratkabar bersangkutan bakal digerogoti. Mungkin pelan, mungkin cepat.

Paralel dengan dilanggarnya pagar api adalah dilanggarnya pemisahan peranan masing-masing golongan dalam masyarakat. Kalau meminjam ajaran Hindu, seorang birokrat dianjurkan tak berdagang. Seorang pedagang sebaliknya tak usah sok intelektual. Tentara jangan ikut mengatur perdagangan. Kalau batas-batas itu dilanggar, etika masyarakat compang-camping. Buktinya ya rezim Orde Baru. Tentara kok merangkap pedagang! Sistem sosial, politik, dan ekonomi Indonesia terbukti rapuh ketika dihantam krisis ekonomi 1997-1998.

Kini, Indonesia menghadapi macam-macam persoalan yang tak mudah dicarikan jalan keluarnya. Mulai dari sistem perbankan yang keropos hingga utang luar negeri yang bertumpuk. Mulai "separatisme" hingga pertikaian antaragama, suku, hingga ideologi. Di Aceh, Maluku, Papua, dan Kalimantan. Isu keadilan, baik dan

http://pustaka-indo.blogspot.com

jahat, dosa masa lalu, harapan masa depan, semua ibarat ombak lautan, datang menerpa, tiap saat memenuhi halaman-halaman koran Indonesia.

Justru dalam situasi sulit macam inilah, media diuji untuk menunjukkan kemampuan menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan *fair* kepada para pembaca. Media yang baik bakal membantu pembacanya mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Dan suratkabar terbukti kebesarannya ketika mampu melalui masa-masa sulit di tengah para pembacanya. Mereka melewatinya dengan anggun, jujur, dan menghormati prinsip pagar api.

Saya berpendapat sudah saatnya suratkabar Indonesia menorehkan garis tipis lambang pagar api. Pagar api ini akan mengingatkan pembaca bahwa suratkabar mereka bukan berisi "berita pesanan." Wartawan tiap hari juga diingatkan mereka tak boleh menulis berita pesanan. Pagar api inilah salah satu cerminan filsafat dasar jurnalisme.

Jakarta, 2001

http://pustaka-indo.blogspot.com

Quo Vadis Jurnalisme Islami?

Dear Rudi Agung,

Terima kasih untuk penjelasannya soal berbagai pendapat "pakar nasional" soal apa yang mereka sebut "jurnalisme Islami." Singkatnya, saya pikir pendapat orang-orang ini belum cukup kuat. Mereka belum menghasilkan metode baru, yang membuat genre ini bisa dipertahankan secara teoritis. Mereka hanya akan bikin mahasiswa macam Anda bingung. Mereka mengambil kesimpulan dari bacaan-bacaan Barat tersebut dengan campur-aduk antara perspektif Islam, audiens Muslim serta pekerjaan wartawan.

Tidakkah Zaim Uchrowi dan Nurul Hamami, keduanya wartawan harian *Republika*, yang memiliki target pasar warga Muslim, mengatakan sendiri kepada Anda bahwa jurnalisme tak bisa dibagi-bagi dengan agama. Singkatnya, tidak ada jurnalisme Islami.

Mari kita lihat argumentasi para "pakar" tersebut!

"... jurnalisme Islam, dapat dimaknakan sebagai suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam, serta berbagai pandangan dengan perspektif ajaran Islam kepada khalayaknya. Jurnalisme Islam dapat pula dimaknai sebagai proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang sarat

http://pustaka-indo.blogspot.com

dengan muatan dan sosialisasi nilai-nilai Islam dengan mengedepankan dakwah Islamiyah."

Apa bedanya dengan propaganda? Kalau suatu jurnalisme dikaitkan dengan pemahaman lain, entah itu fasisme, komunisme, kapitalisme atau agama apapun, definisi yang lebih tepat, saya kira, adalah propaganda.

Propaganda adalah suatu peliputan, penulisan serta penyajian informasi di mana fakta-fakta itu disajikan, termasuk ditekan dan diperkuat pada bagian tertentu, agar selaras dengan kepentingan ideologi atau kekuasaan yang memanipulasi komunikasi tersebut.

Jurnalisme adalah bagian dari komunikasi. Namun tak semua elemen komunikasi adalah jurnalisme. Propaganda maupun dakwah juga bagian dari komunikasi. Namun menyamakan propaganda dengan jurnalisme, atau menyamakan dakwah dengan jurnalisme, saya kira akan menciptakan kebingungan yang serius dengan daya rusak besar.

Coba kita ganti kata "jurnalisme" dengan "dakwah" dalam frasa "jurnalisme Islami."

"... dakwah Islam, dapat dimaknakan sebagai suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam, serta berbagai pandangan dengan perspektif ajaran Islam kepada khalayaknya. Dakwah Islam dapat pula dimaknai sebagai proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan dan sosialisasi nilai-nilai Islam dengan mengedepankan dakwah Islamiyah."

Saya kira lebih masuk akal memakai frasa "dakwah Islam" daripada "jurnalisme Islami."

Sekarang kita lihat definisi lainnya:

"... jurnalisme Islam sarat dengan tuntutan dakwah yang mengemban misi 'amar ma'ruf nahyi munkar.' Jurnalisme Islam adalah upaya dakwah Islamiyah. Karena jurnalisme Islam bermisi 'amar ma'ruf nahyi munkar,' maka ciri khasnya adalah menyebarluaskan informasi tentang perintah dan larangan Allah SWT. Jurnalistik ini berusaha keras untuk memengaruhi komunikan/khalayaknya agar berperilaku sesuai dengan ajaran Islam."

Bagaimana kalau frasa 'amar ma'ruf nahyi munkar' itu kita

http://pustaka-indo.blogspot.com

ganti dengan, misalnya, semboyan kaum Protestan, "Cintailah sesamamu manusia." Atau ganti saja dengan semboyan Kejawen, Buddha, Parmalin dan lainnya.

Pakar komunikasi yang beragama Protestan, kelak mudah saja bilang, "jurnalisme Protestan" adalah upaya misionaris Kristen dengan semboyan, "Cintailah sesamamu manusia," dalam meliput dan menyiarkan informasi. Cirinya, menyebarluaskan informasi tentang Kalam Allah serta ajaran Yesus Kristus. Ia berusaha memengaruhi khalayaknya agar berperilaku sesuai ajaran Kristus.

Menempelkan semboyan kepada kata "jurnalisme" bukanlah pekerjaan sulit. Namun ia akan menciptakan masalah banyak. Siapa yang berhak menilai sebuah karya itu Islami atau Kristiani?

Ukuran dalam agama itu kan bisa senantiasa diperdebatkan? Para "pakar nasional" itu mengatakan "jurnalisme Islami" ini memperjuangkan keadilan, kesejahteraan orang banyak dan sebagainya. Emangnya wartawan tidak memperjuangkan kepentingan publik? Apakah kalau seorang wartawan pakai label "jurnalisme Islami," maka otomatis tingkah-lakunya jadi beres, suci dan bebas dosa? Emangnya dia dijamin takkan terima amplop? Emangnya dia dijamin tak akan masuk tim sukses para politisi?

Suatu genre dalam jurnalisme bisa diakui sebagai gerakan baru bila orang-orang yang mempromosikannya bisa menerangkan seperangkat metode, yang lebih *advanced* dari metode sebelumnya, tanpa melawan elemen-elemen klasik dalam jurnalisme.

Misalnya, *investigative reporting* diakui sebagai jurnalisme karena metode kerjanya lebih *advanced* dari liputan sehari-hari. Atau *narrative reporting* dianggap *advanced* karena ia memperkuat elemen jurnalisme di mana jurnalisme harus menarik dan relevan. Investigasi terkait dengan elemen jurnalisme di mana wartawan diperlukan untuk memantau kekuasaan.

Kalau Anda diminta untuk bikin paper soal "jurnalisme Islami," saya kira, perlu bilang dulu dengan dosen Anda soal definisi-definisi yang kacau-balau itu.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Kalau begitu bagaimana dengan berbagai macam pertemuan wartawan dengan slogan agama? Sederhana saja. Pertemuan itu lebih untuk keperluan menggalang kerjasama, katakanlah, sesama media yang memperhitungkan audiens agama sebagai target mereka. Ini sih biasa dan sah. Menjalin kerjasama sesama media Islam, sesama media Buddha, Katolik dan sebagainya, tak berarti menciptakan genre baru dalam jurnalisme.

Namun upaya-upaya ngawur menciptakan istilah "jurnalisme Islami" hanya akan merugikan kepentingan dan makna dari "jurnalisme" maupun "Islam." Ini akan memancing debat kusir berkepanjangan. Islam yang mana? Masak Islam dibilang propaganda?

Upaya ini mirip dengan upaya Departemen Penerangan menciptakan istilah "jurnalisme Pancasila" zaman Orde Baru dulu. Mereka mengatakan genre ini khas Indonesia. Pedomannya, Undang-undang Dasar 1945, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini, syukurlah, orang sudah tak bicara lagi soal semboyan ciptaan Menteri Penerangan Harmoko tersebut.

Anda mungkin tidak mengalami kerja sebagai wartawan pada zaman Orde Baru. Zaman itu repotnya setengah mati. Zaman itu, kalau orang mempertanyakan "jurnalisme Pancasila," aduh, bisa masuk penjara. Kini, jangan-jangan orang bisa dituduh menghina Islam bila bilang, "jurnalisme Islami" itu mengada-ada.

Jadi, sudahlah enggak usah repot-repot bikin paper soal "jurnalisme Islami." Orang Madura bilang, *"Ndek lakona."* Kayak enggak punya kerjaan saja. Ini menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang tak ada. *Sekelangkong*.

Jakarta, 2007

http://pustaka-indo.blogspot.com

Jurnalisme Warga (Gereja)

HASUDUNGAN SIRAIT MUDAH dikenali dengan kumis baplang ala Joseph Stalin. Namun nada bicaranya lembut. Celananya, warna krem model pendaki gunung dengan banyak kantong. Kesannya, bergaya anak muda.

Suatu siang September lalu, saya menemui Sirait di kedai kopi Starbucks di Plaza Semanggi, untuk bicara soal kegiatannya dua tahun terakhir ini. Sirait beberapa kali membantu Yayasan Komunikasi Massa (Yakoma) PGI melatih para pekerja media gereja. PGI singkatan dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Ia organisasi payung 86 gereja-gereja Protestan di Indonesia sejak berdiri Mei 1950. Saya ingin tahu bagaimana Sirait memandang media komunitas gereja-gereja ini?

Dia memesan kopi. Saya mengambil teh hijau.

"Aku latar belakang HKBP," katanya.

Huria Kristen Batak Protestan, atau HKBP, adalah gereja dengan sekitar 3 juta anggota. Ini menjadikan HKBP sebagai gereja terbesar, bukan saja di Indonesia, namun juga di Asia Tenggara. Mayoritas anggotanya, tentu saja, orang Batak. Pusatnya ada di Pearaja, sebuah desa di Kabupaten Tapanuli Utara.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Sirait menambahkan dia juga pernah memberi pelatihan berbagai media pesantren di Pulau Jawa. Institut Studi Arus Informasi, sebuah organisasi nirlaba Jakarta, pernah minta Sirait membantu pelatihan media pesantren, "Aku (dulu) lebih akrab dengan pesantren daripada gereja."

Ketika Yakoma PGI minta dia ikut melatih media gereja, Sirait minta waktu untuk mempelajari beberapa penerbitan gereja. "Setelah Tobelo dan Batam, baru pemahaman aku lebih komprehensif," katanya.

Tobelo, sebuah kota di Pulau Halmahera, didatangi Sirait ketika Yakoma PGI mengadakan lokakarya media gereja, 24 – 28 April 2007. Dia juga bicara dalam acara pelatihan yang diadakan Gereja Batak Kristen Protestan, di Pulau Batam, 25 – 29 Juni 2007. Agustus lalu, Sirait ikut jadi instruktur semiloka "media rakyat" di Manado.

Saya mulai mengenal Hasudungan Sirait ketika rezim Presiden Soeharto membredel mingguan *Detik*, *Editor* dan *Tempo* pada Juni 1994. Kami sama-sama protes pembredelan tersebut. Kami juga sama-sama ikut menandatangani Deklarasi Sirnagalih, pada 7 Agustus 1994, guna mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sebuah serikat wartawan untuk melawan sensor media.

Waktu itu ada peraturan bahwa satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah Indonesia adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ikut meneken Deklarasi Sirnagalih berarti melanggar hukum. Departemen Penerangan dan PWI minta polisi menindak anggota-anggota AJI. Ada empat kawan kami masuk penjara: Ahmad Taufik, Danang K. Wardoyo, Eko Maryadi dan Tri Agus Siswowiharjo.

Sirait dipecat dari PWI. Dia juga kehilangan pekerjaan dari *Bisnis Indonesia*. Dia lantas bekerja untuk mingguan *D&R* selama tiga tahun, secara anonim. AJI baru bisa bergerak di atas tanah sesudah Presiden Soeharto mundur dari tahta pada Mei 1998.

Empatbelas tahun berlalu, Sirait kini lebih sering jadi instruktur wartawan. Dia tinggal di Bogor, sudah menikah dengan dua anak, serta belakangan merintis majalah bulanan etnik Batak bernama *Tatap*.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Sirait seorang *trainer* yang baik. "Wartawan berkualitas," kata Jufri Simorangkir dari *Suara GKPI*, bulanan milik Gereja Kristen Protestan Indonesia, yang berpusat di Pematang Siantar. Pendeta Simorangkir mengenal Sirait ketika ikut program di Batam.

Menurut Hasudungan Sirait, persoalan utama media gereja-gereja Protestan di Indonesia, baik di sebelah barat (Jawa dan Sumatera) maupun timur (Sulawesi, Sangir, Talaud, Halmahera, Ambon, Sumba dan sebagainya) adalah kekurangan perhatian dari para pemimpin sinode.

"Pengurus media pesantren hebat, sumber daya manusia berlapis-lapis, training lebih sering diadakan di kalangan pesantren. Yang bisa menyamai teman-teman Muslim hanya media Katolik," kata Sirait.

"Kecenderungan sinode (gereja Protestan) gagah-gagahan bikin media."

Namun alokasi biaya sedikit, tidak ada tim khusus, tidak ada *guidance*. "Kalau terbit ya sekali setahun atau dua kali."

Isi media gereja-gereja Protestan, cenderung masih hanya khotbah, peletakan batu pertama atau seremoni gereja. Dari segi tata-letak, umumnya tidak menarik. Kebanyakan media gereja sangat tergantung hanya pada kerajinan dan ketekunan pengurus media itu sendiri. "Kalau yang ngurus rajin, ya sering terbit, kalau tidak, ya ngacak."

Banyak pengelola media gereja mengharapkan ada kebijakan khusus dari gereja agar media dikelola sungguh-sungguh. Namun ketika pengurus media bikin terobosan sendiri, mereka sering diveto oleh sinode.

Saya menelepon Greenhill Weol di Tomohon untuk minta masukannya soal media gereja di Minahasa. Weol redaktur budaya radio *Suara Minahasa*. Tomohon adalah ibukota intelektual Minahasa. Markas besar Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM), gereja terbesar di Pulau Sulawesi, juga terletak di Tomohon. Radio *Suara Minahasa* dikelola Yayasan Suara Nurani pimpinan Bert A. Supit, cendekiawan Minahasa yang dulu juga mengurus GMIM.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Weol mengatakan di Minahasa, GMIM juga punya beberapa penerbitan namun kadang-kadang terbit, kadang-kadang tidak. "Dana ada kalau ada proyek politik," kata Weol. Maksudnya, bila ada politikus Minahasa lagi kampanye, dia bisa memberikan dana kepada penerbitan gereja. "Asal ada tiga atau lima fotonya dimuat," kata Weol. Politisi Minahasa, tentu saja, suka berdekatan dengan GMIM.

Pendeta Jufri Simorangkir cerita pada Februari 2006, dia ditunjuk sinode Gereja Kristen Protestan Indonesia menyunting *Suara GKPI*. "Dua tahun saya mengelola majalah ini sendirian. Saya yang mengetik. Saya yang ambil foto. Saya yang antar ke percetakan. Saya yang distribusi." Tebal majalah antara 90 hingga 112 halaman.

Setiap bulan, Simorangkir mengambil hasil cetakan majalah di Medan. Dalam perjalanan pulang Medan-Pematang Siantar, biasa ditempuh tiga jam, Simorangkir dan seorang sopir mengantar 1.200 dari 3.000 *Suara GKPI* ke berbagai jemaat GKPI.

Menariknya, ketika ditunjuk mengelola *Suara GKPI*, Simorangkir bahkan belum kenal komputer. "Modal kosong semua!" katanya. Dia harus belajar mengetik. Pelatihan Yakoma PGI, yang diikutinya di Batam, dinilainya sangat berguna. Dia belajar bahwa ruang redaksi dan usaha harus dipisah. Kini *Suara GKPI* sudah mendapat tambahan seorang karyawan. Simorangkir juga tidak menambah materi khotbah di *Suara GKPI*. Bahkan majalahnya kini sudah ada cerita pendek, humor dan banyak berita.

Simorangkir memuji majalah milik Gereja Batak Karo Protestan dan Gereja Kristen Protestan Simalungun, "Mereka sudah lebih terbuka. Iklan-iklan sudah masuk."

Saya tanya Hasudungan Sirait, dari pengalamannya melatih media gereja, media mana saja yang tergolong baik?

"Yang paling baik GKJW Malang," jawabnya.

"Rapih sekali mereka."

Gereja Kristen Jawi Wetan, adalah gereja Jawa-timuran dengan pusat kota Malang. Mayoritas anggotanya, tentu saja, orang Jawa. Sinode gereja ini didirikan pada Desember 1931. Kini anggotanya

http://pustaka-indo.blogspot.com

sekitar 150.000 orang. Jumlah ini sangat kecil bila diingat Jawa Timur adalah basis Nahdlatul Ulama. Total populasi Provinsi Jawa Timur sekitar 34,5 juta dan sekitar 96 persen warga Muslim.

Sirait mengatakan ketika membaca *Warta GKJW*, dia merasa pengelolanya terlihat berupaya serius melibatkan umat. Ada lembaran remaja, ada lembar orangtua, ada berita perkembangan di kitaran warga. Jufri Simorangkir juga setuju dengan kesimpulan Sirait. Simorangkir menyebut *Warta GKJW* mirip "majalah sekuler" …. walau 80 persen isinya "soal rohani."

Di kalangan HKBP sendiri, menurut Sirait, ada majalah *Immanuel* yang sudah berumur 120 tahun dan terbit dari Peuraja. Majalah bulanan ini terbit terus-menerus, tidak terganggu, dulu format kecil, kini format majalah. "Cuma isinya sabda pendeta semua."

"Sayang!"

"Pengasuhnya pendeta semua."

Saya mengalami kesulitan menghubungi Siman P. Hutahean, pendeta yang merangkap pemimpin redaksi *Immanuel*. Saya hubungi lebih dari 10 kali lewat telepon HKBP Peuraja, namun tak berhasil. Hutahean termasuk pendeta yang ikut acara Yakoma PGI di Batam.

Kalau format *Immanuel* tidak bisa ditawar, Sirait usul HKBP bikin *outlet* yang lebih interaktif, untuk remaja, anak-anak dan dewasa. Dunia media sudah berubah. Kini sudah ada televisi, internet, radio komunitas, blog, You Tube, Facebook dan macam-macam. Namun mayoritas media gereja masih bergulat dengan majalah. Media gereja kurang dalam banyak hal. "Cari duit enggak susah, cari orang yang susah. (Media) Katolik jauh lebih baik," katanya.

Media gereja Protestan juga kurang berkembang karena ada kekhawatiran di kalangan sinode, media bisa jadi bumerang. "Takut disasar. Padahal tidak juga," kata Sirait.

Dampaknya, ada kesenjangan informasi antara gereja dan umat. Umat sangat dinamis, dapat informasi dari mana-mana. "Itu tidak bisa diimbangi gereja. Paradigma gereja tidak berubah. Mereka cenderung menapis, semacam pakai kacamata kuda."

http://pustaka-indo.blogspot.com

Kalau informasi umum juga ada di media gereja, maka gereja bisa memberitahu soal, misalnya, mengapa harga-harga bahan pangan naik atau mengapa banyak korupsi. "Gereja enggak hanya isinya khotbah soal keselamatan," kata Sirait.

Dia berpendapat media gereja seharusnya jadi media komunitas, "Dari kita, untuk kita. Bagaimana antara jemaat gereja bisa *sharing* pengalaman? Itu tidak mereka dapatkan dari *Kompas* atau *Suara Pembaruan* atau *Suara Merdeka*."

Pukul dua siang, Hasudungan Sirait bilang mau pulang agar bisa tepat waktu untuk "memandikan anak." Saya tersenyum. Si kumis baplang ini bahagia sekali bisa memandikan anak-anaknya setiap sore. Kami meninggalkan Plaza Semanggi.

PADA AWAL JULI 2008, selama empat hari saya jadi instruktur sebuah pelatihan situs web *Panyingkul.com* di Makassar. Kata "panyingkul" dalam bahasa Makassar artinya "persikuan" atau "pertigaan." Panyingkul sebuah media nirlaba, yang mengusung *citizen journalism* atau "jurnalisme orang biasa."

Pesertanya ada 11 orang. Pelatihan diadakan di Biblioholic, sebuah perpustakaan publik di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 9. Perpustakaan ini terletak dalam sebuah rumah besar yang disewa Matsui Kazuhisa, konsultan Japan International Cooperation Agency. Matsui meminjamkan ruang tamu serta lantai dua rumah ini untuk kegiatan anak-anak muda. Siang-malam, selalu ada anak muda berkumpul.

Panyingkul.com menyebut para wartawannya sebagai "citizen reporter." Sengaja dalam bahasa Inggris, sesuai terminologi aslinya dari *Oh My News*, sebuah situs web dari Korea Selatan, agar tak timbul salah paham. Lily Yulianti, redaktur *Panyingkul*, mengatakan rekan-rekannya dari *Oh My News International* di Norwegia, Israel maupun Brazil, juga tak menerjemahkan "citizen reporter" ke bahasa masing-masing. Mereka tetap pakai istilah "citizen reporter."

http://pustaka-indo.blogspot.com

Lily kini bekerja sebagai wartawan radio *NHK* di Tokyo. Dia dulu pernah bekerja untuk harian *Kompas* dari Makassar.

Panyingkul adalah sebuah fenomena penting dalam jurnalisme di Makassar. Tujuan mereka melawan dominasi media *mainstream* yang meletakkan loyalitas terhadap warga lebih rendah daripada loyalitas kepada pemilik media, penguasa maupun pemasang iklan. Lily rajin melancarkan kritik terhadap media Makassar macam harian *Fajar* maupun *Tribun Timur*.

Selama empat hari, kami belajar dengan macam-macam contoh. Saya mengajak peserta diskusi soal-soal dasar dalam jurnalisme. Bagaimana bikin wawancara? Bagaimana merekam dan menulis deskripsi? Bagaimana menggunakan monolog dan dialog? Kami juga membaca beberapa naskah, termasuk "Kejarlah Daku Kau Kusekolahkan" karya Alfian Hamzah, maupun "Hiroshima" karya John Hersey. Kami juga menonton dokumentasi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Para peserta punya *background* macam-macam. Ada arkeolog, ada pelaut, ada peneliti. Beberapa mahasiswa juga ikutan. Ketika memeriksa pekerjaan rumah mereka, saya senang melihat kecepatan mereka menangkap materi latihan.

Saya bertanya-tanya mengapa media gereja tak mencoba mengarah pada *citizen journalism* macam *Panyingkul.com*?

Panyingkul.com maupun *Warta GKJW* sama-sama media komunitas. Satu melayani komunitas Makassar. Satunya melayani komunitas gereja Jawa Timur. Mereka dipersatukan oleh semangat melayani warga masing-masing lewat jurnalisme.

Singkat kata, kebanyakan media, dari *Immanuel* hingga *Suara Pembaruan*, dari *BBC World Service* hingga *Al Jazeera*, melayani komunitas sesuai khayalan mereka masing-masing. Internet membuat batas khayalan menjadi lebih terbuka. Internet membuat semua orang, yang mengerti bahasa media terkait, secara teoritis bisa membaca apa isi media tersebut. Media gereja teoritis bisa mengembangkan diri lewat *citizen journalism* dengan melibatkan warga-warga gereja ikut mengisi media mereka.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Namun Pendeta Jufri Simorangkir memberi tanggapan, "Kelemahan majalah gereja adalah dia jadi corong pimpinan."

Saya kira pernyataan Simorangkir, maupun kritik Sirait, mengingatkan saya bahwa media gereja kebanyakan belum menjalankan jurnalisme. Ia lebih tepat dikategorikan sebagai *public relation* atau propaganda. Boro-boro bicara soal *citizen journalism*. Jurnalisme biasa pun belum berjalan.

Media gereja seharusnya bekerja berdasar prinsip-prinsip jurnalisme umum. Bukan berdasarkan pada teologi Kristen. Bukan berdasar pula pada pendekatan gothak-gathok "jurnalisme Kristiani." Media gereja seyogyanya dipikirkan lebih luas untuk kepentingan umat. Ia lebih baik diletakkan secara independen dari struktur sinode. Para redakturnya tidak ikut duduk dalam kepengurusan sinode.

Namun saya juga sadar bahwa tidak semua orang, termasuk pengelola media gereja, bisa punya pemahaman serius terhadap suatu isu, apalagi banyak isu. Ini juga terjadi dalam dunia wartawan *mainstream*. Namun inilah tantangan rutin setiap wartawan, profesional maupun amatir, dalam memahami suatu isu dan menuliskannya. Para pemimpin sinode sudah selayaknya mulai belajar memahami jurnalisme dan mengubah cara pandang mereka terhadap media gereja. Propaganda sebaiknya diubah jadi jurnalisme.

Lantas apakah jurnalisme itu?

Pada April 2001, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dua wartawan Washington D.C., menerbitkan buku *The Elements of Journalism*. Mereka menyajikan sembilan elemen jurnalisme. Buku ini segera dianggap referensi penting para wartawan. Ia diterjemahkan ke puluhan bahasa lain, termasuk Bahasa Melayu, dan dijadikan pegangan banyak ruang redaksi. Dari *Kompas*, *The Jakarta Post*, *Tempo*, *Republika*, *Jawa Pos* dan sebagainya. Pada 2007, Kovach dan Rosenstiel menerbitkan edisi revisi di mana mereka menambahkan elemen kesepuluh khusus soal hak dan tanggungjawab warga.

Elemen kesepuluh muncul karena apa yang disebut Lily Yulianti sebagai *citizen journalism*. Intinya, warga punya hak dan kewajiban

http://pustaka-indo.blogspot.com

ikut berpartisipasi dalam mencari, melaporkan, menganalisis dan menyebarluaskan informasi. Elemen kesepuluh muncul, tentu saja, disebabkan oleh teknologi internet: blog, kamera telepon, You Tube, Facebook dan sebagainya. Ia membuat warga bisa berperan secara lebih luas dalam jurnalisme. *Panyingkul.com* membuktikan bahwa warga biasa, kebanyakan non-wartawan, bisa mengelola situs web, yang hendak menandingi media *mainstream* di Makassar.

Saya kira media gereja sulit menghindar dari tren ini. Cepat atau lambat, bila gereja mau tetap relevan, mereka harus membuka pintu terhadap "citizen reporter." Blog akan jadi ujung tombak perubahan. Saya mulai memperhatikan banyak sekali anak-anak muda Kristen bicara soal Tuhan lewat blog. Media gereja bisa berkembang dengan melakukan kolaborasi lewat blogger.

Priambodo RH dari Lembaga Pers Dr. Soetomo mengatakan, Agustus 2008 ada sekitar 650 ribu blog di Indonesia. Jumlahnya akan meningkat seiring meningkatnya penggunaan internet. "Perkembangan jurnalisme warga saat ini baru seumur kepompong, belum menjadi kupu-kupu. Karena itu untuk melahirkan jurnalisme warga yang indah dibutuhkan pembelajaran."

Namun banyak wartawan ragu apakah orang yang kurang terlatih dalam jurnalisme bisa menulis berita secara bertanggungjawab? Ada yang menyebut kehadiran internet menciptakan "tsunami informasi." Isinya, kebanyakan *copy-paste* dan sampah.

Priambodo membuat 10 panduan bagi "citizen reporter." Mereka tidak boleh melakukan plagiat; harus cek dan ricek fakta; jangan menggunakan sumber anonim; perhatikan dan peduli hukum; utarakan rahasia secara hati-hati; hati-hati dengan opini narasumber; pelajari batas daya ingatan orang; hindari konflik kepentingan; dilarang lakukan pelecehan; serta pertimbangkan setiap pendapat.

Saya percaya makin bermutu jurnalisme dalam suatu komunitas, maka makin bermutu pula informasi dalam komunitas itu. Maka makin bermutu pula komunitas tersebut. Saya juga percaya senantiasa ada orang macam Hasudungan Sirait, yang tulus

http://pustaka-indo.blogspot.com

membantu para "citizen reporter" maupun media gereja untuk belajar jurnalisme dengan teratur.

"Benar sekali kritik Pak Hasudungan itu. Kalau GKPI punya orang macam Pak Hasudungan Sirait, pasti kami pakai orang berkualitas itu," kata Jufri Simorangkir.

Jakarta, 2008

http://pustaka-indo.blogspot.com

Pers, Sejarah dan Rasialisme

KALAU ANDA MEMPERHATIKAN harian *Jurnal Nasional* di Jakarta, Anda tak akan sulit melihat sebuah logo "Seabad Pers Nasional" di halaman depan. Di dalam Anda akan menemukan logo serupa dan sebuah kolom di mana setiap hari disajikan satu sosok media. Proyek ini diasuh Taufik Rahzen, redaktur *Jurnal Nasional* sekaligus pemimpin *Indexpress*, organisasi yang menangani riset proyek.

Menurut Rahzen, tahun 2007 adalah seabad pers nasional. Tarikh ini dihitung sejak *Medan Prijaji* terbit pertama kali pada Januari 1907. *Medan Prijaji* adalah "tapal dan sekaligus penanda pemula dan utama bagaimana semangat menyebarkan rasa mardika disemayamkan dalam dua tradisi sekaligus: pemberitaan dan advokasi." Dua kegiatan itu dilakukan oleh *hoofdredacteur*-nya Tirto Adhi Soerjo.

Jurnal Nasional menghadirkan 365 koran, yang mereka anggap ikut membangun nasionalisme Indonesia. Hitungannya, antara 1 Januari hingga 31 Desember 2007, ada 365 hari.

Saya berpendapat ada 150 tahun sejarah sebelum *Medan Prijaji*, yang harus diperhitungkan siapapun yang hendak bikin ulasan sejarah media. Kalau mau mencari data siapa yang terbit lebih awal, tanpa memberi label "pribumi" atau "Indonesia," Abdurrachman

http://pustaka-indo.blogspot.com

Surjomihardjo dalam *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (1980) menyebut suratkabar *Bataviasche Nouvelles*, yang terbit 1744-1746, atau sekitar 150 tahun sebelum *Medan Prijaji*, sebagai penerbitan pertama di Batavia.

Mengapa patokannya bukan 1744? Mungkinkah karena ia diterbitkan dalam bahasa Belanda? Kalau patokannya bahasa Melayu, Claudine Salmon dalam *Literature in Malay by the Chinese of Indonesia: A Provisional Annotated Bibliography* (1981), menyebut suratkabar-suratkabar berbahasa Melayu, antara lain milik orang Tionghoa, misalnya *Soerat Chabar Betawie* (1858) atau sekitar 50 tahun sebelum *Medan Prijaji*? Suratkabar-suratkabar Tionghoa Melayu ini berperan dalam penyebaran bahasa Melayu di seluruh Hindia Belanda.

Atau mengapa bukan bahasa Jawa, misalnya, *Bromartani* (1865) yang terbit di Solo? Di luar Pulau Jawa, juga ada *Tjahaja Sijang* di Minahasa (1868) atau *Bintang Timoer* di Padang (1865). Kalau bicara soal pengaruh dan perjuangan melawan ketidakadilan, saya juga ingin mengingatkan kita pada Multatuli, yang mengarang buku *Max Havelaar* (1859). Mengapa semua diabaikan?

Saya mendapat jawabannya dari Agung Dwi Hartanto dari *Indexpress*, yang mewawancarai saya ketika hendak memasukkan *Pantau*, organisasi di mana saya bekerja, kepada 365 media tersebut. Agung menulis, "*Medan Prijaji* adalah pers yang sejak pertama terbit diawaki pribumi. Tirto Adhi Soerjo juga yang mendirikan N.V. Medan Prijaji."

Tjahaja Sijang, menurut Agung, diabaikan karena "… sebelum diawaki pribumi menjadi milik zending Belanda. Demikian juga dengan *Soerat Chabar Betawi*. Koran ini bukan milik pribumi."

Saya bikin riset lagi. Saya menemukan Taufik Rahzen juga memakai kriteria "pribumi" dalam sebuah kolom di *Jurnal Nasional*. Rahzen menulis, "Salah satu penanda penting dari menyingsingnya fajar nasionalisme adalah tumbuh-kembangnya pers pribumi …" Rahzen menganggap "… indikator dimulainya kebangkitan nasional,

http://pustaka-indo.blogspot.com

tumbuhnya pers-pers pribumi, yang diterbitkan oleh pribumi, yang mengangkat berita dan persoalan riil yang pribumi …"

Saya rasa ada *racial tone* dalam proyek *Indexpress*. Saya menganggap tak ada masalah dengan memilih Tirto Adhi Soerjo. Dia penerbit yang berani melawan ketidakadilan pada zaman Hindia Belanda. Pengarang Pramoedya Ananta Toer sudah menulis soal Tirto Adhi Soerjo dalam buku *Sang Pemula* (1985) maupun *Tempoe Doeloe* (1982).

Namun penelitian *Indexpress* ini bermasalah ketika mengabaikan para penulis lain dengan dasar Tirto dan *Medan Prijaji* adalah "pribumi." Dasar pemilihan ini bisa mengarah pada rasialisme. Pada 1907, "Indonesia" belum ada dan slogan *Medan Prijaji* juga masih memakai nama Hindia Belanda. Pramoedya menulis soal Tirto dengan kedekatan emosional. Tirto dan Pramoedya sama-sama kelahiran Blora.

Benedict Anderson dalam pengantar buku *Indonesia dalem Api dan Bara* (2004), menulis bahwa pada awal abad XX, "Koran mulai tumbuh di ampir setiap kota jang berarti, mirip tjendawan dimusim hudjan. Timbullah djagoan2 masa media pertama di Hindia Belanda, termasuk diantaranya Mas Tirto, F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, Marah Sutan, G. Francis, Soewardi Soerjadingrat, ter Haar, Mas Marco, Kwee Kek Beng, dan J.H. end F.D.J Pangemanann pakai dua 'n'."

"Timbul djuga djago2 pers Belanda, termasuk Zengraaff, jang dengan keras membela pengusaha swasta sampai ditakutin pemerintah kolonial sendiri, dan D.W. Beretty, seorang Indo keturunan Italia–Djawa Jogja, jang selain mendirikan persbiro pertama di Hindia Belanda—*Aneta*, Pakdenja *Antara*—djuga menerbitkan madjalah radikal-kanan, berdjudul *De Zweep* (Tjamboek)."

Anderson menulis adanya keragaman dunia media yang mulai tumbuh subur pada awal abad XX. Kriteria "pribumi" untuk suasana macam itu akan menimbulkan dampak yang tidak tepat. Bila kriteria "pribumi" ini dipakai untuk menerangkan suratkabar dan

http://pustaka-indo.blogspot.com

"kebangsaan" Indonesia, sebelum dan sesudah *Medan Prijaji*, bisa kacau-balau penelitian ini.

Sekadar contoh. Kalau Anda perhatikan tesis Daniel Dhakidae di Universitas Cornell, Anda akan membaca setidaknya tiga suratkabar sekarang—*Kompas, Sinar Harapan* dan *Tempo*—yang punya cikal bakal "non-pribumi." Harian *Djawa Pos* di Surabaya didirikan The Chung Sen, seorang penerbit Tionghoa, pada 1949 sebelum dibeli PT Grafiti Pers, yang memiliki saham *Tempo*, pada 1982. Bagaimana sebuah isu tentang Indonesia dilakukan tanpa memasukkan *Kompas, Sinar Harapan* dan *Tempo*?

Tjahaja Sijang di Minahasa, sebelum diawaki "pribumi," memang milik Nederlandsch Zendeling Genootschap, sebuah lembaga zending Belanda. Namun NZG adalah lembaga yang melahirkan Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan kebaikan dan jasa sangat besar di bidang pendidikan dan kebudayaan. Saya kira mengabaikan *Tjahaja Sijang*, dengan alasan ia milik "non-pribumi," akan membuat wartawan di Minahasa bertanya-tanya.

Contoh lain. Harian *Flores Pos* (1999) terbitan Ende, yang dipilih *Indexpress*, juga milik Societas Verbi Divini (SVD), sebuah organisasi Katolik dengan pusat di Roma. SVD adalah organisasi multinasional. Bisa jungkir-balik *Indexpress* kalau mau dicari SVD pribumi mana. Cikal bakal *Flores Pos* adalah majalah *Bintang Timoer* (1928) dan dwimingguan *Bentara* (1948), yang juga punya komponen "non-pribumi."

Lantas apa sih kriteria pribumi? Kalau kategori "pribumi" juga dipakai di Papua, bagaimana Taufik Rahzen memandang Eri Sutrisno? Dia orang Jawa, sekarang pemimpin redaksi mingguan *Suara Perempuan Papua*, suratkabar bermutu di Jayapura. Namun di Papua, Eri Sutrisno dianggap bukan penduduk asli. Bagaimana menyusun logika "pribumi" *Indexpress* terhadap orang Jawa, yang berjasa untuk jurnalisme di Papua, namun secara umum dianggap bukan pribumi Papua?

Kalau kriteria pribumi diletakkan di Timor Leste, negara yang baru meraih kedaulatannya, saya kira Rahzen juga akan jungkir-

http://pustaka-indo.blogspot.com

balik. Irawan Saptono, orang Jawa warga Indonesia, lama bekerja di harian *Suara Timor Timur* pada zaman pendudukan Indonesia. Kini Timor Lorosae sudah merdeka. Irawan juga kembali ke Jakarta. Apakah Irawan tak berjasa dalam pengembangan jurnalisme di Dili?

Saya melihat sendiri kerja keras dan keberanian Irawan membela orang-orang Timor dari tentara Indonesia sehingga dia harus lari dari Dili. Irawan bekerja untuk melayani masyarakat Dili dengan informasi tanpa ribut soal "kebangsaan" Timor Leste. Tidakkah ini tindakan terpuji? Bagaimana perasaan Irawan Saptono bila namanya dihilangkan begitu saja dari sejarah Timor Lorosae?

Tidakkah keadaan ini bisa menjelaskan bahwa orang-orang macam F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, G. Franscis, Multatuli, ter Haar, Kwee Kek Beng, J.H. Pangemanann, F.D.J Pangemanann dan sebagainya juga, bekerja keras menyampaikan kebenaran kepada pembaca mereka, sama dengan Tirto. Mereka tak bisa diabaikan dengan mengambil *Medan Prijaji* sebagai tonggak media yang menyuarakan "kebangsaan" Indonesia.

Ide soal *nation-state* juga bukan pribumi di Hindia Belanda. Ide ini mulanya berkembang di Perancis dan Amerika Serikat lebih dari 200 tahun lalu. Ide ini menyebar tanpa mengenal batas kerajaan, etnik, agama maupun lautan. Ia juga mendarat di Hindia Belanda dengan segala macam tafsir dan variasi. Kalau tiba-tiba ide soal nasionalisme ini "dipribumikan" ala *Indexpress*, saya khawatir, mereka kini sedang memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat.

Pramoedya Ananta Toer menulis dalam *Sang Pemula* bahwa guru Tirto dalam jurnalisme adalah Karel Wijbrands, warga Perancis, kelahiran Amsterdam dan meninggal di Batavia pada 1929. Tirto patuh dan hormat pada Wijbrands. Tirto juga bekerja bersama dengan F.D.J. Pangemanann, orang Minahasa. Tirto juga bekerja dengan F. Wiggers. Tirto menghormati tradisi Wiggers, yang menghargai dan menghormati golongan Tionghoa. Saya merasa Tirto, yang kritis dan "kiri", jadi "kanan" di tangan *Indexpress*. Tirto juga termasuk anak emas Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Saya berpendapat *Indexpress* salah memakai kriteria "pribumi." Kelak 100 tahun lagi, kalau kriteria ini konsisten dipakai terhadap *Pantau*, maka *Pantau* akan diabaikan karena ada "non-pribumi" dalam komunitas ini. Saya seorang "non-pribumi." Dan orang "non-pribumi" ini juga ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen maupun Institut Studi Arus Informasi, dua organisasi yang mengusahakan kebebasan pers pada zaman Presiden Soeharto. Kelak AJI dan ISAI juga bisa diabaikan.

Taufik Rahzen juga ketua Yayasan Blora Institute, lembaga yang punya sejarah dalam kampanye kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rahzen ikut mendirikan SBY Fans Club. *Jurnal Nasional* sendiri dikenal sebagai corong suara Presiden Yudhoyono. Setiap hari hampir selalu Yudhoyono muncul di halaman satu. Saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang politikus, yang dekat dengan Yudhoyono, bisa bikin proyek macam ini?

Jakarta, 2007

http://pustaka-indo.blogspot.com

Beasiswa untuk Wartawan

AKHIR NOVEMBER LALU saya bertemu seorang wartawan Hong Kong yang bekerja di Singapura. Dia mengajak makan malam dan bertanya apa untungnya mendapatkan beasiswa di Amerika Serikat. Ketemunya di sebuah café di Harvard Square, di pusat kota Cambridge.

Saya jawab kalau enaknya mungkin tidak perlu dikatakan. Banyak sekali. Tapi justru tidak enaknya yang perlu didaftar. Dia tertawa. Calon istrinya juga tersipu-sipu. Kami memesan makan malam kami. John Harvard Café mulai penuh dengan orang.

"Apa tidak enaknya?" ujar wartawan ini.

Mungkin yang paling tidak enak adalah pertanyaan apakah kita bisa dengan mudah beradaptasi dengan tempat di mana kita bekerja kelak setelah pulang ke tanah air? Jangan-jangan kita malah jadi tukang bikin onar. Setelah sekolah setahun di tempat yang serba wah, mungkin kita bakal punya anggapan bahwa nilai-nilai yang dulu kita anggap biasa, sekarang sulit untuk diterima orang lain. Sederhananya, kita bisa kehilangan orientasi, kita bisa salah menilai diri kita sendiri.

Seorang wartawan senior di Jakarta mengatakan kita bisa jadi *"spoiled brat"*—seorang anak yang manja dan kepribadiannya tidak menyenangkan. "Kalau Anda pikir bahwa lembaga Anda akan menghargai waktu yang Anda investasikan di sini dan menghargai

http://pustaka-indo.blogspot.com

Anda, saya khawatir Anda salah," ujar Chris Hedges dari *The New York Times*.

Bukan itu saja. Beasiswa buat wartawan juga bisa menimbulkan ketegangan dalam perkawinan sang penerimanya. Logikanya sederhana. Sang wartawan sekolah lagi, ikut seminar, bertemu profesor, baca buku, mengasah otak, sementara si istri atau si pacar mungkin harus meninggalkan kariernya, lalu sibuk mengurus anak, memasak, tinggal di apartemen yang sempit dan hidup dengan dana terbatas. Hidup tidak senyaman di Indonesia.

Saya beri contoh pada program yang saya ikuti. Pada dekade-dekade awal berdirinya Nieman Fellowship, program beasiswa ini bukan saja meningkatkan mutu para pesertanya tapi juga menghasilkan banyak perceraian. Pilihannya memang sulit. Keluarga ditinggal di rumah susah. Dibawa sekolah juga susah.

Namun Nieman Foundation memperbaiki diri dalam sepuluh tahun terakhir ini dengan melibatkan para istri atau suami. Semua program untuk peserta dinyatakan terbuka buat pasangan mereka. Para istri juga diberi kartu perpustakaan untuk meminjam buku dari perpustakaan raksasa Harvard.

Namun enaknya juga banyak. Umumnya program-program beasiswa buat wartawan yang diberikan di Amerika Serikat menekankan unsur *human development*. Mulai dari Nieman Fellowship di Harvard hingga Knight Fellowship di Universitas Stanford, dari yang tidak pakai gelar hingga yang bergelar, dari yang empat bulan hingga yang setahun—tujuannya sama: membuat wartawan menjadi wartawan yang lebih baik.

Nieman, Knight dan Michigan Journalism Fellowship memberikan kebebasan kepada *fellow* mereka untuk ikut kuliah dua semester di universitas masing-masing. Kuliah didesain sesuai kebutuhan peserta. Yang suka masalah politik bisa kuliah pemerintahan. Tapi ada juga jurusan hukum, kedokteran, ekonomi, seni, biologi, filsafat dan lain-lain.

Di Cambridge, kami setiap minggu sekali wajib mengikuti diskusi internal tentang jurnalisme di Nieman Foundation. Peserta

http://pustaka-indo.blogspot.com

merasa banyak belajar mengenai jurnalisme justru lewat diskusi-diskusi ini. Kemampuan mereka untuk membedakan mana yang adil, mana yang benar, mana yang etis dan mana yang berita, digenjot dan dipertajam setiap minggu oleh kurator Nieman Foundation, Bill Kovach. Dia selalu menekankan pentingnya menjaga integritas wartawan. Kovach mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai jurnalisme.

Indonesia butuh lebih banyak wartawan

Saya jelaskan kepada wartawan dari Singapura itu, alangkah baiknya, kalau lebih banyak wartawan Indonesia yang juga mau mencari beasiswa. Dalam era pasca-Presiden Soeharto, wartawan Indonesia tidak bisa terlalu mempertimbangkan faktor tidak enak. Kebebasan pers di Indonesia perlu cepat-cepat diperkuat antara lain dengan mengembangkan kemampuan jurnalisme dan memperbanyak jumlah wartawan yang memperdalam ilmunya.

Dalam dua tahun ini di Indonesia mungkin ada lebih dari 1.000 penerbitan baru. Radio-radio berlomba-lomba bikin berita. Televisi sedang menambah jumlah stasiunnya. Pemain baru juga muncul lewat internet. Lapangan kerja tercipta dengan cepat. Industri media bergeliat dengan penuh gairah.

Tapi sumber daya manusia di bidang media sangat terbatas. Banyak media baru tapi sedikit wartawan. Redaktur juga banyak yang tidak memenuhi syarat. Lembaga pendidikan kurang siap. Di Indonesia hanya ada beberapa perguruan tinggi yang punya jurusan jurnalisme, sebut saja Universitas Pajajaran Bandung, IISIP Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Massa Surabaya.

Dibandingkan negara-negara Asia lainnya, wartawan Jakarta juga termasuk ketinggalan dalam mencari beasiswa. Ambil contoh Nieman Foundation di Universitas Harvard. Indonesia sejak program ini berdiri 1938 hanya memiliki tiga alumni: Sabam Siagian (*The Jakarta Post*), Goenawan Mohamad (*Tempo*) dan Ratih Hardjono (*Kompas*).

http://pustaka-indo.blogspot.com

Coba kita bandingkan dengan Jepang (26), India (17) dan Tiongkok (14). Atau kalau mau dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih kecil: Korea Selatan (19), Filipina (11), Malaysia (4) dan Thailand (4). Indonesia hanya lebih tinggi dari Vietnam (2) dan Singapura (1).

Beasiswa ini macam-macam. Ada yang program satu tahun, ada yang pertukaran wartawan, ada hibah buat proyek tertentu, ada waktu buat menulis dan lain-lain. Syaratnya juga beda-beda. Untuk wartawan muda. Untuk paruh karier. Ada yang umum namun ada pula untuk wartawan spesialis: bisnis, lingkungan hidup, olahraga, kesehatan, ilmu pengetahuan dan lainnya. Di Amerika Serikat mungkin ada lebih dari 300 program beasiswa buat wartawan.

Bagaimana mendapatkannya?

Rekan dari Singapura itu bertanya bagaimana strategi mendapatkan beasiswa? Bagaimana cara membuat proposal? Mungkin untuk wartawan Indonesia di mana bahasa Inggris bukan merupakan bahasa ibu perlu ditambah dengan pertanyaan seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris diperlukan?

Boleh jadi pendekatan mendapatkan beasiswa yang baik sama dengan cara kita mendekati suatu berita. Kita tahu di luar kepala bahwa kita wajib memperhatikan unsur 5W 1H (*what, who, why, where, when, how*). Lebih banyak detail yang didapat lebih baik. Kalau seorang wartawan datang ke sebuah lokasi, dia diharapkan untuk memperhatikan dari jenis lantai hingga warna dinding lokasi tersebut. Keterangan waktu selalu dicek ulang. Ejaan nama jangan salah!

Mendapatkan beasiswa juga demikian. Kita harus tahu siapa yang terlibat dalam proses penyaringan? Siapa orang-orang yang bisa kita minta rekomendasi hingga orang-orang yang duduk dalam tim seleksi? Apa tujuan lembaga pendidikan tersebut mengeluarkan beasiswa? Bagaimana proses seleksinya? Dimana dan berapa lama beasiswa itu diberikan? Apa saja syarat-syarat? Buat yang muda atau buat yang paruh-karier?

http://pustaka-indo.blogspot.com

Bikin riset yang kuat. Pergunakan internet. Semua program buat wartawan, boleh percaya boleh tidak, bisa didapatkan syarat-syarat bahkan formulirnya lewat internet. Ada program yang tidak menyediakan dana buat para peserta. Tapi kebanyakan mereka membantu peserta yang lolos untuk mendapatkan dana. Besarnya antara US$ 25.000 hingga $ 60.000 setahun tergantung lokasi dan biaya hidup. Sediakan waktu yang cukup, katakanlah setahun, untuk mempersiapkan proposal.

Soal bahasa Inggris, Bill Kovach mengatakan bahwa kita toh tidak diharapkan menulis (secara profesional) dalam bahasa Inggris. Kovach bahkan tidak menganjurkan peserta Nieman untuk belajar bahasa apapun ketika mereka ada di Harvard. "Anda bisa belajar bahasa di mana pun tapi tidak semua kuliah di Harvard bisa Anda dapatkan di tempat lain," ujar Kovach.

Mungkin ukurannya adalah kemampuan kita untuk berdebat atau membuat laporan dalam bahasa Inggris. Atau setidaknya kita bisa mengerti kuliah profesor kita walaupun sedang mengantuk berat karena semalam begadang. Jangan lupa bahwa mayoritas teman kelas kita adalah orang Amerika dan mereka bicara bahasa Inggris sejak bayi!

Rekomendasi biasanya memainkan peran penting. Kalau Anda mendapatkan rekomendasi dari wartawan-wartawan Indonesia yang pada jaman Presiden Soeharto ikut bertanggungjawab atas penindasan pers, kemungkinan rekomendasi itu hanya berlaku untuk lembaga-lembaga pendidikan yang kurang begitu baik. Tapi kalau rekomendasi datang dari wartawan asing maupun Indonesia yang punya nama harum, setidaknya itu sudah menjadi bekal yang bagus agar lamaran Anda diperhatikan.

Tapi bagaimanapun bagusnya surat lamaran Anda, sebagai wartawan, kita harus ingat hukum penting dalam jurnalisme: *fairness*. Kita harus *fair* terhadap lembaga di mana kita melamar dan juga *fair* terhadap diri kita sendiri. Ada *self-respect* terhadap diri sendiri.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Ketika saya hendak mengirimkan lamaran, saya sempat diberitahu seorang rekan di Jakarta bahwa program-program yang saya incar di Amerika Serikat adalah *fellowship* buat wartawan-wartawan yang "lebih senior." Saya termasuk junior kalau dibanding Sabam Siagian, Goenawan Mohamad atau Ratih Hardjono. Sempat grogi juga.

Tapi saya putuskan untuk mempelajari usia atau karier alumni program-program tersebut. Ternyata dalam sejarah Nieman Fellowship ada seorang peserta yang umurnya baru 22 tahun! Saya jauh lebih tua dari peserta tersebut. Saya juga perhatikan peserta dari negara-negara lain. Ternyata banyak yang usia atau kariernya setara dengan saya.

Tak terasa sudah dua jam kami bicara. Sayap ayam-kecap kami lahap dengan cepat. Sebelum kami meninggalkan John Harvard Café, wartawan itu dengan hangat mengucapkan terima kasih. Dia merasa yakin bahwa dia memang harus mengejar beasiswa itu. Saya juga senang karena telah membantu. Mudah-mudahan saya juga bisa membantu wartawan-wartawan lain di Indonesia.

Di luar udara dingin sekali. Musim dingin mulai menggigit tulang.

Cambridge, 1999

http://pustaka-indo.blogspot.com

http://pustaka-indo.blogspot.com

http://pustaka-indo.blogspot.com

PENULISAN

http://pustaka-indo.blogspot.com

http://pustaka-indo.blogspot.com

Menulis Perlu Tahu dan Berani

Untuk Luh Putu Ernila Utami di Bali,

Aku tidak menulis makalah saat aku membawakan sesi soal menulis itu. Minggu lalu, aku mulanya mengira sesi itu akan dilakukan dengan format kecil, 10–15 orang, dengan diskusi hangat dan suasana temaram. Ternyata pesertanya 40-an orang dengan ruang besar, meja raksasa, kursi berlengan, serta kebisingan jalan tol.

Intinya, aku cuma mengajak para peserta, para aktivis itu, berpikir ulang soal bagaimana mereka bisa menulis yang menarik sekaligus mendalam.

Aku tahu banyak dari kalian punya pengalaman dahsyat. Dari bikin demonstrasi anti kabel listrik voltage tinggi hingga pemogokan angkutan umum. Dari Bali sampai Maumere, dari Salatiga sampai Makassar. Ini semua bahan-bahan menarik untuk diceritakan.

Kalian melawan polisi. Kalian melawan bupati. Kalian melawan partai. Kalian bahkan ada yang melawan negara. Aduh, itu cerita berminyak untuk ditulis gurih dan diceritakan renyah untuk orang lain!

Pramoedya Ananta Toer dalam *Khotbah dari Jalan Hidup* mengatakan, "Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia

http://pustaka-indo.blogspot.com

tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian."

Ada dua syarat sederhana bila kau ingin ingin "bekerja untuk keabadian": *kau harus tahu dan kau harus berani*.

Kau harus benar-benar menguasai isu yang kau tulis. Janganlah kau menulis soal "peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat" atau "globalisasi dalam kaitannya dengan Pancasila serta Islam" dan sebagainya. Kata-kata itu cuma jargon.

Kau jangan membebek orang lain menulis. Mereka sok pinter. Mereka sering tak tahu perdebatan-perdebatan yang sudah dilakukan orang-orang macam Michael Sandel dan Thomas Friedman soal globalisasi. Mereka tak tahu kebohongan Mohammad Yamin atau Nugroho Notosusanto dengan apa yang dinamakan Pancasila. Ada ratusan teori soal demokrasi dan mereka belum baca tuntas semuanya. Pakai kata-kata sederhana. Kalimat pendek-pendek.

Lebih baik kau tulis masalah sehari-hari. Penyair Widji Thukul menulis masalah sehari-hari bila memulai syairnya. "Tadinya aku pengin bilang: aku butuh rumah tapi lantas kuganti dengan kalimat: setiap orang butuh tanah. Ingat: setiap orang!" tulis Thukul dalam *Tentang Sebuah Gerakan*.

Sederhana sekali.

Kalau kau mau *tahu* maka kau harus bikin riset. Kau harus baca buku. Kau harus wawancara orang. Minta izin bila hendak mengutip omongan orang. Harus jujur. Harus transparan.

Kau tulis masalah listrik naik di subak kau. Kau tulis soal kesulitan tetangga kau si tukang jahit. Kau tulis tentang orang-orang biasa. Esensi jurnalisme adalah verifikasi. Semua keterangan itu harus kau saring. Carilah kebenaran.

Mulailah dari hal kecil. Kelak tanpa sadar kau akan baca makin banyak buku. Kau akan wawancara ribuan orang. Kelak tanpa sadar kau bisa menulis soal kebohongan dan kejahatan para petinggi negeri kita.

Tetapi *tahu* saja tidak cukup. Kau harus punya *keberanian*, punya nyali untuk menyatakan pikiran kau.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Pramoedya dan Thukul adalah orang berani. Pram dipenjara Belanda, Soekarno dan Soeharto. Perpustakaan Pram dibakar tentara. Bukunya habis. Kupingnya *budek* gara-gara hajaran serdadu. Thukul bahkan diculik dan hilang hingga hari ini.

Mereka tahu kesusahan si tukang jahit atau si jongos. Mereka berani pula menulis untuk membela si kecil.

Menulis adalah "laku moral." Kita bicara soal kebenaran. Kau harus berani menyatakan kebenaran.

Aku kenal banyak wartawan di ibukota negeri ini. Mereka tahu soal kebusukan petinggi negeri ini. Mereka tahu redaktur mereka mulai sering ditelepon *bedinde-bedinde* si petinggi. Kok nulis ini? Kok nulis itu? Tapi mereka tak punya keberanian. Mereka takut bisnis mereka terganggu. Maka "imbauan" si *bedinde* diikuti.

Akibatnya, banyak cerita di belakang layar yang tak ditulis di negeri ini. Kau maklum saja. Mereka tak punya keberanian macam Pram atau Thukul. Mereka lebih takut ditegur redakturnya. Mereka ketakutan macam anjing sembunyi ekor di balik pantat.

Jadi, kalau kau mau menulis, hanya dua syarat sederhana. Kau harus *tahu* sekecil apapun yang kau tulis. Dan kau harus *berani*.

Itulah inti dari sesi pelajaran menulis di Jakarta minggu lalu. Aku harap surat kecil ini membantu kau memahaminya. Terima kasih karena kau sudah rela sedia tenaga mengambil makanan untuk rekan-rekan kau.

Jakarta, 2006

http://pustaka-indo.blogspot.com

Cara Belajar Menulis Bahasa Inggris

Untuk Fauzul Muhammad,

Ini pertanyaan gampang-gampang sulit. Bagaimana cara belajar menulis dalam bahasa Inggris? Saya bukan guru bahasa Inggris. Tapi saya bisa cerita tentang bagaimana saya sendiri belajar menulis dalam bahasa Inggris?

Saya punya rahasia. Bekerjalah di harian *The Jakarta Post*! Saya tak bisa menulis Inggris sampai saya masuk ke sana pada 1993.

Terima kasih untuk Endy Bayuni, Hartoyo Pratignyo, Oei Eng Goan, Thayeb Sabil dan Vincent Lingga. Mereka mengajar saya menulis berita dengan struktur piramida terbalik dalam bahasa Inggris. Ini langkah pertama: menulis dalam piramida terbalik.

Mula-mula sulit tapi lama-lama biasa juga. Pak Eng Goan mengajari *style*. Mas Endy memberitahu saya Thesaurus sehingga *spelling* bisa kita cek lewat komputer (Bahasa Indonesia enggak punya khan?).

Lalu setahun di sana, pindah ke harian *The Nation* di Bangkok. Lebih banyak menulis *feature.* Itu pertama kali saya sadar bahwa standar jurnalisme di sana beda dengan di sini. Mereka pakai *byline,* pakai *firewall,* mempekerjakan kolumnis dan sebagainya. Ini praktik yang tak ada dalam jurnalisme ala Palmerah hingga Kebon Jeruk.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Belakangan baru sadar standar di media Palmerah, termasuk harian *Kompas*, *Media Indonesia*, *Tempo*, *Gatra* dan rombongannya, sudah ketinggalan banget dari rekan mereka di Bangkok atau Hong Kong.

The Nation belakangan menunjuk saya jadi kolumnis. Digaji tiap bulan. Lumayan gaji dalam dollar Amerika. Bisa buat menabung. Apalagi saat krisis moneter. Satu dollar pernah jadi Rp 23.000!

Tahun 1996, tiap minggu menulis kolom di halaman editorial. Mereka memberi kesempatan saya menulis panjang, satu halaman penuh, terkadang lebih. Mewah banget bukan? Umur saya baru 31 tahun.

Di sana saya melatih diri menulis esai, sebaik-baiknya. Mulai dari skandal bisnis emas Busang di Borneo, Timor Lorosae, Aceh, Partai Rakyat Demokratik, Sri Bintang Pamungkas, Aung San Suu Kyi, kebrutalan tentara Indonesia dan sebagainya. Saya juga boleh menulis untuk media lain asal bukan saingan *The Nation*—misalnya *The Bangkok Post*.

Maka saya menulis untuk *The American Reporter* secara gratisan. Saya suka karena *The American Reporter* mencoba jadi media alternatif di Amerika Serikat. Saya dibayar kalau berita dipakai media lain. Joe Shea, editor di sana, banyak membantu meningkatkan mutu reportase saya. Dia juga mengomel kalau salah *grammar.*

Sebagai kolumnis, saya melatih diri berargumentasi, mencoba menyakinkan orang yang tak setuju dengan saya, agar mengerti isu yang saya kemukakan. Setidaknya, mereka setuju dengan metode analisisnya. Saya banyak belajar bagaimana menulis opini dari situs web Pulitzer Prize (http://www.pulitzer.org/). Di situ banyak contoh. Saya menggunakan kata-kata sederhana saja. Kalau kesulitan, saya mencari kamus atau menelepon teman yang *native speaker.*

Ketika dapat beasiswa dan belajar di Universitas Harvard, barulah saya mengerti ada struktur yang lebih rumit lagi: NARASI.

Kerennya, disebut "jurnalisme sastrawi." Anda menyebutnya "penulisan kreatif." Saya lebih suka nama "narasi" tapi nama "jurnalisme sastrawi" lebih populer. Padahal salah kaprah sering muncul. Dikiranya, ini penulisan fakta yang mendayu-dayu dan puitis.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Bill Kovach, guru saya di Harvard, mendorong saya belajar narasi. Kovach juga mententir harus baca buku apa? Tiap minggu dia cek. Sudah selesai? Kalau sudah, dia beri judul lagi. *Black Hawk Down. Philadelphia Aurora. The New York Times. CBS. The New Yorker.* Scotty Reston, Harold Ross, David Halberstam dan sebagainya.

Pulang dari Boston, menulis untuk media internasional secara *freelance,* sambil menyunting majalah *Pantau*. Inilah periode ketika saya benar-benar belajar dan berlatih bersama rekan-rekan *Pantau* lainnya: Agus Sopian, Agus Sudibyo, Alfian Hamzah, Budiman S. Hartojo, Budi Setiyono, Chik Rini, Coen Husain Pontoh, Eriyanto, Hamid Basyaib, Helena Rea, Heru Widhi Handayani, Indarwati Aminuddin, Irawan Saptono, Ni Luh Sekar, Linda Christanty, Max Wangkar, Sirikit Syah, Veven Sp. Wardhana dan masih banyak lainnya (*sorry rek nek ono sing lali*).

Sambil menulis dalam Bahasa Melayu, saya juga membandingkannya dengan bahasa Inggris. Saya sendiri enggak punya bahasa ibu yang *official*.

Saya lahir di Jember, satu kota tembakau di Jawa Timur. Nama pemberian orangtua saya, "Ong Tjie Liang," tapi oleh rezim Orde Baru kami dipaksa ganti jadi nama "Indonesia." Nama "Ong Tjie Liang" dianggap "bukan Indonesia," dianggap belum membaur. Papa orang Hokkian. Mama orang Hakka. Di jalanan, kami memanggil satu dengan lainnya *lu* dan *gua*. Tapi nenek kecil orang Jawa asal Tuntang, Malang. Saya memanggilnya *kima*.

Jadi saya besar dengan budaya campuran. Besar dengan Man Tuka yang Madura. Mbek Wie yang Madura. Pak Tie yang Jawa. Masa kecil yang menggembirakan. Omong Madura, Jawa, Melayu, Hokkian.

Enak. Gado-gado. Kamsia. Kulo nuwun. Sampeyan. Kebacut. Selangkong. Dan (maaf) Diancuk!

*(Kata terakhir itu difamilierken lagi ke kuping saya oleh Alfian Hamzah dalam "*Kejarlah Daku Kau Kusekolahkan,*"* Pantau*, Februari 2003. Alfian sendiri belajar dari anggota-anggota Batalyon Infanteri 521/Dadaha Yodha Kediri yang bertugas di Aceh Barat pada 2002).*

http://pustaka-indo.blogspot.com

Ketika kecil, juga ada bahasa Indonesia ala *TVRI* dan *RRI*—yang rasanya keriting di kuping tapi mereka bilang inilah *Bahasa Indonesia yang baik dan benar.* Ketika duduk di bangku SMPK Maria Fatimah Jember, belajar bahasa Inggris dengan Pak Hur, guru bahasa Inggris di sana. Saya paling muda sekelas.

Ketika masuk SMAK St. Albertus Malang, ambil kursus bahasa Inggris privat, di rumah seorang dosen IKIP Malang. Bahkan sudah lupa namanya. Tante itu baik sekali. Lalu sempat les bahasa Jerman di satu pusat kursus di Malang. Juga lupa namanya. Cuma ingat, *"Ich liebe dich."* Tapi punya temen-temen yang hebat, yang mengajar saya untuk belajar apa saja untuk maju. Pastor kepala sekolah kami, Pater E. Siswanto, juga orang liberal yang berpikir terbuka. Hidupnya penuh tragedi tapi dia mendidik kami dengan terbuka. Keluarganya mati dibunuh perampok.

Masuk kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, daerah pekat Jawa-Mataram, yang makanannya terasa berlebihan manis untuk lidah Jember saya. Logat Jawa-timuran dianggap kasar. Apalagi omong kata, "diancuk." Padahal di Malang dan Jember, "diancuk" adalah bumbu omongan perkoncoan. Enggak apa-apa. Belajar Kromo Inggil untuk pergaulan. Orang Cina, *to be politically correct,* orang Tionghoa, di sana juga alus-alus Kromo Inggil.

Di Salatiga, juga kerja sebagai aktivis *grassroot* (ceile!) dengan para sais dokar. Tiap hari ada di terminal dokar Margosari. Orang-orang Jawa tapi "ngoko." *Komboran. Jaran. Suket.* Maka mulailah saya dikenal sebagai "Mas Andreas" oleh Pak Achmadi, Mas Sukardi, Mas Slamet, Bu Endang, Mas Wagimin dan sebagainya. Lalu sempat mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak mereka, dan dipanggil, "Oom Andreas."

Lulus kuliah, saya bekerja di Phonm Penh. Bicara bahasa Inggris tapi sempat ambil kursus bahasa Khmer, sehingga bisa bilang, *"Cum riep sak sabai?"* Artinya, *"How are you*?" atau *"Are you okay*?" Lalu tukang masak di rumah indekost, sering mengajar kalimat, *"Rom Khmer Grohom."* Artinya, *"Crush the Khmer Rouge."* Serem. Hii...

http://pustaka-indo.blogspot.com

Orang Khmer masih trauma dengan "Killing Fields" ala Khmer Rouge. Bahkan koki di rumah tak suka dengan Khmer Grohom.

Saya belajar dengan sering *switching* bahasa. Sering bolak-balik antara logika Melayu, Madura, Jawa dan Inggris. Kalau berhitung dalam hati, saya menggunakan Mandarin, "Ik, ol, san, tse, u, liok..." Suka sekali main-main dengan kosakata.

Adam Ellick, rekan dari Fulbright yang kebetulan sering main ke *Pantau*, mengatakan pemakaian kata Melayu dalam karya bahasa Inggris saya, membuatnya jadi kenal kalau ini karya saya. Suatu saat, Adam ketemu sebuah karya soal bajak laut di Batam. Dia merasa akrab dengan gaya itu. Tapi tak ada *byline*. Dia menduga karya saya. Ternyata benar!

Saya cinta dengan bahasa-bahasa. Goenawan Mohamad, mentor saya di Institut Studi Arus Informasi, mengatakan saya punya bakat di bidang bahasa. Saya tak tahu. Saya hanya tahu imajinasi bahasa melampaui khayalan saya sendiri. Kita tak pernah tahu batas dari kata-kata kita sendiri. Terkadang satu pokok pikiran saya tuangkan dalam dua bahasa dengan khayalan atas dua audiens yang berbeda. Menulis khan soal khayalan tentang audiens bukan?

Jadi bagaimana resepnya? Belajarlah. Mulai sekarang juga. Seraplah sebanyak mungkin bahasa. Bukan hanya bahasa Melayu. Tapi semuanya. Ia akan memperkaya nalar dan komparasi berbahasa Anda. Ia akan membuat jarak bahasa jadi sempit, bahkan mesra. *Grammar* hanya soal logika. Belajarlah mula-mula dengan piramida terbalik. Lalu *feature* dan analisis. Lalu narasi.

Mudah-mudahan cerita ini membantu Anda. Mohon maaf, ini bukan jawaban seorang guru bahasa Inggris. Tapi seorang wartawan. Selamat belajar!

Jakarta, 2005

http://pustaka-indo.blogspot.com

Bagaimana Mempersiapkan Suatu Naskah?

ARITA SOENARJONO, mantan wartawan *TVRI* dan kini ibu rumahtangga di New York, pernah *chatting* dengan saya. Dia mengatakan paling sulit menulis berita. Ini lebih sulit dari menulis esai, katanya. Terutama bikin *lead*, susah *banget*.

Keluhan Arita, saya kira, keluhan banyak orang. Bagaimana sih mempersiapkan sebuah naskah? Bagaimana caranya bikin naskah *hard-news*? Feature? Bagaimana menulis kolom opini? Atau bagaimana cara menulis buku?

Menulis bisa diibaratkan membangun rumah. Ada rumah bambu, dibuat sehari selesai. Ada rumah dari batu bata dan genteng, mungkin perlu waktu sebulan. Ada juga rumah bertingkat dari beton, butuh waktu setahun. Naskah mana yang hendak Anda bangun? Naskah rumah bambu? Naskah rumah beton? Atau naskah gedung pencakar langit?

Banyak naskah hanya memerlukan satu atau dua jam. Sekarang, lewat *Blackberry*, saya sering lihat reporter mengetik naskah dan mengirimkan ke ruang redaksi ketika peristiwa sedang berlangsung. Mungkin hanya 15-30 menit. *Wooosssshhh*. Dan lima menit kemudian sudah online. Namun, ada juga naskah yang perlu waktu lama. Wartawan Neil Shehan menulis buku *A*

http://pustaka-indo.blogspot.com

Bright Shining Lie: John Paul Vann and America in Vietnam (1988) selama 16 tahun!

Lantas daerahnya di mana? Bikin apartemen di Manhattan, New York, yang penuh sesak, tempat Arita tinggal, tentu memerlukan sikap berbeda dari bikin rumah di Namlea, yang penduduknya cuma 109.000 orang di seluruh Pulau Buru. Jumlah penduduk Manhattan 1,6 juta orang dengan kepadatan 27,500 orang per kilometer persegi. Logikanya, orang tak perlu-perlu amat membangun gedung bertingkat di Namlea karena harga tanah murah. Sebaliknya, Anda bisa dibilang gila bila membangun rumah satu tingkat di Times Square, Manhattan!

Artinya, Anda tak perlu bikin buku untuk suatu subjek yang tak begitu penting. Anda cukup bikin berita pendek, bukan sebuah buku, untuk melaporkan sebuah pertemuan pers.

Namun mau bikin naskah apapun, entah berita pendek 30 menit atau buku-16-tahun-pembuatannya, saya kira, seorang wartawan lebih dulu perlu bikin riset dan perlu melakukan *interview*.

Riset diperlukan agar Anda tahu apa yang sudah dikerjakan orang terhadap isu yang hendak dikerjakan. Jangan bikin sesuatu tanpa sadar bahwa ada wartawan lain yang sudah mengerjakannya. Apalagi sekarang sudah ada Google. Minimal bisa google dengan cepat.

Tergantung perlu seberapa dalam, riset bisa memerlukan banyak buku, menghabiskan banyak waktu dan membutuhkan pengendapan. Saya pribadi menghabiskan waktu tiga tahun untuk membaca buku-buku dan dokumen-dokumen penting tentang Acheh sebelum akhirnya merasa mengerti cukup soal Gerakan Acheh Merdeka dan Hasan di Tiro, walinanggroe Acheh. Memahami Papua ternyata perlu waktu lebih lama lagi. Saya perlu pengendapan enam tahun. Papua jauh berbeda—secara sejarah, kebudayaan, politik, pergerakan, botani, zoologi dan sebagainya—dari Aceh maupun Jawa.

Sebaliknya, suatu berita cepat juga tak memerlukan riset panjang. Tapi selalu lakukan riset sebelum pergi liputan. Berhati-hatilah dengan pertemuan pers. Pertemuan pers selalu dirancang

http://pustaka-indo.blogspot.com

agar mereka bisa membuat wartawan mengikuti arah pemberitaan mereka. Pertemuan pers ibarat *menyuapi* alias *spoon feeding* wartawan. Jangan mau disuapi. Usahakan untuk makan sendiri. Berpikirlah secara kritis dalam pertemuan pers. Berpikir kritis memerlukan riset awal dan persiapan.

Interview sangat vital dalam pembuatan naskah. Interview akan membuat seorang wartawan tahu aspek-aspek kebaruan dalam suatu isu. *Interview* bukan pekerjaan mudah. Saya suka dengan "Ten Tips For Better Interview" dari International Center for Journalists.

Interview *one-on-one* berbeda dengan *door-stop interview*. Banyak sekali yang boleh dan yang tak boleh dalam interview. Interview juga senantiasa harus terbuka … kecuali dalam kasus tertentu. Wartawan yang terlatih akan biasa membuat pertanyaan terbuka. Bukan pertanyaan tertutup, yang bisa dijawab "ya" atau "tidak." Pertanyaan terbuka senantiasa dibuat dengan memperhatikan 5W 1H.

Saya juga tak mau menulis bila sumbernya tidak cukup. Narasumber tidaklah cukup bila hanya satu orang. Sering saya merasa geli bila membaca sosok seseorang, entah di suratkabar atau majalah, dan sumbernya hanya satu orang … ya si sosok itu sendiri. Bagaimana si reporter bisa melihat sosok itu dari sudut lain bila dia cuma interview orang yang di-sosok-kan?

Saya kira, sumber satu orang hanya cocok untuk *Facebook* atau *Twitter*!

Panjang-pendek naskah juga mempengaruhi persiapan. Makin banyak bahan yang didapat, biasanya, saya makin leluasa untuk menulis panjang. Makin sedikit bahan, sebaliknya, ya makin pendek pula hasilnya.

Tapi, harus ingat pula, rumah kecil juga bisa indah dan mahal. Artinya, disain interior selalu bisa dimainkan agar sebuah rumah kecil menjadi tinggi nilainya. Naskah pendek juga bisa bernilai tinggi karena ia dikerjakan dengan bahan-bahan dan alat-alat yang mahal. Goenawan Mohamad menulis esai "The Death of Sukardal" dengan indah, bertenaga walau hanya 470 kata (*Tempo*, Juli 1986).

http://pustaka-indo.blogspot.com

Bila sudah riset dan *interview*, maka naskah sudah bisa disiapkan penulisannya. Ibaratnya, bahan-bahan dasar sudah siap—lokasi, modal, baja, semen dan lain-lain—maka bangunan pun bisa mulai digambar. Tentukan dulu mau dijadikan naskah piramida terbalik, naskah feature, esai atau narasi?

Piramida terbalik, yang menjadi masalah Arita Soenarjono, pada dasarnya adalah menaruh sebanyak mungkin unsur 5W 1H pada alinea pertama. Apa yang terjadi, di mana, siapa yang terlibat, bagaimana, kapan dan mengapa?

Pembaca harus bisa mendapatkan informasi hanya dengan membaca alinea-alinea awal. Makin ke bawah, alinea dari struktur ini makin kurang penting. Struktur naskah ini bisa ditinggalkan pembaca—tanpa harus selesai.

Artinya, *lead* atau alinea pertama bisa merangkum isi naskah. Saya beri contoh dari *lead* sebuah naskah saya "BIN Menyewa Perusahaan Lobby Washington" (*Pantau*, September 2006):

> Badan Intelijen Negara (BIN) memakai yayasan sosial milik mantan presiden Abdurrahman Wahid untuk menyewa sebuah perusahaan di Washington DC sejak Mei 2005. Maksudnya, mendekati tokoh-tokoh penting Kongres agar menghapus semua hambatan bantuan dan pelatihan militer Amerika untuk Indonesia.

Sementara untuk penulisan feature, saya biasa memperhatikan *focus*, *angle* dan *outline* lebih dulu. Fokus adalah titik perhatian dari naskah itu. Ia berupa sebuah pertanyaan, lagi-lagi, dari unsur 5W 1H.

Misalnya, "Apa yang terjadi di Sungai Dareh pada Januari 1958?" Atau "Mengapa anak muda membuat Sastra Minahasa?" Benedict Anderson pernah menulis sebuah feature soal Soeharto berjudul "Petrus Dadi Ratu." Fokus feature itu pada Presiden Soeharto. Petrus singkatan "penembak misterius"—sebuah upaya pembunuhan teratur yang dilakukan militer Indonesia pada 1983 guna membunuh orang-orang yang dianggap penjahat. "Petrus Dadi Ratu" plesetan dari lakon wayang "Petruk Dadi Ratu." Maknanya, ya seorang

http://pustaka-indo.blogspot.com

pembunuh misterius *dadi* atau *jadi* Presiden Indonesia. Anderson menyebut Soeharto sebagai "preman" dari Kemusuk, sebuah dusun di Yogyakarta.

Angle adalah titik masuk. Anda harus mencari sesuatu yang segar, yang belum dikerjakan wartawan lain, untuk masuk dalam feature Anda. *Outline* adalah kerangka karangan.

Alinea awal suatu feature juga tak perlu sepadat piramida terbalik. Saya pernah menulis suatu feature, "Panasnya Pontianak, Panasnya Politik" (*Gatra*, Juli 2008). Menurut beberapa wartawan Pontianak, termasuk Nur Iskandar dari *Borneo Tribune* dan Andi Fahrizal dari *Jurnal Nasional*, naskah itu dijadikan pembicaraan seluruh warung kopi Pontianak ketika *Gatra* beredar. Warung kopi, kebanyakan dikelola orang Tionghoa, adalah media khas Pontianak. Ini ajang diskusi berbagai kelompok, dari politikus, wartawan, birokrat sampai preman. Mereka tersebar dari Jl. Gajah Mada hingga Jl. Tanjung Pura, dari Sungai Jawi sampai Sungai Raya.

Alinea pembuka feature itu sederhana saja:

> Awalnya acara tahlilan. Ia diadakan satu keluarga Melayu, di Gang Tujuhbelas No. 4. Rumahnya tembok dan atap seng, dalam sebuah lorong, sepanjang kurang lebih 100 meter, di daerah Tanjung Pura, pusat kota Pontianak.
>
> Ketika Mei lalu saya mengunjunginya, lorong ini terkesan asri, jalanan semen cor. Rumah dua lantai atau tiga lantai, ada juga yang rumah kayu. Andrew Yuen, seorang wartawan yang dibesarkan di sini pada 1990an, mengatakan nama "tujuhbelas" muncul karena dulu hanya ada 17 rumah.

Esai dan narasi juga memerlukan persiapan sama dengan menulis piramida terbalik dan feature. Bedanya, persiapan narasi tentu lebih lama dari lainnya. Pada esai, tentu saja, Anda perlu punya kemampuan analisis yang tajam. Anda perlu membaca buku-buku teoritis hingga pisau analisis dibuat dengan lebih tajam.

Saya misalnya, menganjurkan wartawan untuk baca beberapa buku klasik sebelum berkunjung ke Banda Aceh. Misalnya, *Perang*

http://pustaka-indo.blogspot.com

di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912 oleh Alfian Ibrahim (1987), "Shock Therapy" Restoring Order in Aceh, 1989-1993" oleh Amnesty International (1993) maupun karya-karya Anthony Reid, Denys Lombard, M. Isa Sulaiman, Otto Syamsuddin Ishak, Snouck Hurgronje, Tim Kell dan sebagainya. Saya kira wartawan wajib membaca tiga karya utama Hasan di Tiro: *The Case and the Cause of the National Liberation Front of Acheh-Sumatra, The Legal Status of Acheh-Sumatra Under International Law* serta biografinya *The Price of Freedoms: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro.*

Kalau liputan politik di Indonesia, rasanya, seorang wartawan harus belajar soal pemikiran di bidang nasionalisme lewat Benedict Anderson, Ernest Renan dan lain-lain. Saya juga ingin wartawan belajar sejarah—bukan *sejarah-sejarahan* karya "pakar sejarah Indonesia"—dan hasil riset bermutu.

Narasi biasa dipakai untuk naskah panjang, mulai dari 5.000-7.500 kata. Roy Peter Clark dari Poynter Institute, Florida, mengembangkan pedoman standar 5W 1H menjadi pendekatan baru. Pada narasi, "who" berubah menjadi siapa, "what" menjadi plot atau alur narasi, "where" menjadi *setting*, "when" menjadi kronologi, "why" menjadi motivasi, dan "how" menjadi narasi.

Struktur naskah juga makin hari makin bertambah ragamnya. Seorang wartawan harus senantiasa membaca, termasuk karya-karya rujukan, agar mampu mengikuti perkembangan dalam teknik penulisan.

Jakarta, 2009

http://pustaka-indo.blogspot.com

Bagaimana Cara Rekrut Wartawan?

SELAMA TIGA ATAU empat tahun ini, saya sering bicara dengan redaktur media, yang mengeluh karena wartawan mereka banyak yang tak bisa menulis. Jakob Oetama, orang nomor satu Kompas Gramedia, bilang bahwa wartawan *Kompas b*anyak yang belum bisa menulis. Goenawan Mohamad dari Grafiti Pers, yang menguasai kelompok *Tempo* dan *Jawa Pos*, mengatakan dia tak pernah punya "lebih dari 10 orang penulis" selama 30 tahun jadi redaktur. Bagaimana sih mencari dan merekrut wartawan baru yang kelak terbukti bisa bikin reportase dan penulisan bagus?

Saya kebetulan bertemu Wendel "Sonny" Rawls Jr., mantan wartawan dan redaktur *The Philadelphia Inquirer, The New York Times* serta *The Atlanta Journal-Constitution,* tentang bagaimana cara mencari reporter. Sonny terkenal bertangan dingin dalam mencari dan mendidik wartawan muda.

Kami bertemu di Hotel Renaissanche Chancery Court di London, mengobrol panjang-lebar, lalu saya minta izin mengutip omongannya.

Sonny misalnya, merekrut James Newton sebagai reporter *The Atlanta Constitution.* Newton lantas menjadi redaktur *The Los Angeles Times.* James Newton diperkirakan bakal jadi "James Reston"—kolumnis legendaris di Washington D.C. pada zaman Perang Dunia II.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Sonny juga menulis buku *Cold Storage* (1980) tentang orang gila dan rumahsakit jiwa. Dia mengerti psikologi. Dia juga mengerti banyak soal kriminalitas. Sonny menulis naskah film seri *Law & Order.*

Sonny juga partner Bill Kovach di *The New York Times* dan *The Atlanta Constitution*. Kalau Kovach adalah panglima, maka Sonny adalah orang yang mengurus keperluan rumahtangga dan operasi suratkabar.

Bagaimana cara merekrut wartawan?

Menurut Sonny, dia biasa minta wartawan yang melamar ke tempatnya untuk mengirim 10 contoh laporan. Dia minta *news stories,* bukan *feature,* baik dengan struktur piramida terbalik atau piramida (Sonny paling suka dengan struktur piramida).

"Saya baca *lead* dulu dan tiga alinea pertama. Apakah beres atau tidak? Kalau beres, mudah dicerna, jelas, jernih, saya akan baca *the end of the stories*."

Ini penting untuk mengetahui apakah si pelamar bisa menghubungkan *lead* dengan *ending* laporan. Sonny bisa menilai kemampuan logika si pelamar dari hubungan awal-akhir ini.

"I want to know whether they really have strong understanding," katanya.

Bila tidak sambung, bila tak jernih, dia memutuskan menolak si pelamar. Bila sambung, maka Sonny akan membaca semua naskah, dari alinea awal hingga akhir, semua 10 laporan itu. Bila laporan baik atau menjanjikan, maka Sonny akan mewawancarai si pelamar.

Sonny menyebut nama-nama wartawan yang pernah diwawancarainya, bagaimana mereka membangun karier, mula-mula di tempat Sonny namun pindah ke media lain. Dia juga tahu bagaimana orang macam James Newton tak menarik buat redaktur lain—bahkan mulanya ditolak *The Los Angeles Times*—tapi tidak bagi Sonny.

"James is not a selling person. Dia tidak bisa menawarkan diri dengan baik," kata Sonny.

Charles Lewis, mantan wartawan *CBS* dan pendiri Center for Public Integrity di Washington D.C., mengatakan, *"Sonny Rawls is a legend."*

http://pustaka-indo.blogspot.com

Sonny mampu memotivasi reporter. Sonny sendiri pernah mendapat Pulitzer Prize pada 1977. Ketika memegang ruang redaksi *Atlanta*, dia juga menugaskan wartawan-wartawan meliput macam-macam isu di mana empat di antaranya dapat Pulitzer.

Bila sudah baca, dia akan mewawancarai si pelamar. Mulai dari karier mereka serta kehidupan mereka.

"What kind of books they read?"

"What they do when they're not working?"

Saya tanya kenapa kegemaran orang pun ditanya Sonny.

Apa makna seorang wartawan yang suka memancing, misalnya?

Menurut Sonny, pemancing artinya orang yang "kontemplatif." Dia orang yang suka berpikir dengan dalam.

Tapi Sonny tak suka dengan wartawan yang merokok dengan pipa. *"Too slow thinking,"* katanya, menirukan gaya orang mengisap pipa.

Contohnya?

Sonny menunjuk Max Frankel, mantan redaktur eksekutif *The New York Times,* yang mengepalai biro Washington harian *The New York Times* pada awal 1970-an. Frankel memang perokok pipa.

Frankel kalah dalam liputan skandal Watergate dari harian *The Washington Post*. Presiden Richard Nixon akhirnya mundur gara-gara Watergate, yang diungkap duet Bob Woodward dan Carl Bernstein.

"Ben Bradlee tidak merokok pipa," kata Sonny, merujuk pada redaktur eksekutif *The Washington Post*. Bradlee memimpin Woodward dan Bernstein untuk mendalami Watergate.

"Frankel bekerja pelan sekali. Kami dihajar habis-habisan oleh Bradlee," kata Sonny.

Saya ingat bahwa di Jakarta maupun kota-kota lain, kebanyakan media besar melakukan seleksi wartawan lewat tes psikologi dan melibatkan orang-orang personalia (lebih dulu), sebelum segelintir yang lolos diwawancarai para redaktur. Menariknya, proses lamaran sering kali tanpa melibatkan tulisan si pelamar. Lebih sering malah tes psikologi.

Sonny tak peduli dengan tes psikologi. Dia bilang media bermutu macam *The New York Times* atau *The New Yorker* belum

http://pustaka-indo.blogspot.com

pernah pakai tes psikologi. Wartawan harus dites lewat tulisannya. Beberapa media lain, misalnya *The Philadephia Inquirer,* memakai tes psikologi. Sonny tak keberatan dengan tes ini namun juga tak peduli.

Menurut Sonny, mencari wartawan adalah seni. Ia harus dilakukan sendiri oleh redaktur-redaktur puncak media bersangkutan. Mereka harus tajam mencari wartawan muda yang berbakat. Tulisan adalah utama.

Ketika bekerja dengan Kovach, entah Kovach atau Sonny sendiri yang melakukan rekrutmen. Kalau ada lowongan, mereka tak memasang pengumuman, tapi melakukan *talent scouting* di media kecil.

Saya senang bicara dengan Sonny. Saya kira cara-cara ini bisa dipakai sebagai bahan perbandingan di Jakarta. Di kalangan media Jakarta, jarang sekali ada lowongan pekerjaan yang minta si pelamar mengirim contoh tulisan. Kebanyakan yang diminta Indeks Prestasi 2.75 bahkan 3 (padahal semua universitas kita jelek) atau bisa bahasa Inggris (saya setuju).

Nurman Jalinus dari *Bisnis Indonesia* pernah bilang bahwa sekali kita salah rekrut, maka seumur hidup kita harus membayari gaji seseorang yang tak bisa menulis dan tak banyak berguna untuk ruang redaksi kita.

Bagaimana bisa mendapat wartawan yang bisa menulis ketika rekrutmennya tanpa tulisan?

Saya kira mungkin sudah saatnya cara rekrutmen diganti.

London, 2005

http://pustaka-indo.blogspot.com

Apakah Wartawan Perlu Dipidanakan?

BEBERAPA WAKTU LALU, Bonnie Triyana, seorang sejarawan-*cum*-wartawan, alumnus Universitas Diponegoro kelahiran Banten, mengirim email kepada saya. Isinya singkat. "Mas, aku ingin tanya, apakah penulisan opini itu jadi tanggungjawab penulisnya atau pemimpin redaksi?"

Triyana sedang memberi kesaksian dalam sidang pengadilan Depok terhadap Bersihar Lubis, satu wartawan yang didakwa melakukan "pencemaran nama baik" Kejaksaan Agung di halaman *Koran Tempo*, 17 Maret 2007. Lubis menggunakan kata "jaksa dungu." Alasannya, jaksa-jaksa itu dungu membakar buku-buku pelajaran sejarah. Lubis mengutip wartawan senior Joesoef Isak dari penerbit Hasta Mitra, yang memakai kata "dungu" buat menerangkan proses interogasi pelarangan buku-buku novelis Pramoedya Ananta Toer.

Jawaban saya agak panjang. Saya kira tanggungjawab suatu naskah secara intelektual berada pada orang yang punya *byline*—nama pengarang dalam naskah. Bila seseorang menulis sesuatu, maka dia mendapat pujian (bila bagus) atau cercaan (bila jelek). Bagus atau jelek naskah jatuh ke si pemegang *byline*. Sisi lainnya, seorang wartawan atau kolumnis bisa minta *byline* dihilangkan bila isi berita atau isi kolom diganti sehingga tak sesuai temuan si empunya *byline*.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Lantas dimana tanggungjawab pemimpin redaksi?

Secara intelektual, dia ikut bertanggungjawab terhadap naskah yang dimuat medianya. Logikanya, naskah tadi terbit dengan persetujuannya. Naskah juga tidak terbit tanpa persetujuan si editor. Jadi, editor kepala ikut bertanggungjawab. Editor yang baik akan menerbitkan naskah, yang dikerjakan dengan prosedur benar, walau dia belum tentu setuju dengan analisisnya.

Semua tadi adalah jawaban ideal.

Kini persoalannya, banyak media Indopahit—akronim dari guyonan "Indonesia yang pahit," atau pseudo-ilmiah seolah-olah "Indonesia turunan Majapahit"—membuat jawaban tadi kabur karena mereka tak memasang *byline*. Coba Anda perhatikan suratkabar di Semarang? Suratkabar mana saja yang memasang *byline*? Bandingkan misalnya dengan *International Herald Tribune*? Atau majalah *Atlantic, Time, Newsweek, The New Yorker*?

Wartawan Indopahit juga jarang menulis dengan tersusun. Bahasa porak-poranda. Logikanya akrobat. Isi, kebanyakan propaganda atau hasil suapan para humas. Penyuntingan sering terpaksa "dalam sekali." Maka, tanggungjawab jatuh pada si editor. Bukan si penulis.

Bagaimana kalau kekaburan ini dibawa ke wilayah hukum?

Namanya orang bikin tulisan. Tidak perlu kaget kalau muncul kegeraman. Bersihar Lubis tampaknya menyinggung emosi banyak jaksa. Jaksa-jaksa Indopahit sebenarnya tak semua dungu. Lubis mengatakan kolom sebaiknya dibalas dengan kolom. Saya setuju posisi Lubis. Kolom dibalas kolom.

Kalau tak bisa menulis? Di Amerika Serikat, maksimal kegeraman ini dijadikan perkara perdata. Silahkan menggugat!

Siapa tergugatnya? Ya tergantung si penggugat mau menggugat siapa! Saya sendiri belajar jurnalisme di Cambridge, dekat Boston. Di Amerika Serikat, urusan jurnalisme tak ada dalam *Criminal Code*. Karya jurnalisme hanya masuk wilayah perdata.

Di Indopahit, perkara ini jadi super runyam karena ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang bisa dipakai

http://pustaka-indo.blogspot.com

menghukum dan mengirim wartawan masuk penjara. Maka Bersihar Lubis pun berhadapan dengan KUHP pasal 207 soal menghina lembaga negara.

Bonnie Triyana dan banyak wartawan dari Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia-Reformasi dan Kelompok Kerja Wartawan Depok, melakukan advokasi terhadap Lubis. Mereka datang ke sidang. Mereka bawa poster. Namun tiga orang hakim Depok—Suwidya, Budi Prasetyo dan Ronald—menyatakan naskah dengan *byline* melulu tanggungjawab empunya nama. Bukan pemimpin redaksi. Mereka menyatakan Lubis bersalah pada 20 Februari 2008. Dia dinyatakan melanggar pasal 207. Dia dihukum penjara sebulan dengan tiga bulan percobaan.

"Kemerdekaan berbicara saya dipasung," kata Lubis.

ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA SEORANG wartawan yang hangat. Rambutnya tipis. Kalau tertawa, suaranya menggelegar. Saya kenal "Pak Atma" sejak awal 1990-an. Kami sering diskusi bersama. Terkadang jalan ke luar negeri bersama. Kami pernah makan malam dan melihat *show* musik di sebuah hotel di Bangkok. Atmakusumah tampaknya terbawa suasana romantis. Musik enak. Minuman mengalir. Dia tiba-tiba bilang, "Kalau Sri ada"- Sri Rumiati, isteri Atmakusumah - "saya akan mengajaknya berdansa!"

Alamak, wartawan gaek romantis!

Sejak muda, Atmakusumah jadi wartawan *Indonesia Raya* hingga Orde Baru membredel harian ini pada 1974. Atmakusumah, susah cari kerja dan kerja di US Information Service, Jakarta. Saya mengenalnya sebagai instruktur di Lembaga Pers Dr. Soetomo. Tugasnya, mengajar hukum dan etika pers. Sesudah Presiden Soeharto mundur pada Mei 1998, Atmakusumah jadi ketua Dewan Pers (2000–2003). Dia mendapat Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication Arts pada 2000. Ini penghargaan

http://pustaka-indo.blogspot.com

sering disebut hadiah Nobel versi Asia.

Atmakusumah mengatakan pada saya bahwa melihat hukum pers harus dimulai dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indies* tahun 1918. Nama itu artinya, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda."

Dalam kitab itu ada 35 pasal, yang bisa dipakai untuk mengekang kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Hukumannya, maksimal penjara tujuh tahun. "Pokoknya yang bersangkutan dengan pers, diskusi, demonstrasi, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi," kata Atmakusumah. Korbannya, ada wartawan, penceramah, demonstran dan lain-lain.

Pada 1949, ketika negara Indopahit menggantikan Hindia Belanda, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indies* menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Isinya sama, tanpa perubahan.

Baru pada zaman Presiden Soeharto, KUHP direvisi, tapi belum pernah dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibicarakan dan disetujui. Jadi, gagasan baru dalam revisi-revisi ini semata-mata berasal dari para penguasa eksekutif. Ironisnya, pasal-pasal soal kebebasan berpendapat, dinaikkan dari 35 pasal menjadi 42 pasal. Hukuman maksimal naik menjadi seumur hidup. Ada pasal-pasal menimbulkan keonaran, anti-Pancasila, Marxisme dan Leninisme.

Perubahan lain, pembuktian harus ada bukti material. "Walau ada material, itu omong kosong!" kata Atmakusumah.

"Malari dulu siapa yang membakar?"

Soeharto turun Mei 1998. Perubahan muncul lagi ketika Yusril Ihza Mahendra, mantan penulis pidato Soeharto, menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal kebebasan berpendapat direvisi. Hukumannya, turun dari seumur hidup jadi 20 tahun. Pasalnya tambah dari 42 jadi 49 pasal.

"Ada pasal tambahan. 'Anda bisa dicabut dari profesi Anda,'" kata Atmakusumah. Ini mirip pengalaman Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta, yang sering mengkritik Soeharto dengan

http://pustaka-indo.blogspot.com

organisasi Petisi 50. Sadikin dan kawan-kawan mengalami apa yang disebut "kematian perdata."

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden, dia mengangkat Hamid Awaluddin, seorang sarjana hukum asal Makassar, menggantikan Mahendra. Awaluddin pernah jadi koresponden majalah *Gatra*. Kali ini KUHP direvisi lagi. Pasal-pasal kebebasan berpendapat, yang bisa dipakai menjerat wartawan macam Bersihar Lubis, ternyata naik lagi.

"Saya belum menghitung sendiri. Dalam diskusi-diskusi sering disebut 60-an," kata Atmakusumah.

"Bagaimana para pemimpin kita, makin ke sini kok makin mengerikan? Makin tidak berorientasi pada rakyat?"

"Kalau saya omong-omong dengan ahli hukum, enggak pernah dapat jawaban."

"Di kalangan wartawan senior juga pecah. Wina Armada Sukardi, anggota Dewan Pers, sama saja pendapatnya dengan banyak ahli hukum. 'Emangnya wartawan enggak boleh dipenjara?'" kata Atmakusumah, menirukan Wina Armada.

"Saya bilang kalau karya jurnalistik, jangan dipenjara!"

"Kalau masih ada penjara, antara pemimpin redaksi dan wartawan, saling dorong-mendorong. Siapa yang maju ke pengadilan?"

"Saya lebih suka kalau dikeluarkan dari pidana. Enggak ada dalam pidana itu, kasus jurnalistik."

Atmakusumah mengirim sejumlah naskah kepada saya. Ada satu naskah berisi bermacam-macam nama negara—Honduras, Argentina, Kosta Rika, Paraguay, Peru, Guatemala, Ghana, Uganda, Yordania dan lainnya—yang sudah mengeluarkan soal pidana wartawan, dari kitab hukum mereka. Bahkan Timor Leste, bekas koloni Indopahit, punya aturan yang menghapus pasal penghinaan terhadap kepala negara. Mereka lebih maju dari bekas penjajahnya. Negara-negara ini menyusul sikap non-kriminalisasi orang berpendapat di Amerika Serikat.

http://pustaka-indo.blogspot.com

SAYA TAK BISA menghindar dari pikiran bahwa zaman Hindia

Belanda hanya ada 35 pasal. Zaman Soeharto, naik 42 pasal. Yusril Ihza Mahendra membuatnya jadi 49 pasal. Hamid Awaluddin naik lagi jadi 60-an. Joesoef Isak bisa "mendungu-dungukan" lebih banyak orang kalau tahu ini.

Benedict Anderson dari Universitas Cornell, dalam pengantar buku *Indonesia dalem Api dan Bara* (2004), menulis bahwa pada awal abad XX, "Koran mulai tumbuh di ampir setiap kota jang berarti, mirip tjendawan dimusim hudjan." Mutu jurnalisme zaman itu lebih bagus dari apa yang diledeknya sebagai generasi "Tempe, Kempes, Sirna Harapan dan Jawa Pes." Maksudnya, *Tempo*, *Kompas*, *Sinar Harapan* dan *Jawa Pos*.

Masih ingat polemik kebudayaan? Pada 1930-an, pemikir macam Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Soewardi Soerjaningrat dan sebagainya menulis esai-esai bermutu, yang belum ada tandingannya hingga hari ini.

Banyak teoritisi media mengatakan makin bermutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, maka makin bermutu pula masyarakat itu. International Center for Journalists punya semboyan: "*Better journalism, better lives*!"

Kalau mutu jurnalisme zaman Hindia Belanda lebih baik dari zaman Indopahit, jangan-jangan sistem pemerintahan Hindia Belanda juga lebih bermutu dari Indopahit? Jangan-jangan Indonesia bergerak mundur ke zaman Majapahit?

Semarang, 2008

ISTILAH REFERENSI KEDUA (*second reference*) adalah terminologi

http://pustaka-indo.blogspot.com

Referensi Kedua

penyebutan nama seseorang untuk kedua kali dan seterusnya. Misalnya, Leo Batubara, seorang mantan intel Badan Koordinasi Intelijen Nasional, yang jadi wakil ketua Dewan Pers pasca-Orde Baru, referensi keduanya adalah "Batubara."

Leo adik kandung Cosmas Batubara, seorang menteri kabinet Presiden Soeharto. Referensi pertama untuk si adik "Leo Batubara." Namun "Leo" dipakai ketika kakaknya, Cosmas, juga muncul dalam naskah sama.

Kakak beradik ini orang Batak Karo. Mereka punya nama keluarga. Saat majalah *Pantau* masih terbit, kami biasa menghargai sejarah individu *thus* nama keluarga. Karena itu referensi kedua ditetapkan nama keluarga yang bersangkutan.

Misalnya, Max Wangkar, seorang lelaki Minahasa, dipakai referensi kedua Wangkar (bukan Max). Arief Budiman, seorang sosiolog Tionghoa, dipakai Budiman (anak-anak dan istri Arief pakai nama Budiman). Jose Ramos-Horta dari gerakan kemerdekaan Timor Timur dipakai Ramos-Horta (bukan Jose). Nama keluarganya adalah Ramos-Horta (pakai tanda penghubung). Jenderal Abdul Harris Nasution, seorang Batak Mandailing, disebut Nasution. Siapa berani memanggil jenderal bintang lima ini dengan panggilan

http://pustaka-indo.blogspot.com

Jenderal Abdul?

Namun di Pulau Jawa, maupun di banyak tempat di negeri ini, banyak orang tak memiliki nama keluarga. Dalam kasus ini, kami memakai nama yang paling dikenal dari yang bersangkutan. Misalnya Bambang Trihatmodjo, anak kedua Jenderal Soeharto, dipakai nama Bambang. Atau nama panggilannya: Bambang Tri. Kalau nama satu kata, misalnya Presiden Soekarno atau Jenderal Soeharto, otomatis hanya nama itu yang dipakai: Soekarno dan Soeharto.

Buat panggilan yang akrab: Bung Karno atau Pak Harto. Referensi akrab juga bisa membuat Leo Batubara menjadi Leo. Max Wangkar jadi Max. Arief Budiman jadi Arief.

Tapi di Pulau Jawa, baik orang Jawa, Banten, Cirebon maupun Sunda, juga ada yang mulai menggunakan nama keluarga. Mereka terkadang memilih memakai nama pertama untuk referensi kedua. Dalam kasus ini, saya pikir sebaiknya setiap sumber menentukan sendiri: nama keluarga atau nama depan. Misalnya, penyair Goenawan Mohamad, saya pernah wawancarai dan menanyai referensi kedua, memilih Goenawan. Wartawan Rosihan Anwar, orang Minangkabau, yang setengah abad lebih tinggal di Jl. Surabaya, Jakarta, memilih Rosihan walau ayah dan anak-anak Rosihan pakai nama Anwar semua.

Ruwet dan Repot

Urusan nama keluarga bisa ruwet dan bikin repot. Kebanyakan media international memakai nama marga dalam referensi kedua. Mereka menyebut "Presiden Bush"—bukan "Presiden George." Mungkin karena terlalu banyak nama George di Amerika Serikat.

Bayangkan kalau ada dalam suatu pertunjukan malam dipanggil "Presiden George" dan muncullah George Washington! Orang-orang bisa tunggang-langgang! George Washington (1732-1799) adalah presiden pertama Amerika Serikat. Sama-sama bernama George. Sama-sama penghuni White House. Bedanya, Washington sudah mati 200 tahun silam. George Bush masih hidup dan bikin

http://pustaka-indo.blogspot.com

Perang Irak.

Praktik nama keluarga ada sejarahnya. Sangat mungkin sejarah ini lebih tua dari jurnalisme. Di Eropa ada sejarah nama keluarga. Di Pulau Jawa, di mana media Indopahit berakar, belum ada tradisi nama keluarga. Mayoritas orang Jawa atau Sunda tidak punya nama keluarga. Beberapa keluarga bangsawan Jawa atau Sunda punya nama keluarga. Namun lebih banyak orang, kaya maupun miskin, bangsawan maupun rakyat jelata, tak punya nama keluarga. Ia sah-sah saja.

Terkadang, urusan nama depan, nama keluarga dan nama panggilan, bisa bikin pusing kepala bila seorang Jawa pergi ke luar Indonesia. Sirikit Syah, seorang wartawan Jawa yang tinggal di Surabaya, cerita dia sering mengalami kesulitan di luar negeri karena namanya tak ada nama keluarga.

"Nama saya Hernani Sirikit. Dalam perjalanan hidup, saya ganti sendiri menjadi Sirikit Syah. Panggilan Sirikit. Orang-orang Barat bersikeras nama panggilan saya Hernani dan Sirikit *is a family name*. Sampai *ngeyel* saya bilang Sirikit *is not my family name, it is my name*. Ruwet amat sih."

Suatu ketika, ada seorang teman mencari Sirikit di sebuah hotel. Si teman ini menyebut nama "Sirikit."

"Petugas hotel sampai mampus cari 'Sirikit' di deretan nama *family name* enggak ketemu. Lho, gitu kok ya tidak mau repot mencari nama 'Sirikit' di bagian nama panggilan. Saya terdaftar dengan nama 'Sirikit Syah'. Gara-gara nama itu kami tidak ketemu, padahal saya sudah menunggu dan dia sudah gegeran sama resepsionis."

"Banyak orang Jawa namanya cuma Paijo, Supiatun, Endang Rahayu, Sudjarwo dan seterusnya tanpa ada nama keluarga. *What's wrong with not having a family name?*" tanya Sirikit kepada *mailing list* pantau-kontributor.

Sejarah Nama Keluarga

Saya tidak tahu sejak kapan nama keluarga mulai dipakai dalam kebudayaan manusia. Di daratan Tionghok, menurut kepercayaan

http://pustaka-indo.blogspot.com

orang, yang belum tentu benar, nama keluarga berasal dari zaman Kaisar Fu Xi pada 2852 SM. Fu Xi konon membuat standar penamaan dalam sebuah sensus kekaisaran. Ini memulai tradisi orang-orang di daratan Tiongkok punya marga.

Pada awal abad 15, kebanyakan orang Inggris dan Skot sudah punya nama keluarga. Raja Henry VIII (1509-1547) memerintahkan bahwa semua akte kelahiran di kerajaannya harus mencantumkan nama ayah pada nama si bayi. Praktik ini mendorong munculnya nama keluarga.

Praktik pemberian nama keluarga ada yang dikaitkan pada pekerjaan keluarga itu. Misalnya, Smith (tukang besi), Sawyer (penggergajian kayu), Cook (tukang masak), Carpenter (tukang kayu), Baker (pembuat roti), Dyer (pewarnaan kain) dan sebagainya. Ada juga yang dikaitkan dengan tanah kelahiran mereka. Misalnya, Hill, Bridge, Lee, Wood, Forest, Fields, Stone, Morley dan sebagainya.

Hal ini juga berlaku buat tradisi etnik Jerman, Prancis, Albania, Armenia, Arab dan banyak masyarakat lain. Nama keluarga lazim dipakai etnik-etnik ini dengan metode berbeda. Edy Barlianto, wartawan *Bisnis Indonesia* di Semarang, berpendapat "fatwa penawaran kepada sumber" cukup adil. "Meskipun nantinya akan muncul referensi kedua-referensi kedua yang berbeda-beda. Tidak apa toh kita sedang terus mencari bentuk," kata Barlianto.

Di Indonesia, saya kira, ada lebih dari 500 kelompok etnik. Tidak semua etnik punya tradisi nama keluarga. Namun cukup banyak juga yang punya tradisi itu. Orang bisa mengatakan seseorang itu etnik Batak hanya dari nama. Di Medan, hanya melihat nama, orang tahu dia Batak Karo atau Batak Mandailing: Pakpahan, Panggabean, Siahaan, Sihaloho, Siregar dan lain-lain.

Di Manado, ada belasan etnik Minahasa maupun Sangihe dan Talaud, yang bisa dikenali dari nama marganya: Luntungan, Rompas, Supit, Wenas dan sebagainya. Di Pulau Ambon, juga ada nama marga: Matulessy, Latumahina dan lain-lain. Ini belum lagi kalau pergi ke kepulauan Tanimbar, Kei maupun di utara, Pulau Halmahera. Di

http://pustaka-indo.blogspot.com

Papua, juga ada nama keluarga: Gebze, Giay, Roemkorem dan lain-lain. Orang Papua mudah mengenali seseorang dari "gunung" atau "pantai" hanya dari nama.

Etnik Melayu, mungkin pengaruh kebudayaan Arab, menggunakan kata "bin" maupun "binti" dalam penamaan anak-anak mereka. Abdul bin Hamid artinya Abdul anak Hamid. Istri saya, Sapariah binti Saturi, orang Madura kelahiran Pontianak, namanya bermakna "Sapariah anak Saturi."

Namun Osama bin Laden dari Al Qaeda artinya Osama dengan nama keluarga Laden. Keluarga Laden menggunakan kata "Bin Laden" buat nama keluarga. Ayah Osama, bernama Mohammed bin Laden, seorang pengusaha yang mendirikan Saudi Binladin Group. Ketika Mohammed meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang pada 1967, putra sulungnya, Salem bin Laden, mengambil-alih kepemimpinan dalam kelompok bisnis ini. Salem juga meninggal dalam kecelakaan pesawat pada 1988. Bakr bin Laden, adik Salem, mengambil-alih kepemimpinan keluarga mereka. Mohammed menikah 22 kali dan menghasilkan anak 55 orang. Osama satu-satunya anak dari isteri kesepuluh Hamida al-Attas.

Standar penerjemahan nama Arab ke bahasa-bahasa Eropa belum konsisten. Nama "Osama bin Laden" juga dieja "Usama bin Laden" atau "Usama bin Ladin." Ada juga yang memakai "Ussamah Bin Ladin" atau, dalam media massa berbahasa Prancis, dieja "Oussama Ben Laden." Nama keluarga mereka juga terkadang dieja Binladen, terkadang Binladin. Namun ejaan paling populer "Osama bin Laden."

Dalam buku *The New York Times Manual of Style and Usage* karya Allan M. Siegal dan William G. Connolly, ada lebih dari 20 halaman dipakai untuk menerangkan penulisan nama. Intinya, tetap pakai nama marga namun kapan wartawan mereka bisa tak menggunakan nama marga juga diterangkan. Manual itu juga menerangkan macam-macam sejarah nama keluarga.

Sertifikat Kelahiran

http://pustaka-indo.blogspot.com

Urusan nama keluarga dalam hukum negara Indonesia cukup ruwet. Menurut harian *The Jakarta Post* terbitan 2002, nama keluarga tak diizinkan untuk dipakai dalam akte kelahiran seorang bayi, yang lahir di Indonesia.

Asal-usulnya ada dalam aturan (*staatblad*) Hindia Belanda. *Staatblad* minta akte kelahiran harus mencatat tanggal kelahiran, nama si bayi, jenis kelamin, nama lengkap kedua orangtua serta tempat tinggal orangtua. *Staatblad* tersebut punya ketentuan berbeda untuk orang Kaukasian, Tionghoa, Timur Tengah maupun pribumi.

Muninggar Sri Saraswati, wartawan *The Jakarta Post*, menerangkan ketika negara Indonesia menggantikan Hindia Belanda, sebagian dari aturan itu dihapus dan sebagian lagi dipertahankan. Celakanya, nama keluarga, yang dianggap "kebelanda-belandaan," dilarang dicantumkan dalam akte kelahiran. Tujuannya, "menyeragamkan penamaan seluruh warga Indonesia." Pada 1961, Presiden Soekarno meneken sebuah undang-undang yang mengizinkan orang dewasa mengubah atau menghilangkan nama keluarga mereka.

Pada 1974, Departemen Kehakiman dalam rezim Soeharto, mengeluarkan aturan di mana semua kantor catatan sipil dilarang mencantumkan nama keluarga dalam akte kelahiran semua bayi. Aturan ini bikin repot banyak orang Ambon, Arab, Batak, Flores, Minahasa, Papua, Timor, Tionghoa dan sebagainya.

Saraswati memberi contoh bagaimana soal warisan di tanah Batak jadi kacau, gara-gara si ahli waris tak bisa menunjukkan dia punya nama keluarga sama dengan almarhum. Namanya juga Indonesia. Aturan ini dielak dengan uang suap atau cara-cara lain. Maka kartu identitas, paspor, ijazah dan sebagainya masih bisa mencantumkan nama keluarga.

Anak-anak Ali Alatas masih pakai nama Alatas. Anak-anak keluarga Leo dan Cosmas Batubara juga masih pakai Batubara. Kedua anak Arief Budiman juga memakai nama Budiman. Anak saya, Norman Harsono, kelahiran 1997, juga punya paspor dengan

http://pustaka-indo.blogspot.com

Harsono. Kami membayar sedikit uang buat pemakaian nama keluarga ini. Banyak kantor catatan sipil, terutama di luar Pulau Jawa, juga bersedia mengeluarkan catatan tambahan guna melengkapi akte kelahiran. Isinya sederhana saja. Nama keluarga dari si bayi.

Soekarno dan Soeharto sama-sama orang Jawa, tanpa nama keluarga. Saya duga bias kebudayaan Jawa dari Soekarno dan Soeharto mendorong munculnya penolakan terhadap nama keluarga. Mereka tak mengerti mengapa nama keluarga penting. Soekarno mungkin lebih sekolahan dari Soeharto. Motivasi Soekarno mungkin "menyeragamkan" semua etnik di Indonesia serta menciptakan sebentuk super-etnik. Tapi Soekarno juga seorang rasis - Benedict Anderson pernah menulis Soekarno memuji Adolf Hitler - yang tidak toleran terhadap keragaman di negeri Indonesia.

Praktik ini tak perlu ditiru para wartawan. Keragaman masyarakat-masyarakat di Indonesia akan lebih dihargai dan dihormati bila wartawan mulai menggunakan referensi kedua yang lebih baik. Ia juga mencerminkan pemahaman terhadap slogan "Bhinneka Tunggal Ika." Orang boleh berbeda. Orang boleh punya maupun tak punya nama keluarga.

Kesimpulannya, mulailah bertanya pada sumber Anda, apa nama keluarganya? Apa referensi kedua untuk nama Anda?

Jakarta, 2008

http://pustaka-indo.blogspot.com

http://pustaka-indo.blogspot.com

DINAMIKA RUANG REDAKSI

http://pustaka-indo.blogspot.com

http://pustaka-indo.blogspot.com

Kecepatan, Ketepatan, Perdebatan

MENJELANG SORE JUMAT, 20 Juli 2001, para awak redaksi *RCTI* berkumpul di kantor. Mereka akan piknik ke Puncak, daerah sejuk sekitar 70 kilometer selatan Jakarta, memanfaatkan liburan akhir pekan.

Suasana meriah itu mendadak surut ketika mereka tahu Presiden Abdurrahman Wahid bakal melantik seorang perwira polisi jadi pejabat sementara kepala polisi Republik Indonesia. Ini gawat karena akan memancing lawan-lawannya menggelar sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kata lainnya: pemecatan!

"Jadi acara dibatalkan dan semua siaga," kata Atmadji Sumarkidjo, wakil pemimpin redaksi *RCTI*.

Mereka bergegas meliput langsung acara itu pukul 17.30 dari Istana Negara tempat Jenderal Surojo Bimantoro, pejabat kepala polisi yang diganti Wahid, sengaja memboikot dan tak menyerahkan tongkat komando. Toh, Wahid tetap melantik Jenderal Chaeruddin Ismail seraya mengatakan tongkat komando itu tradisi militer, bukan polisi.

Seusai pelantikan, Wahid menyatakan "semua pihak" harus siap-siap bila negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Chaeruddin tampaknya disuruh Wahid melaksanakan keadaan darurat itu.

Usai pelantikan, pukul 19.00 Atmadji Sumarkidjo, memimpin rapat redaksi *RCTI*. Mereka membagi pekerjaan. Semua awak

http://pustaka-indo.blogspot.com

redaksi yang ada di rumah ditelepon. "Besok pagi pukul lima sudah harus ada di kantor, pergi ke lapangan dan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing," kata Sumarkidjo.

Untungnya, mereka tak panik karena sudah punya persiapan satu bulan sebelumnya, jaga-jaga kalau pertikaian presiden versus parlemen meruncing. "Yang juga krusial adalah mengatur dengan yang lain. Kita ada sinetron, film anak-anak, kita sudah mengatur itu semua," kata Sumarkidjo. "Pihak iklan bisa *complain* ketika iklannya tidak ditayangkan," kata Sumarkidjo.

Sekitar dua kilometer dari *RCTI*, di sebuah ruangan Hotel Mulia di daerah Senayan, terjadi pertemuan singkat antara ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais dengan menteri koordinator politik, sosial, dan keamanan Agum Gumelar.

Amien adalah rival utama Wahid. Mereka saling mengenal lebih dari 20 tahun. Mereka juga pernah memimpin dua organisasi keagamaan yang secara historis dan sosiologis punya perbedaan. Amien adalah mantan ketua Muhammadiyah, yang sering disebut sebagai organisasi Islam modernis, anggotanya kebanyakan orang perkotaan. Sedangkan Wahid, lebih akrab dipanggil Gus Dur, adalah mantan ketua Nahdlatul Ulama, yang biasa disebut Islam tradisional, dan anggotanya kebanyakan warga perdesaan.

Gumelar pembantu Wahid untuk urusan keamanan. Gumelar orang militer tulen. Dia lulusan akademi militer Magelang pada 1968. Kariernya banyak dibangun lewat pasukan komando serta intelijen.

Di kamar hotel itu, menurut Gumelar dalam wawancara dengan majalah *Forum,* Amien menyampaikan rencana percepatan sidang istimewa MPR. Gumelar tanya apakah rencana itu sudah dibicarakan dengan Megawati Soekarnoputri, wakil presiden sekaligus ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang punya kursi terbanyak di parlemen.

"Sudah," jawab Amien.

"Kalau memang sudah ya, *go ahead*. Saya tidak bisa melarang.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Silakan kalau sudah bulat. Kalau soal keamanan, dari awal aparat keamanan sudah siap. Itu tidak ada masalah," kata Gumelar.

Dari pertemuan itu, Amien Rais mengadakan rapat di ruang kerjanya di gedung parlemen yang terletak dekat hotel. Amien memimpin rapat sekitar 20 legislator untuk menanggapi pelantikan Chaeruddin Ismail. Banyak wartawan menunggu keputusan rapat.

"Besok, Sabtu 21 Juli mulai pukul 10.00 pagi kami mengundang seluruh anggota majelis untuk mengadakan rapat paripurna dalam rangka sidang istimewa MPR," kata Amien Rais. Amien mengatakan pengangkatan Chaeruddin dapat membuat institusi kepolisian "retak dan pecah sehingga mengganggu keamanan."

Maka Jumat malam itu semua anggota MPR, yang terdiri dari semua anggota parlemen, sekitar 500 orang, plus sekitar 200 orang utusan daerah dan golongan, diberitahu agar hadir Sabtu pagi untuk rapat paripurna. Pertempuran presiden versus parlemen dimulai.

SABTU PAGI, 21 JULI 2001. Lain dengan hari biasa, hari ini wartawan tak bisa masuk ke gedung parlemen tanpa menunjukkan kartu tanda pengenal warna putih bertuliskan PELIPUTAN. Suasana halaman depan gedung sangat sepi.

Tapi di halaman belakang terlihat 15 buah panser berjejer rapi. Agak jauh sedikit ada 14 tank baja VAB Renault buatan Prancis dan tiga mobil pemadam kebakaran. Juga terdapat anjing gembala Jerman. Menurut seorang perwira polisi, ada 2.095 tentara dan polisi dari 29 satuan setingkat kompi yang datang ke Senayan. Mereka menjaga kemungkinan datangnya ribuan demonstran pendukung Wahid, yang didukung oleh Nahdlatul Ulama, organisasi muslim terbesar di Indonesia, memprotes rapat paripurna MPR.

Tindakan ini didasarkan pada asumsi bahwa kaum nahdliyin bisa mengamuk kalau junjungan mereka diganggu. Jawa Timur, provinsi asal Wahid, beberapa kali dilanda amuk ketika parlemen mengeluarkan memorandum terhadap Wahid. Wahid sendiri tak

http://pustaka-indo.blogspot.com

sekali dua mengkhawatirkan kemungkinan itu walau dia sering minta pengikutnya, terutama dari Jawa Timur, agar tak datang ke Jakarta.

Agak jauh sedikit tampak studio mini dari beberapa televisi Indonesia: *SCTV, RCTI, Indosiar, TPI,* dan *TVRI*. Wartawan hilir-mudik di berbagai tempat umum. Makin lama makin banyak. Dari suratkabar Indonesia hingga asing, dari media Jakarta hingga daerah-daerah.

Salvo pertama Sabtu pagi ternyata datang dari Istana Negara tempat Presiden Wahid mengadakan pertemuan pers. Wahid menyatakan tak akan menghadiri pertemuan dengan MPR, "Itu sidang yang tidak sah atau ilegal." MPR hanya berhak menyelenggarakan sidang umum, sidang tahunan, dan sidang istimewa. Rapat paripurna merupakan bagian dari ketiga sidang tersebut. "Mana mungkin sidang istimewa ditentukan oleh sebuah paripurna? Bagaimana mungkin bagian yang lebih kecil bisa menentukan sesuatu yang lebih besar?" kata Wahid.

Seraya berpidato, Wahid menyuruh stafnya membagikan fotokopi surat undangan Amien Rais yang minta Wahid hadir di parlemen pada Senin 23 Juli 2001 untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Wahid tak bisa menyembunyikan kemarahannya ketika mempertanyakan bagaimana mungkin sidang paripurna yang belum dimulai Sabtu pagi ini sudah memberikan surat macam itu Jumat malam?

Pada saat sama, sekitar pukul 09.40 di depan televisi yang terdapat dalam gedung parlemen di Senayan, tampak berkumpul polisi dan beberapa wartawan. Mereka menonton siaran langsung dari Istana Negara dan tertawa terbahak-bahak, sambil berteriak hu... hu... hu... ketika Wahid meninggikan suara.

Rapat paripurna sendiri yang sedianya dimulai pukul 10.00 tertunda karena Amien Rais dan banyak anggota MPR lain juga menyaksikan televisi. Ibarat orang bertinju, Istana Merdeka dan Senayan mulai saling melancarkan pukulan demi pukulan lewat media. Ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam buku *The Elements of Journalism: What Newspeople*

http://pustaka-indo.blogspot.com

Should Know and the Public Should Expect (2001). Kedua wartawan Amerika Serikat itu mengatakan satu dari sembilan elemen jurnalisme adalah media harus menyediakan forum bagi masyarakat untuk melontarkan kritik dan komentar.

Mereka mengibaratkan media dengan *"public houses"* pada zaman pra-percetakan di mana setiap pengunjung rumah macam itu, bisa berupa bar atau warung, menyampaikan dan mencari informasi.

Seorang penjaga bar, seraya menyajikan segelas bir, tahu bagaimana menyampaikan informasi dengan akurat. Dia tak diharapkan menambahi, tak diharapkan mengurangi. Makin akurat seorang penjaga bar menjalankan fungsi ini makin menguntungkan bagi warungnya. Makin banyak orang percaya pada forumnya. Makin banyak pula pelanggannya.

Televisi Indonesia tampaknya mulai mendapatkan kepercayaan macam itu. Siaran langsung demi siaran langsung menjadikannya sebagai forum publik. Ini prestasi tersendiri. Tanpa ada kepercayaan, orang tak mau bicara lewat media.

Ini pertama kali pertikaian presiden versus parlemen disiarkan langsung oleh televisi. Pada zaman Presiden Soekarno (1945-1965) radio belum melakukan itu sedang televisi masih teknologi baru. Selama 33 tahun pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998) media tak bisa bekerja cukup bebas. Presiden B.J. Habibie bekerja dalam waktu tak sampai dua tahun, sangat singkat, dan diganti oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Lewat media pula orang-orang di Senayan mempertanyakan pelantikan Chaeruddin Ismail. Legislator Budi Harsono, ketua fraksi militer di parlemen, mengatakan, "Ciri-ciri organisasi bersenjata itu dia harus satu, harus homogen tidak boleh dua."

Legislator Ade Komarudin dari Partai Golongan Karya berpendapat Presiden Wahid, tak biasanya bicara prosedur ketika Wahid sendiri sering melanggar prosedur. Komarudin berpendapat adalah sah bagi MPR mengadakan sidang paripurna untuk mengambil keputusan bikin sidang istimewa atau tidak.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Akhirnya rapat paripurna MPR dimulai. Mula-mula dilakukan dengan mempersilakan masing-masing fraksi menyuarakan sikap. Satu per satu juru bicara fraksi naik ke podium dan berpidato. *TVRI* adalah satu-satunya televisi yang diizinkan masuk ke ruang sidang. Entah kenapa televisi swasta tak dipersilakan meliput dari ruang sidang?

Legislator Yusuf Muhammad, ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, partainya Wahid, memberi keterangan lain, "Kita tidak membenarkan, tidak menyetujui, tidak ikut serta, dan tidak ikut bertanggungjawab."

"Kalau saya boleh menyatakan secara sederhana, mereka kecewa dan sakit hati. Karena berkali-kali para tokohnya mengatakan bahwa mereka itu kesal karena fungsionarisnya diberhentikan," katanya.

Ketika pemungutan suara diambil, semua 180 legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan setuju sidang istimewa dipercepat dan diadakan Senin 23 Juli 2001. Partai Golongan Karya dengan 176 anggota hadir semua setuju. Fraksi Utusan Golongan, 63 hadir, lima anggota fraksi menolak, empat orang menyatakan abstain. Kemudian, fraksi militer-polisi, yang seringkali memutuskan abstain, 38 anggota setuju. Partai Kebangkitan Bangsa menolak hadir dalam rapat paripurna ini.

Singkatnya, dari jumlah total 601 anggota MPR yang hadir 592 orang menyatakan setuju penyelenggaraan sidang istimewa, lima menolak, dan empat orang abstain. Mereka yang setuju beralasan Presiden Wahid melanggar sebuah ketetapan MPR karena mengangkat Chaeruddin Ismail sebagai pemangku sementara jabatan kepala kepolisian tanpa konsultasi parlemen.

Sabtu siang voting sudah diambil. Banyak anggota MPR hilir-mudik di gedung parlemen. Wartawan mengerumuni mereka. Salah satunya Nursyahbani Katjasungkana, anggota fraksi utusan golongan yang dikenal pengacara dan aktivis perempuan, yang menolak percepatan sidang istimewa MPR.

Kepada wartawan Katjasungkana mengatakan dia menolak sidang istimewa karena "elemen-elemen yang ada di sini mayoritas adalah Orde Baru."

http://pustaka-indo.blogspot.com

"Kalau kita ingat pasca-jatuhnya Soeharto, kita berhasil melalui pemilihan umum dengan *happy*. Tetapi begitu masuk ke gedung ini, semua itu dinafikan begitu saja. Para wakil ini memposisikan diri tidak sebagai wakil tapi sebagai wali!"

MINGGU PAGI, 22 JULI 2001. Di sebuah rumah dengan halaman hijau, luas, penuh tanaman, di daerah Kebagusan, selatan Jakarta, diadakan sebuah rapat selama hampir tiga jam. Rumah ini milik pribadi Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Para tamunya ketua berbagai partai politik.

Usai rapat Megawati menemui puluhan wartawan yang menunggu di pintu rumah. "Seperti yang saudara lihat di tempat kediaman saya pribadi, saya telah mengundang para ketua umum dan kapasitas saya sebagai pengundang adalah ketua umum PDI Perjuangan," kata Megawati.

Selanjutnya Megawati mempersilakan Amien Rais, ketua Partai Amanat Nasional sekaligus ketua MPR, maupun Akbar Tanjung, ketua Partai Golongan Karya sekaligus ketua parlemen, untuk memberitahu wartawan hasil pertemuan itu.

Amien mengatakan tidak berapa lama lagi Indonesia akan melihat sebuah kepemimpinan nasional yang baru, "Insya Allah, itu semua tergantung Allah, kami semua di sini sudah bersepakat untuk memberikan dukungan moral *support* kepada ibu Megawati Soekarnoputri."

Ketika wartawan bertanya apa Megawati setuju dengan kesepakatan tersebut, Amien Rais menyatakan, "Ya tentu."

Megawati hanya tersenyum. Rapat ini berhasil memuluskan kesepakatan partai-partai. Mereka tampaknya puas dengan penampilan Megawati. Bisa dipastikan bila tak ada aral melintang mereka bakal minta wakil-wakil mereka di parlemen untuk memberikan suara memecat Wahid dan mengangkat Megawati sebagai presiden.

Ternyata Minggu masih ada satu peristiwa besar yang makan perhatian politisi maupun media. Saat Amien, Megawati, dan

http://pustaka-indo.blogspot.com

politisi lain berunding di Kebagusan, dua buah gereja mengalami pengeboman. Bom meledak di Gereja Santa Anna dan satunya di Gereja Batak, keduanya di kawasan timur Jakarta. Wartawan pun ditugaskan mengejar berita itu. Mendatangi gereja maupun rumahsakit tempat 32 korban dirawat.

Seakan-akan melupakan pertikaian mereka, Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Akbar Tanjung, Alvin Lie, A.M. Fatwa, Fuad Bawazier, dan banyak politisi lain mengalir ke dua tempat itu. Mereka tak datang bersamaan tapi tak bisa hilang kesan bahwa pada momen-momen yang sangat menentukan perseteruan politik mereka, kedua kubu berlomba menunjukkan simpati kepada para korban lewat media.

LAPANGAN LUAS SEKITAR MONUMEN NASIONAL selalu menarik perhatian orang pada hari libur. Minggu sore 22 Juli 2001 itu seperti biasa, banyak orang makan angin di sana. Ada banyak anak kecil yang minta diantar bapak dan ibunya naik dokar. Banyak juga orang muda pacaran. Para pedagang kakilima menggelar dagangan di sini.

Minggu sore itu ada satu tambahan tontonan. Lebih dari 2.000 serdadu dilengkapi 134 tank datang ke lapangan itu. Mereka mengadakan "apel bersama dalam rangka kesiapan jajaran Tentara Nasional Indonesia di wilayah Jakarta."

Apel siaga ini dipimpin komandan apel Kolonel Marinir Sapzen Nurdin dari Brigade Infanteri 2 Marinir. Sedangkan inspektur upacara Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Ryamizard Ryacudu.

Pukul 19.00 Ryacudu memasuki lapangan Monumen Nasional dengan mengendarai panser. "Bismillahhirrahmannirahim," Ryamizard Ryacudu membuka pidato.

"Pangdam Jaya, Komandan Korp Marinir, Danjen Kopassus, Panglima Kohanudnas, Pangkop AU, dan Paskhas, panglima Armabar dan seluruh prajurit TNI terutama yang berada di daerah Jakarta Raya yang saya hormati, saya cintai dan yang sangat saya banggakan."

http://pustaka-indo.blogspot.com

Secara singkat Ryacudu mengatakan tujuan apel itu adalah "membangun kekompakan" antara semua prajurit. Dia mengingatkan pada 1998 kekompakan itu terganggu ketika "kita diadu-adu sehingga timbul perkelahian di antara kita." Walau dalam pidatonya tak disebut, tapi Ryacudu mengacu pada pertikaian antara prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan marinir pada momen-momen jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu Kostrad dianggap antireformasi. Marinir justru dielu-elukan mahasiswa.

Ryacudu menjelaskan bahwa apel ini tanpa "maksud politik" karena sudah dilaporkan dan sudah mendapat persetujuan dari semua kepala staf angkatan, panglima TNI Widodo A.S. dan Presiden Wahid. Dia menekankan bahwa dia adalah tentara profesional yang tak mengurus politik.

Belum jelas benar apa dampak politis dari apel tersebut. Media di Indonesia belum banyak yang menggali informasi rapat apa yang memutuskan diadakannya apel malam itu? Bagaimana hubungan Ryamizard Ryacudu dengan Presiden Wahid? Apa hubungan apel itu dengan ketaksukaan Wahid pada dukungan fraksi militer di parlemen terhadap percepatan sidang istimewa MPR?

Di Jakarta, perkembangan ini bisa diketahui dari siaran langsung televisi dan radio, terutama *Metro TV* dan radio *Elshinta* 90,5 MHz FM. Apalagi juga ada undangan via *short message service*, biasa disingkat SMS, yang beredar secara terbatas di Jakarta lewat telepon seluler. Pesannya: *Dukung Gusdur sbg pejuang kemanusiaan! (bukan sbg presiden saja) & malam ini istana terbuka utk rakyat; kl setuju kirim pesan ini ke 10 org lagi & dtg ke istana.*

Seberapa jauh teknologi itu mendorong orang datang ke Istana Negara masih bisa dijadikan bahan studi yang lebih serius. Yang jelas cukup banyak tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat maupun mahasiswa, yang selama ini mendukung Presiden Wahid, datang berbondong-bondong ke Istana Merdeka.

Sekitar pukul 22.00 jumlah mereka makin banyak. Sebut saja aktivis Emmy Hafild, Muchtar Pakpahan, Sandyawan Sumardi,

http://pustaka-indo.blogspot.com

Nursyahbani Katjasungkana, Bonar Tigor Naipospos, Dita Indah Sari, Yeni Rosa Damayanti, Alexander Irwan, Hermawan Sulistyo, dan sebagainya. Adik kandung Megawati, Rachmawati Soekarnoputri, juga ikut datang.

Faisol Riza dari Partai Rakyat Demokratik mengatakan lewat telepon pada seorang wartawan bahwa istana terbuka bagi rakyat, "Tidur di sini pun boleh."

Yeni Rosa Damayanti dari Solidaritas Perempuan keluar masuk istana dan merasa kecewa karena pada saat yang genting media tak berperan membela Gus Dur, "Tidak ada prinsip-prinsip dan etika yang dipegang. Saya lihat uang menjadi faktor pendorong yang utama. Bukan lagi sebuah cita-cita atau sebuah ideologi."

"Nah, ketika konflik menjadi sumber uang, itulah jalan yang diambil. Sama sekali tidak ada pikiran tentang akibat yang ditimbulkan. Akibatnya media massa terjebak pada jurnalisme yang prokekerasan, prosensasional dan memacu konflik."

"Semakin konflik itu berkembang dan lama, maka semakin besar pendapatannya," katanya lagi.

Menurut AC Nielsen, antara Sabtu 21 Juli dan Senin 23 Juli, *SCTV* mengantungi Rp 3.182 miliar dari iklan program berita. *RCTI* mengantongi Rp 1.741 miliar, *Indosiar* Rp 1.380 miliar, *TPI* Rp 683 juta, *Anteve* Rp 523 juta, serta *Metro TV* Rp 282 juta.

Jumlah ini besar tapi relatif kecil dibandingkan iklan dari program hiburan. *Metro TV* memperoleh iklan paling sedikit karena usianya relatif muda. Stasiun ini mulai siaran Desember 2000.

Novi B. Suratinoyo, wakil pemimpin redaksi tabloid *Victorius*, memandang media banyak yang ingin menjatuhkan Gus Dur, "Editorial *Media Indonesia*, misalnya, itu sangat jelas anti-Gus Dur. Seharusnya sikap wartawan itu adalah mengontrol mereka bukan menjatuhkan mereka."

Pukul 21.30 Gus Dur menemui para aktivis. Beberapa menteri juga datang. Gus Dur mengatakan dia akan mengeluarkan dekrit. Rapat jadi panas. Sebagian menteri menyatakan kurang setuju. Gus Dur mengatakan, "Malam ini juga akan saya umumkan dekrit."

http://pustaka-indo.blogspot.com

Soal konsep Wahid minta para aktivis membantu. Hermawan Sulistyo, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang menulis buku *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966),* mengusulkan pembubaran Partai Golongan Karya, warisan dari rezim Presiden Soeharto. Usul itu ditolak karena dianggap antidemokrasi. Kesepakatannya, partai ini dibekukan hingga ada keputusan Mahkamah Agung.

Sekitar pukul 22.30 pintu istana ditutup karena banyaknya jumlah pengunjung. Banyak orang menunggu di pintu kiri gedung istana. Juga banyak wartawan yang menunggu di sana. Situasi sekeliling istana tampak sepi. Tidak terlihat pasukan dalam jumlah mencolok.

Pada pukul 23.03, tampak beberapa orang kiai keluar dari istana. Habib Yahya Assegaf dari Jakarta kepada wartawan mengatakan Gus Dur "nasibnya mujur, bagus. Dekrit akan didukung oleh semua rakyat Indonesia."

Kalau dari TNI tidak mendukung bagaimana?

"TNI mendukung kok. Yang tidak mendukung itu barangkali cuma 20 persen atau kurang."

Televisi tak banyak mengambil gambar para kiai dan aktivis ini. Indra Piliang dari Center for Strategic and International Studies mengatakan, "Saya udah pegel nungguin sampai pukul 23.00, tapi Arief Suditomo (dari *SCTV*) dan kawan-kawan hanya melaporkan sejumlah nama yang ada di istana, tanpa tertarik untuk wawancara orang-orang itu."

Hermawan Sulistyo keluar dari istana dan dicegat wartawan.

"Gus Dur mau mengeluarkan dekrit?"

"Belum tahu, maju mundur, maju mundur."

"Konsep apa yang Anda tawarkan untuk dekrit?"

"Ah enggak, masuk aja saya enggak kok. Kalau kemarin, bersama dengan teman-teman LSM, dekritnya hanya soal pembubaran Golkar sampai ada keputusan MA (Mahkamah Agung). Tapi, kemarin. Bukan tadi lho! Soal dekrit itu saya masih seorang demokrat. Hitungan-hitungannya itu bukan pertarungan politik."

http://pustaka-indo.blogspot.com

"Kalau dalam pandangan Anda mestinya gimana?"

"Ini sudah *point of no return* buat saya. Bagi saya cuman satu aja, kalau alasan moral, bukan alasan politik: pembekuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), lalu pemilu dipercepat. Itu anu aja bahwa mereka menolak peradilan HAM untuk penanggung jawab Trisakti dan Semanggi."

Sulistyo mengacu pada dua tempat di Jakarta saat 1998 terjadi penembakan mati terhadap beberapa mahasiswa. Pertama di depan kampus Universitas Trisakti dan kedua terjadi dekat jembatan Semanggi.

"Tapi militer khan tidak mendukung Gus Dur untuk mengeluarkan dekrit?"

"Ini kan urusan politik, urusan apa sama tentara?"

Sulistyo memainkan peran cukup penting Minggu malam itu. Salah satu televisi yang melakukan kontak telepon dengan Sulistyo adalah *Metro TV*. Menariknya, pemirsa dengan jelas mendengar tuduhan-tuduhan mahasiswa terhadap *Metro TV* ketika wawancara berlangsung.

"Metro Cendana itu. Metro cuci uang Cendana itu."

"Mungkin Anda bisa *backsound* di belakang Anda itu. Nanti ada kesempatan Bung Kikiek," ujar Hersubeno Arief dari *Metro TV*. Kikiek nama panggilan Sulistyo.

"Iya, saya sudah menghindar," kata Sulistyo.

Tuduhan mahasiswa bahwa *Metro TV* berhubungan dengan keluarga Cendana mungkin disimpulkan karena 20 persen saham *Metro TV* dimiliki Bimantara, sebuah perusahaan publik, yang didirikan dan sebagian sahamnya dimiliki putra Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo.

"Jadi konkritnya apa Bung Kikiek?"

"Kalau buat saya bubarin saja DPR itu. Itu penghambat reformasi."

Di studio *Metro TV*, Hersubeno ditemani Alifian Mallarangeng dari *Partnership for Government Reform*, sebuah lembaga dana bentukan Bank Dunia, Asian Development Bank, serta United Nations Development Program. Mallarangeng lebih dikenal sebagai komentator politik. Dalam wawancara itu Mallarangeng mengatakan, "Persoalannya adalah siapa yang berhak membubarkannya Bung Kikiek?"

http://pustaka-indo.blogspot.com

"Ah, itu soal hukum. Biarlah para pakar hukum berantem. Saya lihat dari sisi moralitas saja itu."

Mallarangeng menjawab, "Tentu kalau kita bicara tentang demokrasi, kita menghargai adanya konstitusi, aturan-aturan hukum, yang membatasi kemungkinan pemusatan kekuasaan."

"Bukan! Bagi saya demokrasi itu berarti pembenaran pembunuhan terhadap mahasiswa. Itu ukuran saya," kata Hermawan Sulistyo.

"Bung Kikiek, Anda tidak membayangkan dampak dari dekrit bisa meneteskan darah seperti yang Anda sesali saat ini?" tanya Hersubeno Arief.

"Sama halnya anggota DPR yang tidak membayangkan darah mahasiswa itu. Sama saja kan?" kata Sulistyo.

"Artinya kemudian sah saja darah tumpah berikutnya. Dan ini bukan hanya mahasiswa tetapi juga rakyat biasa," kata Hersubeno Arief.

"Itu kan kata Anda. Kata saya, mereka yang memulai ini. Jadi, ini konsekuensi logis dari satu situasi yang bagi saya itu sangat menghambat reformasi," jawab Sulistyo.

"*Metro* itu Cendana," muncul teriakan lagi.

"Tapi bukankah, saya bisa saja, dan Anda bisa tidak sepakat, dengan keputusan DPR dan MPR, tetapi bukankah sistem demokratis," kata Mallarangeng.

"Saya tidak bisa dengar, ribut nih mahasiswa di seputar saya," kata Sulistyo.

"Mungkin Anda bisa bergerak sedikit. Nanti kita kasih porsi," kata Hersubeno.

Suara mahasiswa makin ricuh.

"Saya tidak bisa mendengar nih. Sudah," kata Sulistyo, sembari mematikan teleponnya.

PUKUL 21.00 DI DEPARTEMEN PERTAHANAN di Jalan Merdeka Barat ada rapat. Tuan rumahnya Laksamana Widodo A.S., panglima Tentara Nasional Indonesia, yang mengundang para petinggi militer

http://pustaka-indo.blogspot.com

dari angkatan darat, laut, dan udara, serta Agum Gumelar, menteri koordinator politik, sosial, dan keamanan.

Widodo mengatakan Presiden Wahid hendak menggantikan kepala staf angkatan darat dan angkatan laut, masing-masing Jenderal Endriartono Soetarto dan Laksamana Indroko Sastrowiryono serta mengangkat Letnan Jenderal Johny Lumintang, seorang perwira senior yang menjabat sekretaris jenderal Departemen Pertahanan, sebagai wakil panglima TNI.

Mereka menganggap keputusan ini persiapan Wahid menjalankan keadaan darurat. Tanpa dukungan polisi dan militer Wahid tak bisa menjalankan kebijakan itu. Polisi sudah relatif dikuasai dengan mengangkat Chaeruddin Ismail. Langkah berikutnya adalah militer.

Para perwira ini juga mengundang Lumintang. Ternyata Lumintang menolak pengangkatannya. Secara diplomatis Lumintang menyerahkan pada Widodo A.S.

Pukul 23.30 Widodo dan Gumelar pergi ke Istana Negara buat menyampaikan keputusan rapat. Di istana, Gumelar melihat banyak orang. "Entah dari mana. Banyak sekali. Ada orang-orang LSM dan Rachmawati (Soekarnoputri) di situ," kata Gumelar.

Di dalam ruang kerja Wahid ada beberapa pembantu Wahid termasuk Chaeruddin. Sempat hening sejenak. Kemudian Agum Gumelar mendekati Wahid yang penglihatannya kurang baik.

"Saya Agum Gumelar, menteri Bapak, ingin menyampaikan pandangan dan saran. Kalau Presiden mengeluarkan dekrit, keadaan tidak akan bertambah baik, tapi semakin memburuk, dan ini juga menyangkut nama baik serta reputasi Presiden. Saran saya, janganlah dekrit dikeluarkan demi keselamatan bangsa."

Tiba-tiba Wahid berdiri sambil berteriak sekeras-kerasnya, "Kalian semua banci!" Teriakan Wahid sedemikian kerasnya sehingga mengundang perhatian orang luar. Beberapa pengawal presiden menyerbu masuk. Agum Gumelar kaget. Wahid terlihat emosional dan napasnya terengah-engah. Menurut penuturannya pada Fo*rum,*

http://pustaka-indo.blogspot.com

Gumelar memegang tangan Wahid, "Bapak Presiden, saya membantu presiden dan tidak menginginkan presiden mengambil keputusan yang keliru."

"Sudah saya putuskan!" teriak Wahid.

"Kalau tidak setuju dengan dekrit, maka silakan pisah. Kalau setuju dengan dekrit, maka ikut saya." Suasana tak nyaman. Gumelar pun mengajak Widodo keluar.

SENIN, 23 JULI 2001 DINI HARI. Di kantor *RCTI* di bilangan Kebon Jeruk, Atmadji Sumarkidjo kelelahan dan tertidur di kantor. Bersama rekan-rekannya, wakil pemimpin redaksi *RCTI* itu seharusnya bersantai di Puncak. Tapi Sumarkidjo malah tidur di kantor.

Budhius Maruf, seorang produser *RCTI*, membangunkan Sumarkidjo lima menit sebelum Presiden Abdurrahman Wahid muncul di depan wartawan untuk mengumumkan maklumat.

RCTI langsung menghentikan tayangan film dan pindah siaran ke Istana Negara. Wahid minta maaf lebih dulu pada wartawan karena mereka menunggu lama. Dia mengatakan itu bukan tindakan yang menyenangkan tapi dia harus mengambil tindakan untuk keselamatan negara.

Isi lengkap maklumat dibacakan juru bicara kepresidenan Yahya C Staquf pukul 01.17. Maklumat itu, yang sering disebut "dekrit" oleh Wahid, dasarnya mengatakan "krisis konstitusional telah memperparah krisis ekonomi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi."

"Maka dengan keyakinan dan tanggungjawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa serta berdasarkan sebagian terbesar masyarakat Indonesia, hari ini selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saya terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memaklumkan:

- Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI;

http://pustaka-indo.blogspot.com

- Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun;
- Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung."

Wahid memerintahkan seluruh jajaran militer dan polisi untuk "mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Acara ini berlaku singkat saja. *RCTI, Indosiar*, dan *SCTV* kembali melanjutkan tayangan hiburan yang tertunda.

Sumarkidjo mengatakan pengumuman itu membuat seluruh awak *RCTI* bekerja keras, mencari narasumber, mengemas berita, dan menyiarkannya untuk berita pagi. Mereka kerja tanpa henti hingga pukul 08.00. "Karena kita bukan stasiun berita, kita memasukkan berita curi-curi diselipkan ketika acara film," kata Sumarkidjo.

Tapi acara-acara hiburan itu, dari musik, film, dan hiburan lain, tampaknya membantu meredakan ketegangan di masyarakat. Waktu diumumkannya yang lewat tengah malam juga mengurangi reaksi spontan dari masyarakat. Mungkin reaksinya berbeda bila diumumkan siang hari.

Sepuluh menit sesudah pengumuman itu, menteri koordinator politik, sosial, dan keamanan Agum Gumelar dipanggil Megawati di kediaman resmi Megawati di bilangan Menteng.

"Ada apa ini dan bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Megawati.

Gumelar menjelaskan kejadian di Istana Negara ketika Presiden Wahid emosional. Usai bercerita Gumelar mengatakan dia hendak mundur karena tak setuju dekrit.

"Siapa yang akan mengendalikan masalah keamanan?" tanya Megawati.

Gumelar jadi bingung karena di satu pihak sebagai menteri Gus Dur yang tak setuju keputusan Gus Dur, dia harus mundur, tapi di pihak lain dilarang Megawati. Namun Gumelar membenarkan

http://pustaka-indo.blogspot.com

Megawati dan menyatakan dia tetap menteri tapi "siap mundur."

Sementara itu di Hotel Mulia tempat ketua MPR Amien Rais dan kebanyakan anggota MPR menginap, suasananya mendadak hiruk-pikuk. Orang-orang turun ke lobi hotel. Mereka yang tidur dibangunkan. Orang-orang Partai Golongan Karya tak bisa menyembunyikan kegeraman terhadap Wahid.

"Suasananya kayak pasar," ujar seorang wartawan.

Dalam suasana hiruk-pikuk itu, di mana perkembangan berita diluncurkan dengan cepat, peran televisi jadi sentral dan orang pertama yang komentarnya muncul di televisi bisa berperan paling besar dalam membentuk opini publik.

Kebanyakan televisi menyiarkan langsung dekrit tersebut tapi cuma *Metro TV* yang siap dengan seorang komentator di studionya. Komentator itu adalah Alifian Mallarangeng, seorang Ph.D ilmu politik dari Ohio State University, Amerika Serikat. Mallarangeng keturunan bangsawan Bugis sehingga sering dipanggil gelar bangsawan Andi.

Menurut Mallarangeng, sebelum dekrit diumumkan, dia dan Hersubeno Arief mengobrol "ngalor ngidul nungguin sambil berdebar-debar apa yang terjadi." Ini terjadi karena pengumuman itu ditunda tiga jam dari pukul 22.00 sampai 01.00.

Mereka kemudian berpikir apakah akan ada semacam dekrit yang isinya tak jelas? Semua serba meraba-raba. Situasi di studio *Metro TV* juga menarik. Informasi yang masuk menit per menit; dari reporter di lapangan, dari internet, dari segala macam.

Mereka disodori informasi terus hingga menyaksikan sendiri siaran langsung dari Istana Negara. Saat itu Mallarangeng tak bisa menyembunyikan emosinya lagi. Begitu siaran langsung dihentikan, Hersubeno Arief minta komentar Mallarangeng.

"Ini maklumat, sayang sekali, memperlihatkan sekali lagi, dan tampaknya akan dicatat dalam sejarah, bahwa Presiden Abdurrahman Wahid adalah seorang diktator. Dia telah melakukan makar terhadap negara," kata Mallarangeng.

"Makar ya Bung Andi?" tanya Hersubeno.

http://pustaka-indo.blogspot.com

"Dia telah melakukan makar terhadap negara. Dia telah melakukan makar terhadap lembaga tertinggi negara yang menjadi perwakilan rakyat. Tidak ada hak seorang presiden yang tidak dipilih oleh rakyat secara langsung untuk membubarkan parlemen. Ini bukan sistem parlementer. Ini juga bukan sistem autoritarian. Dengan ini, dia mengambil kembali seluruh kewenangan kekuasaan negara. Pada dirinya sendiri dia sudah mendefinisikan negara. Dirinya adalah negara. *L'etat c'est moi*."

Tanpa jeda Mallarangeng melanjutkan, "Ini tidak bisa dibiarkan semacam ini. Karena itu saya juga mengimbau, seluruh aparat negara, seluruh TNI, dan militer agar tidak mematuhi dekrit ini. Dekrit ini adalah makar terhadap negara. Kepada sesama warganegara Republik Indonesia, inilah saatnya kita mengatakan selamat tinggal Gus Dur! Kemudian kita mempersilakan sidang istimewa MPR/DPR tetap bersidang sebagaimana mestinya. Kita sebagai rakyat dan seluruh aparat negara mesti melindungi wakil-wakil rakyat di MPR melakukan persidangan sebagaimana mestinya. Kemudian memberhentikan dengan tidak hormat Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian melantik Wakil Presiden Megawati sebagai presiden."

Suasana agak tegang. Hersubeno bergurau, "Ya, saya kira ini bukan maklumat tandingan ya?"

"Bukan. Sebagai warga negara dan seorang demokrat," kata Mallarangeng.

PERTANYAANNYA ADALAH SEBERAPA BESAR pengaruh Alifian Mallarangeng? Berapa banyak orang yang menonton *Metro TV*? Berapa persen dari para penonton itu yang terpengaruh imbauan Mallarangeng?

Menurut lembaga pemeringkat AC Nielsen peringkat *Metro TV* Senin dini hari itu berkisar 0,3 sampai 1,2. Ini berarti 0,3 persen sampai 1,2 persen penduduk Indonesia nonton *Metro TV*. Katakanlah populasi Indonesia 200 juta maka yang menonton 600 ribu sampai 2,4

http://pustaka-indo.blogspot.com

juta orang. Sebagian besar mereka ada di Jakarta karena jangkauan *Metro TV* paling banyak di ibukota. Ini cukup besar mengingat *Metro* baru beroperasi sejak Desember 2001.

Berapa orang yang datang ke parlemen untuk menentang dekrit? Belum ada jawaban konkrit tapi di satu sisi Mallarangeng dipuji karena berani mengambil risiko. Bagaimanapun juga ada kemungkinan dekrit dijalankan, parlemen dibubarkan, Amien Rais ditangkap, dan televisi dikuasai. "Istri saya sudah nangis-nangis di rumah karena khawatir saya ditangkap," kata Mallarangeng.

Mallarangeng mengatakan dia berusaha seobjektif mungkin dalam acara bincang-bincang itu dengan melihat konteks peristiwa pada beberapa hari atau bulan sebelumnya. "Tapi ada beberapa titik di mana mungkin saya tidak bisa objektif. Misalnya ketika dekrit diumumkan, saya kecewa, saya marah. Saya menganggap dekrit yang dikeluarkan presiden itu inkonstitusional. Bisa mengarah pada makar, kudeta terhadap negara."

Mallarangeng belajar dari pengalaman negara lain, semisal dampak buruk pembubaran parlemen oleh Presiden Albert Fujimori di Peru dan Presiden Boris Yeltsin di Rusia. "Saya jadi marah. Saya juga tidak suka sidang istimewa MPR karena banyak proses yang saya pertanyakan. Tapi tidak bisa karena saya tidak suka sidang istimewa MPR maka saya membekukan MPR. Dalam titik itulah saya tidak bisa mengambil jarak. Saya bersikap. Sebagai warga negara mungkin atau sebagai orang yang selalu berusaha mewujudkan demokrasi," katanya.

Tapi ada juga yang berpendapat persoalan tak seserius yang dibayangkan Mallarangeng. Wahid tak bisa dibandingkan dengan Fujimori atau Yeltsin. Wahid mengeluarkan dekrit yang tumpul. Kalau saja Mallarangeng tahu kesepakatan Amien Rais dan Agum Gumelar pada Jumat malam, mungkin Mallarangeng bisa mengatakan dekrit itu tak bakal efektif. Militer tak mendukung sehingga tak bakal jalan. Dia tak perlu "mengimbau" militer agar menentang "makar." Kalau Mallarangeng tahu sikap Megawati

http://pustaka-indo.blogspot.com

Soekarnoputri, yang menanggapi ketegangan itu dengan santai, bahkan pergi nonton film Walt Disney *Shrek*, mungkin Mallarangeng lebih tahu bahwa dekrit itu tak bakal melumpuhkan parlemen.

Jajak Pendapat Pantau

Selama sidang istimewa, bagaimana aktor ini disajikan televisi?

Aktor	Berimbang (%)	Negatif (%)	Positif (%)	Tidak tahu (%)
Gus Dur	39,2	36,8	4,4	19,6
MPR	44,1	5,3	33,7	16,7
TNI/Polri	44,1	7,0	23,6	25,3

Bagaimana sumber berita pilihan televisi ketika memberitakan aktor berikut?

Aktor	Berimbang (%)	Negatif (%)	Positif (%)	Tidak tahu (%)
Gus Dur	41,9	6,4	35	16,7
MPR	40,7	38,1	4,2	17
TNI/Polri	51,3	13,9	6,4	28,4

Bagaimana pemilihan narasumber talkshow televisi?

Narasumber anti-Gus Dur	31,1 %
Narasumber pro-Gus Dur	2,4 %
Narasumber berimbang	55,3 %
Tidak tahu/tidak menjawab	11,2 %

Bagaimana televisi menyajikan program talkshow?

Keburukan Gus Dur saja	34 %
Kebaikan Gus Dur saja	1,8 %
Buruk dan baik berimbang	54,7 %
Tidak tahu/tidak menjawab	9,5 %

Jajak pendapat diadakan PANTAU pada 24 Juli hingga 3 Agustus 2001 untuk menilai pendapat publik terhadap berita televisi saat memberitakan jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid. Jumlah responden 500 orang diambil secara acak dari Buku Petunjuk Telepon Jakarta 2001. Ada 47 responden yang mengatakan tak menonton berita televisi pada periode 20-23 Juli 2001. Hanya 453 responden yang diikutsertakan dalam jajak pendapat. Tingkat kesalahan penarikan sampel mencapai 4,4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Jajak pendapat ini hanya mencerminkan pendapat kelas menengah Jakarta yang menonton televisi.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Th. Yacob Koekeritsz, aktivis Forum Demokrasi, yang kenal Mallarangeng sejak bangku sekolah menengah di Makassar, mengatakan Mallarangeng "emosional sekali." Mallarangeng dianggapnya "tidak lagi *political scientist* karena berpihak sekali."

"Okelah Andi Mallarangeng dikasih waktu empat jam berturut-turut. Satu atau 1,5 jam diberikan kepada Arbi Sanit, Thamrin Tomagola, atau yang lain," kata Yeni Rosa Damayanti, mengacu pada dua dosen Universitas Indonesia yang pro-Wahid.

Hersubeno Arief mengatakan kesulitan terkadang disebabkan keterbatasan komentator yang bisa dihubungi dengan cepat. Selain harus menguasai persoalan, seorang komentator diharapkan orang yang kenal kamera. *Metro TV* juga menghubungi orang-orang Partai Kebangkitan Bangsa tapi mereka tak bisa dihubungi atau tak bersedia datang. Andy F. Noya, pemimpin redaksi *Metro TV*, menghubungi Alifian Mallarangeng Minggu pukul 22.00. Noya minta Mallarangeng datang ke studio. Padahal Mallarangeng baru selesai dengan *talkshow* televisi lain.

Atmadji Sumarkidjo mengatakan, "Para komentator, para pengamat itu pasti laku. Jadi kita *list* dulu beberapa nama untuk dijadikan sumber. Waktu itu ada banyak nama yang diajukan. Ada Dewi Fortuna Anwar, Andi Malarangeng, Rizal Malarangeng, Arbi Sanit, Imam Prasojo, dan lain-lain. Ada 30 nama waktu itu."

RCTI akhirnya memilih Eep Saefulloh Fatah, mahasiswa pascasarjana Ohio State University yang "masih segar karena baru pulang dari Amerika."

"Dalam memilih narasumber kita coba seobjektif mungkin. Dia tidak membawa suatu aliran atau pro-Gus Dur atau anti-Gus Dur karena nanti akan bias. Riswanda Imawan juga jadi prioritas kita tapi karena ia jauh di Yogyakarta ya kita cari yang ada di Jakarta saja," kata Sumarkidjo.

M. Imdadun Rahmat, Zuhairi Misrawi, dan Rumadi dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama, berpendapat media sengaja ingin menjatuhkan

http://pustaka-indo.blogspot.com

Wahid. Anak-anak muda Nahdlatul Ulama ini mengatakan mereka tak pernah sekali pun dihubungi televisi. Lembaga mereka hanya sekali dihubungi oleh sebuah stasiun radio.

"Saya kira apa yang ditampilkan *Media Indonesia* atau *Metro TV* sangat jelas aspek *by design* itu. Orang awam akan bisa melihatnya. Apalagi orang yang berada dalam komunitas NU," kata Rumadi.

Harian *Media Indonesia* dan *Metro TV* adalah dua institusi media yang berhubungan. Keduanya dipimpin oleh pengusaha Surya Paloh. Editorial *Media Indonesia* tiap hari juga divisualkan di *Metro TV*.

Salim Said, penulis buku *The Genesis of Power* dan seorang komentator politik yang banyak tampil pada hari-hari ini, berpendapat secara umum penampilan televisi lumayan baik. Kesalahan atau pertanyaan yang bodoh memang muncul tapi *"by default not by design."*

Sumarkidjo berpendapat agak sulit bagi televisi untuk tak mendapat cap anti-Gus Dur, "Sekarang ada enggak orang yang pro-Gus Dur pada waktu itu?" Masalah teknis lain. Komentator politik yang setuju dekrit semua ada di istana sehingga sulit memanggilnya ke studio televisi. Sehingga yang muncul adalah yang kontra dekrit tersebut.

Setiap televisi dan radio memang harus sangat hati-hati memilih narasumber. Lebih hati-hati ketimbang media cetak karena narasumber media elektronik hanya bicara. Orang menulis harus jujur terhadap dirinya sendiri. Orang menulis sulit untuk berbohong. Ini berbeda dengan wicara.

Salah satu cara mengatasinya adalah memberikan suara kepada semua pihak yang bertikai, kalau perlu sama-sama di studio. Dalam momen secepat ini salah satu keterbatasan televisi dan radio adalah sulit dan mahalnya memproduksi berita. *Talk is cheap*. *News is expensive*. *Talkshow* jadi pilihan karena murah dan kelihatannya gampang. Bandingkan kalau siaran-siaran ini diisi oleh berita melulu? Berapa ratus reporter yang harus dikerahkan?

Konsekuensi lain adalah kerja maraton. Padahal makin capek seseorang makin berkurang kinerjanya. Baik Hersubeno

http://pustaka-indo.blogspot.com

Arief maupun Alifian Mallarangeng, sekadar contoh, bicara lebih dari enam jam. Hersubeno bahkan mulai kerja Minggu pukul 06.30 dan baru pulang ke rumah 25 jam sesudahnya: Senin pukul 07.30. Mallarangeng, yang merasa khawatir akan keamanannya setelah bicara demikian keras, merasa tak aman pulang dini hari, dan memutuskan tetap tinggal dan bicara di studio hingga hari terang.

Atmakusumah Astraatmadja dari Dewan Pers berpendapat, "Memang sulit untuk meminta perimbangan sumber berita 50:50 tapi sepintas (televisi) sudah cukup baik."

SENIN PAGI, 23 JULI 2002. Televisi, radio, dan dotcom terbukti di atas angin dalam liputan 24 jam terakhir. Ini bisa dilihat pada harian *Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia*, *Republika*, dan harian lain yang terasa lebih kurang relevan ketimbang berita televisi, radio, dan dotcom.

Kompas menurunkan *stop press* pukul 03.15 dini hari yang berisi keterangan pers Amien Rais bahwa MPR tetap bakal melaksanakan sidang.

Amien mengadakan pertemuan pers sekitar pukul 02.00 dini hari ketika kebanyakan suratkabar Jakarta sudah naik cetak. Mereka masih sempat menurunkan berita maklumat Presiden Wahid. Tapi reaksi Amien Rais sudah terlambat untuk dicetak. Apalagi reaksi Akbar Tanjung, ketua Partai Golongan Karya, yang mengadakan pertemuan pers lebih lambat dari Amien. Agum Gumelar bahkan bikin pertemuan pers menjelang shalat subuh.

Suratkabar di zona Waktu Indonesia Tengah maupun Waktu Indonesia Timur, yang masing-masing sejam dan dua jam lebih cepat dari waktu Jakarta, malah banyak yang tak sempat menurunkan berita maklumat Wahid.

Kompas bisa melakukan *stop press* karena suratkabar ini menguasai sendiri percetakannya. Toh, *Kompas* terbit Senin tanpa memasukkan reaksi Partai Golkar atau keterangan Agum Gumelar.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Unsur kecepatan memang sangat penting. Makin cepat suatu media bekerja makin penting kedudukannya dalam situasi kritis. Suratkabar kalah bersaing dengan televisi, dotcom, dan radio karena butuh waktu cetak. Majalah *Tempo* bahkan sudah selesai cetak ketika Wahid menyatakan negara dalam keadaan darurat.

Susahnya, wartawan cenderung bekerja dengan pola media masing-masing. Senin dini hari itu hanya ada lima wartawan di hotel tempat Amien Rais dan Akbar Tanjung bikin pertemuan pers. Kebanyakan wartawan suratkabar dan televisi pulang setelah *deadline*. Mungkin kecapekan. Ini beda dengan media internet atau kantor berita yang bekerja praktis 24 jam.

Detikcom menurunkan berita "Gus Dur Bekukan Partai Golkar, Pemilu Digelar 1 Tahun Lagi" hanya beberapa menit setelah juru bicara kepresidenan Yahya C. Staquf membacakan maklumat itu di Istana Merdeka pukul 01.17. *Detikcom* terus-menerus melaporkan perkembangan momen-momen ini. Amien dilaporkan. Tanjung dilaporkan. Gumelar juga dilaporkan.

Sapto Anggoro, wakil pemimpin redaksi *Detikcom*, mengatakan dia dan para reporter juga maraton. Para reporter menggunakan telepon seluler dan melaporkan berbagai kejadian dari istana, parlemen, hotel, kantor Gumelar, dan sekitar Monumen Nasional.

Kompas Cyber Media menurunkan naskah lengkap maklumat pada pukul 01.43 dengan judul "Isi Lengkap Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid."

Di belahan dunia lain, situs web *The New York Times* menurunkan laporan *"Facing Removal, Wahid Dissolves Legislature in Indonesia"* pada pukul 01.47. Laporan ini diambil dari kantor berita *Associated Press*.

Keunggulan suratkabar sebenarnya ada pada kedalaman. Wartawan mereka sebenarnya bisa menembus tembok-tembok ruang rapat yang tak bisa ditembus kamera televisi. Mereka juga punya waktu lebih panjang ketimbang wartawan dotcom. Tapi hingga Senin, belum ada suratkabar yang mampu menjelaskan apa yang terjadi sepanjang Jumat-Sabtu-Minggu di luar hal yang resmi.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Pertemuan Amien Rais dan Agum Gumelar tak diberitakan suratkabar hingga seminggu sesudahnya. Dibentaknya Agum Gumelar oleh Abdurrahman Wahid juga baru muncul hampir seminggu sesudah kejadian.

Media, menurut Bambang Wisudo dari *Kompas*, "Kita terjebak pada apa yang diomongkan, tidak menggali hingga ke substansi persoalan." Kegamangan ini membuat berita suratkabar jadi kurang relevan. Mereka mengejar komentar demi komentar tapi melupakan proses verifikasi fakta demi fakta.

"Wartawan bingung menangkap mana yang substansi dan mana yang tidak. Saya sendiri mengalami kejenuhan, karena problem politik tidak maju-maju dari zaman Soeharto," kata Iwan Setiawan dari majalah *Tempo*.

SENIN SIANG, 23 JULI 2001. Televisi berlomba-lomba menyiarkan sidang istimewa MPR dan mendatangkan komentator di studio masing-masing. *SCTV* mendatangkan Solahuddin Wahid dari Nahdlatul Ulama. Stasiun lain kebanyakan mendatangkan pembicara dari kubu anti-Wahid. *TPI* mendatangkan Indria Samego dari LIPI, Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia, dan Salim Said.

SCTV mendatangkan Solahuddin bersama Hasnan Habib, pensiunan letnan jenderal, Ryas Rasyid, rektor sebuah perguruan tinggi dan mantan menteri kabinet Wahid, dan Daniel Sparingga dari Universitas Airlangga. *Metro TV* mendatangkan Rizal Mallarangeng dari Center for Strategic and International Studies, Denny J.A. dari Universitas Jayabaya serta Hamid Awaluddin dari Partai Golkar.

RCTI mendatangkan Eep Saefulloh Fatah. *Anteve* mendatangkan Alifian Mallarangeng dan Agus Haryadi dari CPPS-Paramadina.

Kalau ada dua nama Mallarangeng di sini karena mereka memang kakak-beradik. Alifian adalah kakak sulung Rizal. Keduanya kuliah di ilmu sosial dan politik Universitas Gadjah Mada

http://pustaka-indo.blogspot.com

dan melanjutkan studi sama-sama di Ohio State University di bawah bimbingan Bill Liddle, seorang akademikus Amerika Serikat dengan spesialisasi Indonesia.

Pilihan-pilihan ini tampaknya tak memuaskan semua orang. Wakil direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Enceng Sobirin Nadj, termasuk salah satunya.

"Sungguh tak adil bahwa pengamat-pengamat yang tampil di televisi notabene adalah mereka yang anti-Gus Dur. Menurut saya, mereka ini lebih pas disebut sebagai pemain-pengamat, karena mereka tak segan-segan turut bermain dalam permainan politik menjatuhkan Gus Dur," kata Sobirin.

"Tidak kritis terhadap tentara. Itu jelas sekali," kata Koekeritsz dari Forum Demokrasi.

Zuhairi dari Lakpesdam Nahdlatul Ulama melihat pilihan para komentator itu dari sudut pandang "perebutan kekuasaan" antara Islam tradisional dan Islam modernis. Menurutnya alumni Ohio State University kebanyakan berlatar belakang Islam modernis.

"Nah persoalannya, selama ini tidak cukup ada dialog antara teman-teman berbasis Islam modernis dan teman-teman dari kalangan tradisionalis."

"Mereka berpikir kalau Gus Dur semakin berkuasa, otomatis mereka tidak punya banyak peluang untuk berkembang. Di sini ada gambaran tentang persaingan antara Ulil Abshar-Abdalla dan rekan-rekannya yang modernis. Ulil itu sebagai intelektual muda Islam sangat cepat melejit. Sementara teman-teman segenerasinya tidak mengalami hal yang sama."

"Mereka menganggap kalau Gus Dur tetap berkuasa akan semakin banyak lagi anak-anak muda NU yang melejit mewarnai dinamika intelektual, keagamaan, dan politik di Indonesia. Saya menangkap ada kekhawatiran seperti itu," kata Zuhairi.

Menurut Hersubeno Arief, *Metro TV* mencoba mengatasi kurang beragamnya sumber mereka pada Selasa 24 Juli 2001. Mereka mencari Ulil Abshar-Abdalla, orang nomor satu Lakpesdam NU, tapi

http://pustaka-indo.blogspot.com

Ulil sedang berada di Amerika Serikat. Mereka mengganti dengan Ahmad Sahal dari jurnal kebudayaan *Kalam*. Sahal dari latar belakang keluarga Nahdlatul Ulama.

Zuhairi mengatakan Sahal memang warga Nahdlatul Ulama tapi tak banyak terlibat dan mengikuti secara langsung perkembangan-perkembangan yang terjadi di Nahdlatul Ulama.

"Saya kira ini kecelakaan betul *Metro TV*. Mestinya media mengetahui hal-hal seperti ini. Apakah benar seseorang itu merepresentasikan suara anak-anak muda NU secara umum? Karena sesungguhnya Sahal diundang untuk melihat bagaimana sih sebenarnya suara anak muda NU."

Menurut Zuhairi ada dua penjelasan ketakrepresentasian itu. *Pertama*, *Metro TV* tidak memahami peta perkembangan di Nahdlatul Ulama. *Kedua*, ada kesengajaan menghadirkan tokoh-tokoh dari luar maupun dalam Nahdlatul Ulama yang mau bicara kritis atau negatif tentang Nahdlatul Ulama dan Gus Dur.

Kerangka yang muncul di media adalah kaum nahdliyin kurang berpendidikan, orang desa, dan bakal mengamuk bila Gus Dur dijatuhkan. Ternyata kekhawatiran itu tak terjadi. Penjagaan gedung parlemen terkesan malah berlebihan. Apakah media kecele dengan asumsi-asumsi mereka? Hermawan Sulistyo mengatakan dekrit dikeluarkan sebagai lambang gerakan moral melawan tren bahwa demokratisasi Indonesia kembali ke model Orde Baru.

Hersubeno Arief dan Rizal Mallarangeng membantahnya. Tidak ada konspirasi. "Lawan Gus Dur adalah prinsip demokrasi. Kikiek bilang dekrit moral. Itu juga omong kosong. Itu dekrit politik. Enggak ada soal moral di situ," kata Mallarangeng. Hersubeno mengatakan bahwa latar belakangnya sendiri adalah seorang nahdliyin.

Ya bagaimana lagi? Mungkin persoalannya memang sudah terlalu terpecah. Yo*u take it or you leave it*. Th. Yacob Koekeritsz, aktivis Forum Demokrasi, memilih mematikan televisi ketika *talkshow Metro TV* sedang berjalan antara Rizal Mallarangeng dan Ahmad Sahal.

http://pustaka-indo.blogspot.com

MASALAH DARI PEMBERITAAN CEPAT biasanya akurasi. Waktu untuk verifikasi, untuk editing, jadi berkurang. Bill Kovach dan Tom Rosentiel mengatakan esensi jurnalisme adalah verifikasi. Boleh cepat tapi jangan meninggalkan esensinya. Itulah kelemahan kebanyakan media Indonesia. Banyak wartawan yang melontarkan pertanyaan tolol karena tak melakukan verifikasi lebih dulu. Ada wartawan di Istana Negara yang Minggu petang dibentak Wahid dan dibilang "tukang melintir" karena asumsi dalam pertanyaannya, soal kerja sama Wahid dan Rachmawati Soekarnoputri, bertentangan dengan fakta.

Dari *SCTV* ada presenter yang mengatakan dia mendapat "bocoran." Hal itu tanpa dicek lebih dulu langsung disiarkan di televisi dan ditanyakan pada J. Kristiadi dari Center for Strategic and International Studies, narasumber di studio. Bagaimana mungkin Kristiadi bisa mengetahui fakta itu? Seberapa besar kebenaran bocoran itu? Beruntung Kristiadi cukup berpengalaman sehingga tak mau memperpanjang informasi yang belum jelas asal-usulnya.

Orang bisa melancarkan kritik terhadap media dengan memperhatikan akurasi dalam pemberitaannya. Siapa yang kebobolan? Siapa yang tekun? Siapa yang tak terburu-buru minta komentar orang-orang yang disebut "pengamat" atau "pakar" sebelum melakukan verifikasi fakta? Bagaimana seorang wartawan menempelkan label "pakar" atau "pengamat" pada narasumbernya? Mengapa orang yang tak pernah menulis buku atau bikin penelitian serius bisa disebut sebagai "pakar"?

Selain itu salah satu kelemahan televisi adalah penggunaan apa yang disebut sebagai *telepolling* atau penggunaan telepon buat menjaring pendapat masyarakat.

Menurut Enceng Sobirin dari LP3ES tak ada satu pun *polling* yang akurat di televisi. Logikanya, dalam sebuah *polling*, pengambilan sampel harus benar. Populasi yang mana? Kerangka samplingnya apa? Teoritis setiap anggota populasi sasaran harus memiliki kesempatan yang sama jadi responden. Penyelenggara *polling* yang menentukan

http://pustaka-indo.blogspot.com

responden dengan menggunakan teknik sampling tertentu. Artinya, responden itu dipilih dan bukan memilih dirinya sendiri.

Salah satu contoh *telepolling* televisi dibuat dengan pertanyaan: Setujukah Anda, apabila dekrit yang dikeluarkan presiden disebut sebagai inkonstitusional?

Polling itu diadakan pada 17 Juli 2001 pukul 18.00-18.50. Jumlah penelepon 1.351 (85 persen dari Jakarta dan 15 persen luar Jakarta). Hasilnya setuju 81,65 persen, tidak setuju 16,80 persen, dan tidak peduli 2,15 persen.

"*Telepolling* kita kan ngawur sekali. Pemirsa televisi mengajukan dirinya sendiri untuk menjadi responden. Mereka menelepon untuk memberikan suara. Bisa saja karena temanya sudah menjurus menyudutkan Gus Dur, dan para pakar yang diundang juga memberi komentar negatif tentang Gus Dur, maka yang banyak menelepon adalah mereka yang anti-Gus Dur."

"Mereka yang pro-Gus Dur cenderung untuk tidak menonton acara tersebut. Dengan kata lain, antara mereka yang pro dan anti-Gus Dur tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Dengan kata lain, televisi tidak melakukan sampling yang benar," kata Sobirin.

Polling itu masalah metodologi penelitian. Kalau metodologi tak benar maka hasilnya juga tak bermakna apa-apa. Hasil *telepolling* televisi tak bisa dianggap sebagai suara masyarakat. "Namun apa yang terjadi? Para doktor lulusan Amerika yang berbicara di televisi membenarkan begitu saja hasil polling itu," kata Sobirin.

Atmakusumah Astraatmadja dari Dewan Pers berpendapat *polling* macam ini memang cacat. "Saya kira sudah jelas itu. Memang disayangkan jika ada media tidak jujur mengatakannya. Hasil *polling* diklaim sebagai representasi suara masyarakat."

Namun Astraatmadja mengatakan pengaruh media tak seserius yang dibayangkan orang selama ini, "Paling jauh, pengaruh media adalah membuat orang yang sebelumnya sudah anti-Gus Dur, menjadi lebih anti lagi, demikian juga sebaliknya. Namun saya yakin

http://pustaka-indo.blogspot.com

tidak sampai membuat orang yang sebelumnya pro-Gus Dur atau netral menjadi anti-Gus Dur."

Mungkin dugaan itu benar. Pukul 16.53 MPR resmi memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden karena dinilai melanggar haluan negara. Megawati Soekarnoputri jadi penggantinya.

Sebanyak 591 anggota MPR menyatakan setuju memberhentikan Wahid dan mengangkat Megawati. Tidak ada yang menolak dan tidak ada yang abstain. Semua politisi itu kelihatan kelelahan tapi tak ada satu pun yang menyimpang dari opini mereka sebelumnya untuk memberhentikan Gus Dur.

Nun jauh di berbagai kantor berita, para wartawan pun kecapekan. Tapi maraton tiga hari ini memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga sekali agar kelak mereka bekerja lebih baik. Kritik adalah cambuk untuk kemajuan masa yang akan datang.

Jakarta, 2001

Laporan ini dikerjakan sebuah tim yang terdiri dari Agus Sudibyo, Andreas Harsono, Coen Husain Pontoh, Dyah Listyorini, Elis N. Hart, dan Eriyanto. Desain polling dan monitoring televisi dikerjakan Eriyanto.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Di Balik Ketegangan Indonesia-Singapura

KISAH INI BERMULA pada Senin pertama Februari 2001 ketika Derwin Pereira, kepala biro harian *The Straits Times* di Jakarta, menerbitkan tiga laporan tentang sebuah rencana peledakan kedutaan Amerika Serikat di Singapura, Kuala Lumpur, dan Jakarta. Pereira melaporkan bahwa dia mendapatkan sebuah dokumen rahasia berjudul "Operasi Jihad Asia Tenggara: Melawan Terorisme Amerika Serikat dan Kaum Yahudi."

Dokumen itu menyebutkan bahwa tiga tim, masing-masing berjumlah tiga orang, bakal berangkat dari Solo dengan tujuan melakukan teror. Mereka diberi nama Jibril, meminjam nama malaikat, masing-masing Jibril 1 (tujuan Singapura), Jibril 2 (Kuala Lumpur), dan Jibril 3 (Jakarta). Ketiga tim ini direncanakan meledakkan bom C-4 di halaman tiga kedutaan tersebut pada 4 Desember 2001.

Rencana itu tak terlaksana. Mungkin karena ada alasan satu atau lain hal yang tak jelas. Pereira tak menjelaskan bagaimana dia mendapatkan dokumen beraksara Arab sebanyak 15 halaman itu. Dia hanya mengatakan pihak intelijen Indonesia menemukan dokumen itu di Solo pada Oktober 2001.

Rencana pengeboman itu sendiri dirancang dalam suatu pertemuan di Solo pada 28 September 2001 atau sekitar seminggu

http://pustaka-indo.blogspot.com

sebelum Presiden Amerika Serikat George W. Bush memerintahkan pengemboman Afghanistan dalam rangka "perang melawan terorisme." Bush menyerang Afghanistan dan rezim Taliban karena dianggap melindungi kelompok Al Qaida pimpinan jutawan Saudi Arabia Osama bin Laden yang dituduh Amerika menyerang Pentagon dan World Trade Centre pada 11 September 2001.

Menurut *The Straits Times*, dokumen itu dibuat oleh organisasi bernama Jamaah Islamiyah Indonesia, dengan alamat "Kampung Wetan Nusukan No. 65 RT05/RW07 Solo." Alasan teror? Mereka melihat Islam terancam oleh "strategi Amerika Serikat dan Yahudi untuk menghancurkan Islam."

"Dengan isu memburu Osama bin Laden dan Al Qaida, mereka menghalalkan pembunuhan terhadap anak-anak dan wanita-wanita tak berdosa di Afghanistan."

"Operasi Jihad Asia Tenggara" dibuat dengan tujuan "menghancurkan kekuatan-kekuatan politik Amerika Serikat dan kaum Yahudi di jantung Asia Tenggara. Ini langkah awal menuju terbangunnya peradaban Islam di Asia Tenggara sebagaimana cita-cita Nusantara Raya."

"Tanpa kehancuran kekuatan-kekuatan politik Amerika Serikat dan kaum Yahudi, Islam tidak akan tenteram dan senantiasa difitnah sebagai agama dan umat yang berbahaya bagi dunia," kata dokumen yang ditandatangani oleh "ketua Abu Hanafiah" dan "sekretaris Fikri Sugondo."

Nama-nama itu kemungkinan besar nama palsu, termasuk juga nama sembilan orang anggota Jibril 1, Jibril 2, dan Jibril 3, maupun para penghubung mereka di berbagai tempat. Tapi dokumen ini menyebut nama Fathur Rahman Al Ghozi, pemuda Indonesia asal Mojokerto, yang ditangkap di Manila, pada 15 Januari 2002. Di dokumen Al Ghozi disebut sebagai kontak Jemaah Islamiyah di Filipina. Al Ghozi ditangkap polisi Filipina dengan tuduhan menyimpan bahan peledak secara ilegal. Jumlahnya tak tanggung-tanggung: satu ton bahan peledak TNT (trinitrotoluena), 300 detonator, dan 17 senapan serbu jenis M-16.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Laporan itu cukup mengagetkan, bukan saja di Singapura, tempat *The Straits Times* terbit, tapi juga di Indonesia dan Malaysia. *Reuters, AP, AFP*, dan berbagai media lain mengutip keterangan *Straits Times*. Nama "Jamaah Islamiyah" bergaung karena sejak Desember lalu, pemerintah Malaysia dan Singapura menangkap lebih dari 40 aktivis muslim dengan tuduhan terlibat dalam organisasi bernama "Jamaah Islamiyah."

Polisi Singapura mengatakan 13 warga negara Singapura yang ditangkap itu berniat menyerang beberapa fasilitas milik Amerika Serikat di Singapura. Mereka ditangkap sesudah polisi Singapura mendapat rekaman video dari militer Amerika Serikat di Afghanistan di mana beberapa lokasi di kota Singapura terekam. Ke-13 orang itu dituduh terlibat dengan Al Qaida.

Laporan Derwin Pereira penting karena dokumen itu bisa dianggap melengkapi *puzzle* besar di kawasan ini bahwa ada tiga Jamaah Islamiyah: Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ketiganya bekerjasama dengan Osama bin Laden dari Al Qaida. Mereka tak segan menggunakan kekerasan, bertujuan mendirikan negara Islam di kawasan Asia Tenggara, berdasarkan penafsiran Islam mereka sendiri.

BEBERAPA HARI SESUDAH laporan Derwin Pereira dimuat *Strait Times*, Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew, politikus paling senior di sana, yang pernah jadi perdana menteri selama 31 tahun, mengatakan dalam suatu acara terbuka bahwa keamanan Singapura tak terjamin selama pemerintah Indonesia belum membereskan para teroris. Lee bilang Indonesia "sarang teroris."

Lee Kuan Yew tak menyebut dokumen Solo tapi dia menyinggung keberadaan Abu Bakar Baasyir, kiai dari pondok pesantren Ngruki, Solo, salah satu tokoh Majelis Mujahidin Indonesia, yang berada dalam daftar pencarian polisi Singapura maupun Malaysia.

Baasyir dituduh polisi dua negara itu jadi tokoh intelektual dalam gerakan Jamaah Islamiyah Singapura maupun Malaysia.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Harian *The Star* dari Kuala Lumpur melaporkan bahwa sejak Agustus 2001, polisi Malaysia menaruh Baasyir dalam daftar pencarian orang bersama empat lainnya. Mereka dituduh terlibat dalam organisasi yang disebut sebagai "Kumpulan Mujahidin Malaysia," yang beberapa anggotanya sudah ditangkap dengan tuduhan terlibat pembunuhan seorang anggota parlemen Malaysia.

Abu Bakar Baasyir, dalam keterangan Inspektur Jenderal Tan Sri Norian Mai dari kepolisian Malaysia, punya nama alias Abdus Samad Abud. Ia memegang izin tinggal (*permanent residence)* di Malaysia dengan alamat Kampung Sungai Manggis, Banting, Selangor.

Baasyir dikenal ikut mendirikan pesantren Al Mukmin di Ngruki, Solo, pada 1972 bersama Abdullah Sungkar. Keduanya tokoh Islam yang pernah dijatuhi hukuman sembilan tahun oleh pemerintah Soeharto karena menentang asas tunggal Pancasila. Salah satu murid pesantren ini adalah Fathur Rahman Al Ghozi yang menyimpan satu ton TNT di Filipina. Tapi sebelum hukuman diterapkan, Sungkar dan Baasyir kabur ke Malaysia. Mereka kembali ke Solo sesaat setelah Presiden Soeharto dipaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Sungkar meninggal dunia sekembalinya ke tanah air.

Orang Indonesia lainnya adalah Hambali (ejaan Bahasa Malaysia "Hambli") alias Nurjaman alias Riduan Isamuddin. Norian Mai mengatakan Hambali juga punya izin tinggal dan juga beralamat Kampung Sungai Manggis, Banting, Selangor. Dia juga dicari polisi Indonesia karena dicurigai terlibat dalam pengeboman gereja-gereja Indonesia pada malam Natal 2000.

Tapi menurut Norian Mai, orang yang paling berbahaya dalam kelompok pelarian ini Zulkifli alias Musa Abd Hir. Zulkifli seorang insinyur telekomunikasi. Dia pernah ikut jihad di Afghanistan maupun Maluku. Zulkilfi saudara ipar Taufik bin Abdul Halim, seorang mahasiswa dari Johor Bahru, Malaysia, yang juga pernah ikut perang di Afghanistan, ikut jihad di Maluku bersama delapan orang Malaysia lain, dan terluka ketika membawa sebuah bom yang meledak sendiri di Atrium Senen, Jakarta, pada Juli 2001. Taufik juga

http://pustaka-indo.blogspot.com

pernah mengatakan dia terlibat dalam pengeboman Natal 2000. Kini Taufik ditahan di Jakarta.

Lee Kuan Yew sama sekali tak menyebut dokumen Solo, walau saya memperkirakan Lee berlangganan *Straits Times* dan kemungkinan besar membaca berita Derwin Pereira. Kenapa Lee lebih memberikan perhatian pada Abu Bakar Baasyir?

Tak jelas benar. Mungkin karena Baasyir dianggap sebagai orang penting dalam gerakan Islam garis keras di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Suratkabar internasional macam *The Los Angeles Times* atau *Asian Wall Street Journal* menyebut Baasyir sebagai "dalang" berbagai tindak kekerasan di Asia Tenggara.

Tapi yang jelas, laporan *Straits Times* bikin polisi Indonesia bekerja ekstra. Inspektur Jenderal Saleh Saaf, juru bicara polisi Indonesia, mengatakan pada majalah *Tempo*, bahwa polisi memeriksa alamat-alamat di Solo dan Batam, bandar udara, bandar laut, imigrasi, dan tempat-tempat lain yang disebutkan *Straits Times*, terutama rute-rute perjalanan ketiga tim Jibril. Hasilnya nol.

SEMINGGU SESUDAH LAPORAN *Straits Times*, muncullah laporan utama majalah *Tempo* yang tak kalah menariknya. Majalah itu mengangkat laporan soal tim Jibril tapi, berbeda dengan *Straits Times, Tempo* meragukan keaslian dokumen tersebut.

Ada beberapa hal yang janggal. *Pertama*, soal alamat Kampung Wetan Nusukan. Reporter *Tempo* Imron Rosyid dari Solo melaporkan bahwa tak ada alamat itu di Solo. Lurah Nusukan Sumanta mengatakan baru kali ini mendengar nama "Kampung Wetan."

"Kalau di Nusukan, yang ada itu Nayu Wetan," kata Sumanta. Nama Abu Hanafiah dan Fikri Suwondo, sebagai penandatangan dokumen, juga tak pernah kedengaran di daerah itu.

Kedua, tak ada ledakan apapun di tiga kedutaan Amerika Serikat pada 4 Desember 2001. *Ketiga*, salah satu anggota tim Jibril disebut bernama Muhammad Furqon. Ternyata ada 11 nama yang sama di

http://pustaka-indo.blogspot.com

kantor imigrasi Solo. *Keempat*, peledakan rencananya menggunakan bom C-4. Bom jenis ini hanya dimiliki kalangan terbatas, seperti militer, karena mahal dan sulit didapat.

Tempo menugaskan 13 reporter, baik di Jakarta, Solo, maupun Kuala Lumpur, buat menelusuri isi dokumen tersebut. Majalah itu juga mewawancarai sumber-sumber polisi dan intelijen Indonesia, baik dengan nama jelas maupun anonim, dan mereka semua meragukan keaslian dokumen "Operasi Jihad Asia Tenggara" tersebut.

Kepada Badan Intelijen Negara A.M. Hendroprijono mengatakan setahu dia gerakan bawah tanah Indonesia tak pernah menggunakan dokumentasi. Sumber anonim *Tempo* mengatakan gerakan Islam garis keras Indonesia tak pernah menuliskan rencana operasinya, apalagi secara detail.

Penulisan dokumen itu sendiri unik. Ia ditulis di atas kertas biasa, mungkin ukuran kuarto, dengan pegon atau aksara Arab yang digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu. Pegon diakrabi oleh kalangan pesantren dan Melayu tua. Huruf pegon berkembang karena di Indonesia banyak kiai tua hanya bisa menulis dalam huruf Arab dan sama sekali buta aksara Latin.

Tempo minta Anik Khamin Tohari, seorang sarjana sastra Arab yang bekerja buat Jaringan Islam Liberal, untuk menerjemahkan dokumen itu. Anik menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sepanjang 1.200 kata. Naskah terjemahan itu pula yang diberikan Anik kepada saya buat perbandingan.

Menurut Anik, penulisan pegon di dokumen Solo itu melenceng dari standar umum di Indonesia, baik tata cara penulisan Arab maupun standar bunyi yang dihasilkan oleh susunan huruf-huruf tersebut. Hampir semua kata yang tertulis mengandung kesalahan bunyi dan tata bahasa. Artinya, kalau dokumen tersebut dibaca menurut standar Bahasa Indonesia, akan banyak sekali kata yang tak terbaca lantaran tidak ada huruf bantu yang berfungsi sebagai huruf vokal. Contoh kata "Amerika" yang dalam standar Bahasa Indonesia seharusnya ditulis dengan huruf "hamzah-mim-ya-ra-ya-kaf-alif," ternyata tertulis "hamzah-mim-ra-kaf."

http://pustaka-indo.blogspot.com

Bagaimana menerangkan kesalahan ini? Bisa jadi dokumen ini ditulis oleh orang yang kurang terdidik, yang kurang akrab dengan kultur Arab-Qurani. Kelompok ini hanya memakai huruf Arab sebagai media komunikasi tertulis. Kemungkinan lain, penulis dokumen ini belajar bahasa Arab ketika dewasa dan kurang akrab dengan dunia akademik Islam. Atau bisa saja si penulis tahu bahasa Arab tapi penulisan sengaja diplesetkan. Tujuannya, bisa saja buat mengaburkan isi dokumen, mengingat catatan itu, kalau memang benar keasliannya, hanya buat mengingat-ingat isi rapat.

Kalau begitu siapa yang membuat dokumen ini? Apa tujuannya? Apakah dibuat oleh intelijen Indonesia?

Tempo mengutip seorang sumber intelijen anonim yang mengatakan, dilihat dari bentuknya, dokumen tersebut tak dibuat oleh aparat intelijen Indonesia, baik Badan Intelijen Strategis maupun Badan Intelijen Negara.

Lantas siapa? "Amerika," kata sumber anonim *Tempo*.

Ini sebuah tuduhan serius. Wartawan Purwani D. Prabandari ditugasi *Tempo* mewawancarai dutabesar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ralph L. Boyce, soal tuduhan itu. Prabandari tak menanyakan secara langsung apakah dokumen itu buatan intelijen Amerika. Mungkin terkesan konyol. Prabandari hanya minta komentar Boyce terhadap ditemukannya dokumen Solo itu. Boyce tak bisa berkomentar banyak karena dia membaca berita itu juga dari *The Straits Times*. "Saya baru menerima kliping berita itu dan belum membacanya dengan tuntas karena baru saja pulang dari perjalanan ke Aceh dan Medan."

Tempo masuk lebih detail dengan sebuah gambar. Dokumen itu menjelaskan bahwa setelah kedutaan Amerika Serikat di Jakarta berhasil diledakkan, mereka hendak meledakkan kedutaan Inggris, konsulat Israel, kedutaan Belanda, kedutaan Singapura, Standard Chartered Bank, kantor pusat Bank Central Asia, gedung-gedung bisnis sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro, Pasar Kenari (Salemba), terminal bus Senen dan Atrium Senen, gedung

http://pustaka-indo.blogspot.com

Plaza 89 (Kuningan), Plaza Jatinegara, Mal Pondok Indah, Sekretariat Negara, dan stasiun kereta api Juanda.

Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Bagaimana mungkin ada gedung konsulat Israel? Apa gunanya mengebom terminal Senen maupun stasiun Gambir? Ada kontradiksi di sini karena dokumen itu menyebut perlunya meminimalkan korban di kalangan anak-anak, perempuan, dan orang tua. Bukankah Senen dan Gambir banyak orang-orang sipil? Jarang sekali ditemukan orang Amerika, katakanlah mereka yang diincar, berjalan-jalan di Senen dan Gambir?

Bersama laporan itu, *Tempo* juga menurunkan editorial yang menarik. Ia mengatakan bahwa sesudah serangan 11 September 2001 cukup banyak pemerintah yang ramai-ramai mendukung Amerika Serikat. Tujuannya, bukan sekadar memerangi apa yang disebut sebagai "terorisme internasional" tapi menggebuk lawan-lawan politik mereka di dalam negeri. Singapura dan Malaysia termasuk kategori ini. Mereka menangkap aktivis muslim radikal dengan memanfaatkan gelombang ini.

Editorial *Tempo* juga mengatakan Derwin Pereira mendapatkan dokumen itu dari "seorang jenderal Indonesia yang berdinas di instansi intelijen." Seakan-akan ada kesan bahwa Pereira punya kontak bagus dengan kalangan intelijen Indonesia.

"Mengapa harian *The Straits Times* memberitakannya secara besar-besaran tanpa terlihat upaya keras mengecek kebenarannya. Padahal banyak wartawan kantor berita ataupun media lain telah menerima dokumen serupa tapi merasa perlu melakukan upaya *check and recheck* di lapangan atau dengan sumber-sumber lain sebelum mempublikasikannya. Wajar kalau kemudian ada pihak-pihak yang mengaitkan pemberitaan ini dengan kepentingan pemerintah Singapura."

"Selain itu, sejak berdirinya pemerintahan Orde Baru, kalangan intelijen militer Indonesia memang diketahui punya hubungan baik dengan mitra kerja mereka di Singapura. Terutama dalam melakukan

http://pustaka-indo.blogspot.com

pemantauan dan operasi represif terhadap apa yang saat itu disebut elemen ekstrem kiri (komunis) ataupun ekstrem kanan (Islam anarkis)."

LAPORAN TEMPO tampaknya bikin Derwin Pereira penasaran. Pada 23 Februari atau kira-kira empat hari sesudah *Tempo* menurunkan editorial, Pereira menulis sebuah opini berjudul *"Indonesia should rethink conspiracy theory."* Intinya, Pereira mengatakan media maupun pejabat-pejabat penting Indonesia, cenderung menyalahkan orang luar, ketimbang memeriksa kelemahan diri sendiri, bila menghadapi masalah. Mereka suka percaya ada konspirasi untuk memojokkan Indonesia.

"Merasuk dalam masyarakat ini sebuah konsep tentang kambing hitam—seseorang atau sesuatu yang bisa disalahkan, biasanya dari luar diri mereka. Sejarah pasca-kemerdekaan Indonesia menunjukkan orang Indonesia tak suka bila diberitahu harus berbuat begini atau begitu, terutama bila masukan itu datang dari 'titik kecil merah' bernama Singapura."

Pereira mengatakan laporan *Tempo* tanpa dasar kuat. Dasarnya hanya sejarah bahwa Singapura dan Indonesia dulu pernah bekerjasama menekan gerakan ekstrem. Pereira juga menyinggung ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais, Wakil Presiden Hamzah Haz, Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, yang ramai-ramai mempertanyakan pernyataan Menteri Senior Lee Kuan Yew.

Di luar ribut antarmedia itu, pada minggu ketiga Februari, terjadi beberapa demonstrasi di depan kedutaan Singapura di Jakarta. Para demonstran geram dengan pernyataan Lee bahwa Indonesia "sarang teroris." Organisasi muslim macam Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Mujahidin, dan Gerakan Pemuda Muslim, turun ke jalan, menggalang demonstrasi, mendesak Lee mencabut ucapannya dan minta maaf.

Ismail Yusanto dari Hizbut Tahrir Indonesia, yang menurunkan lebih dari 500 demonstran, mengatakan tuduhan Lee bahwa Abu Bakar

http://pustaka-indo.blogspot.com

Basyir terlibat dalam terorisme internasional sama sekali tak beralasan. Anggota-anggota Gerakan Pemuda Muslim membakar boneka Lee Kuan Yew. Polisi dikerahkan buat menjaga kedutaan Singapura.

"Pemerintah Singapura harus minta maaf kepada rakyat Indonesia," kata Ahmad Sumargono, anggota parlemen dari Partai Bulan Bintang. Dia menambahkan bahwa Islam tak mengajarkan umatnya terlibat dalam terorisme.

Balas-membalas antara Indonesia dan Singapura seakan-akan makin serius ketika Singapura menolak lebih dari 300 warga negara Indonesia masuk ke Singapura dari propinsi Riau, terutama dari Pulau Batam, yang hanya setengah jam naik feri dari Singapura.

Bahkan selama seminggu, *The Straits Times* dan majalah *Tempo*, maupun *Koran Tempo*, "saudara kandung" majalah *Tempo*, saling menurunkan berita maupun editorial yang gasak-menggasak. Majalah *Tempo* menantang Lee Kuan Yew membuktikan tuduhannya.

Baik *Koran Tempo* dan *The Straits Times*, saling memberitakan berita mereka. Misalnya Devi Asmarani, koresponden *The Straits Times*, menurunkan laporan, *"Singapore perpetrating state terrorism on Indonesia, says paper."* Ini sebuah berita tentang berita *Koran Tempo*. Harian Singapura ini juga menganggap editorial *Koran Tempo* "disisipi sarkasme."

The Straits Times juga menurunkan opini karya Sukardi Rinakit dari Center for Political Studies, sebuah think tank di Jakarta, berjudul *"Two similar comments but Jakarta reacts differently."* Dia bertanya kenapa kalau Lee Kuan Yew bikin komentar, banyak orang Indonesia geram, padahal komentar serupa pernah dilontarkan Paul Wolfowitz, wakil menteri pertahanan Amerika Serikat, dan reaksi Indonesia relatif biasa-biasa saja?

Perang mulut beda dengan demonstrasi di jalanan. Singapura tampaknya tertegun melihat reaksi yang muncul dari Jakarta. Beberapa pejabat negara itu tak menyangka Indonesia naik pitam karena komentar Lee Kuan Yew. Laporan Derwin Pereira notabene kurang disebut-sebut oleh media Indonesia dan tenggelam oleh kontroversi Lee.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura S. Jayakumar. Mereka sepakat agar polisi Indonesia diizinkan menanyai 13 warga negara Singapura yang dituduh terlibat dalam Jamaah Islamiyah. Kecurigaan terhadap Abu Bakar Baasyir datangnya juga dari para tahanan ini.

Ketika kembali ke Jakarta, Hassan Wirajuda memberikan wawancara kepada harian *The Jakarta Post*. Dia menceritakan hasil pertemuannya dengan Jayakumar. Wirajuda mengatakan pembicaraan berlangsung baik walau ada perbedaan mendasar antara Jakarta dan Singapura. Indonesia adalah negara demokrasi, bukan tempat orang bisa main tangkap begitu saja. Singapura sebaliknya negara otoriter.

Indonesia hari ini memang berbeda dengan Indonesia periode Presiden Soeharto. Singapura masih punya hukum yang memberikan kemudahan bagi polisi untuk menahan seseorang tanpa batas waktu atas nama keamanan nasional. Peraturan ini ditakuti dan dinamakan Internal Security Act. Baik Malaysia maupun Singapura memakai Internal Security Act buat menahan aktivis muslim di sana.

Tiga polisi Indonesia yang pergi ke Singapura memang mewawancarai orang Singapura yang ditahan di sana. Inspektur Jenderal Engkesman Hillep, kepala rombongan, mengatakan mereka bertemu dengan para tahanan tapi belum ada bukti kuat Abu Bakar Baasyir terlibat dalam terorisme. Para tahanan mengenal Baasyir ketika dia tinggal di Malaysia, setelah lari dari kejaran rezim Soeharto, tapi kenal saja bukan bukti kejahatan.

James Gomez dari Think Center, sebuah think tank independen di Singapura, mengatakan pada saya, bahwa tuduhan kepada ke-13 warga Singapura itu sulit dipercaya atau tak dipercaya karena tak ada organisasi independen yang bisa melakukan verifikasi terhadap tuduhan polisi.

Abu Bakar Baasyir, orang yang dicari-cari polisi Singapura dan Malaysia, mungkin jengkel dengan tuduhan-tuduhan yang deras meluncur kepadanya, memutuskan menggugat Lee Kuan Yew ke pengadilan Indonesia karena pencemaran nama baik.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Ketegangan Singapura dan Indonesia ini relatif menurun setelah Presiden Megawati Soekarnoputri memanggil dutabesar Singapura untuk Indonesia, Edward Lee, pada Jumat malam, 1 Maret 2002, datang ke kediaman resmi Megawati. Tak ada keterangan dari pertemuan itu. Tapi laporan-laporan media agak mereda dan demonstrasi-demonstrasi juga tak segarang minggu-minggu sebelumnya.

BAGAIMANA MENILAI LAPORAN *Tempo* dan *The Straits Times*? Siapa yang benar dan siapa yang salah? *The Straits Times* menganggap dokumen Solo itu asli. *Tempo* menganggap dokumen itu penuh kejanggalan dan menduganya buatan pihak ketiga, yang bakal diuntungkan bila Amerika Serikat, negara adikuasa yang sedang mengamuk itu, bisa menekan entah militer Indonesia, entah polisi, entah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, untuk mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap orang-orang Islam radikal, setidaknya Abu Bakar Baasyir.

Ketika bertemu Derwin Pereira, saya tanya, bagaimana dia menilai kritik *Tempo* terhadap laporannya?

"I stand by my story (Saya tetap berpegang pada cerita saya)," kata Pereira.

Lalu bagaimana dengan alamat palsu? Mengapa 4 Desember tak terjadi apa-apa? Pereira menganggap alamat palsu itu wajar karena Jamaah Islamiyah harus bekerja hati-hati. Kalau 4 Desember 2001 tak terjadi pengeboman, Pereira juga tak bisa memastikan, terlalu banyak alasan yang bisa dipakai buat membatalkan rencana macam itu.

Pereira mengeluh karena beberapa media Indonesia mengutip editorial *Tempo* yang mengatakan dokumen itu datang dari seorang jenderal Indonesia. Spekulasinya dari ketua Badan Intelijen Nasional A.M. Hendroprijono (Hendroprijono membantah informasi itu).

Tempo memang menulis dokumen itu didapat dari "seorang jenderal Indonesia yang berdinas di instansi intelijen." Pereira mengatakan dokumen itu didapatkannya dari seorang "muslim

http://pustaka-indo.blogspot.com

Indonesia" yang radikal dan *hardliner*. Saya juga mengecek gosip bahwa Pereira mendapatkan dokumen itu dari seorang politikus Indonesia, namanya tak perlu disebut di sini, dan sekali lagi Pereira membantahnya.

Saya juga memeriksa editorial *Tempo* yang mengatakan dokumen itu sebelumnya sudah diterima "banyak wartawan kantor berita ataupun media lain." Jerry Norton dari kantor berita *Reuters* mengatakan, "Tidak, kami tidak pernah mendapatkannya." Norton mengatakan *Reuters* memberitakan kasus itu setelah membaca *Straits Times*. Bhimanto Suwastoyo dari *AFP* juga mengatakan tak pernah menerima dokumen itu.

Bambang Harymurti, pemimpin redaksi *Tempo*, mengatakan laporan *Tempo* benar. Harymurti justru meragukan apabila Pereira pergi ke Solo buat mengecek dokumen itu. Bahkan mewawancarai Abu Bakar Baasyir pun tak dilakukan Pereira. Harymurti mengatakan *Straits Times* "munafik" karena suratkabar ini tak berani bersikap kritis terhadap pemerintahannya sendiri.

Keterangan Harymurti mengingatkan saya pada laporan harian *The Australian* Juni lalu. Di sana dilaporkan bahwa *Straits Times* punya sebuah kebiasaan jurnalistik yang agak ganjil. Ada beberapa wartawan *Straits Times* yang pernah bekerja sebagai intel untuk Internal Security Department, sebuah dinas rahasia peninggalan pemerintah kolonial Inggris, yang dulu dipakai menekan komunisme di Malaysia dan Singapura, dan kini masih ditakuti karena kekuasaannya.

Eric Ellis dari *The Australian* menulis bahwa Susan Sim, koresponden *Straits Times* di Jakarta, pendahulu Pereira, dulunya bekerja sebagai analis dinas rahasia. Kini Susam Sim jadi diplomat di Departemen Luar Negeri Singapura. Chua Lee Hoong, kolumnis *Straits Times*, dulu bekerja untuk dinas rahasia selama sembilan tahun. Irene Ho dari desk luar negeri juga pernah jadi agen rahasia. Dari 1986 hingga 1993, Tjong Yik Min mengepalai Internal Security Department. Tjong kini presiden Singapore Press Holdings, induk perusahaan *The Straits Times*. Tapi Cheong Yip Seng, pemimpin

http://pustaka-indo.blogspot.com

redaksi *Straits Times*, mengatakan negara mereka kecil sehingga gonta-ganti topi itu biasa terjadi.

Goenawan Mohamad, redaktur senior *Tempo*, mengatakan pada saya, bahwa laporan *Tempo* itu bisa jadi taruhan reputasinya di dunia internasional, "Saya tak mengatakan *Tempo* selalu akurat dan tidak bias, tapi berbeda dengan *The Straits Times*, mereka (*Tempo*) bisa kritis terhadap kalangan militer dan keamanan di Indonesia. Mereka tak punya minat untuk melayani posisi pemerintah (Indonesia), sementara *The Straits Times* tak terbayangkan bagi saya bisa kritis terhadap posisi Lee Kuan Yew atau pemerintah Singapura."

Mungkin kecurigaan itu yang membuat orang skeptis terhadap laporan Pereira. Apakah Pereira juga pernah bekerja sebagai intel?

"Ini guyonan. Saya tak pernah kerja di sana," kata Pereira, setengah berteriak.

BOCORAN ADANYA DOKUMEN Solo itu sebenarnya pernah disinggung Derwin Pereira dalam sebuah artikel opini pada 20 Januari berjudul, *"Is there an Al-Qaeda connection in Indonesia?"* Pereira mengatakan Osama bin Laden dan Al Qaida sejak lima tahun terakhir mencoba menanamkan pengaruh di Asia Tenggara. Pereira tak mengemukakan bukti-bukti yang baru untuk mendukung argumentasinya tapi di sana dia menyinggung ditemukannya dokumen Solo oleh intelijen Indonesia pada Oktober 2001.

Informasi ini tak pernah saya baca dalam media Indonesia. Tapi Pereira mengatakan pada saya sejak mendengar adanya dokumen tersebut dia mencoba mencari. Dalam opini itu, Pereira mengutip seorang sumber dari Jamaah Islamiyah, yang tak mau disebutkan namanya, hanya minta disebut sebagai "orang nomor tiga" Jamaah Islamiyah Indonesia, yang mengatakan sumber-sumber intelijen yang dihubungi Pereira "berbohong."

Menurut sumber itu, dokumen dan rencana meledakkan kedutaan Amerika Serikat itu benar adanya, tapi dibatalkan karena

http://pustaka-indo.blogspot.com

adanya penangkapan-penangkapan aktivis Jamaah Islamiyah di Malaysia dan Singapura. Kebohongan intelijen Indonesia terletak pada keterangan mereka yang menghubungkan Jamaah Islamiyah dan Al Qaida. Menurut sumber Jamaah Islamiyah ini, mereka merasa solider dengan Al Qaida dan "saudara-saudara muslim" mereka di Afghanistan. Mereka sama-sama merasa dikorbankan oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat tapi Jamaah Islamiyah dan Al Qaida tidak satu komando.

Pereira akhirnya mendapat dokumen itu pada awal Februari. Dia cepat-cepat menuliskan laporannya. Laporan itu butuh waktu enam hari untuk penyuntingan sebelum diterbitkan pada 11 Februari. Enam hari lumayan lama buat penerbitan sebuah harian, walau saya berpendapat menunggu beberapa hari lagi, buat pengecekan ulang dan pengecekan ulang, sebenarnya lebih menguntungkan ketimbang timbul kesan terburu-buru. Setidaknya kesan itu timbul dari majalah *Tempo*.

Pereira juga membantah keterangan Bambang Harymurti dari *Tempo* yang mengatakan Pereira tak mendapatkan wawancara dengan Abu Bakar Baasyir. Dia mewawancarai Baasyir pada Januari.

Sulit menentukan siapa yang benar dalam kasus itu karena kedua suratkabar tersebut belum tuntas menggali informasi mereka. *Straits Times* dan *Tempo* kurang menyediakan waktu, tenaga, dan reporter buat mencari informasi lebih dalam. Saya juga terganggu karena keduanya sangat menggantungkan diri pada sumber-sumber anonim. Lebih merisaukan lagi, keduanya menggantungkan diri pada sumber-sumber intelijen yang anonim.

Kelebihan *Straits Times* mungkin terletak pada kemampuan Pereira menembus sumber dari Jamaah Islamiyah. Tapi selebihnya, ya sumber-sumber intelijen. Dalam jurnalisme, sumber anonim kurang kredibel ketimbang sumber dengan nama jelas. Sumber intelijen yang anonim, lebih kurang kredibel lagi karena pihak intelijen, dari negara manapun, sering punya kepentingan menyebarkan informasi maupun disinformasi.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Kepada *Tempo*, sumber-sumber intelijen ini mengatakan dokumen itu buatan Amerika Serikat. Kepada *Straits Times*, mereka mengatakan ada hubungan antara Al Qaida dan Jamaah Islamiyah. Wartawan yang tak hati-hati adalah makanan empuk para intel.

Saya sendiri minta Ulil Abshar-Abdalla, seorang sarjana sastra Arab dari Jaringan Islam Liberal, yang sekaligus kolega Anik Khamin Tohari, untuk memberi *second opinion* terhadap dokumen Solo itu. Sama dengan Anik, yang menerjemahkan dokumen itu buat *Tempo*, Ulil mengatakan dokumen itu memakai aksara pegon, bahasanya Melayu tapi aksaranya Arab.

Ulil mengatakan bahasa Melayu, dalam sejarahnya, tak pernah punya aksara sendiri. Bahasa Melayu ratusan tahun lalu meminjam aksara Arab, dan wujudnya antara lain dalam bentuk pegon. Kini bahasa Melayu memakai aksara Latin dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Pegon masih dipakai di kalangan pesantren walau pemakai aksara Latin juga makin banyak.

Berbeda dengan keterangan *Tempo* yang mengatakan bahasa itu dipakai di daerah Banten dan Jawa Barat, Ulil mengatakan pegon sebenarnya dipakai tak hanya di Indonesia, tapi juga di Brunei Darussalam, Malaysia, maupun daerah-daerah Islam lain di Indonesia macam Aceh, Jawa, dan Riau. "Saya kalau menulis kepada ayah saya dalam bahasa pegon," kata Ulil, yang dibesarkan dalam tradisi pesantren oleh ayah yang kiai.

Ketika membaca dokumen itu, Ulil mengatakan bahasanya Melayu-Malaysia. "Ini bukan cara orang Indonesia." Dia memberi contoh penulisan "Amerika Serikat" di mana terdapat perbedaan ejaan yang lazim dipakai di kalangan pesantren Indonesia dan Malaysia. Contoh ini juga yang dipakai Anik. Frase "Amerika Serikat" itu beda penulisannya di Indonesia dan Malaysia.

Dokumen Solo itu ditulis oleh orang yang bukan amatiran dalam menulis aksara Arab. "Itu kelihatan biasa menulis (Arab) karena konsisten. Ini cara penulisan Malaysia," kata Ulil. "Saya

http://pustaka-indo.blogspot.com

seyakin-yakinnya ini ditulis oleh orang Malaysia atau kalau orang Indonesia, ya yang pernah tinggal di Malaysia."

Siapa orang Malaysia yang membuat dokumen ini? Jawabannya masih sulit didapat. Saya khawatir beberapa upaya verifikasi saya ini malah membuahkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Siapa orang muslim Indonesia, punya latar garis keras, yang kemungkinan besar bisa menulis bahasa Malaysia dalam aksara pegon? Apakah Abu Bakar Baasyir maupun Hambali, orang Indonesia yang pernah tinggal lama di Malaysia, masuk kategori ini? Tapi pada Baasyir tak ditemukan bukti kuat buat menuduhnya terlibat dalam terorisme. Baasyir bahkan menggugat Lee Kuan Yew. Sedang Hambali melarikan diri dan diduga bersembunyi entah di Indonesia atau Pakistan.

Mengapa nama-nama dalam dokumen Solo itu kebanyakan tak dikenal kecuali Fathur Rahman Al Ghozi? Mengapa semua nama disembunyikan dan hanya satu yang nyata? Kalau memang rapat itu pernah terjadi dan rencana itu hendak dilaksanakan, mengapa mereka menuliskan dalam sebuah notula? Mengapa tak menghafalnya saja? Kalau benar itu notula, mengapa mencantumkan alamat fiktif? Bagaimana dengan tuduhan dokumen itu buatan Amerika? Apa bukti-buktinya? Atau mengapa intel Indonesia menuding Amerika? Bagaimana menilai retorika anti-Yahudi yang ditunjukkan dokumen itu?

Ini semua, sekali lagi, hanya membuat saya lebih percaya, bahwa bekerja sebagai wartawan bukan pekerjaan mudah, apalagi ketika diminta menerangkan suatu kejadian yang kompleks, yang melibatkan orang dalam jumlah banyak, di mana ada benturan ideologi maupun wilayah geografis yang luas. Derwin Pereira mungkin bekerja cukup keras tapi dia terlalu percaya pada sumber-sumber intelijen. Wartawan-wartawan *Tempo* mungkin punya waktu terlalu pendek buat melakukan verifikasi yang memadai.

Bagaimanapun kejadian ini sebuah pengalaman yang bisa dipakai buat memacu diri lebih baik dalam menjalankan praktik-

http://pustaka-indo.blogspot.com

praktik jurnalisme. Pekerjaan wartawan butuh disiplin baja, latihan bertahun-tahun, mengasah metode, dan kecerdasan prima.

Jakarta, 2001

http://pustaka-indo.blogspot.com

Tempo VS Tomy Winata

SAYA PUNYA CERITA menarik tentang sengketa *Tempo* versus Tomy Winata. Dua hari sesudah kantor *Tempo* didemonstrasi para pendukung Tomy pada 8 Maret 2003, saya duduk semeja dengan salah seorang redaktur *Tempo*. Kami membandingkan yang kami dengar tentang peristiwa itu.

Memang menyedihkan. Bambang Harymurti, pemimpin redaksi *Tempo*, dihina para demonstran tersebut. Kepalanya dijotos, perutnya ditonjok. Para demonstran itu marah dengan cara penuh intimidasi.

Kata redaktur *Tempo* ini, pemukulan terhadap Harymurti dan wartawan *Tempo* lainnya harus dilawan dengan gerakan politik. Bukan dengan kekerasan. Bukan pula dengan diplomasi.

Menurut dia, wartawan seyogyanya tak percaya pada kekerasan. Wartawan juga seyogyanya tak percaya kepada orang yang menawarkan kekerasan. Tentang pernyataannya yang belakangan itu, sehubungan adanya kelompok masyarakat yang menawarkan bantuan kepada wartawan *Tempo* bila memerlukan penjagaan. Rupanya tawaran ini dilihat oleh rekan tadi termasuk dalam kategori "bantuan kekerasan."

Lalu, mengapa juga bukan diplomasi? Bukankah banyak media Indonesia menyelesaikan sengketa dengan diplomasi?

http://pustaka-indo.blogspot.com

Jawabnya, premanisme ini membahayakan bukan saja kebebasan pers juga proses demokratisasi. Diplomasi membuat premanisme bisa kembali lagi.

Logika politik, menurut rekan tadi, dasarnya demokrasi. Gerakannya bisa macam-macam. Mulai dari melakukan demonstrasi di jalanan hingga meminta dukungan para tokoh publik. Gerakan politik diperlukan untuk menekan polisi agar memeriksa orang macam David Tjioe, seorang kolega Tomy yang dituduh memukul Bambang Harymurti di kantor polisi Jakarta Pusat.

Menurut kesaksian Ahmad Taufik, wartawan *Tempo* yang ada di kantor polisi bersama Harymurti, Tjioe juga menguliahi Harymurti bahwa sebagai "komandan" harus bertanggungjawab atas berita *Tempo*. Tjioe bahkan mengancam Harymurti, "Lo, gua tembak juga deh sekarang. Kalau gua dipenjara dan dibunuh di sini, enggak takut. Mana, mintain pistol!"

David Tjioe membantah tuduhan ini. Dia mengatakan kepada saya, Sabtu pekan lalu, dia tak memukul Harymurti dan tak mengeluarkan kalimat itu. Katanya, mana mungkin dia memukul orang lain di hadapan polisi? "Sekarang saya lagi dijelek-jelekkan namanya," kata Tjioe. Menurut dia, Harymurti dan Taufik hanya "didorong-dorong."

Gerakan politik, debat soal kalimat atau apapun, masih menyisakan satu pertanyaan. Benarkah Tomy Winata, tiga bulan sebelum kebakaran, mengajukan proposal renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp 53 miliar, sebagaimana ditulis *Tempo*? Ini informasi terpenting dalam laporan *Tempo* berjudul "Ada Tomy di Tenabang?" Informasi ini seakan-akan mengindikasikan bahwa kebakaran itu bisa jadi dilakukan oleh kelompok Tomy.

Tomy membantah berita ini. Dia mengadukan *Tempo* ke polisi, setelah sebelumnya mengirimkan somasi. Tapi, perkembangan kemudian "ada demonstrasi dan pernyataan-pernyataan bahwa *Tempo* tidak perlu minta maaf setelah terjadi kekerasan." Tomy meniadakan somasi dan melakukan pengaduan. "Kita minta yang benar dibenarkan, yang salah dikoreksi, dan menyerahkan semua

http://pustaka-indo.blogspot.com

kepada hukum yang berlaku. Mudah-mudahan bisa dicari mana yang benar," kata Tomy.

Desmond J. Mahesa, pengacara Tomy Winata, mengatakan berita *Tempo* mengenai kliennya tendensius, diskriminatif, serta mengatur stigma terhadap orang lain. "*Tempo* tidak pernah secara langsung mewawancarai klien saya. Nanti kita lihat saja, ada rekamannya apa enggak?"

Tapi tidak mungkinkah Tomy berbohong? Bukankah integritas Tomy sering dipertanyakan orang? Tomy dianggap pengusaha yang sering main kayu dan memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat? Mengapa orang harus percaya kepada pengusaha macam Tomy?

Masalahnya, bagaimana dengan bantahan Gubernur Jakarta Sutiyoso dan Direktur Utama Pasar Jaya Syahrial Tandjung? Mereka juga mengatakan, tak ada proposal Rp 53 miliar. Juga pengusaha Ciputra, salah seorang komisaris PT Tempo Inti Media Tbk., yang melakukan pertemuan dengan Tomy di hari peristiwa kekerasan terjadi, percaya bahwa Tomy tak mengajukan proposal itu. "Saya menyesalkan tulisan dan juga unjuk rasa tersebut," kata Ciputra.

Sumber utama *Tempo* dalam berita itu adalah seorang "konsultan arsitektur" yang namanya tak disebutkan. Menurut Ahmad Taufik, wartawan yang menulis berita itu, si arsitek ini kenalan dia. Si arsitek memberikan informasi tapi memberikan syarat, namanya tak disebutkan. Arsitek ini mengatakan, tiga bulan lalu dia melihat proposal renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp 53 miliar. Dalam proposal itu ada nama Tomy Winata dan Bank Artha Graha yang dipimpin Tomy.

Keterangan arsitek ini ditempatkan sebagai pembuka berita *Tempo*. Pada berita itu juga, ada bantahan Tomy tentang proposal itu, juga bantahan Syahrial Tandjung, Direktur Utama Pasar Jaya, pengelola pasar-pasar milik Pemerintah DKI Jakarta. *Tempo* menilai berita itu sudah memenuhi syarat liputan seimbang.

Harian *Kompas* berpendapat sama. "Dari prinsip *cover both sides*, keseimbangan sumber dan pendapat, cara kerja pers telah dilakukan oleh mingguan tersebut secara *correct*," tulis editorial *Kompas*.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Saya berpendapat, ada kelemahan prosedural dalam berita itu. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dua pemikir jurnalisme terkemuka dari Amerika Serikat, dalam buku *The Elements of Journalism*, mengatakan bahwa elemen jurnalisme yang utama adalah menyajikan kebenaran.

Dalam hal berita *Tempo*, kebenaran yang mana? Kebenaran si arsitek atau kebenaran Tomy? Tidakkah bias pandangan seorang wartawan karena latar belakang sosial, pendidikan, kewarganegaraan, kelompok etnik, atau agama bisa membuat si wartawan menghasilkan tafsir tentang kebenaran yang berbeda-beda? Tidak mungkinkah bias ini pula yang dicurigai David Tjioe dan kawan-kawan?

Kovach dan Rosenstiel menerangkan, masyarakat membutuhkan prosedur dan proses guna mendapatkan apa yang disebut kebenaran fungsional. Liputan berimbang adalah salah satu cara untuk menyajikan kebenaran, tapi bukan tujuan jurnalisme. Liputan berimbang, kalau dijadikan tujuan, malah sering kali menimbulkan kebingungan.

Adalah David Yarnold dari *San Jose Mercury News,* mengembangkan satu daftar pertanyaan yang disebutnya *accuracy checklist*. Salah satunya, "Apakah lead berita sudah didukung dengan data-data penunjang yang cukup?" Atau, "Apakah laporan itu membuat penghakiman yang mungkin tak terasakan terhadap salah satu pihak? Siapa yang kira-kira tak suka dengan laporan ini lebih dari batas yang wajar?"

Tempo menurunkan berita yang alinea-alinea pembukanya tak didukung data-data penunjang yang cukup. Ungkapan si arsitek dijadikan dasar untuk mengatakan ada proposal Rp 53 miliar, sementara itu tak ada alinea-alinea lain yang mendukung. Mengapa hanya dengan satu sumber anonim, *Tempo* menurunkan sebuah berita?

Kalau Anda sempat memperhatikan *All the President's Men*, film ini tentang dua wartawan *The Washington Post* yang mengungkapkan skandal di balik terpilihnya Richard Nixon sebagai presiden. Harian itu juga memakai sumber anonim, tapi minimal dua untuk sebuah

http://pustaka-indo.blogspot.com

informasi yang sama. Ini pun masih dianggap belum cukup. Dalam film itu digambarkan Bob Woodward dan Carl Bernstein, dua reporter itu, kena damprat Redaktur *Executive* Ben Bradlee.

Kovach dan Rosenstiel sebelumnya menerbitkan buku *Warp Speed: America in the Age of Mixed Media* (1999). Pada bab "The Rise of Anonymous Sourcing" (h. 33-42), dijelaskan tujuh kriteria untuk sumber-sumber anonim, yang dibahas agak panjang-lebar ketika mereka membahas pemakaian sumber anonim pada kasus Monica Lewinsky.

Intinya, wartawan harus ingat bahwa sumber anonim tak memberi kesempatan kepada audiens (pemirsa, pembaca, pendengar) untuk menentukan seberapa besar derajat kepercayaan mereka pada sumber bersangkutan. Ini praktik yang harus wartawan hindari karena dia harus bisa memberi kesempatan kepada audiens untuk menentukan sendiri; seberapa besar audiens mau percaya pada suatu keterangan.

Seorang sumber anonim juga punya kecenderungan lebih kurang bertanggungjawab ketimbang sumber yang sama tapi identitasnya disajikan dengan lengkap. Sumber anonim cenderung lebih sering "bernyanyi"—kedengarannya merdu, sensasional, tapi esensinya lebih kecil dari nyanyian.

Dalam buku itu, Kovach dan Rosenstiel menjelaskan seseorang bisa diberi status anonim bila dia memenuhi ketujuh syarat sebagai berikut:

1. Sumber tersebut berada pada lingkaran pertama "peristiwa berita" yang kita laporkan. Artinya, dia menyaksikan sendiri, atau terlibat langsung, dalam peristiwa tersebut. Dia bisa merupakan pelaku, korban atau saksi mata, tapi dia bukanlah orang yang mendengar dari orang lain. Dia bukan pihak ketiga yang melakukan analisis terhadap peristiwa itu. Dia bukan berada pada lingkaran kedua, ketiga, dan seterusnya.

2. Keselamatan sumber tersebut terancam bila identitasnya kita buka. Unsur "keselamatan" itu secara masuk akal bisa diterima akal sehat audiens kita. Artinya, entah nyawanya yang benar-benar terancam atau nyawa anggota keluarga langsungnya yang terancam

http://pustaka-indo.blogspot.com

(anak, istri, suami, orangtua, saudara kandung). Kalau sekadar "hubungan sosial" yang terancam, misalnya pertemanan, maka ia tak termasuk faktor "keselamatan." Kalau sekadar "kelangsungan pekerjaan" yang terancam, masih harus diperdebatkan lagi, apakah benar dia akan kehilangan pekerjaan, dan apakah dia akan sulit mendapat pekerjaan baru?

3. Motivasi sumber anonim memberikan informasi murni untuk kepentingan publik. Kita harus mengukur apa motivasi si sumber memberikan informasi. Banyak kasus di mana si sumber memberikan informasi dan minta status anonim untuk menghantam lawan atau orang yang tak disukainya. Banyak juga kasus di mana informasi anonim diberikan karena hal itu menguntungkan si sumber tapi dia mau sembunyi tangan.

4. Integritas sumber utuh. Orang yang sering mengarang cerita atau terbukti pernah berbohong atau pernah menyalahgunakan status sumber anonim, tentu saja, jangan diberi kesempatan jadi sumber anonim lagi. Biasanya makin tinggi jabatan seseorang, makin sulit mempertahankan integritas diri, sehingga kita harus makin hati-hati dengan status anonim.

5. Harus seizin redaktur. Bagaimanapun juga, redakur yang harus bertanggungjawab kalau ada gugatan terhadap kinerja jurnalistik kita. Ini prinsip dalam pekerjaan jurnalisme. Redaktur punya hak veto terhadap suatu berita tapi redaktur pula yang harus masuk penjara atau membayar denda bila kalah di pengadilan. Lebih baik berdebat duluan ketimbang ribut belakangan gara-gara suatu berita anonim digugat orang.

6. Keterangan anonim sumber minimal dua atau bisa diverifikasi secara independen. Ini mengingatkan lagi pada Ben Bradlee, yang hanya mau meloloskan keterangan anonim kalau sumber minimal dua pihak yang independen satu dengan yang lain. Dalam film *All the President's Men*, ada adegan di mana Bradlee minta reporter Bob Woodward agar sumber anonim ditambah—untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang sama.

http://pustaka-indo.blogspot.com

7. Perjanjian keanoniman akan batal dan nama sumber dibuka bila terbukti berbohong atau sengaja menyesatkan. Ini perjanjian yang berat karena konsekuensinya bermacam-macam tapi wartawan harus menjelaskan persyaratan ini kepada sumber.

Saya kenal baik Bambang Harymurti dan Ahmad Taufik. Saya percaya Taufik punya niat baik sebagai wartawan. Dia pernah dipenjara tiga tahun pada zaman Presiden Soeharto, karena menjadi pengurus organisasi wartawan yang kala itu dianggap ilegal, Aliansi Jurnalis Independen, dan menerbitkan majalah bawah tanah, *Independen*. Saya tak meragukan integritas Taufik. Saya juga merasa marah mengetahui penghinaan yang diterima Bambang Harymurti.

Tapi perlawanan terhadap premanisme seyogyanya juga dilakukan lewat jalur jurnalistik. Harymurti dan kawan-kawan harus menjadikan momen ini untuk mengatakan kepada publik bahwa media bisa salah tapi tak bisa dilecehkan dengan cara-cara preman. Ada jalur hak jawab. Ada saluran kepada Dewan Pers. Bahkan jalur hukum juga terbuka. Saluran-saluran ini mungkin tak memuaskan, tapi inilah esensi upaya demokratisasi.

"Pers bisa salah dan punya hak untuk salah," kata Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja.

Mungkin ini bukan saat yang tepat untuk melakukan *soul searching* terhadap jurnalisme Indonesia, karena kekerasan yang dilakukan David Tjioe dan kawan-kawan membuat banyak orang marah. Tapi, soalnya adalah, apakah *Tempo* mau mengakui kelemahan itu atau tidak? Apakah *Tempo* mau menjadikan momen ini untuk melihat ulang prosedur kerjanya, mengkaji beban kerja reporternya, bahkan memperhitungkan kembali ekspansi bisnisnya—sesuatu yang terjadi pada hampir semua media di Indonesia?

"Ini soal prioritas, gerakan politik harus fokus!" kata rekan saya.

Saya berbeda pendapat. Saya mengatakan kalau seorang wartawan salah, ya, harus minta maaf dan melakukan koreksi. Suka tak suka, gerakan politik atau tidak, jurnalisme harus senantiasa proporsional dan komprehensif. Berita-berita yang diturunkan media

http://pustaka-indo.blogspot.com

soal *Tempo* versus Tomy Winata juga harus dibuat untuk membantu publik memahami secara proporsional dan komprehensif tentang persoalan ini.

Gerakan politik melulu, tanpa diimbangi kritik terhadap jurnalisme itu sendiri, pada gilirannya bisa membahayakan demokrasi juga. Sebab, gerakan itu bukannya memperlebar nuansa suatu perdebatan isu jurnalisme dan premanisme, melainkan lebih memfokuskan diri pada isu yang terpolarisasi. Buntutnya, upaya mencari kompromi, sesuatu yang esensial dalam demokrasi, bisa terkesampingkan. Kekerasan terhadap wartawan bahkan bisa mengalami eskalasi karena publik tak melihat bahwa media pun mau memperbaiki diri.

Jakarta, 2003

http://pustaka-indo.blogspot.com

Wartawan atau Politikus?

BEBERAPA HARI LALU seorang teman kuliah, yang kini jadi pengusaha, menelepon saya dan mengajak diskusi soal nilai tukar rupiah, para kandidat presiden, dan macam-macam isu politik lain. Kami bicara agak lama ketika dia mengejutkan saya dengan menanyakan mengapa Goenawan Mohamad, wartawan terkemuka Indonesia, yang punya reputasi internasional, juga kenalan baik saya, memutuskan bergabung dengan tim sukses Amien Rais. "Ini apa tidak memengaruhi independensinya?" tanyanya.

Saya belum tahu dan berjanji akan mengeceknya. Selang sehari saya mengirim SMS kepada Goenawan, menanyakan apa benar dia bergabung dengan tim kampanye Amien Rais? Kalau benar, tidakkah keputusan itu akan memengaruhi independensinya sebagai wartawan?

Dia pun menjawab dengan SMS, *"It will. But if you are committed to democratic change, you have to be prepared to be a normal citizen. In the election time partisanship is a sad duty."*

Kurang lebih, dia mengatakan dia juga sedang menjadi "warga negara biasa" yang ingin melihat terjadinya perubahan politik secara demokratis di Indonesia. Sikap partisan memang akan mempengaruhi independensinya sebagai wartawan dan tanggungjawab ini menyedihkan.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Saya kira Goenawan bukan satu-satunya wartawan Indonesia yang terlibat dalam politik pemilihan presiden. Alwi Hamu, misalnya, salah satu pemimpin Kelompok Jawa Pos, ikut bergabung dengan tim sukses Jusuf Kalla. Alwi mengerahkan banyak redaktur harian *Fajar*, salah satu suratkabar terbesar di Pulau Sulawesi, membantu duet Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Cyprianus Aoer, wartawan asal Manggarai, Pulau Flores, dan pemimpin redaksi harian *Suara Pembaruan*, jadi kandidat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk anggota parlemen. Dia masuk urutan nomor satu calon PDIP untuk Flores dan April lalu lolos masuk Senayan. "Motivasi saya adalah memperjuangkan rakyat, masih banyak yang miskin di Flores sana," katanya.

Panda Nababan, dulu dikenal sebagai wartawan harian *Sinar Harapan*, kini salah satu orang kepercayaan Megawati. Wahyu Moeryadi kini bekerja untuk mingguan *Tempo* dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Contoh lain adalah Surya Paloh, pemilik harian *Media Indonesia* dan *Metro TV*. Paloh menjadi calon presiden Partai Golongan Karya. Ketika berkampanye, Paloh mengarahkan kedua media itu membantunya, "Secara jujur harus saya akui bahwa saya menggunakan *Metro TV* dan *Media Indonesia*. Kalau tidak, apa lagi yang bisa saya gunakan? Kalau ada wartawan yang tak senang, ya, salah sendiri mengapa dia menjadi wartawan di *Metro TV* atau *Media Indonesia*. Saya tak ingin jadi hipokrit."

Surya Paloh terang-terangan mungkin karena dia pemilik media. Tapi banyak wartawan yang namanya tak tercantum resmi namun sering membantu mengatur berbagai pertemuan antarpolitisi dan "bertugas" membuat agenda atau opini (maupun opini tandingan) di media massa. Saya tahu ada tiga wartawan majalah *Tempo* juga masuk tim Jusuf Kalla. Mereka melakukannya diam-diam dan memakai nama samaran kalau menulis.

Pengusaha kenalan saya itu bertanya-tanya bagaimana wartawan-wartawan ini bisa independen saat bekerja? Wartawan memang sulit

http://pustaka-indo.blogspot.com

menjadi netral tapi mereka harus independen dari orang atau isu yang mereka liput sehingga bisa tetap kritis terhadap liputannya. Apa dampak dari wartawan yang ikut berpolitik terhadap medianya?

Bagaimanapun, wartawan termasuk warga negara biasa yang punya hak politik dan sering diharapkan ikut memimpin masyarakat. Mereka sah melakukannya. Cyprianus Aoer sangat prihatin karena warga Flores kurang diperjuangkan di Jakarta. Tidakkah pilihannya sah untuk terjun ke Parlemen?

Saya kira pertama-tama harus dibedakan juga antara mereka yang melakukan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Saya lebih menghargai wartawan yang terang-terangan masuk politik, termasuk Panda Nababan dan Cyprianus Aoer, walau saya kurang setuju dengan tindakan itu, daripada mereka yang diam-diam ikut rapat partai dan ikut mengatur strategi kampanye namun namanya tak diungkapkan kepada publik (seringkali mereka yang terang-terangan dulunya juga mulai dari diam-diam). Mereka yang sembunyi-sembunyi jelas menyalahi salah satu dasar intelektual dari verifikasi dalam jurnalisme: transparan kepada audiens.

Namun saya percaya keterlibatan wartawan dalam politik sebaiknya diberlakukan sebagai *one-way ticket*. Seorang wartawan boleh jadi politikus tapi jangan kembali jadi wartawan. Cyprianus Aoer boleh masuk parlemen tapi jangan kembali ke *Suara Pembaruan*. Alwi Hamu, Goenawan Mohamad dan Surya Paloh juga jangan kembali ke media mereka. Saham bisa dikelola orang lain bukan?

Bill Kovach, kurator Nieman Foundation on Journalism, Universitas Harvard, punya cerita penting untuk menerangkan isu ini. Pada 1979, ketika baru menjadi kepala biro Washington *New York Times*, Kovach diajak mengobrol Presiden Jimmy Carter di Gedung Putih. Mereka bicara tentang makna informasi buat seorang politikus dan seorang wartawan.

Carter berkata, "Ketika Anda memiliki kekuasaan, Anda menggunakan informasi untuk membuat orang mengikuti kepemimpinan Anda. Namun kalau Anda wartawan, Anda

http://pustaka-indo.blogspot.com

menggunakan informasi untuk membantu orang mengambil sikap mereka sendiri."

"Carter benar sekali," kata Kovach. "Informasi yang sama dipakai untuk dua tujuan yang berbeda. Bahkan berlawanan."

Ini pula yang membuat Kovach mengambil sikap teguh untuk independen dari dunia politik maupun politisi. Kovach setia pada jurnalisme dan tak pernah mau menerima tawaran masuk ke dunia politik. Dia membuktikannya selama bekerja sebagai wartawan sejak 1959. Kovach tak pernah masuk ke partai, ikut kampanye atau menerima pekerjaan lain di luar jurnalisme.

Inilah salah satu elemen jurnalisme. Loyalitas utama seorang wartawan adalah kepada warga masyarakat tempatnya berada. Wartawan bisa melayani warga dengan sebaik-baiknya apabila mereka bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Independen baik dari institusi pemerintah, bisnis, sosial maupun politik. Wartawan bahkan harus independen dari pemilik media tempatnya bekerja.

Bila seorang wartawan masuk politik, dia akan mempunyai sikap yang berbeda terhadap informasi, sehingga lebih baik bila dia tak kembali ke media. Praktik bolak-balik ini akan menimbulkan citra kurang baik dari masyarakat tehadap media Indonesia, apalagi pada masa demokratisasi sekarang ini, di mana warga butuh informasi yang bermutu untuk mengambil sikap terhadap berbagai isu penting di Indonesia.

Jakarta, 2004

http://pustaka-indo.blogspot.com

Kupas Tuntas Media Palmerah

Untuk Puji Santoso di Pekanbaru,

Soal anti "media Palmerah," saya kira, ini hanya kritik biasa saja. Arief Budiman dari Melbourne University pernah mengatakan, "Kritik itu konsultan gratis." Jadi kritik sangat berguna. Saya tak anti-media Palmerah. Saya dulu pernah ikut melawan sensor dan bredel ala Orde Baru sampai tak boleh kerja di media manapun di Jakarta. Itu alasan saya pindah kerja ke *The Nation* di Bangkok.

Banyak wartawan tahu saya diberhentikan dari *The Jakarta Post*. Alasannya, saya dituduh partisan! Wartawan tidak boleh ikut politik. "Kita harus netral," kata Raymond Toruan, *publisher The Jakarta Post*. Emangnya gue ikut partai politik mana?

Ironisnya, orang-orang yang dulu memecat saya, termasuk Toruan, belakangan dengan bangga menjodoh-jodohkan politisi dan jadi *broker* politik. Mereka ikut menggalang dukungan agar Megawati Soekarnoputri bisa menggantikan Gus Dur sebagai presiden. Ganjarannya, ketika Megawati jadi presiden, Susanto Pudjomartono, pemimpin redaksi *The Jakarta Post*, jadi dutabesar di Rusia. *Don't get me wrong!* Saya enggak punya dendam sama mereka. Saya kira pada 1994 Toruan dan Pudjomartono tak punya pilihan

http://pustaka-indo.blogspot.com

untuk tak memecat saya. Harmoko lagi galak-galaknya. Soeharto berdehem saja sudah bikin orang-orang takut.

Saat itu, saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen. Saya jadi juru bicara AJI ketika media tak memuat satu kata pun tentang AJI. Hanya *Republika* pernah memuat foto saya ketika ada pertemuan pers AJI memprotes penangkapan Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo. K. Basri dari *The Jakarta Post* bahkan lebih gemar memuat versi polisi soal "kesalahan" Taufik dan kawan-kawan tanpa sekalipun tanya kepada saya, juru bicara AJI, yang sekantor dengan Basri. Meja kami bahkan berdekatan. Saat itu menjadi anggota AJI ibarat penderita penyakit kusta.

No hard feeling!

Susanto Pudjomartono secara bergurau pernah bilang dalam suatu forum bahwa pemecatan itu merupakan *blessing in disguise!* Kalau saya enggak dipecat, karier saya hari ini mungkin tetap berkubang di Palmerah.

Saya setuju pendapat "Pak Santo." Saya bisa melihat dunia setelah dipecat. Saya pindah ke *The Nation* lantas *Associated Press Television* dan sebagainya. Jadi, saya tak menyesal. Kita hidup punya nasib sendiri-sendiri.

Cuma saya memang kesal lihat mereka tak berbuat lebih banyak sesudah lima tahun masa demokratisasi ini. Sudah ada kemajuan tapi terlalu pelan. Lebih cepat gerak bisnis mereka daripada gerak redaksionalnya. Ini bukan keluhan saya pribadi lho!

Selama dua tahun lebih menyunting *Pantau*, saya sering menerima laporan kegelisahan para wartawan, terutama redaktur yang bukan jajaran pemilik atau manajemen top, terhadap berbagai macam kebijakan bos mereka.

Kelompok Jawa Pos memangkas pemimpin redaksi mereka yang umurnya 40 tahun ke atas. Dahlan Iskan tampaknya sampai mati juga tetap duduk di kursi nomor satu Kelompok Jawa Pos. Masa jabatan pemimpin redaksi dibatasi sementara anggota komisaris atau direksi tak dibatasi. Buntutnya, bobot editorial sering kalah dengan kebutuhan bisnis media. *Board room*, anggota-anggotanya kawakan.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Sementara *newsroom* terus diganti. *Newsroom* jadi melemah. Media Palmerah pun jadi konglomerat. Maka mereka pun bergerak sesuai langkah konglomerat—harus tumbuh demi pertumbuhan itu sendiri.

Siapa yang rugi?

Saya kira warga Indonesia yang rugi. Media Palmerah ini menguasai lebih dari 90 persen konsumsi berita politik di seluruh Indonesia. Farid Gaban, mantan wartawan *Republika*, menganjurkan media memberitakan tuntutan GAM agar diadakan referendum untuk masa depan Aceh. "Ini harus menjadi diskursus yang lebih luas, termasuk politisi dan publik pemilih Indonesia di luar Aceh," kata Farid.

Saya pakai terminologi "media Palmerah" buat mengacu kepada semua konglomerat media di Jakarta. Kebetulan konglomerat yang besar-besar ada di kawasan tertentu saja di Jakarta, tepatnya dari bilangan Kedoya (*Metro TV* dan harian *Media Indonesia*) hingga Jl. Gatot Subroto dengan *SCTV*. Di daerah ini juga ada Palmerah di mana Kompas Gramedia serta kelompok *Tempo* dan *Jawa Pos* mendirikan markas besar mereka. *TVRI* hanya terletak 500 meter dari *Kompas*. Kalau saya berdiri di puncak menara apartemen saya, yang ada di Jl. Palmerah Selatan, dengan mudah bisa melihat semua pemancar televisi Jakarta. Di sekitar daerah ini ada lebih dari 200 kantor media.

Saya pesimis terhadap para konglomerat media ini. Media Palmerah itu sendiri sudah berpihak. Ia bukan pengamat yang independen. Mereka akan melakukan sensor internal agar informasi-informasi yang peka tak muncul di masyarakat.

Intinya, saya punya asumsi bahwa media Palmerah ini peninggalan sistem Orde Baru. Semuanya gede pada zaman Orde Baru bukan? Baik *Jawa Pos, Kompas, Tempo, The Jakarta Post* apalagi *RCTI, SCTV, Indosiar, TVRI, TPI*. Mereka rata-rata berideologi fasisme, berorientasi komersial (secara berlebihan), secara teknis belum mau pakai standar jurnalisme internasional (*byline, firewall,* liputan media independen, menganggap wartawan kerja produksi alias kuli, tak meliput media secara independen, nasionalisme sempit dan sebagainya).

http://pustaka-indo.blogspot.com

Jangan kaget kalau budaya korupsi ini menyebar ke kalangan reporter mereka. Amplop adalah penyakit yang ditularkan dari atas. Coba deh Anda tanya pada Dahlan Iskan. Beranikah dia mendeklarasikan Kelompok Jawa Pos bebas amplop? Saya berani bertaruh tidak berani karena mereka belum sanggup membayar wartawan dengan layak.

The Jakarta Post, dengan segala hormat kepada rekan-rekan saya di sana, didirikan 1983 sebagai mesin propaganda Orde Baru. Jusuf Wanandi, bos besar Anda, adalah manajer cakap tapi dia pernah kerja untuk Operasi Khusus pada 1970-an. Dia membantu almarhum Ali Moertopo dengan politik "kupas tumpas" Orde Baru—meminjam nama "Kupas Tuntas" ala *Trans TV*.

Jadi, sama dengan TNI harus melakukan reformasi, saya kira, media Palmerah juga perlu reformasi. Di dalam tubuh media Palmerah, baik itu di kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia atau di berbagai ruang direksi, masih banyak wartawan yang dulu ikut melakukan penindasan terhadap warga Indonesia.

Anda bisa baca cukup banyak karya ilmiah untuk tahu bagaimana mereka ikut membenarkan pembunuhan orang kiri 1965-1967 (termasuk Thres Nio dari harian *Kompas*), orang Tionghoa di Kalimantan Barat 1967, politik "massa mengambang" 1970-an, Tanjung Priok 1984, Kedung Ombo 1989 dan entah apa lagi. Bahkan sesudah reformasi pun, kegamangan dan kebodohan mereka, ikut "mengupas-tumpaskan" orang Madura di Kalimantan, sengketa agama di Maluku, orang Acheh di Aceh, orang Papua, orang Poso dan sebagainya.

Selama setahun ini saya banyak membaca kliping-kliping lama. Ngeri deh kalau baca berita-berita mereka. Alasan bahwa mereka harus pandai salto untuk selamat bukan justifikasi untuk membenarkan ideologi yang represif. Apalagi sesudah zaman bebas begini. Tapi inilah kupas tuntas ala media Palmerah.

Jakarta, 2005

http://pustaka-indo.blogspot.com

"Asing" di Tanah Acheh

SIAPA SIH YANG ASING DI TANAH ACHEH ITU?

Anda mungkin termasuk orang yang menganggap Acheh adalah bagian dari diri Anda, bagian dari "keindonesiaan" kita. Tapi coba deh tanya kepada orang-orang Gerakan *Acheh* Merdeka, Sentral Informasi Referendum *Acheh* dan beberapa organisasi lain. Mereka menganggap orang-orang dari Pulau Jawa orang asing. Apakah GAM dan SIRA mewakili rakyat Aceh? Ini bisa diperdebatkan, tapi suka atau tak suka, Anda harus mengakui mereka sebagai *major political groups* di sana. Buat mereka, kita sama asingnya dengan orang Amerika atau Australia.

Ironisnya, mereka justru menyambut kehadiran pasukan Amerika, Australia, Singapura, Jepang dan lainnya karena pasukan-pasukan itu membantu usaha-usaha kemanusiaan di sana. Coba Anda baca pernyataan Mucksalmina, juru bicara GAM, kepada Ian Fisher dari *The New York Times*. Mucksalmina tak suka dengan kehadiran tentara Indonesia di Aceh. Hasan Tiro, walinegara Acheh, mengatakan bahwa kata "Indonesia" itu hanya "nama samaran" dari kolonialisme "bangsa Jawa" yang dianggapnya musuh bebuyutan "bangsa Acheh" sejak abad 13. Mereka menganggap kehadiran tentara Indonesia sebagai "pasukan asing" justru tak dikehendaki—

http://pustaka-indo.blogspot.com

karena "pasukan asing" yang ini melakukan penangkapan, penjajahan, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya terhadap "bangsa Acheh" sejak 1945.

Kedua, apa yang Anda sebut "pasukan asing" itu datang bukan untuk melakukan kegiatan militer. Mereka datang ke sana untuk membawa helikopter, *landing craft*, mendistribusikan makanan, bikin rumah sakit, memberikan obat, bersama-sama dengan orang-orang lain, asing maupun tidak, Jawa maupun Bugis, Sunda maupun Melayu, Madura, Tionghoa, Minahasa maupun Cina, Jepang, Irlandia, Australia, Spanyol dan sebagainya. Tujuannya, membantu korban tsunami, lagi-lagi korbannya, juga bukan hanya orang Aceh, tapi sesama manusia. Ini bantuan dari manusia kepada manusia.

Saya menerima beberapa email dari sahabat-sahabat saya di Amerika Serikat maupun Sri Lanka, India dan sebagainya. Antara lain datang dari wartawan terhormat Bill Kovach, mantan redaktur *The New York Times*, yang merasa tersentuh dengan penderitaan korban tsunami. Emosi Kovach tulus. Dia nonton televisi. Dia ikut sedih. Dia senang pemerintahnya mengirim helikopter, kapal, serta tentara ke Aceh, untuk bantu-bantu. Minimal uang pajaknya dipakai untuk kepentingan yang baik—bukan untuk membunuh orang di Irak, misalnya. Kok ketulusan ini dianggap asing?

Kritik saya, isu kemanusiaan ini diubah dengan cepat, terutama oleh beberapa politisi, militer dan media Indonesia, menjadi isu nasionalisme yang sempit. Manajemen bantuan kemanusiaan jadi terdistorsi ketika isu kebangsaan dimasukkan. Juga isu sektarian, Islam dan Kristen. Apalagi isu kristenisasi, yang buktinya samar-samar, dan ia dengan cepat menyentuh urat syaraf banyak orang.

Apakah bantuan dari Amerika tidak politis? Jelas sekali politis! Apakah bantuan dari United Nations tak akan dikorupsi? Jelas sekali kemungkinan bakal ada korupsi—kalau ingat pelajaran United Nations di Kamboja 1992-1993. Tapi bantuan dari "pemerintah asing"

http://pustaka-indo.blogspot.com

yang bernama Republik Indonesia ini juga sama politis. Bantuan dari "Indonesia" juga kemungkinan besar akan dikorupsi—kalau ingat pelajaran di Sambas, Maluku, Sanggauledo, Timor Timur atau bencana manapun. Jangan karena Anda merasa sebangsa dengan Aceh, lalu Anda tidak menjadi kritis.

Apa sih yang belum politis saat ini di Aceh? Bahkan ejaan nama *Aceh* atau *Acheh* juga sangat politis. Orang Indonesia, termasuk mayoritas media Jakarta, memakai "Aceh" sedang aktivis sana memakai "Acheh." Anda perhatikan deh pernyataan-pernyataan yang keluar dari organisasi Acheh. Mereka bukan harus satu kubu. GAM dan SIRA tidak satu kubu. Namun mereka sepakat menggunakan "Acheh" ketimbang "Aceh."

Ketiga, saya yang bekerja sebagai wartawan, justru merasa isu politisasi inilah yang menarik perhatian saya untuk disajikan media kepada audiens mereka. Seberapa jauh, bantuan-bantuan yang sifatnya politis itu, dari Indonesia maupun apa yang biasa disebut sebagai "bangsa asing," akan mengubah persepsi "rakyat Acheh" terhadap Indonesia? Seberapa jauh bantuan-bantuan dari bangsa-bangsa lain di Republik Indonesia ini, meninggalkan kesan yang tulus dalam diri individu-individu Acheh?

Sayangnya, media kita lebih berkepentingan menggiring opini audiens daripada memberikan informasi yang benar. Kalau wartawan ikut tenggelam dalam semarak nasionalisme, saya khawatir, kejadian pembantaian Santa Cruz di Dili tahun 1991 akan terulang lagi di media kita ketika isu Santa Cruz itu berubah dari isu hak asasi manusia dan pembantaian menjadi isu nasionalisme.

Titik balik itu terjadi ketika negara-negara Barat dan Jepang, dalam payung International Governmental Group on Indonesia (IGGI), menekan rezim Presiden Soeharto agar menyelidiki Dili. Soeharto menolak intervensi dan membubarkan IGGI. Manuver politik yang hebat. Media Jakarta terpesona dan rasa kebangsaan diaduk-aduk. Tapi penderitaan orang Timor dan keinginan mereka merdeka luput dari media. Itulah cara saya memandang isu tsunami ini.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Saya sendiri, pertama-tama, seorang yang bekerja sebagai wartawan. Identitas lain, termasuk kewarganegaraan, saya lepaskan saat bekerja. Kewarganegaraan hanya untuk memperkaya pemahaman saya soal *Aceh* dan *Acheh*. Kewarganegaraan saya tak akan saya biarkan untuk mendikte liputan saya.

Jakarta, 2005

http://pustaka-indo.blogspot.com

Jungkir Balik di El Tari

LAGI ASYIK-ASYIKNYA menyunting laporan tren politik Pulau Flores, sembari menunggu seorang reporter mengetik kasus pemerkosaan di stadion Marilonga, tiba-tiba eh... listrik mati! Semua jaringan komputer mati. Padahal jaringan ini bekerja tanpa sistem pengaman. Maka semua data hilang.

Saya nyaris mengeluarkan koleksi kebun binatang saya, plus nama seluruh pembunuh massal, kalau tak ingat, bahwa mereka yang kerja di ruangan ini, ruang redaksi harian *Flores Pos*, hanya teriak, "Wah… wah..."

Santun sekali. Sekitar 15 orang, yang kerja di ruang redaksi, keluar satu per satu, menuju pelataran depan kantor, merokok dalam kegelapan, makan pisang molen, dan sedikit memaki. Frans Obon, redaktur pelaksana, bilang, "Ya begini ini Mas, koran kota kecil."

Terkadang listrik mati dari pukul 17.30 sampai 22.00. Artinya, kami mulai bekerja lagi pukul 22.00 dan selesai pukul 3.00 dini hari. Koran sering belum muncul hingga pukul 7.00 dari percetakan. Pelanggan Ende pun mulai menelepon, marah-marah. Sekretaris redaksi bolak-balik minta maaf. Ada juga pelanggan mengancam berhenti langganan. Pukul 10.00 telepon keluhan masuk dari Bajawa. Sambung-menyambung sampai Labuhan Bajo.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Inilah salah satu pengalaman membantu harian *Flores Pos*. Ada selusin wartawan, selusin komputer tua, tanpa satu pun kamera, sambungan internet jalan kayak siput (maaf ya siput). Para koresponden, dari Maumere, Larantuka, Ruteng, dan sebagainya, mengirim berita dengan tulisan tangan dan mesin fax. "Listrik padam, komputer onar, Telkom tidak punya internet," kata koresponden Maxi Gantung dari Lewoleba.

Saya seakan-akan kembali ke masa silam, 20 tahun lalu, ketika mesin fax baru muncul. Ada rasa aneh. Kok wartawan mengirim berita dengan tangan? Kok pakai mesin fax?

Dulu saya pernah bekerja di harian *The Star* di Kuala Lumpur, di mana satu hari sirkulasinya sekitar 300.000. Semua serba otomatis. Semua reporter bawa laptop, handphone, internet, foto satelit dan bekerja dari ujung-ujung dunia … London, New York, Beijing, Hong Kong, Singapura, Jakarta dan sebagainya. Sirkulasi harian *The Star* sekitar 100 kali lipat dari *Flores Pos*. Gedungnya lebih dari 17 tingkat dan percetakannya ada di beberapa kota.

Hitam putih. Di *Flores Pos*, kami mengetik ulang semua berita. Terkadang mutu fax buruk sehingga ada kalimat-kalimat tak terbaca. Saya harus berjuang keras untuk tak mengkhayal agar ada kutipan yang *sexy*.

Harap maklum. Setiap sore, para redaktur *Flores Pos* mengeluh soal berita "elitis"—berita yang intinya cuma mengutip pejabat, namun tak memberi ruang buat orang kebanyakan. Padahal warga kebanyakan Flores, Adonara, Solor atau Lembata, yang justru jadi tumpuan perjuangan *Flores Pos*. Kami ingin petani, pedagang, mahasiswa, pemuda dan orang biasa, bicara lebih banyak di halaman-halaman *Flores Pos*. Para pejabat kalau bicara juga banyak slogan, tak menarik, kering, atau meminjam istilah anak ABG Jakarta: OM-DO alias "omong doang."

SAYA BEKERJA UNTUK *Flores Pos* melalui kerjasama dengan Yayasan Pantau, sebuah organisasi nirlaba di Jakarta, yang bergerak di bidang

http://pustaka-indo.blogspot.com

pelatihan wartawan serta riset media. Swisscontact, sebuah organisasi dari Swiss, dengan kantor cabang Ende, membiayai kerjasama ini senilai Rp 150 juta setahun. Yayasan Pantau mengirim dua konsultan pemasaran, empat konsultan editorial dan dua disainer. Harapannya, *Flores Pos* bisa tampil sebagai suratkabar yang lebih baik, dari segi editorial, bisnis maupun desain. Swisscontact ingin membantu *Flores Pos* memberikan informasi yang lebih bermutu kepada warga Flores.

Pekerjaan saya membuat "evaluasi harian" terhadap *Flores Pos*. Isinya, mulai dari bahasa yang birokratis ("kelaparan" disebut "rawan pangan" sedang "kemiskinan" disebut "ketertinggalan") hingga etika wartawan.

Saya usul *Flores Pos* membuat kriteria pemakaian referensi kedua. Misalnya, Frans Seda, referensi keduanya adalah "Seda"—bukannya "Frans." Di Pulau Flores ada tradisi penggunaan nama keluarga. Maka saya usul *Flores Pos* menghormati tradisi ini. Nama depan, tentu saja, memang biasa dipakai sebagai panggilan sehari-hari.

Usulan lain, *Flores Pos* tak memakai inisial dalam pemberitaan kasus kriminal namun meninggikan mutu wartawannya dalam bidang praduga tak bersalah. Inisial terbukti tak membuat masyarakat tak menduga-duga, dan seringkali tepat, siapa pemilik inisial.

Misalnya, pada kasus YZ dan ME, orang mudah menemukan bahwa Yahya Zaini adalah anggota DPR dari Partai Golkar, yang terlibat video mesra dengan penyanyi dangdut Maria Eva. Atau pada kasus di Maumere, EPdG mudah ditebak adalah Eugene Paceli da Gomez, yang diduga ikut judi kecil-kecilan.

Kalau kita hendak benar-benar menyembunyikan identitas tersangka kejahatan, cara terbaik adalah tak menyebut inisial. Sebut saja seorang "politikus" baik pada kasus Zaini maupun da Gomez. Bukannya, "anggota DPR" atau "wakil ketua DPRD Sikka."

Di Jakarta, memang berlaku kode etik jurnalisme formal, di mana nama lengkap seorang tersangka baru diungkap penuh bila hakim sudah bikin vonis. Kode etik ini terbukti tak ditaati media Jakarta. Proses peradilan kita sangat berbelit-belit dengan prosedur

http://pustaka-indo.blogspot.com

panjang. Lantas siapa pun tahu bahwa peradilan Indonesia, karena prosedurnya sulit, lebih menguntungkan orang yang punya uang buat bayar pengacara. Orang yang tak punya uang umumya dirugikan pengadilan. Jadi, mengapa kita harus mendasarkan pemakaian nama atau inisial kepada proses peradilan macam begini?

Frans Anggal, pemimpin redaksi *Flores Pos*, minta saya juga membantu penyuntingan *feature* serta melatih para koresponden selama dua hari. *Pantau* juga membantu Anggal agar bisa lolos seleksi pelatihan pemimpin media di Melbourne tahun depan. Stef Tupeng Witin bulan depan ikut kursus penulisan di Jakarta. Harapannya, wartawan-wartawan lain juga ikutan.

Manajemen *Flores Pos* sendiri bicara soal ingin bikin naik sirkulasi harian dari 4.000 hingga 7.000 eksemplar setahun lagi. Direktur Keuangan PT Arnoldus Nusa Indah Wilfrid Kromen, yang menangani keuangan *Flores Pos*, bicara soal kemungkinan cari mesin cetak bekas untuk ditempatkan di Pulau Lembata dan Ruteng. Ini bukan kerja gampang. Harga satu mesin kira-kira Rp 2 milyar.

FLORES POS PENTING karena ia harian independen. Ia bukan milik konglomerat media di Jawa. Media di Indonesia kebanyakan pemiliknya orang Jakarta. Lebih dari 90 persen isi berita mereka, dari Sabang sampai Merauke, ditentukan oleh media yang siaran atau terbitannya dimiliki orang Jakarta.

Entah itu Kompas Gramedia. Entah itu kelompok Tempo dan Jawa Pos. Entah itu milik Media Nusantara Citra. *Indosiar*, *SCTV*, *Trans TV*, *Metro TV* dan Kelompok Femina. Gramedia memiliki lebih dari 30 harian di seluruh Indonesia. Kelompok Tempo dan Jawa Pos punya lebih dari 140 suratkabar. MNC menguasai *RCTI*, *TPI*, *Global TV* maupun jaringan radio *Trijaya* dan koran *Seputar Indonesia*. Harian *Serambi* di Aceh misalnya, bukan milik orang Aceh, namun milik Gramedia. Sama dengan *Pos Kupang*. Tempo dan Jawa Pos mengembangkan jaringan radar-radar, dari *Radar Jember* hingga *Radar Lampung*.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Semua terpusat dari Jakarta. Standar kerja sama. Manajemen sama. Penilaian kerja sama. Cara mencari wartawan sama. Mutu kerja sama. Sama buruk, sama baik. Mereka berlomba-lomba menguasai pasar sembari menekan biaya. Wartawan ditekan gajinya agar mereka bisa menguasai pasar lebih banyak.

Harian *Flores Pos* lain. Harian ini hanya terbit 16 halaman tapi mengisinya dengan 80 persen berita lokal. Ia punya enam biro, masing-masing dua reporter. Total ada 16 wartawan. Ini usaha luar biasa (walau ia masih curi-curi "berita nasional" dari internet).

Di Indonesia, bisa dihitung dua tangan, harian lokal tapi milik Jakarta, yang mengisi beritanya macam *Flores Pos*. Kebanyakan hanya ambil bahan berita dari induk mereka di Jakarta atau Surabaya, lalu membayar empat atau lima wartawan, guna mengisi halaman lokal. Desain pun sama, dari *Jawa Pos* di Surabaya hingga *Cenderawasih Pos* di Jayapura. Bayangkan isi *Flores Pos* kalau jumlah reporter dan redakturnya cuma lima orang?

Kerja di Ende ini melelahkan. Setiap tengah malam, badan saya capek, masuk kamar kost untuk tidur. AC mati dan tukang AC, kerjanya minta ampun lambat. Kamar pengap. Namun setiap pagi pula, saya hendak cepat-cepat bangun, melihat koran hari ini, melihat desainnya, melihat mutu cetakan dan menunggu hasil penjualan. Ada seorang penjual koran yang suka cerita berapa koran dijualnya hari ini?

Ada gairah. Ada pengorbanan. Belum lagi melihat Frans Anggal, Hieronimus Bokilia, Inno Making dan lain-lain, yang juga sudah muncul di kantor, pagi-pagi sekali. PT Arnoldus Nusa Indah masih rugi. Tapi saya percaya, *Flores Pos* mencoba melakukan yang terbaik, melayani warga Flores, dengan segala keterbatasannya. Anggal pulang malam ketika anak-anaknya sudah tidur.

Air ledeng sempat tiga hari mati. Saya berhemat air, cukup hanya untuk buang air, kecil dan besar. Mandi di Pantai Ria. Makan dan minum juga harus hati-hati kalau tak mau sakit perut. Ada wabah diare. Tapi dari Jl. El Tari inilah, saya belajar makin menghargai kerja

http://pustaka-indo.blogspot.com

keras wartawan-wartawan kota kecil. Jurnalisme justru menunjukkan mutu dan pengabdiannya ketika ia bergerak lurus dengan segala keterbatasan dan kesulitannya. Ini sebuah keanggunan.

Ende, 2006

http://pustaka-indo.blogspot.com

Sengkarut Harian Equator

SUASANA LEBARAN HARI keempat tampaknya sudah tuntas dengan acara maaf lahir dan batin ketika Djunaini KS, direktur utama PT Kapuas Media Utama Press, merangkap pemimpin umum dan pemimpin redaksi harian *Equator,* memecat empat redakturnya: Yusriadi, Tanto Jacobus, Hairul Mikrad dan Asriyadi Alexander, Jumat malam.

Alasannya, empat wartawan itu ikut membuat "mosi tidak percaya" terhadap Djunaini. Djunaini memakai kata "dinonaktifkan" saat mengusir keempatnya secara lisan. PT Kapuas Media Utama Press adalah penerbit harian *Equator*, satu dari lima suratkabar milik Kelompok Jawa Pos di Pontianak.

Menurut beberapa saksi, sekitar pukul 20.10, Djunaini tiba-tiba berteriak memanggil mereka di ruang redaksi, "Alex, Yusriadi, Dek berdiri! Kalian keluar!" Kalimat itu diulanginya tiga kali. Keempat kalinya, Djunaini menambahkan, "Alex, Yusriadi, Dek, Tanto, berdiri. Kalian keluar!"

Banyak orang terpana. Dek adalah nama panggilan Hairul Mikrad. Menurut Alex, dia sempat bertanya, "Apa alasan Anda memecat saya?"

Djunaini menjawab, "Surat yang Anda tulis ke *Jawa Pos*. Saya adalah direksi di sini dan saya berhak."

http://pustaka-indo.blogspot.com

"Saya tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum ada pemecatan dari Dahlan Iskan," kata Alex, mengacu pada orang nomor satu *Jawa Pos*. Djunaini tak menyangka ada sanggahan.

Djunaini kemudian menelepon Zainal Muttaqin, CEO *Jawa Pos*. Namun, telepon Djunaini tak dijawab. "*Jawa Pos* minta saya me-*reshuffle*. Silakan Anda keluar dari tempat ini. Mulai saat ini Anda dinonaktifkan sampai ada keputusan lebih lanjut," kata Djunaini.

Djunaini langsung memanggil Rido Ibnu Syahrie, mantan koresponden *Equator* di Singkawang yang baru pindah ke Pontianak, untuk mengambil-alih pekerjaan *editing*. Suasana tegang. Menurut dua saksi, Djunaini terlihat emosi sampai lupa memasang gigi palsunya.

Keempat wartawan itu pun keluar dari kantor *Equator*. Alex dan Yusriadi duduk di depan kantor. Mereka melihat beberapa orang tak dikenal, kelihatannya orang keamanan, ditempatkan Djunaini di pintu masuk. Orang-orang itu memberi ultimatum: tak boleh ada wartawan luar yang masuk ke *Equator*. Malam itu beberapa wartawan datang dari *Pontianak Post, Kompas, Antara, TV7, Volare* serta Muhlis Suhaeri dan saya dari *Pantau*.

Beberapa wartawan *Equator*, antara lain Elfrida Sinaga, Indra Nova, Anton Perdana dan Stevanus Akim, ikut mengelilingi Alex dan Yusriadi. Mohamad Iqbal, putra sulung Djunaini, berada di depan pintu masuk.

Pemecatan ini buntut dari mosi yang ditandatangani 32 karyawan *Equator*. Mereka mengirim surat kepada Zainal Muttaqin pada 5 Oktober. Intinya, mereka minta penggantian Djunaini selaku direktur dan editor. *Jawa Pos* memiliki saham 67,5 persen, Djunaini 2,5 persen dan karyawan 30 persen.

Dalam mosi itu, karyawan menilai Djunaini sering mencampuri urusan *Equator* dengan bisnis non-media (Djunaini terlibat dalam usaha perkebunan kelapa sawit), sering melarang berita-berita tertentu (antara lain, protes masyarakat Dayak dan organisasi lingkungan terhadap perkebunan sawit), sering tak masuk kantor, mempraktikkan nepotisme (kedua putranya dilibatkan dalam *Equator*) dan mem-*blacklist* 13 politisi dan organisasi dari pemberitaan *Equator*.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Mereka yang masuk daftar hitam Djunaini, termasuk Bupati Kabupaten Landak Cornelis, kandidat Gubernur Kalimantan Barat Akil Mochtar, Bupati Kabupaten Pontianak Agus Salim, anggota DPR Uray Faisal Hamid, ketua DPRD Pontianak Gusti Hersan Asli Rosa, ketua Yayasan Bhakti Suci Lie Kie Leng, Adhie Rumbee dari Majelis Adat Budaya Tionghoa serta organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Aliansi Masyarakat Adat. Djunaini juga tak suka pada politisi AR Muzammil, advokat Cecep Priyatna, akademikus Rousdy Said. Dua organisasi ini dinilai Djunaini anti perkebunan kelapa sawit. Mosi tersebut dilampiri berita-berita *Equator* yang tak dimuat karena intervensi Djunaini.

Para karyawan juga mengeluh soal ketiadaan genset (listrik Pontianak sering mati), komputer sudah tua, tenggat waktu berita sering dilanggar, tiadanya transparansi pembangunan gedung baru *Equator*, kontrak kerja tak jelas, dan karakter Djunaini temperamental. Fakun dari bagian grafis juga mengeluh Djunaini kurang menghargai upaya perbaikan tata-letak *Equator* sesudah mereka mendapat pelatihan dari Georgia Scott, desainer harian *The New York Times*. Djunaini sering bilang, "Bantai, bantai ja," ketika orang grafis bekerja membuat tata-letak dengan memakai bekal pelatihan Scott. Kata "ja" dalam bahasa Melayu, yang lazim dipakai di Pontianak dan sekitarnya, artinya "saja" dalam versi resmi Indonesia.

Saya mengenal banyak karyawan *Equator*. Saya kira mereka yang dipecat relatif wartawan berprestasi dan punya niat meningkatkan mutu suratkabar itu.

Yusriadi wartawan yang ahli bahasa. Dia sering jadi tempat bertanya rekan-rekannya. Dia mendapatkan gelar doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur. Dia menulis buku, bersama rekannya Hermansyah, *Orang Embau: Potret Masyarakat Pedalaman Kalimantan*.

Riset dan penulisan buku ini dibimbing Prof. James T. Collins, ahli Borneo dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Collins memuji

http://pustaka-indo.blogspot.com

buku tersebut karena membongkar stereotip Borneo bahwa orang Melayu selalu Muslim dan tinggal di daerah pesisir, sedangkan orang Dayak tinggal di pedalaman.

Yusriadi sendiri orang Embau, sebuah komunitas Dayak Muslim, kadang disebut Melayu, yang tinggal di sepanjang Sungai Embau di jantung Kalimantan. Etnisitas adalah isu penting di Pontianak. Berbagai buku—termasuk disertasi Jamie Davidson dari Universitas Washington, Seattle, soal akar kekerasan di Kalimantan Barat—menyebut pulau ketiga terbesar dunia ini selalu penuh dengan masalah keragaman etniknya. Davidson menelusuri *ethnic cleansing* orang Tionghoa dan Madura.

Asriyadi Alexander dan Tanto Jacobus orang Dayak. Hairul Mikrad orang Bugis. Alex juga seorang penyair. Dia pernah diundang ke Sarawak, Malaysia karena puisi-puisinya. Alex, Hairul dan Tanto juga anggota Aliansi Jurnalis Independen, sebuah organisasi wartawan yang giat kampanye anti-amplop.

Tindakan Djunaini sangat berani memecat langsung empat dari lima redakturnya. Nur Iskandar, redaktur pelaksana, yang ikut memotori mosi tersebut, tak ikut dipecat namun disingkirkan dengan halus lewat penunjukan Rido. "Saya memutuskan tidak bekerja Sabtu ini," katanya. Artinya, Djunaini sekaligus membabat habis lapisan redaktur paling atas di *Equator*. Hanya satu redaktur, Mutadi, yang tak disingkirkannya.

Rido Ibnu Syahrie, yang menggantikan Nur Iskandar, mulanya ikut rapat-rapat dan menandatangani mosi tak percaya Djunaini. Entah bagaimana dia bersama delapan karyawan lain kemudian berbalik arah dan membuat surat tandingan. Mereka tetap minta perbaikan manajemen, tapi tak menggugat status kedirekturan Djunaini.

Saya minta komentar Rido tentang surat tandingan itu, namun tak dijawab. Nur Iskandar mengatakan bahwa sesudah pemecatan, Djunaini, Rido dan kawan-kawan mengadakan rapat serta makan-minum.

Anton Perdana, koresponden Sanggau yang ikut barisan Rido,

http://pustaka-indo.blogspot.com

mengatakan mereka bisa memahami keputusan penonaktifan keempat rekan mereka, "Itu kebijakan pimpinan, kami ikut. Kami hanya ingin menyelamatkan tempat kami makan."

Mohamad Qadhafy, putra bungsu Djunaini yang menangani bagian event *Equator*, menolak tuduhan nepotisme. Dia menyebutkan bahwa dia sudah menulis untuk *Equator* sejak 2003. "Saya mulai bisa nyari duit dengan menggarap *event* sebelum bekerja di harian *Equator*," katanya.

Barisan Djunaini-Rido kebanyakan didukung koresponden *Equator* di luar kota Pontianak. Mereka termasuk Adrianus Jumadi (Landak), Darussalam (Ketapang), Indra Nova (Melawi), Yuni Kurnianto dan Ramdan (Singkawang). Seorang reporter baru, Aulia Marti, juga ikut gabung gerakan mendukung Djunaini ini.

Gerakan Djunaini-Rido mendapat momentum dari sebuah pertemuan di rumah Djunaini di daerah Parit Haji Husin pada hari Rabu, Lebaran kedua. Tujuan pertemuan mendukung Djunaini. "Pimpinan ternyata *commit*," kata Anton Perdana. Ketika Jumat malam saya hubungi, Djunaini menolak memberi komentar, "Maaf, internal."

Menariknya, Djunaini sempat memberi tahu saya akan memecat "yang tak suka" padanya hari Kamis siang, sehari sebelum peristiwa Jumat. Ketika itu saya ikut beberapa karyawan *Equator* bertamu ke rumahnya. Sapariah Saturi, tunangan saya, pernah bekerja untuk *Equator*. Sapariah mengajak saya ke sana untuk diperkenalkan dengan "Bos Djun."

Kami berbasa-basi saja. Djunaini bicara soal mempersiapkan gedung baru sebelum dia "lengser." Dia mengatakan dirinya "owner *Equator* dan kuasa *Jawa Pos*." Dia juga cerita akan "mempersilahkan" orang yang tak suka padanya untuk keluar dari *Equator*.

Rumahnya dua tingkat, perabotan baru, mengkilat, desain modern, *kitchen set* rapi dan sebagainya. Di halaman banyak koleksi bonsai. Saya tak melihat ada rak buku di lantai satu namun di meja tamu tergeletak novel Tom Clancy, *The Bear and The Dragon*.

Rumah Djunaini kontras dengan kantor *Equator* di kawasan pertokoan Nusa Indah. Kantor kumuh. Perabotan bobrok. Komputer

http://pustaka-indo.blogspot.com

tua. Wartawan miskin. Alex sering bergurau bahwa tiga mobil yang sering parkir depan kantor *Equator* cuma mobil milik Djunaini, Mohamad Iqbal dan Mohamad Qadhafy: ayah dan dua anaknya.

Jumat malam, ketika baru dipecat, Hairul Mikrad kalut, memacu sepeda motornya keliling kota Pontianak. Dia sempat menerima pesan pendek dari nomor 0858-22059993, yang berbunyi, *"Kau te dari mani anjing hitam yang kancut mak kau."* Artinya, "Kamu itu asalnya dari air mani anjing hitam yang menyetubuhi ibu kamu sendiri."

Menurut Hairul, kalimat ini khas dialek Melayu Ketapang. Hairul beranggapan Djunaini tak mungkin mengirimkan pesan tersebut. Kemungkinannya, nomor itu nomor *instant* dan dikirim seorang kroni Djunaini yang tak mau diketahui identitasnya.

"Saya tidak sedih atau gundah dinonaktifkan, tapi saya sedih dengan kawan-kawan yang tidak komitmen," kata Hairul. Mayoritas pendukung mosi balik badan ketika melihat keempat rekan mereka dipecat. Nur Iskandar mengatakan mayoritas takut kehilangan pekerjaan. Surat buatan Rido bahkan diedarkan dan dimintakan tanda tangan lebih banyak lagi.

Yusriadi pucat sekali. Dia tidak biasa diperlakukan kasar. Dia sempat mengungkapkan kegeramannya pada Anton Perdana dengan menyebut Anton sebagai "tim suksesnya" Djunaini. Anton menolak tuduhan Yusriadi.

Menurut Tanto Jacobus, dia sudah punya firasat akan kehilangan pekerjaan. "Saya pikir, jangan-jangan ini hari saya terakhir kerja di *Equator*." Dia juga sudah menyiapkan istri dan kedua anaknya untuk menghadapi perubahan situasi. "Kami biasa hidup miskin, tidak apa-apa," katanya.

Pontianak, 2006

Disclosure: Asriyadi Alexander, Nur Iskandar dan Hairul Mikrad pernah ikut kursus jurnalisme sastrawi Yayasan Pantau di Jakarta dengan instruktur Janet Steele dari Universitas George Washington dan saya. Setelah pemecatan, mereka bikin harian Borneo Tribune.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Lampung, Lampung, Lampung

SAYA BEBERAPA KALI berkunjung ke Bandar Lampung, menemui mahasiswa-mahasiswa, bicara dengan wartawan, dan tentu saja, menikmati durian Kotabumi. Kebetulan ada beberapa warga Lampung, antara lain Eva Danayanti, alumnus majalah *Teknokra,* yang pernah menjadi rekan kantor saya di Pantau, Jakarta.

Terkadang, lewat diskusi dengan Eva dan kawan-kawannya, saya tahu adanya persaingan, sehat maupun tak sehat, antara bangsa Jawa—"Kami yang mayoritas," kata satu wartawan—dengan bangsa Lampung, sang "putra daerah." Eva juga cerita soal etnik Tionghoa, yang dominan dalam perdagangan, serta sering jadi kambing hitam dalam keadaan kacau.

Cuma omong-omong saja. Tak ada liputan, tak ada riset. Lampung, dari sejarahnya, jauh kurang sering berantem. Bandingkan misalnya, dengan kesultanan Acheh, yang sudah 600 tahun berantem dengan kekuasaan di Pulau Jawa. Gerakan Acheh Merdeka hanya perpanjangan dari sejarah 600 tahun itu. Atau bangsa Papua, yang tak merasa dijadikan bagian yang jujur dari Indonesia. Atau Timor Leste, yang melawan pendudukan Indonesia, dengan korban 183.000 mati antara 1975 dan 1999.

Persoalannya, bagaimana harian-harian di Bandar Lampung meliput serta membentuk opini soal ini? Saya kira, soal ini

http://pustaka-indo.blogspot.com

penting banget kalau Anda ingat analisis Benedict Anderson, guru nasionalisme dari Universitas Cornell, soal peranan media cetak dalam membentuk rasa satu nasib, rasa satu bangsa, rasa persaudaraan. Anderson terkenal dengan buku-buku klasik macam *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946* (1972) serta *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (1983).

Menurut Anderson, "bangsa" adalah suatu masyarakat khayalan. Warga masyarakat betulan mengenal sebagian besar warga masyarakat tersebut. Suatu masyarakat khayalan, atau suatu bangsa, tentu saja, tak mengenal mayoritas warga lainnya. Namun media menciptakan khayalan seakan-akan mereka punya nasib sama, seakan-akan mereka saling mengenal dan bersama-sama memperjuangkan sesuatu. Saking hebatnya, khayalan ini bisa menggerakkan orang jadi emosi. Namun bangsa juga sering jadi sasaran manipulasi. Siapa lagi kalau bukan media pula yang bikin manipulasi?

Hari ini, peranan media cetak itu, secara luar biasa disaingi oleh media elektronik, terutama televisi. Ada gosip artis dan politikus kawin-cerai, ada film Hollywood super menarik, ada pelawak macam Thukul Arwana. Orang tertarik nonton televisi, lalu enggan beli koran. Hari ini, juga praktis tak ada orang yang mendapatkan *breaking news* dari suratkabar. Padahal *breaking news*, sejak awal abad XX, jadi daya tarik suratkabar menggaet pembaca. Suratkabar pun makin frustasi lihat kue iklan direbut televisi. Di Jakarta, saya sering jadi korban curhat para redaktur, yang jengkel lihat sirkulasinya turun terus, lalu tergoda menyeleweng dari pakem-pakem jurnalisme.

Jalan keluar yang benar bagaimana? World Association of Newspapers berusaha membantu dunia persuratkabaran. WAN adalah sebuah organisasi nirlaba, berdiri tahun 1948 di Paris. Anggotanya ada 102 negara, mewakili sekitar 18.000 suratkabar (termasuk Indonesia). Mereka mempunyai macam-macam petunjuk guna mengembangkan sirkulasi dan pendapatan suratkabar. Mulai dari perbaikan manajemen hingga kerjasama digital.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Semuanya ada dalam proyek *"Shaping the Future of Newspapers."* Saya sempat perhatikan judul-judul dari laporan mereka:

- *The Power of Local Focus*
- *Digital Classifieds Survey*
- *Media Landscapes: Beyond Advertising*
- *The Format Change Phenomenon*
- *Classified Models Revisited*
- *Circulation science*
- *Profiting from Digital*
- *New Designs, New Formats*
- *Reaching and Retaining Young Readers*
- *The Value Driven Newspaper*

Intinya, suratkabar modern tak bisa mengandalkan kecepatan lagi. Suratkabar modern harus menekankan kedalaman. "Analisis, analisis, analisis," katanya. Desain harus diperhatikan. Situs web bisa jadi tambang uang. Iklan baris perlu diformat segar. Pendapatan bukan hanya dari iklan. Sirkulasi harus lebih hemat.

Committee of Concerned Journalists dari Washington D.C. juga memberi banyak usul. Mereka usul mutu jurnalisme ditingkatkan. Suratkabar Lampung, kalau mau modern, harusnya juga makin analitis, makin bercerita serta makin mudah dibaca. Ia juga harus lebih lokal, lebih dekat kepada warga.

Suratkabar Lampung juga harus mendidik warga untuk sadar bahwa nasib mereka, seringkali tak ditentukan oleh mereka sendiri. Nasib mereka lebih sering dipengaruhi oleh orang-orang berkuasa di tempat yang jauh dari Lampung. Entah di Jakarta, atau mungkin London, New York, Tokyo, Beijing, Kairo dan Mekkah. "Makin bermutu jurnalisme dalam suatu masyarakat," kata Bill Kovach dari Committee of Concerned Journalists, "makin bermutu pula masyarakatnya."

Lebih penting lagi, suratkabar modern harus memberikan gambar, yang sedekat-dekatnya, bahwa keragaman adalah bagian dari Lampung. Politik bangsa-bangsaan harus diceritakan dengan segala macam *background*, yang tak muncul pada berita sepotong dua potong.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Ia juga harus lebih memberi tempat kepada warga. Suratkabar modern bukan hanya meliput pejabat dan orang-orang besar.

Orang Amerika bilang, *"It's a tall order."* Ini permintaan yang sulit. Kebanyakan media Jakarta baru bebas dari sensor dan bredel sesudah mundurnya Presiden Soeharto. Namun fasisme Orde Baru, yang anti-keragaman, gemar menindas kaum minoritas, serta mengagung-agungkan kekerasan, masih diwarisi di setiap sudut Indonesia dan Timor Leste.

Republik Indonesia, yang dibentuk pada 1950-an, juga menghancurkan semua suratkabar peninggalan Hindia Belanda. Dampaknya, tak ada garis sambung antara media di Indonesia, yang kini 95 persen dikuasai orang Jakarta, dengan jagoan-jagoan macam Tirto Adhi Soerjo, F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, Marah Sutan, Mas Marco Kartodikromo, Kwee Kek Beng, atau F.D.J. Pangemanann. Ketika beberapa kali bertemu dengan orang-orang WAN, saya sering gagap bila tahu umur suratkabar-suratkabar Eropa, Amerika atau India, 150 hingga 200 tahun. Republik baru ini tak punya sejarah jurnalisme yang panjang. Paling tua umurnya 40-50 tahun.

Di Jakarta, Goenawan Mohamad dari *Tempo* sering mengeluh susahnya cari wartawan yang bisa menulis. Saya setuju dengan Goenawan. Coba Anda hitung berapa wartawan di Jakarta, yang biasa menulis, tentu saja dengan benar dan memikat, lebih dari 10.000 kata dalam satu cerita? Bagaimana mau bikin analisis dan cerita mendalam kalau wartawannya tak bisa menulis panjang? Tapi banyak reporter juga mengeluh. Bagaimana bisa menulis bagus dan dalam kalau setiap hari disuruh bikin dua, tiga hingga lima berita? Ini macam lingkaran setan.

Tapi siapa tahu, dari tempat di mana durian Kotabumi bikin banyak orang jatuh cinta pada makanan Lampung, bisa muncul suratkabar bermutu, yang memelopori perubahan jurnalisme kuno ala Majapahit di Jakarta?

Jakarta, 2007

http://pustaka-indo.blogspot.com

Surat untuk *Gatra*

Dear Heddy Lugito,

Aku usul *Gatra* mengubah diri, perlahan-lahan, jadi majalah yang mengedepankan analisis—walau tetap berupa majalah berita. Ia bukan analisis tanpa liputan. Ia bukan opini murahan. Ia adalah analisis yang didasarkan pada liputan serta pemahaman terhadap *background* berita tersebut.

Ada dua alasan. Pertama, Jakarta tak memiliki majalah yang menekankan pada analisis. London punya *The Economist*. New York punya *The New Yorker*. Jakarta hanya punya majalah-majalah berita, termasuk *Gatra*, *Tempo*, *Trust* dan sebagainya. Padahal kalau menengok tempoe doeloe, Batavia dan Djakarta—kalau mau diperpanjang juga Soerabadja, Semarang, Solo, Manado dan Padang—punya moendjalat2 bermutu yang melahirkan macam-macam esais dan wartawan hebat, yang belum tertandingi dalam era Indonesia.

Kedua, kecepatan internet membuat pola konsumsi *hardnews* diambil oleh *Kompascom*, *Detikcom*, *Vivanews* dan sebagainya. Televisi juga mudah siaran langsung. Hari ini tak ada orang yang mendapatkan *breaking news* dari suratkabar harian … apalagi majalah mingguan. Menurut *World Association of Newspapers*, pada zaman

http://pustaka-indo.blogspot.com

dimana kecepatan internet mengalahkan suratkabar, hanya ada tiga tiga kata untuk membuat isi suratkabar tetap relevan buat audiens mereka: analisis, analisis, analisis.

Kalau alasan ini bisa diterima—saya tak membicarakan aspek pemasaran, distribusi dan keuangan, yang memang bukan bidang saya, namun juga ikut menentukan daya saing dan daya tahan *Gatra*—maka saya usul praktis dilakukan beberapa perubahan pada orientasi redaksional *Gatra*.

Pertama, saya kira wartawan-wartawan *Gatra* perlu berlatih menulis narasi maupun esai. Analisis memerlukan kemampuan menulis panjang. Feature, yang menjadi andalan majalah berita, biasanya dipakai untuk menulis laporan pendek. Dalam produksi feature, sebuah isu yang kompleks malah harus dipotong-potong menjadi beberapa bagian, termasuk 'Q&A' maupun *side-bar*. Feature mengambil asumsi orang tak punya waktu untuk membaca laporan panjang.

Sebaliknya, narasi diperlukan untuk menulis panjang. Asumsinya, orang mau membaca laporan panjang jika ia dikerjakan dengan memasukkan unsur-unsur kebaruan maupun analisis.

Esai diperlukan guna menurunkan argumentasi yang tajam, yang bisa membantu pembaca memahami, misalnya, tuduhan terhadap Antasari Azhar, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai dalang pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Ia harus diberi konteks: sejarah, teori, informasi baru lain dan sebagainya.

Kedua, usul ini menuntut beberapa penyesuaian cara kerja ruang redaksi *Gatra*. Majalah *Gatra* akan menjadi kurang *timely*. Gatra akan menjadi lebih *timeless*, kurang mengikuti balon-balon berita. Namun ia bukan berarti tak bisa kejar-kejaran berita. Kalau ada berita magnitude besar, *Gatra* harus bisa mengerahkan ruang redaksi mengejar berita.

Gatra juga akan lebih membangun spesialisasi. Ada reporter khusus politik. Ada khusus Islam. Ada yang dianggap mengerti Aceh. Ada yang spesialis Papua. Ekonomi juga memerlukan beberapa spesialis. Mereka akan bekerja individualistis agar kedalaman digali.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Ada juga jago musik, film, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Namun mereka juga bisa bekerja team bila ada berita magnitude besar dimana semua keahlian mereka bertemu.

Spesialisasi dan analisis memerlukan pemakaian byline—bahkan kalau sudah terkenal, macam Fareed Zakaria dari *Newsweek*, byline dipajang di kulit muka. Byline membantu wartawan untuk membangun reputasi mereka. Sebaliknya, byline juga membuat wartawan lebih hati-hati bekerja.

Kedalaman juga menuntut alokasi waktu lebih panjang untuk bikin liputan individual. Seorang wartawan mungkin perlu satu hingga dua bulan, mungkin lebih, untuk menyelesaikan laporan. Artinya, ia juga mengubah mekanisme kerja *Gatra*. Tidak setiap wartawan bisa bikin analisis. Namun mereka yang mampu, tentu saja, akan diberi kesempatan menulis panjang.

Spesialisasi juga membuka ruang kepada orang-orang luar *Gatra* untuk membuat laporan utama—bahkan mendapatkan byline di kulit muka. Praktik ini biasa dilakukan *Time* dan *Newsweek*. *Gatra* seyogyanya bisa memanfaatkan tersedianya banyak talenta di Indonesia guna menyajikan laporan dan analisis yang memikat serta mendalam kepada audiens-nya.

Saya membayangkan kelak *Gatra* bisa minta Andi Widjajanto menulis masalah militer, Rusdi Marpaung atau Bonar Tigor Naipospos soal hak asasi manusia, Fredy Wowor soal nasionalisme Minahasa, Joost Willem Mirino atau Muridan Widjojo soal Papua, Otto Syamsuddin Ishak soal Aceh, Leo Suryadinata soal Tionghoa, Anies Baswedan soal politik di Pulau Jawa, Josef Ardi soal bisnis, Lily Yulianti soal Bugis-Makassar dan sebagainya. Mereka bukan hanya menulis esai dua halaman namun 10-20 halaman.

Manfaatkan orang-orang yang sudah selesai menulis buku untuk bikin laporan utama *Gatra*. Misalnya, *Gatra* bisa minta Wilson menulis esai soal cikal-bakal fasisme di Pulau Jawa. Imdadun Rachmat bisa menulis soal hubungan Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan Sejahtera. Murizal Hamzah, yang sedang menyelesaikan

http://pustaka-indo.blogspot.com

biografi Hasan di Tiro, bisa menumpahkan sebagian penemuannya. Budi Setiyono menulis soal penyair Lekra A.S Dharta.

Ketiga, rubrikasi juga akan berubah. *Gatra* tak perlu menurunkan belasan rubrik setiap minggu karena alokasi halaman akan memerlukan ruang lebih panjang untuk rubrik-rubrik yang minggu tersebut naik cetak. Bikinlah survei keterbacaan setiap rubrik. Rubrik-rubrik yang kurang tinggi keterbacaannya diperbaiki. Majalah *The New Yorker* memiliki keterbacaan 80 persen dari seluruh total isi. Artinya, setiap naskah yang turun di *Gatra*, dibuat target bahwa 80 persen harus dibaca habis.

Keempat, saya pikir perubahan ini seharusnya melibatkan seluruh komponen ruang redaksi, bukan hanya bagian naskah, tapi juga disain dan foto. Disain akan diberi keleluasaan lebih tinggi. Saya usul *Gatra* membeli buku *Covering The New Yorker: Cutting-Edge Covers From a Literary Institution* karya Francoise Mouly.

Saya sengaja menganjurkan kulit muka *The New Yorker* karena majalah ini paling fenomenal dalam disain kulit muka mereka. Setiap tahun, *The New Yorker* menghasilkan jutaan dollar hanya dari penjualan frame kulit muka mereka. Kulit muka edisi Desember 2001 "New Yorkistan" menghasilkan penjualan US$400,000. Bayangkan satu kulit muka saja dapat $400,000? Ini pun bukan gambar asli. Hanya *print-out* dilengkapi tanda tangan si pelukis.

Kulit muka mereka tanpa teks sehingga para pelukis juga suka gambarnya tak diacak-acak dengan judul-judul berita. Kreatifitas diberi tempat terhormat di *The New Yorker* sehingga orang-orang pun mau membeli khusus, hanya frame kulit muka *The New Yorker*.

Saya punya *feeling* kulit muka bisa jadi "profit center"—istilah ini datang dari majalah Folio "the magazine for the magazine management"—karena Jawa dan Bali memiliki cukup banyak pelukis kelas dunia. *Gatra* bisa memakai banyak sekali pilihan. Perupa Agus Suwage dari Yogyakarta, misanya, bisa diminta bantuan.

Foto juga demikian. *Gatra* akan menerbitkan hanya foto-foto berkualitas. Jumlah foto dikurangi—sama dengan jumlah rubrik—

http://pustaka-indo.blogspot.com

namun mutunya ditingkatkan—sama dengan naskah tulis. Gunakan lebih banyak fotografer *freelance*. Perhatikan pameran-pameran foto. Sediakan tempat untuk foto-foto bermutu dalam halaman-halaman *Gatra*. Minta masukan dari Oscar Motuloh dan kawan-kawan.

Intinya, *Gatra* akan memberikan tempat kepada analisis. Ia harus disertai langkah-langkah lain untuk jadi lengkap. Kalau kalian suka, saya kira diskusi kita bulan lalu bisa dilakukan dua atau tiga kali lagi untuk sharing ide-ide ini lebih konkrit. Terimakasih.

Jakarta, 2009

http://pustaka-indo.blogspot.com

http://pustaka-indo.blogspot.com

PELIPUTAN

http://pustaka-indo.blogspot.com

Independensi Bill Kovach

KETIKA BILL KOVACH meluncurkan bukunya di Medan, seorang mahasiswi Universitas Sumatera Utara menyatakan terkesan pada buku *Sembilan Elemen Jurnalisme* karya Kovach dan Tom Rosenstiel itu. Seraya memuji, Farida Hanim, si mahasiswa tersebut, juga bertanya, "Apa kesalahan terbesar yang pernah dilakukan Bill Kovach?".

Orang-orang tergelak mendengarnya. Kovach tersenyum, "Ini tidak *fair*. Saya mendapat pertanyaan sulit ketika diskusi hampir berakhir. Padahal saya sudah capek." Tapi Kovach menjawab bahwa tiap wartawan bisa salah, termasuk dirinya, dan salah satu kesalahan yang mengganggunya belakangan ini adalah sebuah esainya tentang Charles Longstreet Weltner dalam buku *Profiles in Courage for Our Time*, suntingan Caroline Kennedy, putri almarhum Kennedy.

Welter anggota Kongres asal negara bagian Georgia, yang terkenal berani. Tahun 1991, dia menerima "John F. Kennedy Profile in Courage Award", sebuah hadiah yang diberikan tiap tahun oleh sebuah yayasan milik keluarga mantan presiden John F. Kennedy kepada pejabat pemerintah yang dinilai punya keberanian moral.

Dalam esai itu, Kovach menulis bagaimana Weltner memilih mundur dari Kongres pada 1966 karena Lester Maddox dicalonkan

http://pustaka-indo.blogspot.com

partainya dalam kampanye pemilihan gubernur Georgia. Maddox seorang pendukung segregasi atau seorang rasialis. Weltner melawan partainya sendiri, mengambil risiko dikucilkan, karena Weltner percaya bahwa tiap warga punya hak sama. Kulit putih maupun hitam. Weltner pun kehilangan karier politik.

Repotnya, sesudah mundur, Weltner punya kehidupan kacau. Dia cerai dari istrinya, suka mabuk, naik sepeda motor besar, dan bergaya macam anak muda. Kovach juga menerangkan bahwa pada periode ini Weltner menikah dengan istri kedua. Pernikahan hanya bertahan lima bulan. Kovach tak menyebut nama istri kedua itu tapi pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian juga. Belakangan Weltner menikah dengan istri ketiga. Weltner lantas jadi hakim agung dan meninggal pada 1992.

Sesudah buku terbit, Kovach menerima sebuah bungkusan besar, dari mantan istri kedua Weltner. Isinya, berupa fotokopi surat, dokumen, foto, dan sebuah surat panjang. Dalam surat ini, si istri mengatakan Kovach keliru dan telah menghancurkan hidupnya hanya dengan tiga kalimat tersebut. Memang Kovach tak menyebut nama tapi banyak orang tahu siapa mantan istri kedua Charles Weltner. Si mantan istri mengatakan dua tahun itu termasuk periode hidupnya yang paling bahagia. Bahkan sesudah cerai pun, mereka masih sering berkomunikasi.

Kovach mempelajari kiriman itu dan menyesal karena merasa tak cukup melakukan reportase untuk mengetahui periode dua tahun itu. Kovach menelepon si mantan istri dan berjanji akan menulis sebuah esai untuk memperbaiki apa yang sudah ditulisnya. "Saya mau pergi ke Indonesia tapi saya bilang saya akan mewawancarainya sesudah pulang dari sini. *To get things right,"* kata Kovach.

Artinya? Tiap wartawan bisa berbuat salah tapi mereka harus berusaha memperbaiki kesalahannya. Inilah salah satu pelajaran yang saya peroleh ketika jadi penerjemah Kovach pada 1–17 Desember 2003 saat dia mengunjungi Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Bali untuk berceramah dan meluncurkan buku. Buku

http://pustaka-indo.blogspot.com

Sembilan Elemen Jurnalisme diterjemahkan Yusi Pareanom dan saya menyuntingnya.

Kovach salah satu wartawan Amerika Serikat yang reputasinya menembus banyak batas negara. Saya merasakan kesenioran ini ketika mengantar Kovach keliling Indonesia. Dari mahasiswa hingga wartawan, dari pemilik media hingga reporter, banyak yang menyatakan kekaguman pada Kovach.

Saya punya kesan Kovach sangat berhati-hati dengan opini. Dia bertemu dengan ratusan orang media tapi lebih banyak mendengar orang lain daripada bicara. Jakob Oetama, orang nomor satu Kompas Gramedia, mengatakan dia merasa "mendapat kehormatan" ketika Kovach berkunjung ke kantor *Kompas*. Dahlan Iskan dari Kelompok Jawa Pos memuji isi buku itu. Goenawan Mohamad dari *Tempo* pernah mengatakan pada saya bahwa Kovach adalah orang yang sulit dicari kesalahannya. Hary Tanoesoedibjo dari *RCTI* minta agar Kovach "mengajarnya" soal bagaimana mengelola bisnis media.

Anak-anak muda juga terkagum pada Kovach. "Dia orang yang rendah hati. Dia ibaratnya gunung, punya banyak material di dalamnya, tapi hanya terlihat sedikit saja," kata Geg Ary Suharsani dari *Akademika,* Universitas Udayana, Denpasar.

Tapi Kovach juga tak ragu berpendapat terbuka soal mutu jurnalisme. Dia misalnya mengkritik berbagai suratkabar Indonesia yang kebanyakan tidak memakai *byline*. Ketiadaan *byline* membuat *accountability* atau pertanggungjawaban seorang wartawan jadi samar. Pembaca sulit menilai kinerja seorang wartawan. Pembaca sulit menilai integritas seorang wartawan.

Kovach lahir dari keluarga Amerika keturunan Albania pada 1932 di Tennessee, di bagian Selatan negara Amerika Serikat. Kovach memulai kariernya sebagai wartawan pada 1959 di harian *Johnson City Press-Chronicle*. Dari tahun 1960 sampai 1967 dia jadi reporter pada *Nashville Tennessean*. Di suratkabar ini, Kovach banyak meliput soal gerakan persamaan hak orang kulit hitam di Amerika, politik wilayah Selatan, dan kemiskinan di daerah pegunungan Appalachian.

http://pustaka-indo.blogspot.com

"Saya bangga karena ikut membuat perubahan. Generasi sebelum saya menganggap berita orang hitam tak perlu diliput. Tapi generasi kami mengubah keadaan itu," kata Kovach.

Pada 1968, Kovach bergabung dengan harian *New York Times*—salah satu suratkabar terbaik di dunia. Di tempat ini, dia bekerja selama 18 tahun. Dari tahun 1979-1986 dia jadi kepala biro *New York Times* di Washington—sebuah jabatan yang penting karena biro ini besar sekali. Kovach lalu pindah dan jadi pemimpin redaksi harian *Atlanta Journal-Constitution* di Atlanta, ibukota Georgia, selama dua tahun.

Selama kurun itu, dia membuat harian itu memenangi dua penghargaan Pulitzer, penghargaan pertama untuk koran ini dalam 20 tahun. Tapi Kovach mundur dari jabatannya karena berbeda pendapat dengan pemilik *Journal-Constitution*. Dia akhirnya jadi Nieman Fellow di Universitas Harvard pada 1988-1989 dan kemudian jadi kuratornya hingga 2000. Selama 10 tahun di Nieman Foundation, ada tiga wartawan Indonesia yang beruntung mendapat kesempatan menggali ilmu dari Kovach: Goenawan Mohamad dari *Tempo*, Ratih Hardjono dari *Kompas* dan saya sendiri.

SELAMA PERJALANAN 17 HARI di lima kota, banyak orang meragukan apakah sembilan elemen jurnalisme bisa diterapkan di Indonesia. H. Soffyan, pemimpin redaksi harian *Analisa* Medan, berpendapat sembilan elemen ini ideal. Mungkin buat generasi wartawan Indonesia hari ini belum bisa dipakai. Cukup banyak wartawan Medan atau di berbagai kota Indonesia lain yang masih bergulat dengan isu "amplop"—sogokan untuk wartawan dalam bentuk uang. Soffyan berharap generasi yang akan datang bisa memakai sembilan elemen ini.

Kovach berpendapat sembilan elemen jurnalisme itu ibarat bintang di langit. Para pelaut membutuhkan bintang-bintang di langit agar tak tersesat. Elemen-elemen jurnalisme itu jadi semacam pedoman ke mana wartawan harus mengarahkan pekerjaannya.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Jakob Oetama dan Dahlan Iskan termasuk orang yang setuju dengan pendekatan Kovach.

Ada juga yang bertanya apakah elemen soal independensi juga dilakukan oleh Kovach sendiri? Apakah Kovach juga berani bersikap independen terhadap orang-orang yang dicintainya? Bagaimana kalau anaknya sendiri yang melakukan kesalahan? Apakah Kovach akan meliput mereka sama dengan kalau meliput orang lain?

Kovach menanggapi serius ketika ditanya soal ini. Dia bersyukur karena kini sudah pensiun dan selama bekerja sebagai wartawan tak ada satu pun dari empat anaknya yang bikin perkara. "Ada aturan dalam rumahtangga saya. Saya selalu bilang pada anak-anak. Kalian boleh melakukan apa saja tapi jangan sampai besok perbuatan itu masuk *headline* suratkabar. Kalau itu terjadi, saya akan meliput kalian sama dengan saya meliput orang lain," jawab Kovach.

Soal keluarga memang tak masalah. Tapi ada cerita yang melibatkan seorang teman dekatnya, Homer Peas, yang diliput Kovach dan berujung dengan pahit. Peas adalah teman main *football* Kovach ketika mereka sama-sama duduk di sekolah menengah atas. Mereka juga pada waktu bersamaan masuk ke dinas militer pada 1951 ketika Perang Korea pecah. Kovach masuk ke Angkatan Laut dan Peas jadi *paratrooper* atau prajurit payung.

Ketika keluar dari dinas militer, Kovach kuliah dan lalu jadi wartawan. Peas masuk ke dunia politik dan jadi aktivis Partai Demokrat. Pada 1960, ketika Richard Nixon sedang bertanding melawan John F. Kennedy untuk jadi presiden Amerika Serikat, Peas ikut bekerja memenangkan Kennedy. Peas membujuk veteran perang untuk memberikan suara mereka dengan imbalan sebotol whisky. Kovach saat itu menyelidiki tentang "pembelian" suara dan melihat Peas terlibat.

Dia menelepon Peas dan memberitakan keterlibatan sahabatnya ini. Peas diperiksa polisi, diadili, dan terbukti bersalah. Hukumannya, Peas boleh memilih masuk penjara atau masuk dinas militer lagi. Peas memilih militer dan dikirim ke Vietnam. Pada 1966

http://pustaka-indo.blogspot.com

Peas meninggal dalam sebuah pertempuran dekat Bien Dien Phu, Vietnam. Peas kehabisan peluru dan melawan gerilyawan Vietnam dengan bayonet.

Dalam perjalanan naik mobil antara Magelang-Yogyakarta, Kovach mengatakan pada saya bahwa kematian Homer Peas hingga hari ini masih mengganggu dan membuatnya merasa sakit. "Saya sering sedih dan marah karena secara langsung saya ikut menyebabkan kematian teman saya. Kalau saya tak menyebut nama Homer, dia jelas takkan berangkat ke Vietnam dan mati di sana. Tapi saya juga tahu bahwa keputusan untuk berbuat salah atau berbuat benar adalah keputusan Homer sendiri. Homer bisa menolak untuk ikut kejahatan yang membahayakan demokrasi kami. Tapi Homer memilih berbuat salah."

Saya tanya bagaimana sikap Kovach kalau ia menghadapi pilihan yang sama? "*You and I are journalists*! Tugas kita adalah memberitahu warga kalau ada penyalahgunaan kekuasaan. Warga harus tahu apa yang salah, apa yang benar, sehingga mereka bisa mengambil sikap dengan informasi yang lengkap. Kalau saya harus menghadapi dilema ini lagi, saya kira saya akan melakukan hal sama dengan apa yang pernah saya lakukan terhadap Homer," katanya.

Bulu kuduk saya merinding!

Yogyakarta, 2003

http://pustaka-indo.blogspot.com

Pakar, Pengamat dan Pemerhati

MAJALAH TRUST MEMBERI gelar "pengamat media" kepada saya. Dan saya sangat keberatan. Dasarnya, ada ketidakjelasan, yang sangat mengganggu, dalam praktik jurnalisme di Indonesia ketika media memakai kata "pakar" atau "pengamat" atau "pemerhati." Apa syarat seseorang sehingga disebut, atau menyebut dirinya sendiri, "pengamat sosial politik"? Apa kriteria seorang "pemerhati budaya"? Bagaimana prosedur kerja seorang pengamat?

Bayangkan, seorang yang bergelar "pemerhati masalah internasional" artinya dia bekerja setiap hari, setiap jam, setiap menit, dengan memperhatikan masalah-masalah dunia! Saya kadang nakal berpikir. Apa beda pekerjaan seorang pengamat dengan Tuhan Yang Maha Mengamati?

Alifian Mallarangeng (sering disebut dengan gelar bangsawan Bugis "Andi Mallarangeng") digelari "pakar ilmu politik." Media menyebutnya "pakar" setiap kali minta komentar Mallarangeng. Mengapa tak menyebut Mallarangeng seorang politikus karena dia ikut partai, bahkan gonta-ganti, dan belakangan jadi juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Juru bicara ini jabatan politik juga.

Lebih relevan kalau disebutkan Mallarangeng dapat Ph.D dari Northeastern Illinois University di Amerika Serikat dengan tesis tertentu. Ketika kembali di Jakarta, dia jadi dosen di sebuah kampus

http://pustaka-indo.blogspot.com

Jakarta sambil memimpin Partnership for Governance Reform in Indonesia—sebuah lembaga dana yang disponsori negara-negara Eropa. Mallarangeng tak pernah melakukan riset apapun sejak mendapatkan doktornya. Ini tabiat kebanyakan doktor kita. Mereka tak bikin penelitian hingga ilmunya kurang berkembang.

Lucunya, ketika Mallarangeng laris diminta komentar sebagai "pengamat politik," Mallarangeng juga jadi juri sebuah lomba kecantikan. Pesertanya cantik-cantik dan molek-molek. Saya sempat nonton di televisi dan bertanya-tanya, "Apa relevansi Mallarangeng untuk dinilai layak jadi juri kecantikan?"

Kalau logika media Indopahit diterapkan di sini, artinya Mallarangeng bisa juga disebut sebagai "pakar kecantikan" atau "pengamat perempuan"?

Tapi *khan* lucu! Atau disebut label "pakar wanita."

Nah lho!

Apa Vitria Cahyaningsih, istrinya Mallarangeng, tak sewot suaminya yang ganteng dan berkumis tebal itu disebut "pakar wanita"?

Contoh lain. Suatu saat sebuah majalah berita mewawancarai seorang doktor sebagai "pengamat LSM." Dia ditanya soal penyaluran dana-dana organisasi internasional ke berbagai organisasi nirlaba Indonesia. Si doktor ini pernah memimpin sebuah organisasi Amerika Serikat di Jakarta. Susahnya, majalah itu tak tahu bahwa doktor ini sebenarnya masuk daftar hitam beberapa lembaga donor karena kurang becus mengelola organisasi tersebut.

Masih banyak contoh lain. Tapi inilah yang membuat saya sangat keberatan ketika majalah *Trust* memberi label "pengamat media" kepada saya.

Expert dan Observer

Pemakaian keterangan "pengamat" atau "pakar" meniru dari istilah "observer" atau "expert" pada sebagian media berbahasa Inggris. Label-label ini dipakai sebagian media Barat pada zaman Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Komunis.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Saat itu kebanyakan wartawan Barat sulit menembus negara-negara sosialis, termasuk Uni Soviet dan Tiongkok. Sebagai ganti, mereka mewawancarai orang-orang yang tinggal di perbatasan, yang kerjanya mencatat siaran radio negara sasaran, lantas bikin *newsletter*. Mereka lantas disebut "pengamat."

Seorang di antaranya pastor Serikat Jesuit bernama Lazlo Ladany. Dia kelahiran Hungaria tahun 1914. Pada usia 22 tahun Ladany menjadi calon imam Katholik di Budapest. Pada 1939, Serikat Jesuit mengirim Ladany ke Beijing dan belakangan dipindah ke Shanghai. Pada 1949, ketika Mao Zhedong dari Partai Komunis Tiongkok menguasai Tiongkok, Mao mengusir semua misionaris Barat.

Ladany dipindahkan ke Hong Kong, sebuah koloni Inggris. Dia diberi kantor di sebuah kampus. Selain mengurus mahasiswa, kerja utama Ladany adalah mendengarkan siaran radio Beijing, dan belakangan menonton televisi, dalam bahasa Mandarin, dari Beijing.

Pastor Ladany mulai menerbitkan mingguan *China News Analysis* pada 1953. Tujuannya, membantu jaringan misionaris Katolik di seluruh dunia mengikuti perkembangan dalam negeri Tiongkok. Menulis dan menyunting *China News Analysis* menjadi pekerjaan Ladany selama 30 tahun. *China News Analysis* jadi bacaan wajib banyak kantor kedutaan, kantor pemerintah dan beredar di 48 negara plus Tiongkok sendiri. Wartawan-wartawan Barat, yang dilarang masuk Tiongkok, banyak yang menjadikan Hong Kong basis mereka. Mereka mengandalkan Ladany untuk jadi sumber liputan.

Pada 1966, Robert Shaplen dari majalah *The New Yorker* menyebut Ladany sebagai "*China watcher*" atau "pemerhati China." Ladany sering muncul dalam berbagai pemberitaan media Barat. Ladany menulis beberapa buku, termasuk *Law and Legality in China: The Testament of a China-Watcher*. Ketika meninggal dunia pada 1990, *Associated Press* menyebut Pastor Ladany sebagai orang yang berjasa "membuka" Tiongkok kepada media Barat.

Ladany digunakan sebagai narasumber karena wartawan-wartawan Barat tak bisa masuk ke Tiongkok. Prinsip urutan sumber jadi

http://pustaka-indo.blogspot.com

penting sekali di sini. Bila wartawan-wartawan itu bisa langsung tembus ke sumber-sumber utama, Ladany tentu tak relevan. Salah satu esensi dari verifikasi adalah tekad wartawan mencari sumber-sumber primer.

Ketika Uni Soviet runtuh dan Tiongkok merangkul kapitalisme, wartawan-wartawan Barat dengan mudah membuka kantor biro di Moskow maupun Beijing. Mereka bisa langsung wawancara sumber-sumber pertama. Peranan orang-orang macam Ladany menyurut. Label "pengamat" atau "pakar" tak diperlukan kalau si wartawan bisa menembus sumber-sumber berita atau lingkaran-lingkaran sumber hingga lingkaran paling dalam.

Acheh, Papua, Maluku dan Timor Leste praktis daerah-daerah yang cukup terbuka di Indonesia. Mereka merasa bukan bagian dari bangsa Indonesia. Mereka ingin merdeka dari kolonialisme Indonesia. Pada zaman Soekarno, Soeharto maupun pasca-Soeharto, daerah-daaerah panas itu terkadang masih ditutup untuk wartawan. Namun saya tak pernah mendengar istilah "pengamat Papua" atau "pemerhati Maluku Selatan." Siapakah "pakar Acheh" di Jakarta? Rasanya tidak ada pula bukan? Jadi buat apa mewawancarai pengamat-pengamatan itu?

Pada awal 2002, majalah *Tempo* menurunkan laporan "Theys Dibunuh: Dua Jenderal Terlibat" dan "Mengapa Kopassus Tersesat". *Tempo* menurunkan dugaan ada dua orang jenderal mendalangi pembunuhan pemimpin rakyat Papua Theys Hiyo Eluai. *Tempo* tak menyebut siapa nama dua orang tersebut. Persoalannya, tuduhan itu hanya berasal dari seorang "pengamat militer" bernama Kusnanto Anggoro dari Center for Strategic and International Studies di Jakarta.

Febry Arifmawan, seorang wartawan mahasiswa Universitas Islam Indonesia, menulis, "Kalau boleh saya nilai, Kusnanto di sini posisinya adalah sebagai pengamat (narasumber ketiga), namun dijadikan titik pijak *Tempo* dalam membuat fokus laporan." Arifmawan menganggap pilihan itu punya risiko.

Memang ada surat pembaca yang mengecam *Tempo* karena tuduhan itu. Saya juga tahu laporan-laporan itu menciptakan debat

http://pustaka-indo.blogspot.com

internal dalam *Tempo*. Saya setuju dengan Arifmawan bahwa laporan itu tak memenuhi standar dasar jurnalisme. Sumber-sumbernya anonim dan tuduhan terbuka hanya dari Kusnanto Anggoro, seseorang yang tak mengalami dan tak melihat sendiri peristiwa itu.

Bagaimana cara memberi keterangan pada komentator?

Saya pernah menulis untuk *Courier*, sebuah majalah multibahasa dari Paris, yang diedit dengan rapih sekali. Mereka punya saran yang bagus. Kalau saya minta seorang akademikus atau seorang politikus memberi komentar atas suatu isu, *pertama*, mereka minta saya memperhatikan apakah pekerjaan dan penelitian si sumber relevan dan berbobot untuk komentar itu. Bobotnya bisa dilihat dari karya akademik mereka. Atau kalau seorang politikus, dilihat dari reputasi dan integritasnya. *Kedua*, tanpa memberi gelar pemerhati atau apapun, cantumkan saja karya orang itu dalam laporan Anda, atau setidaknya, cantumkan afiliasinya.

Jadi tak ada istilah "pakar politik" atau "pemerhati hukum kriminal." Tetapi *Courier* membuat standar. Misalnya, Benny Giay disebut dosen Sekolah Tinggi Teologi Walter Post di Jayapura. Atau Benny Giay dari STT Walter Post, yang pernah menulis buku *Pembunuhan Theys: Kematian HAM di Tanah Papua*. Bisa juga disebut Giay mendapatkan Ph.D dari Vrije Universiteir, Amsterdam, dengan tesis soal ini dan itu.

Kalau definisinya gamblang, pembaca akan bisa menilai sendiri, seberapa besar bobot si sumber dan seberapa relevan disiplin si sumber dalam mengkaji apa yang dianggap sebagai keahliannya. Unsur transparansi sangat penting sehingga kalau ada *conflict of interest* antara pribadi si sumber dengan isu yang dibicarakannya, pembaca, pendengar atau pemirsa, juga bisa menilai sendiri.

RRI pernah mewawancarai Budi Harsono, dengan sebutan "seorang pengamat militer" tentang bantuan Amerika US$ 51 juta kepada polisi dan tentara Indonesia. *RRI* menyebut bahwa Harsono juga mantan ketua fraksi militer di parlemen—artinya dia juga seorang jenderal. *RRI* juga menyebut Harsono sekretaris

http://pustaka-indo.blogspot.com

jenderal Partai Golongan Karya. *RRI* cukup gamblang sehingga pendengar tahu siapa Harsono itu. Namun *RRI* keliru menyebutnya dengan "pengamat." Harsono adalah pemain dalam lapangan ini. Budi Harsono seorang tentara-*cum*-politikus. Budi Harsono bukan seorang Lazlo Ladany di Hong Kong, yang tak pernah menjabat apapun dalam struktur negara Republik Rakyat Tiongkok.

Contoh lain Benedict Anderson dari Universitas Cornell. Terkadang Anderson disebut sebagai "pakar nasionalisme" karena menulis buku *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (1983). Buku ini termasuk karya klasik bagi orang yang belajar nasionalisme. Saya berani bertaruh Anda hanya akan jadi tertawaan orang bila bicara soal kebangsaan namun tak pernah membaca *Imagined Communities*. Anderson tak pernah ikut partai apapun. Anderson tak pernah jadi juru bicara presiden. Pekerjaannya hanya sebagai ilmuwan. Cocok kalau Anderson disebut "pakar" namun dia masih harus ditambah judul bukunya.

Salah satu elemen dasar jurnalisme adalah transparansi. Memberikan keterangan sejelas-jelasnya pada seorang kolumnis atau seorang sumber akan membantu pembaca, pendengar atau pemirsa untuk menilai kredibilitas si kolumnis atau si sumber.

Rekan saya dari majalah *Pantau*, Agus Sopian, yang dulu sering membanggakan pacar-pacarnya yang cantik, suatu hari menulis, "Dulu saat menulis kolom seks dan orgasme, saya mencantumkan label 'Playboy' ehhh malah diganti jadi 'Playgroup.' Asem!"

Jakarta, 2008

http://pustaka-indo.blogspot.com

Jurnalisme dan Nasionalisme

SAYA DIUNDANG METRO TV untuk muncul dalam siaran bincang-bincang tentang Aceh dan jurnalisme. Ini semacam pendidikan publik. Saya menjelaskan prinsip-prinsip yang dikenal sebagai "sembilan elemen jurnalisme" ala Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Seorang wartawan harus bisa mewawancarai sebanyak mungkin pihak. Dalam masalah Aceh, seorang wartawan harus mewawancarai baik pihak tentara maupun gerilyawan.

Saya merasa terganggu dengan banyaknya halangan yang diciptakan pemerintah terhadap media. Banyak juga warga yang minta wartawan bersikap "nasionalis" atau "merah putih." Banyak telepon masuk. Saya dinilai tidak nasionalis. Chik Rini, yang menonton program ini, geli mendengar tuduhan itu pada diri saya.

Hersubeno Arief, pembawa acara ini, tanya apa saya tak takut kalau dituduh tidak nasionalis? Tidakkah wartawan Indonesia harus membela "Indonesia" dan tak mewawancarai pihak Aceh Merdeka?

Saya jawab, "Enggak apa-apa dituduh tidak nasionalis. Tugas saya adalah menyajikan kebenaran kepada para warga agar mereka bisa mengambil keputusan yang benar tentang Aceh."

Pelayanan ini akan bisa bermutu bila wartawan bisa mendekati sebanyak mungkin sumber. Kalau seorang wartawan diminta

http://pustaka-indo.blogspot.com

memperhatikan status dirinya sebagai seorang "anak bangsa" dalam liputan Aceh, saya khawatir, wartawan-wartawan kita tak bisa bekerja dengan baik.

Implikasi dari permintaan ini adalah kita juga harus membela kelompok-kelompok lain di mana kita dianggap berada di dalamnya. Misalnya, saya warga Indonesia keturunan Tionghoa, lahir dalam keluarga Kristen Protestan, besar di sekolah-sekolah Katolik, belajar dan percaya pada sosialisme, saat pemilihan umum mencoblos atau tidak mencoblos partai tertentu, bahkan pernah belajar di Amerika Serikat. Apakah ini artinya, saya juga harus membela siapa pun yang dianggap Tionghoa? Apakah saya juga harus membela apa yang disebut "Kristen"? Apakah saya juga harus bias terhadap ideologi tertentu? Membela partai politik tertentu? Membela Amerika Serikat?

Kalau permintaan itu dituruti, saya kira, jurnalisme tidak akan jalan!

Kristen yang mana? Tionghoa yang mana? Partai politik pun punya banyak faksi? Apalagi apa yang disebut sebagai "Indonesia"? Amerika Serikat apalagi?

Saya percaya jurnalisme justru berkembang ketika ia mengembangkan metode di mana bias seorang wartawan—entah etnik, agama, pendidikan, kewarganegaraan—bisa diatasi lewat prosedur dan mekanisme kerja antara lain *cover both sides*, verifikasi dan sebagainya. Kok sekarang wartawan malah disuruh memperlihatkan bias kebangsaannya dalam liputan Aceh?

Keputusan Gustav Roberto dari *Indosiar*, Anggi Mulya Makmur dari *TV-7*, Orin Basuki dari *Kompas*, dan Imam Wahyudi dari *RCTI* untuk mewawancarai Erza Siregar dan rombongan mereka adalah salah satu cerminan prosedur kerja ini. Mereka masuk hutan dan cari berita. Ini bukan tindakan yang salah. Kenapa mereka malah diinterogasi polisi?

Bill Kovach mengatakan wartawan bisa disamakan dengan kerja dokter di medan pertempuran. Kalau si dokter merawat gerilyawan GAM tak berarti si dokter bukan warga negara Indonesia yang baik bukan? Dokter ini justru menjalankan tanggungjawabnya sebagai

http://pustaka-indo.blogspot.com

warga negara Indonesia dengan sebaik-baiknya ketika dia mengabdi pada tanggungjawabnya sebagai dokter.

Atau pengacara yang membela terdakwa teroris macam Amrozi, Abdul Azis, Mukhlas, Abu Bakar Ba'asyir, dan sebagainya. Mereka justru menjalankan tugas mereka sebagai pengacara, sekaligus juga jadi warga negara yang baik, tanpa perlu dituduh berpihak pada "teroris" yang ingin menggantikan negara Republik Indonesia dengan "Daulah Islamiyah."

Contoh sama terjadi pada Yap Thiam Hien ketika membela Soebandrio pada 1966. Padahal Partai Komunis Indonesia dianggap bertanggungjawab hendak menjatuhkan rezim Presiden Soekarno. Bayangkan kalau para pengacara dinilai tak nasionalis?

Saya ingin sedikit sumbang pikiran. Tanggungjawab kita sebagai wartawan kini memang sedang berat-beratnya. Kita bisa disalahmengerti. Kita bisa dituduh macam-macam. Tapi bagi seorang wartawan, dia harus mendahulukan jurnalisme. Agamanya, kewarganegaraannya, kebangsaannya, ideologinya, latar belakang sosial, etnik, dan sebagainya, harus dia tinggalkan di rumah begitu dia ke luar dari pintu rumah dan jadi wartawan.

Jakarta, 2003

http://pustaka-indo.blogspot.com

Wawancara, Wartawan, dan Ratu Kecantikan

KALAU ANDA MENGENAL David Candow, pelatih wartawan dari *Canadian Broadcasting Corporation*, Anda akan tahu bahwa seorang wartawan yang baik, kalau melakukan wawancara, bekerja dengan mewakili rasa ingin tahu audiens. Dia harus sopan. Dia harus siap dengan pemahaman bahan. Dia harus menggali informasi sebanyak mungkin. Dia tak bernada menghakimi. Dia tak menunjukkan kesan sudah tahu. Bukan sok pamer. Bukan sok pintar.

Ini penting karena wawancara adalah bagian penting dari reportase. Dan reportase adalah bagian penting dari jurnalisme. Wawancara yang baik akan menghasilkan banyak informasi. Wawancara yang buruk akan menghasilkan banyak bantahan.

Sumber yang menerima pertanyaan-pertanyaan yang buruk akan memakai waktu wawancara untuk memahami pikiran si wartawan, dan tak jarang, membantah asumsi-asumsi si wartawan. Atau lebih jelek lagi, meninggalkan si wartawan, tak menanggapi isi wawancara.

Anda boleh bertanya pada Candow, "Berapa jumlah kata ideal untuk sebuah pertanyaan?"

Candow biasanya menjawab, "Satu kata saja. Dan kata itu adalah *mengapa*?"

http://pustaka-indo.blogspot.com

Namun, tentu saja, tak setiap pertanyaan bisa disarikan jadi satu kata. Prinsipnya, makin panjang suatu kalimat tanya, makin menurun kemampuan si sumber mencerna pertanyaan itu. Sebaliknya, makin pendek pertanyaan, makin mudah si sumber memahami si wartawan. Candow memberikan pedoman 16 kata.

Lebih banyak dari 16 kata, lebih menurun juga daya tangkap si sumber. Dan kalimat harus dibuat dengan pertanyaan terbuka dengan kata tanya "5W 1H" yang artinya *what*, *when*, *who*, *where*, *when*, *how*.

Pertanyaan tertutup menghasilkan jawaban yang kurang memuaskan. Maksudnya, pertanyaan tertutup teoritis bisa dijawab dengan jawaban "ya" atau "tidak."

Kami sering menyaksikan wartawan-wartawan Jakarta, baik televisi, radio, maupun cetak, belum menyadari teori dasar wawancara ini. Mungkin menarik untuk tahu bagaimana kesalahan-kesalahan itu dibuat dengan memerhatikan pertunjukan seleksi wartawan *SCTV* dalam acara *Menuju Layar Liputan 6*. Acara ini diadakan sejak 1997 di kampus-kampus. Namun tahun ini diselenggarakan lewat siaran langsung. Finalnya 3 Oktober lalu.

Acaranya diadakan layaknya pemilihan penyanyi "Indonesian Idol" atau "Akademi Fantasi *Indosiar*." Ada acara *catwalk*. Peserta berputar-putar di panggung. Pakaian kelas disainer. Nyanyian. Hiburan. Lawakan. Pertanyaan disajikan oleh MC Tantowi Yahya. Lalu ada juri-juri: Okky Asokawati (model), Pia Alisjahbana (pengusaha Femina Group), Tengku Malinda (*TVRI*), Karni Ilyas (*SCTV*) dan Darwis Triadi (fotografer). Pokoknya, kesannya wangi, jauh dari kesan kerja keras mengejar berita yang jadi citra wartawan.

Seorang peserta dari Padang, Dora Multa Sari, tampil cantik dengan busana hijau pupus. Tantowi Yahya pun bertanya apa pendapat Dora soal korupsi di kalangan anggota parlemen. Dora menjawab bla bla bla…

TANTOWI : *All right*, wow, tepuk tangan tanda setuju membahana di studio malam ini. Eeeh... Dora ini

http://pustaka-indo.blogspot.com

seorang yang penuh prestasi. Di samping sebagai presenter, Dora ini pernah berprestasi di bidang apa?

DORA : Saya pernah masuk 10 besar Puteri Indonesia. Maka tepuk tangan pun membahana di studio.

Dora tersenyum manis dan melenggak-lenggok meninggalkan panggung. Cantiknya, jangan ditanya. Singkat kata, dari 13 finalis, juri memilih lima orang *grand finalist*.

Masing-masing diminta mewawancarai seorang narasumber selama 2,5 menit, dipilih berdasarkan undian, dan narasumber sengaja dipilih dari orang-orang yang biasa diwawancarai *SCTV*: Eep Saefulloh Fatah (komentator isu politik), Alan Budi Kusuma (pemain bulutangkis), Ulfa Dwiyanti (pelawak dan penghibur), Baby Jim Aditya (aktivis HIV/AIDS), dan Brigadir Jenderal Pranowo Dahlan (komandan kesatuan polisi anti teror).

Nama	Jumlah kata Tanya	Rata-rata		Sumber
		Buka	Tutup	
Grace N. Louisa	31,2	1	6	Pranowo Dahlan
M. Achir	25,8	3	3	Baby Adita
Linda P. Mada	18,2	1	6	Alan Kusuma
Dora M. Sari	15,5	4	4	Ulfa Dwiyanti
Wahyu R.	19,6	3	5	Eep S. Fatah

Dari lima orang ini, semuanya bertanya dengan panjang-panjang dan tertutup. Hanya Dora yang bertanya dengan singkat karena dia harus balik menjawab pertanyaan Ulfa Dwiyanti. Dora rata-rata hanya melontarkan 15.5 kata per kalimat tanya. Namun dari delapan pertanyaan itu, lima merupakan pertanyaan tertutup. Kira-kira begini tanya-jawab antara Dora dan Ulfa:

DORA : Mbak Ulfa, saat banyak sekali *talent show-talent show* yang melahirkan bintang-bintang baru dalam

http://pustaka-indo.blogspot.com

waktu singkat, seperti mereka di karantina dalam waktu dua bulan, tiga bulan, kira-kira mereka menjadi bintang yang memiliki banyak sekali penggemar. Bagaimana Anda melihat *talent show-talent show* seperti ini?

ULFA : Maksudnya *talent instant* gitu, *roger*?

DORA : *Talent show* Mbak.

ULFA : Kalau menurut saya itu masalah faktor. Faktor keberuntungan, beruntung bisa masuk dalam waktu singkat. Seperti kamu misalnya. Gitu lho.

DORA : Tapi Mbak Ulfa, apakah menurut Mbak Ulfa mereka itu sudah cukup siap atau bagaimana?

ULFA : Itu yang saya khawatirin. Apakah kalau kamu menang apakah cukup siap di lapangan?

DORA : Ya. Baik, Mbak Ulfa itu merintis karier dari awal?

ULFA : Sepuluh tahun lebih.

DORA : Sepuluh tahun lebih?

ULFA : Mbak berapa minggu?

DORA : Terima kasih Mbak Ulfa, jika nanti saya jadi bintang nantinya. Mbak Ulfa meniti karier lama sekali. Apakah Mbak Ulfa merasa ada ketidakadilan antara yang lama meniti karier dengan saat ini?

ULFA : Bukan ketidakadilan. Nasib beruntung. Itu dia. Dora tampaknya memang beruntung. Malam itu juri memenangkan Dora.

Namun dari perhitungan kami, para peserta rata-rata menggunakan 22 kata per pertanyaan, atau lima kata lebih banyak dari batas David Candow. Model bertanya mereka panjang-panjang dan tertutup. Ulfa Dwiyanti sendiri mempertanyakan kualitas Dora. Hanya keberuntungan saja. Tanpa kerja keras. Mereka hanya menang tampang tapi miskin pengalaman.

Tidak heran kalau banyak narasumber yang bertanya ulang. Misalnya, Wahyu Rahmawati dari Malang, dalam segenap

http://pustaka-indo.blogspot.com

kegugupannya, bertanya pada Eep Saefullah Fatah, "Langsung saja. Sekarang perpolitikan setelah pemilihan presiden kedua telah dibuktikan bahwa SBY menang. Pada saat ini banyak sekali nama-nama yang dicantumkan, baik itu di *SCTV* sendiri maupun di suratkabar, tentang calon-calon kabinet. Menurut Anda, bagaimanakah persentase pemberian nama pemunculan nama itu terhadap kabinet nanti?"

Eep tampaknya tak mengerti pertanyaan versi 44-kata Wahyu. Eep bertanya, "Maksudnya?"

RAHMAWATI : Maksudnya, seberapa kredibelkah orang-orang yang dicantumkan di televisi dalam kabinet nanti?

EEP : Sebetulnya belum ada satu pun konfirmasi dari SBY-Kalla tentang nama-nama yang beredar. Jadi saya kira, kita tidak bisa menilai seberapa kredibel mereka sebelum ada konfirmasi (*Perhatikan Eep membantah asumsi Rahmawati*).

RAHMAWATI : Tapi mengapa nama-nama itu harus dimunculkan. Apakah ini *testing the weather d*ari SBY atau Anda optimis terhadap *testing the weather* dari SBY?

EEP : Sebetulnya ada kebutuhan memang untuk memunculkan nama sebelum pelantikan 20 Oktober dikarenakan masyarakat perlu tahu siapa yang akan menjadi pejabat publik. Tapi persoalannya, nama-nama yang muncul sekarang ini adalah nama-nama yang sebetulnya beredar begitu saja, tanpa ada konfirmasi. Itu yang jadi persoalan.

RAHMAWATI : Kok bisa tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu, kenapa harus memunculkan?

EEP : Siapa yang memunculkan?

RAHMAWATI : Kata Pak Eep tadi bahwa tidak ada konfirmasi terhadap pemunculan nama-nama tersebut.

http://pustaka-indo.blogspot.com

EEP : Sampai sekarang SBY dan Kalla belum mengkonfirmasikan satu pun nama.

RAHMAWATI : Dan siapakah yang memunculkan adanya nama-nama di televisi tersebut?

EEP : Media massa.

RAHMAWATI : Media massa? Jadi tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari SBY maupun Kalla.

EEP : Belum ada sampai sekarang. Termasuk ketika kemarin SBY mengadakan ujian doktor. Ada sejumlah nama yang ikut serta hadir dan SBY mengatakan bahwa mereka bukanlah calon-calon menteri.

RAHMAWATI : Menurut Anda sendiri Pak Eep, bagaimana kredibel yang dicantumkan? Maksud saya, nama-nama yang dicantumkan ini, menurut Pak Eep, bagaimana posisinya dalam kabinet nanti? Apakah mereka cukup mampu dalam memimpin negara kita esoknya?

EEP : Belum ada nama masalahnya. Jadi kalau misalnya Anda menanyakan kredibilitas mereka, siapa mereka kita tidak tahu. Jadi ada ketidakjelasan di sini. Siapa yang Anda maksudkan?

Tanya jawab ini menghabiskan waktu 2.5 menit karena Rahmawati memakai asumsi yang salah. Tapi ini bukan monopoli Rahmawati. Wahyu Rahmawati dan kawan-kawannya semua menunjukkan kesan sok pintar, agresif, serta tak mampu mewakili audiens dalam wawancara. Grace Natalie Louisa dan Linda Puteri Mada bertanya enam pertanyaan dan hanya satu yang terbuka. Mohammad Achir bahkan bertanya 62 kata. Kesan belum tentu sama dengan esensi. Bisa saja Dora, Wahyu dan sebagainya sebenarnya rendah hati.

Karni Ilyas, direktur pemberitaan *SCTV*, tak setuju dengan argumentasi kami. Karni mengatakan bahwa kelima orang ini

http://pustaka-indo.blogspot.com

memang bukan wartawan. Mereka hanya calon wartawan. "Ketika mereka jadi juara, mereka baru jadi calon wartawan. Masa percobaan lagi. Begini saja, yang namanya Bayu Setiyono, pantas jadi wartawan atau enggak? Bayu itu juara kami 1997. Sekarang jadi pantas setelah enam tahun. Ketika jadi juara, boleh saja Anda bicara belum pantas."

Atmakusumah Astraatmadja, mantan ketua Dewan Pers dan pemenang Hadiah Magsaysay, mengatakan pada kami bahwa dia tak setuju seleksi wartawan dilakukan secara komersial (Dora Multa Sari mendapat hadiah Daihatsu Xenia) dan memanfaatkan frekuensi publik untuk keperluan internal *SCTV*. Beberapa wartawan lain juga tak setuju karena khawatir citra wartawan diasosiasikan dengan kinerja Dora dan kawan-kawan.

Kami juga belum melakukan analisis kemampuan Bayu Setiyono. Tapi kami ingat Bayu pernah diperlakukan sama macam gaya Ulfa ketika Bayu mewawancarai Kwik Kian Gie dari PDI Perjuangan. Kwik menyebut Bayu "jongkok."

Tapi menarik juga kalau mulai sekarang Anda memakai prinsip David Candow untuk menghitung jumlah kata pertanyaan-pertanyaan Bayu. Atau seberapa tertutup atau terbuka pertanyaannya? Dan tentu saja, bukan hanya Bayu, tapi kalau perlu semua wartawan televisi Jakarta. Jangan-jangan Anda akan menemukan kesimpulan bahwa kualitas mereka tak jauh lebih baik dari Dora atau Rahmawati?

Jakarta, 2004

Naskah ini ditulis dengan joint byline *bersama Esti Wahyuni.*

http://pustaka-indo.blogspot.com

Seksisme, Rasialisme dan Sektarianisme

Untuk Sapariah Saturi,

Aku kira keputusan kamu untuk tak menurunkan profil usaha Puspo Wardoyo di halaman *Jurnal Nasional* punya dasar yang benar. Keputusan ini tak bisa dikategorikan *self-censorship* mengingat naskahnya tidak sempurna. Artinya, naskah itu sengaja tak mengungkap sisi buruk praktik poligami Puspo Wardoyo.

Keputusan reporternya untuk sengaja "hanya mengambil sisi positif dari sukses berbisnisnya" Puspo Wardoyo, justru menghasilkan laporan yang kebenarannya terdistorsi (*distorted*). Si reporter justru melakukan *self-censorship* terhadap sisi lain Puspo Wardoyo.

Jurnalisme yang bermutu berhak menolak menerbitkan naskah yang sifatnya s*exist, racist* maupun s*ectarian*. Logikanya, laporan jurnalistik harus usaha selalu tampil proporsional sekaligus komprehensif. Artinya, naskah yang tersurat atau tersirat *sexist, racist* atau *sectarian* adalah naskah yang tak tampil komprehensif dan proporsional. Naskah beginian bikin masalah.

Namun pertama-tama kita harus sepakat dulu bahwa s*exism, racism, sectarianism* adalah paham-paham yang keliru dan berbahaya untuk masyarakat kita. Paham-paham ini intinya memandang

http://pustaka-indo.blogspot.com

rendah orang-orang tertentu karena jenis kelaminnya (perempuan), orientasi seksual (gay atau lesbian), etniknya atau orientasi keagamaannya (Ahmadiyah, Kejawen, Sunda Wiwitan, Komunitas Eden, Kaharingan dan lainnya).

Wartawan bisa menurunkan cerita tentang orang yang *sexist, racist* atau *sectarian* bila pandangan itu sendiri yang jadi fokus dari laporan si wartawan. Namun kalau fokusnya bukan pada pandangan mereka, seorang wartawan harus ekstra hati-hati agar laporannya bukan malah menyajikan informasi yang terdistorsi.

Puspo Wardoyo seorang lelaki yang dikenal punya dua sisi. *Pertama*, dia seorang pengusaha sukses, pemilik restoran Wong Solo, yang cabangnya ada di mana-mana. *Kedua*, dia dikenal sering mempromosikan poligami. Artinya, dia juga tergolong *sexist*. Dia pernah mengeluarkan kalimat yang sensasional.

Aku berikan beberapa contoh ungkapan Puspo Wardoyo:

"*Mindset* istri pertama itu yang harus diubah. Harus ditanamkan kepadanya, istri yang baik dan saleh adalah tunduk terhadap suami, taat dan bisa menyenangkan suami. Dia harus rela dan malah bahagia suaminya beristri lagi."

"Kalau cuma satu istri, dia bisa seenaknya sendiri, karena tidak ada saingannya. Namun kalau beristri lebih dari satu, masing-masing istri akan bersaing untuk lebih mempercantik diri lebih dicintai suami."

Pilihan profil usaha Puspo Wardoyo potensial mengaburkan atau mendistorsi kebenaran dari cerita kehidupan Puspo Wardoyo. Seakan-akan dia ini hanya "sukses" tanpa melihat sisi lain poligami. Ini bisa paralel dengan memilih seorang pengusaha yang rasialis. Ini bisa paralel dengan memilih seorang pengusaha yang sektarian.

Misalnya, bagaimana sikap kita kalau media kita hendak menurunkan *feature* tentang satu pengusaha yang sentimen terhadap orang Tionghoa. Isinya melebar terhadap orang Tionghoa umumnya? Biasanya dibumbui dengan kata "pribumi" dan "non-pribumi."

Frase Tionghoa ini bisa diubah dengan kata lain. Misalnya, "pengusaha Bugis" atau "tentara Jawa" atau "polisi Batak" dan

http://pustaka-indo.blogspot.com

seterusnya. Sedang kata "non-pribumi" bisa dengan mudah diganti jadi "pendatang" atau lawannya "putra daerah" maupun "penduduk asli." Semuanya berujung pada rasialisme. Bagaimana kalau tokoh yang kita tampilkan mempromosikan rasialisme? Apakah kamu melakukan *self-censorship* bila menolaknya?

Atau bagaimana sikap kita kalau kita hendak menurunkan *feature* tentang satu pengusaha Amerika WASP (White, Anglo Saxon, Protestant), yang terkenal karena ketidaksukaannya pada Islam?

Aku banyak sekali punya contoh beginian. George W. Bush, sebelum presiden Amerika juga seorang pengusaha, beberapa kali mengeluarkan kata-kata yang enggak benar. Dia misalnya memakai kata "*crusade*" untuk "memerangi terorisme," seakan-akan membangkitkan makna Perang Salib soal Islam dan Kristen pada kasus World Trade Center. Bush memakai kata *"articulate"* untuk menerima Barack Obama, seakan-akan Obama, yang lulus doktoral dari Harvard Law School, tak bisa bicara bahasa Inggris fasih. Ini hinaan yang terselubung terhadap orang kulit hitam.

Kalau pun kita terpaksa harus menurunkan laporan tentang pengusaha-pengusaha yang *sexist, racist* atau *sectarian,* maka prinsip yang harus kita perhatikan adalah proporsionalitas dan komprehensif. Artinya, kita harus menurunkan laporan yang detail tentang paham-paham mereka yang salah itu.

Misalnya, si reporter juga *interview* istri-istri dan anak-anak Puspo Wardoyo dan cerita soal sisi negatif dari praktik poligami Puspo. Kalau si reporter bisa memasukkan sisi-sisi destruktif dari poligami ini, aku kira, *feature* itu bolehlah untuk dilihat lebih jauh. Tapi tanpa *interview* sisi negatif Puspo Wardoyo, aku khawatir, kalian akan menurunkan laporan yang terdistorsi.

Itupun si reporter harus memasukkan pendapat bahwa poligami adalah praktik perkawinan yang merugikan institusi keluarga. Ini setara dengan sikap kritis terhadap rasialisme dan sektarianisme dengan menyebutkan paham-paham itu merugikan prinsip hidup bersama dalam satu negara dan bangsa.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Kalau kita memilih Puspo Wardoyo untuk *feature* bisnis, tanpa mengaitkannya dengan poligami, "hanya mengambil sisi positifnya," justru kita akan menciptakan informasi yang *distorted*. Ini paralel dengan kalau kita menurunkan *feature* yang rasialis atau sektarian padahal maksudnya (secara salah) adalah *feature* bisnis. Ini kelemahan kebanyakan wartawan di Indonesia, seolah-olah "hanya mengambil sisi positif" tanpa sadar bahwa pilihan itu justru menonjolkan sisi negatif.

Akhir kata, kita juga harus sadar bahwa Puspo Wardoyo maupun figur lain sejenisnya tahu benar bahwa mereka bisa mempromosikan kedua visi mereka—"poligami dan bisnis" atau "rasialisme dan bisnis" atau "sektarianisme dan bisnis"—lewat media justru karena sikap politik yang kontroversial tersebut. Wartawan pasti tertarik pada kontroversi. Secara tidak langsung, wartawan yang bikin *feature* itu membantu promosi bisnisnya plus pandangan sempitnya. Ini iklan gratis untuk *sexism, racism* dan *sectarianism*.

Aku kira kalau kita mau membangun reputasi sebagai wartawan yang solid, yang tahu mana yang metodologis dan mana yang bakal mencoreng reputasi kita, naskah itu sebaiknya memang diperbaiki atau tak dimuat. Jurnalisme bermutu tak mau menciptakan distorsi yang begitu serius dalam masyarakat kita. Terima kasih untuk diskusi yang penting ini.

Jakarta, 2007

http://pustaka-indo.blogspot.com

Apa Itu Investigative Reporting?

APAKAH SEMUA WARTAWAN menjalankan fungsi investigasi?

Jawabnya bisa ya bisa tidak. Sebagian wartawan mengatakan setiap reporter juga seorang investigator. Namun, ada yang mengatakan, tidak setiap wartawan melakukan investigasi. Wartawan yang ikut pertemuan pers, menyodorkan *tape recorder* dan sekali-kali menerima amplop, pasti bukan seorang investigator.

Namun ada juga pendapat setiap wartawan seyogyanya menjadi investigator. Atau dipertajam lagi, setiap wartawan harus bisa menjadi investigator. Entah itu wartawan di kota atau reporter bisnis. Bahkan wartawan yang bertugas meliput pakaian mode baru juga bisa menjadi investigator. Logikanya, kejahatan tak mengenal bidang-bidang liputan. Di mana-mana bisa terjadi kejahatan.

Sebagian wartawan juga mengatakan investigasi adalah pekerjaan jurnalisme yang dikaitkan upaya membongkar apa-apa yang salah dan dirahasiakan. Namun apakah membongkar skandal antara manajer dengan mantan sekretarisnya juga dikategorikan investigasi? Apakah membongkar skandal politikus dan aktivis perempuan bisa dikategorikan investigasi? Berhakkah media masuk hingga ke ruang pribadi ini? Apa beda *investigative reporting* dan *in-depth reporting*?

http://pustaka-indo.blogspot.com

Dari "Muckraking" Hingga "Investigative Reporting"

Sebelum masuk ke perdebatan-perdebatan tersebut, ada baiknya kita melihat negara-negara lain yang tradisi persnya, setidaknya di bidang investigasi, lebih tua dari Indonesia. Di Amerika Serikat istilah *investigative reporting* mulai populer pada tahun 1975 ketika di Columbia didirikan Investigative Reporters and Editors Inc.

Tapi ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali. Sebelumnya ada istilah *muckraking journalism,* antara tahun 1902 hingga 1912, ketika majalah *McClure's* menerbitkan laporan-laporan yang membongkar politik uang elit Washington. Sekarang IRE menjadi salah satu organisasi terkemuka dalam masalah investigasi dengan anggaran US$ 800.000 per tahun.[1]

Setiap tahun IRE mengadakan seminar teknik-teknik baru dalam investigasi, baik dalam pengelolaan *database* maupun spesialisasi tertentu (lingkungan hidup misalnya), serta memberikan hadiah buat karya-karya investigasi yang bagus di seluruh Amerika Serikat. Ia memperkenalkan sistem riset lewat internet maupun pemakaian penginderaan jarak jauh.

Di Asia, saya kira, Filipina yang pertama kali memiliki organisasi semacam Philippines Center for Investigative Journalism, ketika sekelompok wartawan muda, pada tahun 1989, mendirikan lembaga itu sesaat setelah diktator Ferdinand Marcos melarikan diri dari Filipina. Direktur PCIJ, Sheila Coronel, datang ke Indonesia dan memberikan ceramah di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Ujung Pandang pada 1–11 Oktober 1999.[2]

---

1 Lihat "Search opens for IRE executive director," *IRE Journal*, November-December 1996. IRE juga memiliki website http://www.ire.org/ yang memiliki link dengan situs-situs riset lewat internet buat para wartawan.

2 Sebagian ceramah Sheila Coronel dalam perjalanannya itu juga dipakai di sini, terutama yang berkenaan dengan hipotesis dan proses investigasi. Coronel datang ke Indonesia atas undangan dari Institut Studi Arus Informasi bekerjasama Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Yogya (LP3Y) serta Lembaga Pers Dr. Soetomo. Mereka mengadakan program pelatihan

http://pustaka-indo.blogspot.com

Menurut Coronel, mereka mendirikan PCIJ karena media di mana mereka bekerja tak menyediakan suasana yang memungkinkan bagi wartawan-wartawan muda itu untuk membuat *in-depth reporting* maupun *investigative reporting*. Budaya *newsroom* di Filipina lebih banyak dihabiskan untuk meliput *breaking news* daripada analisis mendalam.

Pada November 1998 di Cambridge, Amerika Serikat, juga diadakan pertemuan perdana dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang memberikan penghargaan buat wartawan-wartawan dari seluruh dunia yang berkarya dengan baik di bidang investigasi. Untuk pertama kali penghargaan ini diberikan kepada Nate Thayer dari mingguan *Far Eastern Economic Review*, Hong Kong, atas jerih-payah dan prestasi Thayer dalam mewawancarai tokoh Khmer Merah Pol Pot.[3]

Di Indonesia sendiri kurang jelas mulai kapan istilah liputan investigasi mulai menjadi populer. Namun setidaknya ada beberapa majalah, yang secara eksplisit pada tahun 1990-an, menggunakan kata "investigasi" dalam liputan mereka. Dwi-mingguan *Tajuk*, yang didirikan tahun 1996, memposisikan dirinya majalah "berita, investigasi dan entertainmen." Majalah *Tempo* juga menambahkan satu rubrik "Investigasi" ketika terbit kembali 6 Oktober 1998.[4]

---

investigative reporting selama enam bulan di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Ujung Pandang, Oktober 1998 hingga April 1999. Saya juga mengadakan wawancara lewat internet dengan Coronel (22/01/1999). Lihat http://www.pcij.org/.

3 Lihat http://www.publicintegrity.org/investigations/icij/ yang juga memiliki link dengan berbagai organisasi pers di seluruh dunia termasuk yang memberikan beasiswa buat wartawan. ICIJ juga memberikan bantuan riset internet buat wartawan lewat situsnya.

4 *Tempo* menjadikan laporan "investigasi" atas wanita Indonesia keturunan Cina sebagai korban pemerkosaan huru-hara Mei 1998 sebagai laporan kulit depan perdana. *Tempo* menemui mereka yang membantu korban-korban pemerkosaan. Namun *Tempo* lebih banyak memfokuskan pada kontroversi ada tidaknya, atau jumlah,

http://pustaka-indo.blogspot.com

Namun, apa yang dinilai sebagai "investigasi", yang mungkin paling terkenal di Indonesia, adalah liputan harian *Indonesia Raya* atas kasus korupsi di Pertamina dan Badan Logistik, antara 1969 dan 1972. Harian itu melaporkan dugaan korupsi besar-besaran di Pertamina dengan memanfaatkan sumber-sumber anonim dari dalam perusahaan negara tersebut. Pertamina maupun pemerintahan Presiden Soeharto menolak adanya korupsi. Walaupun *Indonesia Raya* terkesan agak *crusading* dalam liputannya, tapi beberapa tahun kemudian terbukti Pertamina memang penuh korupsi hingga hampir membangkrutkan pemerintahan Soeharto.

Dalam lima tahun terakhir ini, saya pikir liputan investigasi skala internasional yang dilakukan wartawan Indonesia adalah investigasi tentang skandal emas Busang yang dibuat wartawan lepas Bondan Winarno. Dia melanglang buana, pergi ke Calgary dan Toronto di Kanada, Manila di Filipina, serta hutan rimba Busang di Kalimantan untuk menelusuri investigasinya yang dituangkan dalam bentuk sebuah buku.[5]

Winarno juga menelusuri berbagai dokumen tentang pertambangan mineral dan cara-cara untuk "meracuni" mata bor dengan "emas luar" sedemikian rupa sehingga dibuat kesimpulan ada cebakan emas yang luar biasa besarnya di bawah permukaan hutan Busang.

Intinya, Winarno menganggap Michael de Guzman, geolog senior Bre-X, "meracuni" sampel hasil pemboran mereka dan melakukan kejahatan canggih untuk memperkaya diri mereka.

perempuan Tionghoa yang diperkosa, daripada mencari siapa yang melakukan pemerkosaan. Itupun dengan hasil yang tak jelas. Lihat: *Tempo*, 6–12 Oktober 1998, "Pemerkosaan: Cerita dan Fakta."

5 Lihat Bondan Winarno, *Bre-X: Sebungkah Emas di Kaki Langit*, Penerbit Inspirasi Indonesia, Jakarta, 1997. Saya juga melakukan wawancara dengan Bondan Winarno lewat telepon, Minggu, 24 Januari 1999, untuk mengetahui metode dan hipotesisnya dalam investigasi Busang ini. Dia juga memberikan ceramah mengenai bukunya di Institut Studi Arus Informasi, Kamis, 7 Februari 1999.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Winarno secara mengejutkan juga memperkirakan de Guzman masih hidup, tidak mati bunuh diri seperti diberitakan.

Winarno melaporkan mayat yang ditemukan di tengah hutan Busang itu tidak memiliki gigi palsu di rahang atasnya seperti yang dimiliki de Guzman. Geolog Filipina ini juga mempunyai gaya hidup mewah, suka berfoya-foya, main perempuan—yang tidak cocok dengan tipe orang yang memiliki kecenderungan melakukan bunuh diri. Aneh juga bahwa de Guzman tidak duduk di samping pilot helikopter namun di belakang. Winarno mewawancarai dua orang dokter yang melakukan autopsi terhadap jasad tersebut serta seorang dari empat istri de Guzman.

Dari gambaran sekilas atas pekerjaan Winarno maupun Nate Thayer, sudah bisa kita ketahui bahwa *investigative reporting* memang lebih berat dari rata-rata pekerjaan jurnalisme sehari-hari. Winarno butuh waktu dua bulan penuh untuk mengerjakan investigasinya. Thayer bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyakinkan Khmer Merah bahwa dia layak mewawancarai Pol Pot.

Goenawan Mohamad dari majalah *Tempo* menyebut *investigative reporting* sebagai jurnalisme "membongkar kejahatan." Ada suatu kejahatan yang biasanya ditutup-tutupi. Wartawan yang baik akan mencoba mempelajari dokumen-dokumen bersangkutan dan membongkar keberadaan tindak kejahatan di belakangnya.

Namun pemahaman ini perlu dibedakan antara investigasi yang dikerjakan seorang wartawan atau sebuah tim wartawan dengan liputan media atas hasil investigasi pihak lain. Ketika mingguan *Panji Masyarakat* memuat rekaman pembicaraan antara Presiden B.J. Habibie dan Jaksa Agung Andi M. Ghalib, pertengahan Februari 1999, banyak dosen komunikasi mengatakan itulah *investigative reporting*.

Ahli hukum media Abdul Muis dari Universitas Hasanuddin mengatakan, secara etis *Panji* tidak bisa disalahkan karena pemuatan itu bagian dari *investigative reporting*.[6] Muis mengatakan

6 Lihat: "Prof. Dr. Haji Andi Abdul Muis, SH," *Kompas*, 21 Maret 1999.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Panji melakukan investigasi. Terlepas dari keberanian *Panji* dalam menurunkan pembicaraan itu dengan pertimbangan adanya *public interest* dalam perbincangan tersebut, Prof. Muis lupa rekaman tersebut bukan dikerjakan *Panji* sendiri. Yang melakukan investigasi bukan *Panji* karena majalah itu hanya mendapatkan kaset rekamannya saja. Bukan menyadap pembicaraan telepon itu sendiri.

Robert Greene dari *Newsday*—beberapa kali disebut "Bapak Jurnalisme Investigasi Modern"—membatasi liputan investigasi sebagai karya seorang atau beberapa wartawan atas suatu hal yang penting buat kepentingan masyarakat tapi dirahasiakan oleh mereka yang terlibat. Liputan investigasi ini minimal memiliki tiga elemen dasar. *Pertama*, liputan itu adalah ide orisinil dari wartawan, bukan hasil investigasi pihak lain yang ditindaklanjuti oleh media. *Kedua*, subyek investigasi merupakan kepentingan bersama yang cukup masuk akal untuk mempengaruhi kehidupan sosial mayoritas pembaca suratkabar atau pemirsa televisi bersangkutan. *Ketiga*, ada pihak-pihak yang mencoba menyembunyikan kejahatan ini dari hadapan publik.[7]

Dua Bagian Dari Proses Investigasi

Mula-mula seorang wartawan investigator adalah wartawan yang tidak menerima mentah-mentah pernyataan sumber-sumber resmi. Seorang wartawan yang mau melakukan pekerjaan riset yang dalam, tekun merekonstruksi suatu kejahatan, dan tidak kenal lelah untuk

7 Lihat John Ullmann, "Investigative Reporting: Advanced Methods and Techniques," St. Martin Press, Inc., New York, 1995, hal. 2. Robert Greene salah satu wartawan terkemuka Amerika Serikat. Pada tahun 1967 dia mendirikan unit investigasi *Newsday* yang memenangkan dua Pulitzer Prize pada 1970 dan 1974. Greene pula yang memiliki ide mengumpulkan puluhan wartawan Amerika Serikat untuk datang ke Arizona menyusul terjadinya pembunuhan terhadap Don Bolles, wartawan *Arizona Republic*, pada 1976. Wartawan-wartawan itu datang untuk bekerja lebih giat membongkar apa yang diliput Bolles dan menyebabkan kematiannya. Bolles dan Greene ikut mendirikan *Investigative Reporters and Editors* pada 1975.

http://pustaka-indo.blogspot.com

mengejar sumber-sumber yang penting—kira-kira itulah bayangan pekerjaan dalam jurnalisme investigasi.

Sumber-sumbernya banyak. Dokumen-dokumennya bertumpuk. Jelas bahwa sebuah karya investigasi tidak bisa dibuat hanya dengan mengandalkan sebuah laporan pemeriksaan polisi, atau keterangan pers sebuah lembaga swadaya masyarakat. Walaupun ukuran waktu bersifat sangat nisbi, namun sebuah laporan investigasi biasanya makan waktu cukup lama. Bisa setengah tahun namun bisa juga setahun tergantung pada ukuran dan cakupan investigasi tersebut.

Menyelidiki perdagangan senjata antar-negara dan penggunaannya oleh para serdadu bayaran tentu lebih lama daripada investigasi penyalahgunaan dana pembangunan Pasar Pagi di kota Tegal. Perdagangan senjata biasanya melibatkan kejahatan terorganisasir di beberapa negara. Serdadu bayaran juga beroperasi lintas batas. Namun ukuran waktu memang nisbi. Kalau mereka yang dianggap melakukan penyalahgunaan renovasi Pasar Pagi ternyata sudah melarikan diri ke luar negeri, tentu waktu yang dibutuhkan lebih lama daripada sekadar mengejar sumber-sumber antara Tegal dan Jakarta (dalam negeri).

Dalam skala internasional, investigasi memang kebanyakan berkaitan dengan perdagangan senjata, operasi militer rahasia, operasi kelompok-kelompok bisnis raksasa berbau korupsi-kolusi, penyelundupan obat bius maupun penyelundupan tenaga manusia secara global (baik dalam bisnis pelacuran maupun perbudakan modern).

Bondan Winarno menyelidiki manipulasi contoh emas Busang hingga ke kantor Bre-X di Calgary maupun situs Busang di dalam hutan-hutan Kalimantan Timur. Winarno juga pergi ke Manila untuk menemui saudara perempuan Michael de Guzman untuk mencari jejak ke arah *dental record* geolog Bre-X tersebut. Thayer harus mondar-mandir antara Bangkok, Phnom Penh dan hutan-hutan perbatasan Thailand-Kamboja untuk mengejar sumber-sumbernya di kalangan Khmer Merah.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Sheila Coronel secara singkat membagi proses investigasi ke dalam dua kali tujuh bagian. Pembagian ini untuk mempermudah seorang investigator dalam mengatur sistematika pekerjaannya. Bagian pertama merupakan penjajakan dan pekerjaan dasar. Sedangkan bagian kedua sudah berupa penajaman dan penyelesaian investigasi:

Bagian Pertama

- Petunjuk awal (*first lead*)
- Investigasi pendahuluan (*initial investigation*)
- Pembentukan hipotesis (*forming an investigative hypothesis*)
- Pencarian dan pendalaman literatur (*literature search*)
- Wawancara para pakar dan sumber-sumber ahli (*interviewing experts*)
- Penjejakan dokumen-dokumen (*finding a paper trail*)
- Wawancara sumber-sumber kunci dan saksi-saksi (*interviewing key informants and sources*)

Petunjuk awal bisa berupa apa saja. Ia bisa berupa sebuah berita pendek di suratkabar. Bisa juga berupa sebuah surat kaleng yang menunjuk adanya ketidakberesan dalam suatu lembaga tertentu. Bisa pula berupa telepon dari seseorang tak dikenal. Atau petunjuk ini juga bisa berupa suatu peristiwa besar yang sudah banyak diberitakan media namun masih menyimpan teka-teki yang kelihatannya menarik untuk dikejar. Teka-teki ini bakal menarik kalau si investigator menemukan sumber penting yang bisa membuka ke arah terbongkarnya teka-teki tersebut.

Indonesia memiliki banyak sekali peristiwa menarik untuk diselidiki. Katakanlah mulai dari isu keterlibatan oknum-oknum berseragam dalam huru-hara 14–16 Mei 1998. Sebuah petunjuk bisa saja muncul dari berbagai arah yang dapat dipakai untuk menyelidiki peristiwa tragis tersebut. Atau pembunuhan mereka yang dituduh sebagai "dukun santet" di daerah Banyuwangi dan Jember. Mengapa

http://pustaka-indo.blogspot.com

tiba-tiba bupati yang memerintahkan pendaftaran para dukun santet diganti sebelum masa jabatannya berakhir?

Huru-hara juga meledak di mana-mana. Dari Ketapang di Jakarta hingga Karawang sampai Kupang dan Ambon. Benarkah ada provokator dan kejahatan terorganisir di balik huru-hara tersebut? Seorang investigator seyogyanya sudah mengetahui latar-belakang suatu kasus sebelum bisa mencium adanya petunjuk yang berharga.

Investigasi pendahuluan bisa berupa penggalian data lebih jauh, wawancara maupun peninjauan lapangan. Riset dikerjakan dengan teliti sebelum hipotesis ditetapkan. Pekerjaan yang terarah dan tajam praktis baru dikerjakan setelah hipotesis terbentuk.

Bondan Winarno menggunakan metode deduksi untuk mencari data dan membuktikan hipotesisnya. Mula-mula dengan pencarian dan pendalaman literatur. Lantas dikombinasi dengan wawancara para pakar dan sumber-sumber ahli agar si investigator mendapatkan latar-belakang teknik yang memadai sebelum melangkah lebih jauh.

Sheila Coronel menekankan pentingnya pencarian dokumen-dokumen maupun wawancara sumber-sumber kunci dan saksi-saksi. Dokumen ini penting karena di sanalah biasanya ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa dijadikan barang bukti. Dokumen juga bisa dipakai untuk mempertentangkan pernyataan-pernyataan narasumber yang berbohong.

Di Indonesia banyak sekali pejabat atau pemimpin perusahaan yang setengahnya "berbohong" dengan cara menjawab pertanyaan wartawan secara diplomatis atau bahkan dengan memutar-balikkan logika. Keberadaan dokumen tertulis dengan mudah akan membantah semua kebohongan.

Pekerjaan terakhir dalam tahap pertama ini adalah wawancara dengan orang-orang kunci. Pekerjaan ini seringkali makan waktu lama karena jarak maupun waktu. Orang-orang kunci tidak harus orang-orang dengan jabatan tinggi. Seorang tukang perahu dekat Samarinda bisa menjadi sumber penting dalam investigasi Bre-X untuk membuktikan "peracunan emas" tidak dilakukan di gudang

http://pustaka-indo.blogspot.com

Loa Duri (seperti dilaporkan *Asian Wall Street Journal*). Atau seorang istri yang bisa menegaskan suaminya memiliki gigi palsu di rahang atas. Memang sumber-sumber kunci dalam Bre-X juga termasuk John Felderhof, geolog senior yang juga atasan Michael de Guzman, namun yang seringkali terjadi orang-orang macam ini keberatan bicara dengan wartawan.

Bagian Kedua

- Pengamatan langsung di lapangan (*first hand observation*)
- Pengorganisasian file (*organizing files*)
- Wawancara lebih lanjut (*more interviews*)
- Analisa dan pengorganisasian data (*analyzing and organizing data*)
- Penulisan (*writing*)
- Pengecekan fakta (*fact checking*)
- Pengecekan pencemaran nama baik (*libel check*)

Pengamatan langsung di lapangan seyogyanya dilakukan dengan berbekal peta geografis dari lokasi di mana investigasi dipusatkan. Wartawan seringkali melupakan tinjauan dari aspek geografis. Padahal banyak keputusan militer maupun dagang yang dibuat berdasarkan pertimbangan geografis. Ahli penginderaan jarak jauh Christopher Simpson dari American University berpendapat bahwa 80 persen keputusan bisnis maupun dagang ditentukan pertimbangan geografis.[8]

Pengorganisasian file akan mempermudah investigator menganalisis dan mencari "benang-merah" atau pola dari berbagai data temuannya. Investigasi pembunuhan dukun santet, misalnya, akan lebih mudah bila dibuat matriks yang mencatat

8 Christopher Simpson dalam ceramah ICIJ, 7 November 1998, di Cambridge. Lihat juga "Journalist's Guide to Experts in Remote Sensing" (Spring, 1997) dan "Journalist's Guide to Remote Sensing Resources on the Internet" (Spring, 1997).

http://pustaka-indo.blogspot.com

kecenderungan-kecenderungan korban pembunuhan. Entah lokasinya, metode pembunuhan atau pola penyebaran desas-desus. Dalam kasus korupsi yang canggih, melibatkan banyak orang, juga akan terbentuk suatu pola bila semua data yang ada dimasukkan dalam *database* dengan rapih.

Penulisan laporan merupakan teknik tersendiri yang tentu tidak meninggalkan teknik pembuatan *angle, focus* dan *outline*—bila memakai *feature*. Data yang sedemikian banyaknya tentu memerlukan seleksi ketat untuk memilih mana yang perlu dan mana yang kurang perlu. Walaupun media elektronik di Indonesia belum pernah punya reputasi harum dalam hal investigasi, namun ini lebih disebabkan masalah sejarah dan kepemilikan media elektronik. Cepat atau lambat, investigasi juga akan masuk ke media yang pengaruhnya luas sekali ini. Alat-alatnya pun menjadi lebih rumit. Entah dalam bentuk kamera tersembunyi atau alat rekam ultra-sensitif.

Pengecekan fakta (*fact checking*) sangat penting walau banyak diremehkan wartawan. Apalah arti kerja keras berbulan-bulan bila seorang sumber dengan enteng mengatakan, "Investigasi apa itu? Menulis ejaan nama saya saja salah!" Banyak sekali kesalahan yang kelihatannya remeh, namun bisa merusak penilaian orang akan laporan tertentu. Nama orang, tanggal kejadian, hubungan darah antar-satu sumber dengan yang lain, jumlah anak, nilai transaksi dan sejuta data lain, harus disisir satu demi satu agar semua data akurat.

Wartawan Richard Lloyd Parry dari harian *Independent* (London) membuat laporan luar biasa soal pembunuhan orang-orang Madura oleh orang Melayu di Kalimantan Barat antara Desember 1996 hingga Januari 1997. Parry menulis laporan sepanjang 40 halaman pada majalah *Granta* terbitan London. Data-datanya luar biasa. Peristiwa penjagalan manusia digambarkan dengan detail. Kuburan-kuburan dibongkar dan tengkorak-tengkorak dihitung. Namun pada halaman awal karangannya, Parry membuat kesalahan kecil: Partai

http://pustaka-indo.blogspot.com

Demokrasi Indonesia disebutnya sebagai partai dengan nomor kontestan dua sedangkan Golongan Karya nomor tiga![9]

Pengecekan fakta ternyata tidak cukup. Dalam zaman di mana kebebasan pers makin terbuka, ancaman seringkali datang dari tuntutan dengan dasar pencemaran nama baik (*libel check*).

Bondan Winarno mengatakan dia digugat pencemaran nama baik masing-masing Rp 1 triliun oleh mantan menteri pertambangan Ida Bagus Sudjana dan putranya Dharma Yoga Sudjana. Winarno harus membayar pengacara untuk membuktikan dia tidak bersalah. Namun ongkos pengacara tidak murah bukan? Bahkan menurut Winarno, biaya melalang buana ke Kanada dan Filipina masih lebih murah dibandingkan biaya yang sudah dikeluarkannya untuk membayar pengacara. Sebuah penerbitan bisa bangkrut bila tuntutan pencemaran nama baik terbukti benar. Sementara buat wartawan semacam Winarno, mundur berarti membiarkan reputasinya sebagai wartawan dipertanyakan. Jadi sama-sama sulit. Maju kena mundur kena.

Kesimpulannya, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan wartawan daripada melakukan konsultasi hukum dengan ahli hukum perdata secara benar, sebelum laporannya naik cetak atau disiarkan. Editor juga banyak berperan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya gugatan pencemaran nama baik. Prinsip *cover-both-side* seringkali sangat membantu untuk menghindar dari jeratan tuntutan pencemaran nama baik. Dalam kasus Winarno, dia memang beberapa kali mencoba mewawacarai Sudjana, namun kurang berhasil hingga naik cetak.

Hipotesis dan Teknik

Salah satu hal yang banyak membedakan antara *in-depth reporting* dan *investigative reporting* adalah ada atau tidaknya hipotesis dalam penelusuran tersebut. Saya berpendapat dalam

9 Richard Llyod Parry, "When Young Men Die," *Granta*, No. 62, London, Summer 1998.

http://pustaka-indo.blogspot.com

batasan tertentu *investigative reporting* adalah fase kelanjutan dari *in-depth reporting*.

Majalah *Panji Masyarakat* jelas tidak memiliki hipotesis ketika mereka menurunkan laporan pembicaraan telpon Habibie-Ghalib. Namun keadaan ini akan berbeda bila *Panji* memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan itu dan melakukan investigasi sendiri.

Dalam melakukan *in-depth reporting* seorang wartawan bisa berangkat praktis dari nol atau dari sekadar membaca kliping-kliping koran. Ketika wartawan itu sudah jauh lebih banyak mengetahui duduk persoalan sebenarnya—setelah melakukan banyak wawancara, membaca tumpukan dokumen serta mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan liputannya—saat itulah dia pada titik hendak melakukan kegiatan lanjutan atau tidak. Liputan lanjutan inilah yang lebih bersifat investigatif. Membongkar kejahatan. Mencari tokoh-tokoh jahat dan merekonstruksi kejahatan-kejahatan mereka. Hipotesis sangatlah penting untuk membantu wartawan memfokuskan dirinya dalam suatu investigasi.

Jakob Oetama, pendiri harian *Kompas*, mengatakan kepada saya, salah satu halangan kegiatan investigasi di harian *Kompas* adalah iklim *"ewuh-pekewuh"* terhadap mereka yang dianggap terlibat dalam kejahatan tersebut. Keadaan itu yang membuat harian terbesar di Indonesia ini mengalami kesulitan mengejar dan menyelidiki hipotesis-hipotesis yang mereka pikirkan.

Bondan Winarno dalam investigasinya soal Busang mengajukan hipotesis kematian Michael de Guzman tidak wajar dan aneh. Dia juga curiga de Guzman adalah otak dari "peracunan" sampel emas Busang, sehingga harga-harga saham Bre-X naik berkali-kali lipat, di mana de Guzman juga sangat diuntungkan. Winarno curiga mayat yang ditemukan di hutan Busang itu bukanlah mayat de Guzman. Bagaimana mungkin mayat orang yang jatuh dari ketinggian 800 kaki masih utuh?

Untuk membuktikan hipotesis tersebut, Winarno mula-mula bicara dengan dokter-dokter yang memeriksa jasad tersebut.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Dia menemukan para dokter Indonesia yang mengatakan mayat itu mayat de Guzman hanya mendasarkan pengamatannya dari pakaian yang dilaporkan dikenakan oleh de Guzman. Sementara itu dari salah seorang istri maupun teman-temannya, Winarno menemukan de Guzman memiliki gigi palsu. Sementara mayat itu tidak ada gigi palsunya.

Winarno juga terbang ke Filipina untuk mencari saudara-saudara de Guzman maupun mantan pembantu-pembantunya di Busang—Cesar M. Puspos dan Jerome Alo—yang semuanya menolak menemui Winarno. Keluarga de Guzman bahkan menolak memberikan alamat dokter gigi yang biasa merawat Michael. Sementara pembantu-pembantunya seolah-olah raib tertelan bumi. Tidakkah ini indikasi ada yang aneh dengan "kematian" Michael de Guzman?

Winarno tentu memakai seperangkat teknik untuk membuktikan hipotesisnya. Selain wawancara panjang-lebar di beberapa sudut dunia, dia juga mengadakan riset panjang, bahkan belajar tentang teknik pertambangan, untuk mendukung investigasinya. Salah satu kelebihan Winarno adalah sikapnya yang sopan.

"Sikap santun itu penting. Ini sikap yang penting dalam investigasi," ujarnya. Dengan modal sopan-santun ini pula Winarno menegaskan prinsipnya bahwa dia tidak mau mencuri.

Soal mencuri atau tidak memang jadi isu yang sulit sekali. Banyak wartawan berpendapat bahwa dalam investigasi, segala cara dibenarkan, termasuk mencuri data, mencuri pembicaraan orang maupun mencuri informasi. Panda Nababan, wartawan senior majalah *Forum Keadilan*, berada pada kubu yang membenarkan pencurian data.

Nababan memakai teknik apa saja untuk mendapatkan data. Dia pernah "menipu" petugas bandara Jakarta dengan mengaku dirinya pejabat tinggi militer dalam kasus pembajakan pesawat Garuda Woyla. Dalam kesempatan lain Nababan juga pernah mencuri dokumen di mobil seorang pejabat tinggi yang hendak

http://pustaka-indo.blogspot.com

menyerahkan dokumen itu kepada Presiden Soeharto.[10]

Perdebatan antara boleh tidaknya mencuri data ini memang sangat erat terkait masalah etika dan hukum. Namun secara umum ada beberapa teknik yang biasanya dipakai seorang investigator:

- Riset dan reportase mendalam dan berjangka waktu panjang untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan hipotesis;
- *Paper trail* (pencarian jejak dokumen) berupa upaya pelacakan dokumen, publik maupun pribadi, untuk mencari kebenaran-kebenaran demi mendukung hipotesis;
- Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan investigasi, baik para pemain langsung maupun mereka yang bisa memberikan *background* terhadap topik investigasi;
- Pemakaian metode penyelidikan polisi dan peralatan anti-kriminalitas. Metode ini termasuk melakukan penyamaran. Sedangkan alat-alat bisa termasuk kamera tersembunyi atau alat-alat komunikasi elektronik untuk merekam pembicaraan pihak-pihak yang dianggap tahu persoalan tersebut. Ini memang mirip kerja detektif;
- Pembongkaran informasi yang tidak diketahui publik maupun informasi yang sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak yang melakukan atau terlibat dalam kejahatan.

Hipotesis biasanya disusun dengan beberapa pertanyaan dasar. Pertama-tama, pertanyaan tentang aktor pelaku kejahatan. Siapa yang bertanggungjawab atas penyalahgunaan dana masyarakat tersebut? Siapa yang memicu huru-hara? Siapa yang mula-mula menyebarkan sentimen anti-etnik atau anti-agama tertentu? Siapa yang melakukan

10 Panda Nababan bercerita bagaimana dia "mencuri" laporan Dirjen Perhubungan Laut Fanny Habibie dari mobil Habibie ketika pejabat ini hendak berangkat menemui Presiden Soeharto dalam masalah tenggelamnya kapal Tampomas II. Nababan mengungkapkan cerita ini dalam sebuah diskusi tentang investigasi di Institut Studi Arus Informasi, Selasa, 15 Desember 1998.

http://pustaka-indo.blogspot.com

insider trading? Siapa yang mula-mula berkepentingan agar dukun-dukun santet dibunuh?

Dalam investigasi Bre-X, Bondan Winarno berteori kasus Bre-X itu dilakukan Michael de Guzman dan anak-anak buahnya dari Filipina. Bukan oleh almarhum David Walsh, orang nomor satu Bre-X, maupun John Felderhof, geolog senior Bre-X, atasan de Guzman. Walaupun kedua orang itu juga diuntungkan ulah de Guzman, namun mereka tidak terlibat dalam skandal ini. Felderhof boleh jadi mengetahui namun tidak mencegah. Winarno mendapatkan jawaban tertulis dari Felderhof.

Selain hipotesis tentang aktor pelaku, juga perlu ditanyakan cara-cara suatu kejahatan dilakukan. Bagaimana penyalahgunaan itu dilakukan? Bagaimana cara sampel mata bor lubang-lubang Busang dicampur dengan emas luar agar ada kesan temuan memang besar sekali? Bagaimana cara Michael de Guzman menipu sekian banyak konsultan independen yang memperkuat hasil temuan Bre-X? Apa konsekuensi dari penyalahgunaan tersebut? Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki?

Hipotesis ini yang terus-menerus diteliti, diuji dan disimpulkan benar-tidaknya. Kalau kemudian terbukti hipotesis itu salah, seorang investigator harus dengan besar hati mengakui tidak terjadi kejahatan di sana. Kasus ditutup. Setiap investigasi memang mengandung kemungkinan hasilnya ternyata tidak sedramatis yang diperkirakan. Dan hasil yang negatif ini juga seringkali disertai dengan keputusan hasil investigasi tersebut tidak layak diteruskan.

Kesannya memang sia-sia. Mungkin biaya besar dan waktu lama juga sudah dikeluarkan. Hipotesis Winarno, misalnya, bisa saja salah kalau suatu saat dia menemukan bukti baru bahwa mayat itu ternyata benar mayat de Guzman. Ironisnya, dalam kasus buku *Sebungkah Emas di Kaki Langit*, Winarno justru tidak mendapat gugatan hukum dari keluarga de Guzman. Dia justru mendapat gugatan pencemaran nama baik dari keluarga Ida Bagus Sudjana. Winarno masih beruntung! Dalam banyak kasus, taruhannya bahkan nyawa.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Penulisan Dalam Sistem Memo

Investigasi yang baik perlu didukung sistem pelaporan yang baik pula. Apalah artinya investigasi yang mahal dan makan waktu bila hasil akhirnya disajikan dengan buruk? Penulisan perlu dibuat menarik. Untuk itu metode penulisan dari pekerjaan besar ini harus didukung oleh sebuah sistem memo.

Sistem ini pada dasarnya sebuah alat bantu buat wartawan mengatur pekerjaan mereka secara lebih sistematis. Sistem ini membantu reporter bekerja lebih mudah dan lebih cepat untuk mencari data dan menyusun arsip. Sistem memo terutama sangat berguna untuk membantu sebuah tim (bahkan seorang wartawan) untuk bekerja sama secara rapih dalam mengerjakan proyek mereka.

Seorang koordinator tim juga bisa memetik keuntungan dari sistem ini. Dia bisa mengetahui setiap perkembangan dari proyek yang sedang dipimpinnya. Dia misalnya dengan teratur bisa membaca laporan-laporan dari anggota-anggota timnya dan dengan cepat bisa memutuskan materi apa yang harus dikembangkan.

Sistem memo ini juga mempermudah penulisan draft final. Alasannya sederhana saja. Dengan secara teratur dan disiplin membuat memo, proses penulisan jadi sebuah proses yang dinamis. Penulisan laporan final, entah dalam bentuk buku atau artikel, menjadi sebuah proses kerja yang lebih sederhana karena semua bahan sudah tersedia dan secara teratur diperbarui terus-menerus. Pekerjaan final hanya tinggal dilakukan dengan menyusun blok demi blok sesuai *outline* laporan yang hendak dibuat.

Sistem memo lagi-lagi diperkenalkan oleh BOB GREENE (dob 6/5/1930) dari *Newsday*. Dia pada mulanya membuat sistem ini untuk keperluan investigasi di mana pengecekan data-data dibuat dengan sangat hati-hati dan menyeluruh. Sistem memo yang diperkenalkannya sekarang diadopsi oleh banyak organisasi berita di seluruh dunia termasuk International Consortium of Investigative Journalists.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Pertama-tama, ada dua tip yang diperkenalkan GREENE. Nama orang senantiasa diketik huruf kapital. Hal ini akan mempermudah editor, koordinator tim atau reporter dalam membaca memo-memo yang berdatangan setiap hari. Seperti tertera dalam artikel ini, penyebutan nama pertama kalinya senantiasa ditambah dengan *date of birth* (dob). Ini penting karena sebuah sumber boleh jadi baru berumur 68 tahun ketika diwawancarai. Namun ketika naskah diterbitkan umurnya sudah 69 tahun.

Memo ini pada dasarnya produk kerja seorang wartawan. Ia kompilasi dari apa yang dilihat sang wartawan, didengarnya, dibacanya, dibauinya, dirasakannya dan dicicipinya. Seorang wartawan harian atau *wire service* tidak memakai memo. Laporan harian itu sendiri sudah merupakan kumpulan memo. Mereka yang pernah bekerja di *Reuters* atau *Associated Press* tentu mengetahui bagaimana rasanya membuat berita yang diturunkan hampir setiap hari kalau tidak setiap jam.

Memo hanya dipakai bagi mereka yang bekerja dalam periode waktu yang panjang. Bisa mingguan, atau yang penting bagi mereka yang terlibat dalam penulisan buku atau investigasi skala besar. Cara tradisional untuk menggunakan *jolt note* sebelum seorang wartawan menulis laporannya jelas tidak efisien. Ini cara yang kuno. Berapa dari kita yang masih bisa membaca tulisan tangan kita sendiri setelah seminggu? Dan berapa banyak orang yang bisa mengerti tulisan tangan kita? Apabila seorang koordinator membutuhkan *jolt note* anggotanya, seberapa besar kemungkian bagi si koordinator memahami semua coretan tangan reporternya?

Kalau anggota tim hanya dua orang, dengan mudah keduanya bisa duduk berdua dan membandingkan *jolt note*. Namun kalau anggota lebih dari empat dan tinggal di tempat-tempat yang berbeda?

Sekadar contoh. Investigasi huru-hara Kebumen. Ada cukup banyak reporter yang bekerja dari Kebumen. Namun mereka merasa tidak cukup. Perlu ada pekerjaan yang dilakukan di Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Ambarawa. Bahkan mereka

http://pustaka-indo.blogspot.com

membutuhkan bantuan tenaga luar untuk terjun di Kebumen. Berapa dana yang harus dikeluarkan bila setiap kali semua anggota tim harus rapat dan diskusi bersama?

GREENE membagi memo dalam dua macam: *"copy ready"* dan *"procedural."*

Memo *"copy ready"* meliputi semua fakta yang sudah diverifikasi dan bisa diatribusikan dengan jelas (bedakan antara *'off the record'* atau *'background'* dengan *'attribution'* dan *'not to be quoted'* dan beri kotak dalam *jolt note*). Memo jenis ini disusun dalam blok-blok yang kelak bisa dipakai dengan mudah dalam sebuah laporan.

Memo ini jelas bukan cerita. Ini karena blok-blok tersebut masih harus diatur dalam komposisi yang siap untuk publikasi. Ia belum memiliki jembatan, *lead* atau detail lain. Namun memo juga tidak perlu mengikuti aturan 'awal, tengah dan akhir'. Memo ini secara sederhana hanya sekumpulan blok-blok yang dibuat berdasarkan perkembangan harian atau dua harian untuk dipakai dalam konstruksi laporan lebih lanjut. Ia juga bukan sekadar pemindahan dari *jolt note* ke komputer.

Saya mengambil asumsi bahwa wartawan yang sudah terlibat dalam proyek-proyek skala besar tentu bukan wartawan pemula. Memo ini disusun tidak dengan urutan kronologi dari mulut sang sumber namun berdasarkan subyek.

Memo *"procedural"* meliputi semua fakta yang belum diverifikasi. Teori, spekulasi dan tip termasuk dalam kategori ini. Sebuah sumber bisa menghasilkan dua macam memo. Dalam kasus Kebumen misalnya. Seorang perwira militer mengatakan Prabowo Subianto ada di Kebumen, pada saat yang hampir bersamaan dengan terjadinya huru-hara, untuk menengok kuburan kakeknya. Ini fakta yang sudah diverifikasi. Namun ketika perwira ini berspekulasi bahwa Prabowo terlibat kerusuhan, kita harus memasukkannya dalam memo prosedural.

Semua memo ini disentralisasikan pada suatu lokasi yang disepakati bersama. Karena ini sudah jaman internet, memo

http://pustaka-indo.blogspot.com

sebaiknya dikirimkan lewat internet kepada koordinator tim bersangkutan. Dia akan mengeditnya menjadi memo *"copy ready"* yang lebih baik dan nantinya akan menyimpannya di *database*.

Pengiriman memo harus memenuhi jadwal yang telah ditentukan bersama. Seiring datangnya memo-memo ini, koordinator tim bisa melakukan diskusi dengan anggota-anggota timnya. Kalau perlu ada perbaikan atau pengejaran hal tertentu bisa segera diputuskan. Syukur bila *database* memo ini bisa diletakkan dalam *web server* yang dilengkapi dengan *password*. Server ini sebaiknya dilengkapi dengan '*search engine*' sehingga bisa diakses oleh semua anggota tim tanpa harus menerima email setiap hari.

Bila semua bahan sudah lengkap dan penulisan final sudah siap dilakukan, dengan mudah wartawan yang bertugas menulis bisa memanfaatkan memo-memo tersebut. Kalau dia harus menulis laporan sepanjang 10.000 kata, katakanlah, dia harus membaca memo-memo sepanjangan 100.000 kata. Sistem ini juga dengan mudah bisa mengatasi proyek yang terbengkalai gara-gara reporternya mengundurkan diri. Seorang anggota tim baru atau koordinator baru akan memiliki kemudahan untuk melanjutkan proyek yang terganggu jalannya itu.

Database ini sebaiknya disimpan. *Database* ini jangan dibuang setelah proyek berakhir. GREENE memiliki *database* sejak 1972. Dan dalam banyak hal, blok-blok yang semula tidak kita pakai, lima atau sepuluh tahun lagi, ternyata menjadi sangat berguna.

Investigasi memang akhirnya menjadi sebuah pekerjaan yang bukan saja makan waktu, sulit, penuh disiplin, tapi juga berbahaya. Namun risiko besar ini yang tampaknya justru membuat investigasi makin diminati wartawan yang suka tantangan, maupun masyarakat pembaca suratkabar, pendengar radio serta pemirsa televisi.

Kompetisi media yang makin ketat membuat kemungkinan membuat investigasi makin meningkat. Namun kompetisi ini bisa jadi lunak apabila pola kepemilikan media justru didominasi kelompok-kelompok bisnis yang lebih cenderung mengejar *hardnews* daripada

http://pustaka-indo.blogspot.com

analisa dan kedalaman suatu berita. Apapun yang terjadi, *investigative reporting* adalah salah satu pengembangan jurnalisme yang paling memikat, paling menantang, paling mahal dan paling tinggi risikonya.

Singkat kata, selamat berpetualang dan bersenang-senang dengan investigasi!

Serpong, 1999

http://pustaka-indo.blogspot.com

Kapan Wartawan Mencuri?

APA BATAS-BATAS seorang wartawan boleh melakukan penyamaran? Sekitar enam tahun lalu, saya ikut sebuah konferensi wartawan di Universitas Stanford, San Fransisco. Ada satu sesi yang khusus mendiskusikan isu ini. Intinya, kapan seorang wartawan boleh mencuri? Kapan dia boleh memakai kamera tersembunyi? Kapan dia boleh memalsukan identitasnya?

Penyamaran juga mencuri bukan? Artinya, penyamaran itu dilakukan untuk mendapatkan data, dokumen, gambar atau suara secara tidak terus-terang. Padahal kita tahu wartawan tidak boleh mencuri. Baik mencuri omongan, mencuri gambar, mencuri dokumen dan sebagainya.

Bill Kovach, seorang wartawan tua yang saya hormati, membawakan *keynote speech*. Kovach memberikan beberapa contoh di mana ada satu kasus dengan televisi *ABC*. Mereka bikin penyamaran tentang perlakuan buruk terhadap anak-anak cacat mental di sebuah rumahsakit.

ABC mendapatkan pujian. Rumahsakit itu terpaksa mengubah kebijakan mereka. Pemerintah setempat juga minta maaf. Lalu terjadi perubahan besar-besaran aturan pemerintah soal rumahsakit anak-anak cacat.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Tapi pada kasus lain, juga terjadi pada *ABC*, penyamaran mereka tentang pabrik pengemasan daging berbuah gugatan hukum. Belakangan mereka terpaksa minta maaf dan membayar denda. Mereka terbukti bersalah karena data dan gambar yang mereka tampilkan tidak proporsional.

Perusahaan itu memang menghasilkan beberapa potong daging yang busuk namun jumlahnya sangat kecil. Mereka juga disalahkan karena menyadap telepon seorang eksekutif perusahaan daging tersebut.

Dari dua kasus pada sebuah televisi yang sama itu, Kovach memberikan beberapa pedoman bila kita terpaksa harus mencuri:

Pertama, motivasi kita melakukan pencurian atau penyamaran tujuannya murni untuk kepentingan publik. Kita tak mencari sensasi. Kita juga tak mengejar hadiah di bidang jurnalisme. Artinya, ada sebuah isu di mana publik, secara masuk akal, kita perhitungkan penting untuk tahu.

Masalah selingkuh di mana kedua belah pihak saling suka, tentu saja, akan diperdebatkan bila masuk ranah publik. Atau maling-maling kecil. Tapi kejahatan kerah putih atau pelanggaran hak asasi manusia, tentu lebih mudah diterima orang bila dimasukkan dalam ranah publik.

Kedua, wartawan sudah melakukan prosedur yang biasa untuk mendapatkan data, informasi, dokumen gambar atau suara, dengan frekuensi cukup, namun belum berhasil mendapatkan apa yang dicarinya. Artinya, ada dugaan si sumber memang hendak menyembunyikan informasi yang kita cari.

Bill Kovach menekankan pentingnya prosedur normal ini ditempuh. Kita tidak boleh langsung saja menyamar. Harus mencoba prosedur biasa dulu. Kovach juga orang yang tidak terburu-buru memberi label "investigasi."

Mencuri atau tidak juga tak harus dikaitkan dengan investigasi. Bondan Winarno, penulis buku *Bre-X: Sebungkah Emas di Kaki Langit* (1997), soal geolog Michael de Guzman yang dinyatakan mati

http://pustaka-indo.blogspot.com

bunuh diri, ternyata masih hidup, pernah mengatakan dalam sebuah seminar Yayasan Pantau bersama Unesco bahwa label "investigasi" ini sering cuma jadi gagah-gagahan.

Kalau belum bikin"investigasi" seakan-akan belum wartawan sejati. Winarno menekankan pentingnya kerja dulu. Meliput makanan pun, seperti yang dilakukannya dengan *"Jalan Sutera,"* tak kalah sulit dan tak kalah penting dengan investigasi skandal emas Busang.

Ketiga, pekerjaan mencuri harus dilakukan dengan seizin atasan si reporter. Artinya, ini pekerjaan di luar standar normal. Maka para editor harus tahu dan memberikan izin. Siapa tahu kelak ada gugatan hukum. Lebih baik kita bekerja dengan sepengetahuan para redaktur kita lebih dulu. Lebih baik mempersiapkan semuanya dengan teliti daripada ribut belakangan.

Kovach juga menekankan tentang kemungkinan secara hukum kita dinyatakan bersalah. Artinya, bersiap-siaplah bila menghadapi gugatan hukum atau membayar denda. Mungkin bahkan masuk penjara.

Tentu lucu sekali bila kita kelak terbukti salah tapi mengelak tanggungjawabnya? Kuncinya, bagaimana melakukan liputan ini dengan kekuatan moral yang secara hukum bisa dibenarkan walau secara teknis bisa disalahkan. Kovach menekankan tentang pentingnya kita membicarakan apakah suatu isu termasuk "kepentingan publik" atau bukan sebelum melakukan penyamaran.

Keempat, ketika hasil pencurian ini disajikan ke publik, entah lewat televisi, radio, internet atau suratkabar, kita juga harus transparan menjelaskan bahwa ia didapat dengan mencuri namun prosedur itu terpaksa ditempuh karena prosedur normal tidak berhasil.

Kita harus memberikan kesempatan kepada audiens untuk menilai sendiri. Kita tentu juga harus minta tanggapan dari pihak yang kita curi untuk dimuat tanggapannya bersama dengan presentasi hasil penyamaran kita. Tanggapan ini diminta tak pada saat penyamaran. Ia diminta sesudah kita mendapatkan informasi tersebut.

Jakarta, 2006

http://pustaka-indo.blogspot.com

Bagaimana Meliput Pontianak?

SEJAK JANUARI 2008, ketika Barisan Umat Islam datang ke DPRD Kalimantan Barat dan minta Majelis Adat & Budaya Tionghoa dibubarkan, hingga demo 20 Februari dengan Barisan Melayu Bersatu minta kebudayaan Tionghoa dilarang dan orang Tionghoa dilarang berbahasa etnik, saya sering ditanya bagaimana harus meliput ini?

Beberapa rekan wartawan di Pontianak—dari etnik Dayak, Madura, Melayu maupun Tionghoa—bilang kalau hanya diliput apa adanya, kesannya malah makin beringas. Banyak yang memutuskan tidak dimuat. Media Jakarta hampir semuanya tak memuat ketegangan ini. Ada televisi sudah punya gambar namun editornya bilang, kalau dimuat, nanti rasialisme anti-Cina makin luas di Indonesia.

Alamak! Bagaimana pula awak ini?

Tapi begini deh. Kalau mau meliput Pontianak dengan baik, minimal si wartawan harus mengerti sejarah daerah itu. Ada beberapa karya bagus. Misalnya, karya Jamie Davidson dan Douglas Kammen, "Indonesia's Unknown War and the Lineages of Violence in West Kalimantan" (*Indonesia*, no. 73, April 2002, 53–87). Davidson juga menulis tesis Ph.D yang bakal jadi karya klasik berjudul *Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia*.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Mereka intinya mengatakan daerah ini merupakan kancah pertikaian etnik. Mulanya, sejak Orde Baru berkuasa, orang-orang pedalaman merasa disisihkan dengan program transmigrasi dan bisnis penebangan hutan. Mereka melihat para transmigran dibantu. Mereka melihat para pengusaha tebang hutan. Mereka sendiri dimiskinkan.

Sejak 1980-an, orang-orang ini membentuk identitas. Namanya, diambil dari nama lama, Daya atau Dayak. Ada macam-macam organisasi dan program dibuat. Mereka bikin *credit union*, lembaga adat, media dan lainnya. Makin lama makin santer hingga mereka mau jabatan-jabatan publik dengan identitas etnik. Gubernur, bupati, walikota, rektor, dekan, camat dan sebagainya.

Revitalisasi Dayak ini memancing orang pesisiran membentuk identitas Melayu dengan payung Majelis Adat & Budaya Melayu. Isi masing-masing kelompok sebenarnya beragam. Bahasanya, untuk payung Dayak: Kenayan, Iban dan lain-lain. Untuk Melayu, bahasanya Melayu, Jawa, Bugis, Sambas dan sebagainya. Ini juga tumpang tindih dengan agama. Orang Melayu dianggap beragama Islam. Hanya Muslim Madura tak dianggap Melayu. Majelis Melayu segera jadi saingan Dewan Adat Dayak. Belakangan muncul Majelis Adat & Budaya Tionghoa. Saya pribadi merasa aneh. Politik harusnya berbasis partai. Tapi di Pontianak, partai menjadi kendaraan organisasi etnik.

Akademisi lain, yang bekerja independen, misalnya Mary Somers Heidhues dan J.A.C. Mackie. Heidhues menulis soal pengaruh kebudayaan Tionghoa di Pontianak, Singkawang, Ketapang dan lain-lain. Mackie menulis soal pembunuhan 1967. Ada juga wartawan yang sudah menulis pembantaian 3.500 orang Tionghoa 1967 (David Jenkins) dan 4.100 orang Madura 1997 dan 1999 (Richard Lloyd Parry).

Background ini penting buat meliput isu politik. Ia akan membuat si wartawan mengerti sejarah dan mampu memberikan konteks. Tanpa memberikan konteks maka liputan wartawan sering mengambang tak tentu arah. Buntutnya, pengalaman menunjukkan rasialisme anti-Cina dan anti-Madura makin parah. Pembunuhan makin menyebar. Orang-orang terjebak pada identitas etnik atau agama.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Saya pernah bikin penelitian di Pemangkat, Sambas, Mempawah, Jawai, Bengkayang, Singkawang, Roban dan sebagainya. Saya ngeri kalau lihat tempat-tempat di mana mayat tanpa kepala dikubur. Ini nanti akan muncul dalam buku saya *A Nation in Name: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism*. Saya pesimis masalah di Pontianak ini bisa berakhir dengan damai. Sejajar dengan Pontianak, saya pesimis masalah di Aceh, Papua, Maluku maupun Jawa bisa damai. Selama tak ada pengadilan terhadap kejahatan masa lampau, orang tak akan belajar dari sejarah dan para preman tak akan takut untuk melakukan premanisme. Kasarnya, kalau Soeharto tak dibuktikan melakukan kejahatan melawan kemanusiaan, maka "soeharto-soeharto" lain akan tetap muncul. Saya mencium bau amis selama dua tahun terakhir ini di Pontianak.

Tapi media minimal perlu membantu masyarakat mendapat informasi selengkap-lengkapnya agar bisa mengambil sikap, agar tahu keragaman. Keragaman ini membantu orang hidup lebih toleran.

Sudutnya?

Demonstrasi dimuat namun berikan konteks. Beritakan selengkap-lengkapnya. Walau foto atau gambarnya seram, saya tetap usul diberitakan. Kalau sudah berdarah, saya kira tak perlu menggambarkan mayat dengan tak senonoh. Tapi saya usul semua diberitakan.

Namun berikan proporsi. Demo kemarin relatif kecil—namun akan membesar. *Interview*-lah orang-orang Melayu lain. Banyak orang Melayu tak setuju dengan rasialisme dan fasisme dari Barisan Melayu Bersatu. Coba telusuri siapa yang memimpin rapat-rapat? Siapa yang bikin statemen? Beberapa wartawan Melayu kasih tahu saya bahwa Barisan Melayu Bersatu maupun Barisan Umat Islam, isinya mah preman-preman. Benarkah?

Berikan konteks pemilihan gubernur Cornelis, orang Dayak, dan wakilnya, Christiandy Sanjaya, yang Tionghoa. Cornelis memainkan kartu Dayak saat kampanye. Dia menang. Keduanya kebetulan beragama Kristen. Wah rame tuh di Pontianak! Bayangkan gubernur dan wakil sama-sama Kristen. Nah, berikan konteks di mana ada tiga calon

http://pustaka-indo.blogspot.com

gubernur Melayu—Akil Muchtar, Osman Sapta Odang, Usman Jaffar. Dalam dunia politik tradisional macam Pontianak, di mana etnik dan agama penting, karena "suara Melayu" pecah, maka Cornelis menang.

Berikan tempat untuk orang-orang kecil. Pasti ada yang setuju, ada yang tak setuju. Jangan, sekali-sekali, jangan melakukan *interview* terhadap apa yang disebut "pakar" atau "pengamat." Di Pontianak, praktis semua orang bermain dalam politik identitas. Kalau mau *interview* pakar, saya usul hubungi Jamie Davidson atau Gerry van Klinken. Dua orang ini sudah meliput Kalimantan Barat habis-habisan. Mereka bikin buku serius yang terbit secara internasional.

Last but not the least, saya biasa berpegang pada sembilan elemen jurnalisme dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Wartawan harus memberitakan kebenaran. Esensi jurnalisme adalah verifikasi. Wartawan harus independen dari sumber-sumbernya. Dengarkan hati nurani. Loyalitas wartawan kepada warga—bukan kepada pemasang iklan, patron politik, perusahaan dan sejenisnya. Saya juga ingin media memasukkan satu kalimat dalam berita Pontianak bahwa media bersangkutan tak setuju dengan rasialisme dan fasisme.

Ini praktik biasa dilakukan di Skandinavia. Bila ada *telephone caller* yang mengucapkan kebencian terhadap (biasanya) orang Islam, entah di Stockholm atau Oslo, maka hubungan telepon diputus sepihak oleh radio. Pihak radio, saat itu juga, menanggapi dengan bilang tidak setuju. Televisi pun selalu diimbangi dengan statemen *host*, "Kami tak setuju dengan rasialisme. Hak orang manapun untuk memakai bahasa etnik mereka."

Saya kira hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya pesimis Pontianak bisa berakhir damai. Namun saya juga jahat kalau tak berusaha memberi tahu bahwa ada jalan yang lebih baik guna mengurangi kekerasan, syukur-syukur, bisa mencegahnya. Namun pada akhirnya, orang-orang waras di Pontianak yang harus berjuang melawan fasisme, rasialisme dan premanisme ini.

Pontianak, 2008

http://pustaka-indo.blogspot.com

Sebuah Renungan Merauke

SELAMA SEMINGGU INI saya berada di Merauke. Bikin wawancara, jalan-jalan dan bikin liputan terhadap orang-orang Marind dan Muyu. Mereka banyak mengeluh. Banyak hal yang tak saya ketahui terungkap dari pembicaraan dengan mereka. Media di Pulau Jawa praktis tak pernah memberitakan secara mendalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Seorang Mama bilang sudah tak bisa bicara soal nasib orang Papua. Sudah habis keluhan mereka! Saya juga punya kesan mereka juga sulit percaya kepada wartawan rambut lurus!

Ini kunjungan saya kedua ke Merauke. Sama dengan kunjungan pertama, saya juga sempat datang ke Monumen Benny Moerdani di daerah Tanah Miring. Pada Juni 1962, Kapten Moerdani memimpin penerjunan sekitar 350 tentara Indonesia, resminya "sukarelawan," ke daerah Merauke. Tujuannya, menjalankan perintah Presiden Soekarno untuk menggagalkan rencana kerajaan Belanda membikin "negara boneka" di Papua. Orang Papua mungkin tak setuju istilah "negara boneka" karena mereka merasa juga berhak punya negara sendiri, macam Indonesia, ketika minta tolong kepada Jepang menyatakan kemerdekaan pada 1945.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Penyerbuan ini berakhir dengan New York Agreement pada Agustus 1962 di mana Amerika Serikat menekan Belanda menyerahkan Papua ke pihak Indonesia. Belanda juga merasa takkan menang bila perang melawan Indonesia di West Papua. Belanda menyerah. Pada 1969, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat di Papua. Idealnya, referendum ini harus *one-man-one-vote*. Namun Indonesia usul diadakan dengan "masyawarah" saja.

Pada Juli-Agustus 1969, total 1025 orang Papua diminta menentukan suara mereka: mau integrasi dengan Indonesia atau jadi negara sendiri. Sistemnya, menurut pemerintah Indonesia, adalah *musyawarah*. Dan musyawarah tersebut diadakan di beberapa kota: Merauke (14 Juli), Wamena (15 Juli), Nabire (19 Juli), Fak Fak (23 Juli), Sorong (27 Juli), Manokwari (29 Juli), Biak (31 Juli) dan Jayapura (2 Agustus). Banyak represi terjadi terhadap orang-orang Papua. Mereka yang kritis bisa gawat.

Pemerintah Indonesia melarang wartawan internasional memantau pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Papua. Perwakilan United Nations, diplomat Bolivia Fernando Ortiz Sanz, berada di Papua untuk melakukan supervisi terhadap referendum tersebut. Namun Ortiz Sanz mengalami kesulitan dari militer Indonesia untuk berjalan ke sebagian kota di mana musyawarah diadakan. Sekarang mungkin mustahil menentukan berapa orang Papua yang mati terbunuh pada 1962-1969. Pada 1968, Mayor Jenderal Sarwo Edhie Wibowo mendirikan komando militer Cenderawasih di Jayapura, ketika Papua secara legal masih ada dalam supervisi United Nations. Hingga hari ini, hampir 50 tahun Papua di bawah kekuasaan Indonesia, wartawan internasional masih dilarang masuk Papua.

Seorang diplomat internasional, dalam buku John Saltford, *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua 1962-1969*, mengamati bagaimana seorang wakil Papua dalam musyawarah di Mulia, Pucak Jaya, bertanya kepada wakil pemerintah Indonesia apa yang akan terjadi bila dia memilih merdeka. Jawabnya sederhana. Dia akan ditembak!

http://pustaka-indo.blogspot.com

Hasilnya, 100 persen wakil-wakil Papua memilih integrasi dengan Indonesia. Sidang PBB di New York menerima hasil 100 persen. Maka Papua pun jadi provinsi Indonesia. Orang-orang Papua merasa dikhianati oleh Belanda maupun Amerika Serikat.

Sejak awal 1970an, dengan bantuan World Bank, Indonesia mendirikan koloni-koloni di Papua, termasuk Merauke, dengan menamakannya sebagai *program transmigrasi*. Ratusan ribu transmigran dari Jawa didatangkan ke Papua. Daerah sekitar Tanah Miring kini adalah daerah mayoritas etnik Jawa. Mereka menjadikan Merauke sebagai koloni Jawa. Saya bicara bahasa Jawa Ngoko bila makan bakso di Merauke. Di sini juga didirikan beberapa markas batalion militer Indonesia. Hingga hari ini, orang-orang Papua masih berjuang melawan kolonialisme Indonesia.

Saya kira inilah isu paling besar, paling penting dan paling perlu diketahui dari Papua. Ironisnya, isu ini pula yang paling tidak diliput secara bermutu oleh media Jakarta dan keturunan mereka di Jayapura, Wamena, Manokwari, Biak dan lain-lain. Mayoritas wartawan Jakarta tak pernah tahu Papua. Mayoritas redaktur mereka juga tak tahu apa-apa soal Papua selain menelan bulat-bulat propaganda pemerintah Indonesia. Wartawan di Papua, yang bekerja untuk *Cenderawasih Pos* dan lainnya, adalah pendatang rambut lurus. Hanya sedikit pendatang rambut lurus ini kelahiran Papua.

"Papua Barat adalah suatu wilayah yang sangat memprihatinkan karena penduduk pribumi di sana dalam keadaan bahaya pemusnahan (*genocide*)," Juan Mendez sebagai UN Special Advisor on the Prevention of Genocide.

Di Merauke, saya juga berkunjung ke kampung-kampung Marind. Daerah mereka rawa-rawa. Jalanan rusak. Lubang sebesar kerbau. Masih banyak rumah semut di kampung-kampung Marind. Kampung-kampung mereka berbeda dengan daerah transmigran. Di kampung Marind, kalau ada klinik, pastilah tertutup, tanpa dokter, tanpa perawat.

http://pustaka-indo.blogspot.com

Di setiap kampung ada pos penjagaan tentara Indonesia. Mereka biasa bikin gapura dengan angka 17-8-1945. Mereka hendak menciptakan kesan bahwa kemerdekaan Indonesia juga berarti kemerdekaan Papua. Di beberapa pos, saya juga baca kalimat, "NKRI Harga Mati." Semboyan ini sering sekali saya baca di tanah Papua, termasuk juga slogan "Pakailah Bahasa Indonesia yang baik dan benar," yang seakan-akan mau mengatakan orang Papua sebaiknya tak menggunakan bahasa Melayu Papua, yang komunikatif. Saya terkadang berpikir mengapa tak ada papan macam ini di Yogyakarta di mana orang-orang bicara campur-campur antara Jawa, Melayu dan lainnya?

Orang Papua sering bilang, "NKRI itu dorang punya, kitorang punya harga mati."

Kampung Tomer. Kampung Naseem. Kampung-kampung ini mengingatkan saya pada film-film Hollywood. Daerah penduduk kulit putih terkesan maju. Daerah kampung orang Indian terkesan tradisional. Banyak orang Marind mati karena terkena virus HIV. Beberapa orang Marind maupun Muyu bilang bahwa banyak keluarga mereka mati pelan-pelan sesudah dipukul oleh tentara Indonesia. Biasanya tentara Indonesia memukul kepala bagian belakang atau ulu hati. Tujuh, delapan atau sembilan tahun sesudah pemukulan mereka mati.

Atmakusumah Astraatmadja, mantan ketua Dewan Pers, mengatakan bahwa media Jakarta seringkali luput memberitakan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Papua maupun Maluku. Dia menyebut laporan *Human Rights Watch* belakangan ini, *Protest and Punishment* serta *Out of Sight*. Dua laporan itu tajam menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Papua oleh aparat keamanan Indonesia.

Pada 1962 hingga 1969, Papua menjadi bagian dari Indonesia karena United Nations memakai doktrin *uti possidetis juris*. Intinya, doktrin ini mengatakan batas-batas negara-bangsa pasca-kolonialisme Eropa sebaiknya mengikuti batas-batas negara kolonial. Alasannya, guna mengurangi munculnya peperangan yang tidak perlu. Batas-

http://pustaka-indo.blogspot.com

batas Indonesia, misalnya, sebaiknya mengikuti batas-batas Hindia Belanda. Doktrin ini mencegah restu Belanda untuk mengalihkan kekuasaan kepada bangsa Papua. Belanda diminta mengalihkannya ke Indonesia. Papua tidak jadi merdeka walau mereka mati-matian ingin punya negara sendiri, tanpa kolonialisme Belanda maupun Indonesia.

Menurut Michael Freeman dari Essex University, doktrin *uti possidetis juris* terbukti argumentasi yang cacat. Kebanyakan negara-bangsa pasca-kolonialisme adalah multinasional atau *polyethnic*. Indonesia misalnya, terdiri dari bangsa Jawa, bangsa Sunda, Melayu, Madura, Acheh, Minangkabao, Bugis dan sebagainya. Banyak kelompok menganggap doktrin ini memberikan pembenaran kepada kelompok kuat menindas kelompok-kelompok lemah. Akibatnya, separatisme dan represi terhadapnya jadi menonjol. Negara Indonesia adalah saksi ketidaksempurnaan *uti possidetis juris*. Belanda pergi dari Hindia Belanda namun Indonesia menyaksikan dominasi bangsa Jawa dan penindasan terhadap hampir semua kelompok yang melawan dominasi Jawa. Mayoritas tentara Indonesia, setidaknya dari yang saya lihat di Papua, adalah orang Jawa.

Dari Acheh hingga Papua, dari Minahasa hingga Ambon, dari Ternate hingga Minangkabao, sejak tahun 1950, sudah mengalami penindasan atau pertikaian dengan tetangganya berkat politik *divide et impera* kolonialisme Indonesia. Hindia Belanda diganti Indonesia. Jawa menggantikan posisi Belanda. Kelompok paling kuat menindas kelompok-kelompok minoritas atas nama "nasionalisme Indonesia." Inilah kritik terhadap *uti possidetis juris*. Ia juga terjadi di Afrika, Asia, Amerika Latin dan sebagainya – bekas kolonialisme Eropa. Saya kira wartawan yang bermutu akan melihat Papua dari sudut ini.

Merauke, 2009

http://pustaka-indo.blogspot.com

http://pustaka-indo.blogspot.com

Sumber Naskah

Sembilan Elemen Jurnalisme. *Pantau*, Desember 2001

Pagar Api Desain Suratkabar. *Pantau*, Juni 2001

Jurnalisme Warga (Gereja). Seri Pendidikan "Media, Komunikasi dan Kebudayaan," Yayasan Komunikasi Massa Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2008.

Pers, Sejarah dan Rasialisme. Pantau, 27 Desember 2007.

Apakah Wartawan Perlu Dipidanakan? Makalah untuk pelatihan pers mahasiswa di Semarang, 2008.

Bagaimana Mempersiapkan suatu Naskah? Esai untuk "Pekan Jurnalistik 2009" Universitas Moestopo (Beragama), Jakarta, 27 Mei 2009.

Kecepatan, Ketepatan, Perdebatan. *Pantau*, September 2001.

Di Balik Ketegangan Indonesia-Singapura. Majalah *Pantau*, April 2002.
Tempo versus Tomy Winata. Majalah *Trust*. Naskah ini mengalami revisi, dengan memasukkan bagian "tujuh kriteria sumber anonim", demi melengkapi tubuh naskah.

Sengkarut Harian Equator. Pantau, 29 Oktober 2006.

Lampung. Lampung, Lampung. *Lampung Post*, 9 Agustus 2007

Independensi Bill Kovach. *Pantau*, Januari 2004.

Apa Itu Investigative Reporting? Makalah ini pertama kali dipakai untuk pelatihan pers mahasiswa *Balairung*, 20 – 24 Februari 1999.

http://pustaka-indo.blogspot.com

DR·9 QQ

Ucapan Terima Kasih

Antologi ini takkan terbit tanpa ada pengalaman terbit majalah *Pantau*. Mula-mula ia terbit 1999 sebagai sebuah jurnal kajian media dan jurnalisme dengan editor Veven Sp. Wardhana. Lantas berubah menjadi majalah bulanan antara Maret 2001 hingga Februari 2003. Saya ditunjuk sebagai redaktur pelaksana. Majalah ini ditutup oleh manajemen Institut Studi Arus Informasi pada Februari 2003. Lantas terbit lagi, dengan badan hukum Yayasan Pantau, hanya tiga bulan, Desember 2003 hingga Februari 2004. Yayasan Pantau lantas mengubahnya ke sebuah situs berita *www.pantau.or.id*. di mana pada 2005 hingga 2007, ruang redaksinya dipindah ke Banda Aceh dengan redaktur Linda Christanty. Saya banyak menulis naskah untuk *Pantau* dan sebagian besar naskah dari antologi ini berasal dari terbitan *Pantau*.

Saya mengucapkan terimakasih kepada semua anggota komunitas Yayasan Pantau. Mulai dari wartawan hingga fotografer, dari desainer hingga kartunis, juga semua staf. Selama satu dekade ini, saya banyak bekerja, bermain dan … juga, terkadang, berantem dengan mereka.

Saya mengenang dua orang Pantau, yang sudah pergi meninggalkan kami semua, pada tahun 2009: M. Said Budairy dan Agus Sopian. Kiranya keluarga mereka terhibur bila mengetahui bahwa Pak Budairy dan Kang Agus pernah punya sejarah bersama Pantau, *thus* juga buku ini. Agus Sopian adalah orang yang mengubah email saya jadi sebuah kolom di *Kompas*: "Asing" di Tanah Acheh.

Fahri Salam menemani saya memilih 34 naskah dalam antologi ini. Saya sangat menghargai kesediaan Fahri menjahit kata demi kata dalam antologi ini. Juga kepada rekan-rekan yang kini sehari-hari

http://pustaka-indo.blogspot.com

menjalankan Yayasan Pantau: Basilius Triharyanto, Budi Setiyono, Endah Yuliani, Imam Shofwan, Khoiruddien dan Siti Nurrofiqoh. Sri Maryani adalah orang yang berjasa menyediakan kertas, membelikan tinta printer, menyediakan teh panas atau sekadar mendengar keluhan saya terhadap deadline. Saya berterima kasih kepada Yani.

Saya ucapkan terimakasih untuk rekan-rekan dari Penerbit dan Percetakan Kanisius. Ranggabumi Nuswantoro, yang pertama kali menawarkan Kanisius guna menerbitkan antologi ini. Emmy Kuswandari dari Sinar Mas memperkenalkan saya kepada Nuswantoro. Saya sangat menghargai upaya Kuswandari tersebut.

A big hug untuk Sapariah Saturi-Harsono, rekan diskusi dan teman sebantal saya, yang mendorong suaminya membuat buku-bukuan. *Also another big hug* untuk Norman Harsono. Saya menulis naskah ini bersama dengan pertumbuhan Norman, dari seorang bayi umur dua tahun hingga menjadi remaja 13 tahun.

http://pustaka-indo.blogspot.com

pantau

BEBERAPA TAHUN LALU, Hamid Basyaib, mantan redaktur harian *Republika*, minta saya bikin antologi jurnalisme. Perkaranya, sejak pulang dari Universitas Harvard, saya sering menjawab email dari wartawan atau mahasiswa. Mereka tanya macam-macam. Dari soal "amplop"—suap untuk wartawan—hingga liputan. Saya menembuskan jawaban-jawaban ini kepada *mailing list* majalah Pantau. Basyaib sering membaca. Dia usul saya mengumpulkan tanya-jawab ini.

Saya ragu. Saya kira paling ideal bikin buku utuh. Bukan apa yang disebut Ulil Abshar-Abdalla dari Jaringan Islam Liberal: membuat *non-book book* atawa buku-bukuan. Suatu hari, istri saya, Sapariah, mengajak saya ke toko buku dan memperlihatkan berbagai buku-bukuan. Sapariah juga wartawan. Dia berpendapat kumpulan naskah punya keunikan. Tanya-jawab itu mencerminkan masalah-masalah yang muncul dari kalangan wartawan di dalam negara Indonesia. Ia adalah persoalan-persoalan yang hidup di masyarakat media kita. Bikin buku (*beneran*) memerlukan waktu dan biaya besar. Kami tak punya biaya.

Saya masih ragu. Di Indonesia, tak terhitung banyak orang bikin buku-bukuan. Maria Hartiningsih, kenalan saya dari harian Jalan keluarnya? Khas seorang blogger, saya lempar saja ke internet. Saya minta pendapat orang. Ada lebih dari selusin blogger kirim komentar. Tak ada seorang pun menganggapnya salah. Keraguan akhirnya leleh. Saya pikir toh di dunia ini banyak sekali orang bikin kumpulan karangan. Saya juga berjanji akan tetap menulis buku utuh. Antologi ini saya kumpulkan sembari menyelesaikan buku *A Nation in Name: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism*. Sudah tujuh tahun saya pakai untuk melakukan riset dan menulis buku tersebut. Tiga tahun saya pakai buat melakukan perjalanan dari Sabang di Pulau Weh ke Merauke di Papua—di antara mereka, saya mengunjungi lebih dari 90 kota, desa, pulau kecil dan pantai.

Penerbit KANISIUS